



Membangun kembali Aceh:

Belajar dari hasil penelitian dan program rehabilitasi Aceh pasca Tsunami



Editor:

Janudianto, Elok Mulyoutami, Lina Moeis, Reny Juita,
Abraham RA Pribadi, dan James M Roshetko

Membangun kembali Aceh: Belajar dari hasil penelitian dan program rehabilitasi Aceh pasca Tsunami

Kumpulan Hasil Penelitian, Pembelajaran dan
Rekomendasi untuk Kemajuan dan Rehabilitasi di
Aceh Barat dan Sekitarnya

Editor

*Janudianto, Elok Mulyoutami, Lina Moeis, Reny Juita,
Abraham RA Pribadi, dan James M. Roshetko*

World Agroforestry Centre (ICRAF)

Sitasi

2012. Membangun kembali Aceh: Belajar dari hasil penelitian dan program rehabilitasi Aceh pasca Tsunami. Kumpulan Hasil Penelitian, Pembelajaran dan Rekomendasi untuk Kemajuan dan Rehabilitasi di Aceh Barat dan Sekitarnya. In: Janudianto, Mulyoutami E, Moeis L, Juita R, Pribadi ARA, and Roshetko JM (eds.). Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office. 382p.

Buku ini dicetak dengan menggunakan dana dari proyek *Trees in Multi-use Landscapes in Southeast Asia* (TULSEA), yang di danai oleh *Federal Ministry of Economic Cooperation and Development* (BMZ) and *Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ). Namun tanggung jawab mengenai isi naskah berada pada penulis.

Hak Cipta

The World Agroforestry Centre (ICRAF) mempunyai hak cipta untuk publikasi dan halaman webnya namun mendorong duplikasi, tanpa perubahan, dari materi yang bertujuan tidak ekonomi (non-komersial). Diperlukan kutipan yang tepat dalam semua hal. Informasi yang dimiliki oleh orang lain yang memerlukan izin harus ditandai. Informasi yang disediakan oleh ICRAF, berdasarkan pengetahuan yang terbaik, adalah benar namun kami tidak menjamin informasi tersebut dan kami juga tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan informasi tersebut.

Link situs yang ICRAF sediakan memiliki kebijakan sendiri yang harus dihormati/dihargai. ICRAF menjaga database pengguna meskipun informasi ini tidak disebarluaskan dan hanya digunakan untuk mengukur kegunaan informasi tersebut. Tanpa pembatasan, silahkan menambah link ke situs kami www.worldagroforestry.org pada situs anda atau publikasi.

ISBN 978 979 3198 68 2

World Agroforestry Centre

ICRAF Asia Tenggara
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Ph: +62 251 8625415
Fax: +62 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org
<http://www.worldagroforestry.org/sea>

Foto sampul: James M Roshetko, Laxman Joshi dan Charlie Pye-Smith

Disain & Tata Letak: Tikah Atikah dan Janudianto

Daftar Isi

Kata Pengantar	vii
Overview: Refleksi Penelitian Agroforestri Pasca Tsunami Aceh (Ujjwal P Pradhan)	1
Bab 1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan Fokus pada Pepohonan dan Hutan Sebelum dan Pasca Tsunami di Aceh Barat	9
Perubahan Cadangan Karbon Akibat Perubahan Tata Guna Lahan di Aceh Barat, Indonesia (Cheryl Batistel, Carsten Marohn, Fahmuddin Agus, Laxman Joshi, Joachim Sauerborn dan Georg Cadisch)	11
Akumulasi Karbon pada Sistem Agroforestri Karet di Lahan Gambut dan Mineral di Aceh Barat (Degi Harja, Janudianto, Laxman Joshi, Suyitno)	25
Pengelolaan Lahan Gambut (Fahmuddin Agus, I. GM. Subiksa dan Wahyunto)	37
Evaluasi Kesesuaian dan Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk Pertanian Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh (Wahyunto dan Fahmuddin Agus)	59
Bab 2. Merubah Penghidupan dan Kesempatan Baru Pasca Tsunami di Aceh Barat	75
Merubah Penghidupan dan Kesempatan Baru Pasca Tsunami di Aceh dan Nias (Laxman Joshi)	77
Pelibatan Pengetahuan Lokal dalam Kesiapsiagaan Bencana (Elok Mulyoutami)	87
Pemberdayaan Petani Perempuan Korban Konflik Melalui Pengembangan Teknologi dan Akses Pasar (Abdul Wahab)	99

Bab 3. Peluang Pengembangan Pertanian, Peternakan, Tambak dan Agroforestri	119
Produksi Pertanian Aceh Barat Sebelum dan Sesudah Tsunami sebagai Pembelajaran untuk Ketahanan Pangan (T. Helmy P, T. Zainal Abidin dan T. Irwansyah)	121
Potensi dan Peluang Pengembangan Peternakan dalam Rekonstruksi Aceh Barat Pasca Tsunami (L. Hardi Prasetyo)	137
Potret Budi Daya Tambak di Aceh Pasca Tsunami 2004 – Kajian Sosial Ekonomi (Bagian Pertama) (Suseno Budidarsono)	147
Membangun Kembali Budi Daya Tambak di Aceh Pasca Tsunami 2004 – Kajian Sosial Ekonomi (Bagian Kedua) (Suseno Budidarsono)	173
Belajar dari Kawan: Cara Efektif untuk Menyebarluaskan Sistem Agroforestri Karet (Ratna Akiefnawati, Suyitno dan Janudianto)	191
 Bab 4. Pohon dan Kesempatan Pembangunan Ekonomi Lokal	 201
Potensi Budi Daya Kakao untuk Pembangunan Ekonomi Di Aceh Barat (A. Adi Prawoto dan Rudy Erwiyono)	203
Nilam (<i>Pogostemon</i> spp), Tanaman Alternatif untuk Kesejahteraan Petani Kabupaten Aceh Barat: Potensi dan Permasalahannya (Pratiknyo Purnomosidhi, James M. Roshetko, Ibnu Sa'adan, Bruce Bailey, Agustiar)	227
Sumber-sumber dan Permintaan untuk Plasma Nutfah Buah-buahan dari Petani Skala Kecil Pasca Tsunami dan Konflik di Aceh, Indonesia (Endri Martini, James M. Roshetko, Pratiknyo Purnomosidhi, Jusupta Tarigan, Nazar Idris, dan Teuku Zulfadhli)	243
Pembibitan Jenis Pepohonan pada Rehabilitasi Sistem Pertanian: Pembelajaran dari Program Nurseries Of Excellence (NOEL) di Provinsi Aceh, Indonesia (James M. Roshetko, Pratiknyo Purnomosidhi, Nazar Idris, dan Jusupta Tarigan)	255
Pemanfaatan Varietas Lokal dalam Meningkatkan Produksi Bibit Rambutan (Subekti Rahayu, James M. Roshetko, Khailal Mitras, Sabaruddin, dan Nurhayati)	271
Pemasaran Produk Tanaman Tahunan Utama di Aceh Barat dan Nias (Uhendi Haris dan Aulia Perdana)	281

Bab 5. Perencanaan Penggunaan Lahan (Inklusif, Integratif dan Terbuka)	291
Dinamika Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Barat dan Hubungannya dengan Penghidupan Masyarakat Lokal di Kabupaten Aceh Barat (Andree Ekadinata)	293
Merencanakan Pembangunan Bersama Masyarakat: Sebuah Ilustrasi dari Perencanaan Pembangunan di Aceh Barat (Syahril dan Ratna Ekawati)	307
Keputusan Petani, Dinamika dan Keterkaitannya terhadap Perubahan Bentang Lahan (Dian Yusvita Intarini)	319
Menghubungkan Metode Perencanaan Konvensional dengan Perencanaan Partisipatif; Sebuah Proses Belajar Perencanaan Bersama Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, Aceh (Feri Johana, Andree Ekadinata, Dewi Sonya)	331
Potensi Penggunaan Model FALLOW dalam Perencanaan Guna Lahan Pasca Tsunami di Arongan Lambalek, Wilayah Aceh Barat, Sumatera (Rachmat Mulia, Betha Lusiana, Janudianto, Feri Johana)	357
Hutan Rawa Tripa sebagai Habitat Orangutan Sumatera: Ancaman dan Peluang (Hesti L. Tata dan Subekti Rahayu)	373

Kata Pengantar

Gempa dan Tsunami Aceh 26 Desember 2004 mengakibatkan kerusakan infrastruktur, kehilangan sumber mata pencaharian, kehilangan tempat tinggal, bahkan menelan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya di Aceh. Berbagai program bantuan, rehabilitasi infrastruktur, pertanian, peternakan dan pengembangan masyarakat, baik dari masyarakat dan lembaga di Indonesia maupun internasional berdatangan dalam rangka pemulihan kembali daerah Aceh.

World Agroforestry Centre (ICRAF) sebagai salah satu perwakilan dari lembaga *Consultative Group on International Agricultural Research* (CGIAR) ikut berperan dalam mendukung program rehabilitasi melalui program penelitian dan pengembangan kapasitas masyarakat di Aceh. Sepak terjang ICRAF tidak hanya dibawah kaki sendiri, namun juga melibatkan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, pemerintah daerah, penelitian akademis dari mahasiswa dan badan penelitian pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan agroforestri dan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat yang telah dilakukan di Aceh pasca Tsunami.

Buku ini mencoba membahas dan merangkum berbagai kegiatan dalam upaya mengatasi permasalahan dan penyelesaiannya dalam upaya rehabilitasi lingkungan dan peningkatan penghidupan masyarakat miskin yang berbasis lahan di Aceh pasca Tsunami. Hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengembangan masyarakat yang telah didokumentasikan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh khususnya, dan juga bagi masyarakat secara luas melalui pemerhati-pemerhati lingkungan dan lembaga atau dinas yang banyak berkiprah dengan masyarakat di wilayah rentan Tsunami.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Laxman Joshi dan James M Roshetko yang menginisiasi dan mendorong diterbitkannya buku ini, Subekti Rahayu atas input yang berharga, dan Tikah Atikah/Sadewo yang mendisain tata letak buku. Tidak lupa kepada beberapa lembaga donor yang telah memberikan dukungan dana dan teknis terhadap berbagai program ICRAF di Aceh seperti European Community (EU), Common Fund for Commodities (CFC), Canadian International Development Agency (CIDA), United Nations Environment Programme (UNEP), German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ), dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melalui proyek TUL-SEA, PanEco Foundation, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Ujjwal P Pradhan

Refleksi Penelitian Agroforestri Pasca Tsunami Aceh

Ujjwal P Pradhan

26 Desember 2004 adalah hari yang tidak pernah dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Gempa bumi berkekuatan 9,1 Skala Richter mengguncang sebagian besar Aceh, dengan diikuti menyusutnya laut di pantai barat Aceh yang kemudian membalik ke darat dengan kecepatan tinggi yang dikenal sebagai gelombang Tsunami.

Gempa dan Tsunami tersebut mengakibatkan kerusakan sangat besar berupa hancurnya infrastruktur di pesisir barat Aceh dan hilangnya mata pencaharian, bahkan menelan korban hingga mencapai 230.000 jiwa. Lebih dari satu juta masyarakat Aceh kehilangan tempat tinggal. Sekitar 37.000 ha sawah, termasuk 8.000 ha sawah irigasi dan 28.000 ha perkebunan rusak. Setengah dari area tambak kehilangan kapasitas produksinya, 7.300 ha diantaranya mengalami rusak berat dan tidak ada harapan lagi untuk dapat segera diperbaiki, 1.000 ha tambak terendam permanen karena terjadinya pergeseran garis pantai. Infrastruktur dan fasilitas utama untuk tambak, seperti 810 km (66,8%) saluran irigasi dan 193 unit (dari 223 unit) pembenihan ikan rusak berat.

Kendati kerusakannya sangat besar, namun masyarakat Aceh tetap bertahan untuk memulihkan kondisi yang rusak parah melalui bantuan dari masyarakat Indonesia maupun internasional. Pemulihan memang berjalan lambat, tetapi stabil, bahkan disertai dengan perjanjian damai untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di daerah ini. Peningkatan kemampuan organisasi lokal dan institusi non pemerintah dalam kemitraan dengan institusi masyarakat sipil lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri maupun melalui bantuan dunia telah memberikan dampak positif dalam pemulihan Aceh pasca Tsunami.

Fakta tentang Aceh

Provinsi Aceh yang terletak di bagian paling utara Pulau Sumatera dengan luas sekitar 61,36 km², pertama kali dihuni sekitar empat juta tahun yang lalu yaitu pada zaman Pleistosen. Sejak saat itu Aceh telah mengalami sejarah yang beragam dan menarik. Kedatangan pedagang India pada awal abad kedua, menjadikan wilayah

tersebut sebagai kawasan perdagangan internasional bagi berbagai negara seperti China, Persia dan Malaysia.

Masuknya Islam pada abad ke-13 menjadikan Aceh sebagai daerah Muslim konservatif dan dikenal sebagai “Serambi Mekah”. Daerah ini juga merupakan wilayah yang sangat menghargai kebebasan dan kemerdekaan. Hal ini dibuktikan oleh berbagai perlawanan untuk memperjuangkan kemerdekaan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh terhadap Portugis dan Belanda. Pada tahun 1959, Aceh dinyatakan sebagai ‘wilayah khusus yang merdeka’, yaitu sebagai daerah istimewa atau provinsi yang memiliki otonomi. Daerah ini telah mampu mendesak pelaksanaan hukum Syariah. Munculnya kelompok kuat yang dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berjuang untuk sebuah negara yang merdeka menyebabkan beberapa kali bentrok dengan militer Indonesia. Pertempuran sengitpun terus terjadi antara keduanya. Namun pasca Tsunami 26 Desember 2004, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2005 telah disepakati adanya perjanjian damai.

Provinsi Aceh yang secara geografis terletak antara 2° – 6° Lintang Utara dan 95° – 98° Bujur Timur dengan ketinggian antara 0 – 3.466 meter di atas permukaan laut. Hasil sensus 2010, penduduk Aceh berjumlah 4.486.570 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.243.578 orang dan perempuan 2.242.992. Lahan potensial untuk pertanian dan perkebunan yang belum diberdayakan masih sangat luas. Ketersediaan lahan kering, marginal dan sawah terlantar mencapai 1.564.438 ha, luas lahan tegalan sebesar 983.389 ha, lahan pekarangan 240.594 ha, lahan tidur 340.455 ha, dan lahan sawah terlantar seluas 53.603 ha, sedangkan untuk perkebunan diperkirakan seluas 761.572 ha.

Luas kawasan hutan di Aceh, berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan adalah 3.872.071,64 ha yang berupa hutan dataran rendah 2.202.300,18 ha; hutan dataran tinggi 1.143.549 ha; hutan pegunungan 214.715,70 ha; hutan mangrove 54.362,63 ha; dan hutan rawa 257.143,57 ha. (http://www.dephut.go.id/halaman/Peta%20Tematik/PL&Veg/VEG_97/LUAS/LUASACEH.GIF)

Refleksi Penelitian Agroforestri

Pengelolaan sumber daya alam yang berfokus pada pohon dan hutan sebelum dan sesudah Tsunami merupakan tema penelitian yang dilakukan di Aceh. Penelitian tidak hanya dilakukan pada lahan mineral tetapi juga pada lahan gambut yang mulai dialihgunakan. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut di Aceh diubah menjadi perkebunan kelapa sawit mengemisikan sejumlah besar CO₂ dan juga sangat mempengaruhi ekosistem. Penggunaan lahan dengan cara dan perencanaan

yang lebih baik bagi ekosistem dan memberikan keuntungan masyarakat menjadi rekomendasi dari hasil penelitian di Aceh.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lahan gambut harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, tetapi tuntutan kebutuhan akan lahan yang sangat tinggi memicu pembukaan hutan di lahan gambut untuk ditanami padi dan jagung. Salah satu solusi dalam menghambat proses emisi pada lahan gambut adalah melalui pengelolaan air yang baik.

Penanaman karet secara berkelanjutan menjadi pilihan dalam pemulihan pengelolaan lahan pasca Tsunami. Namun demikian, penelitian mengenai jenis tanah sangat penting dalam mempengaruhi kualitas hasil panen tanaman karet.

Peningkatan salinitas air tanah pasca Tsunami merupakan permasalahan di lahan masyarakat karena beberapa jenis tanaman menjadi tidak sesuai. Hasil penelitian menemukan bahwa curah hujan yang tinggi dapat mencuci sebagian besar garam yang ada di lahan-lahan masyarakat, sehingga pada lahan-lahan tertentu masih bisa ditanami kembali kecuali dengan jenis tanaman yang rendah produktivitasnya.

Kejadian gempa dan Tsunami mengakibatkan sebagian masyarakat Aceh kehilangan sumber mata pencaharian, terutama yang berbasis pada sektor lahan. **Perubahan mata pencaharian atau peluang munculnya sumber mata pencaharian baru terjadi di Aceh Barat.** Beberapa penelitian tentang perubahan mata pencaharian, pelibatan pengetahuan lokal dalam menghadapi bencana dan pemberdayaan petani perempuan dilakukan di Aceh.

Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa Tsunami telah membuka lembaran baru dalam pembangunan Aceh. Perjanjian perdamaian menjadi angin segar bagi perkembangan pembangunan. Konflik politik lebih memberikan dampak kemiskinan daripada dampak Tsunami di wilayah tersebut. Tsunami yang menyebabkan masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek, tetapi program konservasi yang memfokuskan pada penanaman pohon pilihan masyarakat akan dapat membantu menyediakan solusi ekonomi jangka panjang bagi masyarakat miskin di Aceh.

Sebelum Tsunami, masyarakat Aceh tentunya telah memiliki pengetahuan lokal dalam mengelola lahan. Oleh karena itu, penelitian untuk menggali kembali dan mengimplementasikan pengetahuan lokal pada masyarakat setempat untuk mengelola lahan pertanian mereka pasca Tsunami dilakukan di daerah ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya mengerti dan memahami jenis-jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai penahan atau pemecah ombak, bahkan masyarakat juga telah memahami mengenai cara-cara memulihkan kembali

lahan pertanian yang tercampur dengan air laut dan berkadar garam tinggi. Mengairi sawah dan menguji dengan menanam tanaman semusim dilakukan oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan lokal mereka.

Aktivitas ekonomi tidak hanya melibatkan kaum laki-laki, tetapi keterlibatan petani perempuan korban konflik menjadi isu menarik dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani perempuan memiliki keterlibatan yang besar dalam kegiatan pertanian, mulai dari menentukan jenis tanaman, menanam, memanen hingga memasarkan hasilnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat khusus untuk meningkatkan pengetahuan perempuan dalam pengembangan teknologi pengeringan kopra/pinang dan pemasarannya telah dilakukan di Aceh dan telah menghasilkan enam kelompok swadaya masyarakat yang dikelola oleh perempuan, satu badan koordinasi kelompok swadaya masyarakat dan 31 dapur pengering kopra/pinang hemat energi. Lima kelompok diantaranya telah berhasil meningkatkan harga jual produksi mereka, dan juga telah meningkatkan posisi tawar mereka dengan pembeli.

Sejalan dengan pengelolaan sumber daya berbasis pohon dan pengelolaan lahan berbasis pada pengetahuan lokal, **agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan yang dapat ditawarkan di wilayah Aceh.** Agroforestri yang menghasilkan produk pertanian tahunan dan perkebunan seperti pohon buah-buahan dan karet sebagai penghasil getah menjadi sektor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produksi pertanian di Aceh Barat merupakan komponen penting sebagai basis kekuatan pendukung pembangunan di Aceh Barat. Lebih dari 70% penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Pembangunan sektor pertanian justru lebih cepat pada saat pasca Tsunami bila dibandingkan sebelumnya.

Penelitian tidak hanya dilakukan pada sektor pertanian dan kehutanan, tetapi juga di sektor peternakan dan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ternak memiliki potensi yang baik di Aceh, sehingga keluarga bukan hanya sebagai konsumen tetapi dapat berperan sebagai produsen yang menjual produk mereka ke pasar di luar wilayah Aceh. Pada sektor perikanan, potensi tambak yang merupakan mata pencaharian tradisional dan sangat populer sebelum Tsunami menjadi isu penelitian karena kerusakan tambak pasca Tsunami tidak bisa dianggap sepele. Rehabilitasi tambak yang rusak dirasa sangat memberatkan bagi petani miskin di Aceh.

Pohon dan tanaman potensial lainnya merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian di Aceh. Status dan potensi Aceh sebagai produser coklat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengembangkannya. Penelitian menunjukkan bahwa Aceh telah mampu memproduksi kakao, sehingga membuka

peluang untuk menjadi pemasok kakao seiring dengan meningkatnya permintaan dari negara lain seperti Jepang dan Australia. Penelitian ini juga didukung oleh potensi ketersediaan lahan yang tepat untuk tanaman kakao di Aceh, meskipun harus memerlukan survei tambahan. Panen kakao yang umumnya berbasis mingguan dapat terjadi sepanjang tahun, yang artinya berpotensi sebagai pendapatan yang bisa diandalkan bagi keluarga.

Selain kakao, tanaman nilam juga banyak ditanam oleh masyarakat Aceh. Namun, harga nilam yang tidak stabil, menyebabkan petani kadang beralih menanam semangka, sehingga ketersediaan produk nilam menjadi tidak stabil pula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha penanaman nilam perlu diperbaiki dengan menggunakan pupuk dan memperbaiki sistem irigasi.

Harga komoditas tanaman perkebunan pada tingkat petani di Aceh Barat seperti karet, kakao dan kelapa adalah rendah karena kualitas. Peningkatan kualitas dan skema pemasaran secara bersamaan merupakan solusi yang direkomendasikan dari hasil penelitian. Demikian pula, pembangunan pabrik karet (*crumb rubber*) di wilayah Aceh Barat diharapkan dapat meningkatkan harga karet di tingkat petani.

Peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui peningkatan sumber plasma nutfah dari bibit yang ditanam. Pembahasan mengenai peluang petani untuk dapat mengakses sumber plasma nutfah berkualitas juga disajikan dalam buku ini.

Dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan akses plasma nutfah yang baik, ICRAF melalui Program Nursery Of Excellence bersama dengan LSM lokal membangun pembibitan di masyarakat. Pelatihan untuk petani baik laki-laki maupun perempuan dan dilakukan mulai dari menanam hingga memanen. Pada akhir program, 56 pembibitan telah dibangun dan 5.542 orang telah dilatih. Keberhasilan program ini menjadi contoh untuk diimplementasikan di tempat lain di Indonesia.

Aceh dikenal sebagai penghasil rambutan yang berkualitas tinggi. Potensi varietas lokal untuk dikembangkan sebagai sumber bibit telah diteliti di Aceh. Diskusi mengenai upaya peningkatan efisiensi pasar difokuskan pada karet, kakao dan kelapa sebagai komoditas utama di wilayah pesisir Aceh dan Nias. Kebijakan pasar yang memungkinkan petani mengakses informasi harga pasar serta strategi pemasaran bersama (*collective marketing*) dapat meningkatkan efisiensi pasar bagi petani kecil. Tsunami Aceh tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan tetapi juga menimbulkan dinamika penggunaan lahan. **Meningkatkan perencanaan penggunaan lahan (inklusif, terintegrasi dan informatif) dalam pemulihan Aceh**

merupakan tema dalam penelitian pasca Tsunami. Dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat berhubungan erat dengan penghidupan masyarakat lokalnya dan terjadi pada sistem penggunaan lahan sebelum dan sesudah Tsunami. Dinamika perubahan lahan ini juga memiliki konsekuensi terhadap penghidupan masyarakat, serta pilihan yang ada bagi pengembangan Aceh Barat di masa datang.

Perencanaan pembangunan bersama dengan masyarakat sebaiknya dilakukan secara terintegrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dimulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Perencanaan pembangunan ini sangat erat kaitannya dengan pemetaan yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Hasil kegiatan menemukan bahwa masyarakat dapat menginventarisasi sumberdaya yang dimiliki di desanya, memiliki data desa, mampu mengusulkan rencana pembangunan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin muncul. Manfaat lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah alternatif mekanisme untuk mengembangkan perencanaan partisipatif ke dalam perencanaan formal ditingkat kabupaten yang dimiliki oleh peserta kegiatan dari unsur pemerintah.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh petani dalam mengelola lahan juga mempengaruhi perubahan bentang lahan. Keputusan-keputusan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan lahan dan kondisi keuangan petani. Penerapan metoda *Forest, Agroforest, Low-value Or Waste (FALLOW)* sebagai alat bantu bagi para pengambil keputusan dalam hal strategi alih guna lahan dalam suatu lansekap, untuk memilih dan menyusun strategi pembangunan pertanian yang tepat, yang dapat memberikan efek positif baik dari segi ekonomis dan ekologis. Hasil dari skenario dengan menggunakan metode FALLOW adalah skenario pengembangan kebun rakyat berbasis karet tampak memberikan dampak yang positif dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus cadangan karbon yang ada.

Salah satu kawasan penting di Aceh adalah hutan rawa Tripa sebagai habitat orangutan, karena merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser. Kawasan ini telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Simulasi menggunakan metode FALLOW menunjukkan bahwa dengan sistem *business as usual*, tutupan lahan Tripa akan didominasi oleh kebun kelapa sawit, sehingga perekonomian masyarakat meningkat, tetapi laju emisi karbon juga meningkat secara drastis hingga 0,31 Mt CO₂e/tahun. Sebaliknya, skenario konservasi dan restorasi tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, tetapi dapat menurunkan emisi karbon dan meningkatkan sekuestrasi mulai dari 0,34 sampai dengan 0,47 Mt CO₂e/tahun. Adapun imbal jasa karbon yang dapat diperoleh berkisar antara 5 - 14 USD/tCO₂e (Mulia dkk 2010).

Pembelajaran

Kehancuran akibat gempa dan Tsunami tahun 2004 masih terasa di Aceh setelah delapan tahun berlalu, sehingga pembangunan kembali pada berbagai sektor akan terus berlanjut. Agroforestri sebagai alternatif yang dapat memberikan manfaat secara ekologi dan ekonomi bagi masyarakat harus tetap melanjutkan perannya dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.

Indonesia yang merupakan salah satu negara rawan bencana, harus selalu siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk dengan meningkatkan ketahanan di berbagai sektor. Hasil-hasil penelitian dalam rangka pemulihan Aceh pasca Tsunami yang telah dirangkum dalam buku ini diharapkan dapat membantu pemerintah, instansi lokal dan LSM dalam mempersiapkan masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana dan membantu masyarakat untuk bangkit kembali. Perumusan pertanyaan penelitian ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana dan temuan penelitian yang tepat waktu dapat dilihat sebagai bagian yang terintegrasi dengan proses pemulihan dan pembangunan kembali.

BAB 1

Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
dengan Fokus pada
Pepohonan dan Hutan
Sebelum dan Pasca Tsunami
di Aceh Barat

Perubahan Cadangan Karbon Akibat Perubahan Tata Guna Lahan di Aceh Barat, Indonesia

*Cheryl Batistel¹, Carsten Marohn², Fahmuddin Agus³, Laxman Joshi^{4,5},
Joachim Sauerborn² dan Georg Cadisch²*

*¹Institute for Strategic Research and Development Studies, Visayas State University,
Baybay, Leyte, Philippine*

*²University of Hohenheim, Institute of Plant Production
and Agroecology in the Tropics and Subtropics, Germany*

³Indonesian Soil Research Institute, Indonesia

⁴World Agroforestry Centre (ICRAF)

⁵The International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD)

Pendahuluan

Emisi Gas Rumah Kaca (*Greenhouse Gas*/GRK) merupakan topik utama pada berbagai diskusi ilmiah sejak Earth Summit 1992 di Rio de Janeiro yang diselenggarakan karena banyaknya proyeksi tentang pemanasan global dan berbagai kemungkinan dampaknya terhadap bumi, khususnya pada daya radiasi dan penipisan ozon. GRK yang paling berlimpah adalah uap air, karbon dioksida (CO₂), metan (CH₄), nitro oksida (N₂O), ozon dan chlorofluorocarbon (CFC). Dari GRK tersebut, CO₂ merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 60% terhadap pemanasan global (Rastogi dkk 2002). Antara tahun 1970 dan 2004, emisi global GRK meningkat 70%, dan akan terus bertambah 25-90% di tahun 2030 (IPCC 2007) kecuali ada perubahan pengelolaan sumber daya dan tata guna lahan.

Salah satu sumber utama emisi GRK bisa saja tanah gambut karena besarnya jumlah kandungan karbon dan nitrogen di dalamnya (Immirzi dkk 1992). Emisi CO₂ tanah gambut saat ini adalah sekitar 2.000 Mt/tahun yang disebabkan oleh degradasi lahan dan kebakaran hutan, yang terus bertambah dan akan terus bertambah, kecuali ada perubahan untuk sistem pengelolaan lahan dan perencanaan pembangunan tanah gambut. Lebih dari 90% emisi tanah gambut dunia berasal dari Indonesia, dan menempatkan negara ini pada posisi ketiga negara-negara penghasil CO₂ (Hooeijer dkk 2006).

Areal rawa dengan ketinggian air tanah dekat dengan permukaan yang berada di tanah Sumatera cukup luas. Luasnya sekitar 7,2 juta ha dengan cadangan karbon bawah tanah berjumlah 22.283 Mt atau sekitar 3.093 Mg C/ha (Wahyunto dkk 2003). Secara tradisional, kubah-kubah gambut di Sumatera ditanami "karet hutan" (*Hevea brasiliensis*) dengan gangguan minimal dan ekosistem mendekati alamiah yang biasanya berumur ratusan tahun. Di Aceh, pantai baratnya tertutup area seluas 170 ribu ha hutan rawa gambut pesisir (Agus dan Wahdini, tidak diterbitkan) yang telah menjadi sumber penghasilan masyarakat dengan biaya perawatan rendah dan dapat dipanen kapan saja. Namun, akhir-akhir ini terjadi kecenderungan baru, dimana area hutan ditebang, area rawa dikeringkan, dan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit atau perkebunan lain yang didorong oleh beberapa faktor. Dua puluh tujuh persen (27%) konsesi perkebunan sawit di Indonesia, termasuk perkebunan yang telah dan akan beroperasi, berada di lahan gambut (Hooeijer dkk 2006). Perkebunan tersebut berkembang dengan cepat, terutama karena didorong tingginya permintaan minyak sawit sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) dari negara-negara maju. Terbatasnya sumber pendapatan alternatif pada masyarakat adalah satu faktor lain yang mendorong kerusakan berkelanjutan rawa-rawa pantai (Agus dan Wahdini, tidak diterbitkan). Ketika perluasan perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan dilakukan dengan alasan-alasan yang sama, debat publik mengenai keberlangsungan dari tata guna lahan ini menguat. Menghitung perubahan cadangan karbon dapat menyumbangkan suatu dasar ilmiah yang kuat untuk debat ini.

Kajian ini dilakukan sejalan dengan proyek ReGrin (*Rebuilding Green Infrastructure with Trees People Want*/Pembangunan Kembali Infrastruktur Hijau dengan Tanaman yang Dikehendaki Masyarakat), yang didanai oleh program EU-ASIA PRO ECO II B, dan dilaksanakan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF), Balai Penelitian Tanah Indonesia dan Balai Penelitian Tanaman Perkebunan dan Universitas Hohenheim. Kajian ini merupakan kombinasi antara penelitian dan pengembangan masyarakat dengan tujuan utama untuk mengembangkan pengelolaan zona pesisir termasuk tanaman perkebunan untuk menyediakan perlindungan lingkungan dan membantu masyarakat memenuhi target ekonomi dari pilihan penghidupannya. Sebagai dasar perencanaan, perubahan tata guna lahan, dipantau, dikaji dan diperkirakan berdasarkan beragam skenario. Hitungan kandungan karbon di tanah gambut pada berbagai tata guna lahan: kebun karet, lahan dalam masa bera, kebun kelapa sawit – dalam serial waktu buatan /*false time series*, dan perkiraan cadangan karbon (C) pada biomassa tumbuhan dari seri waktu tata guna lahan yang sama dengan menggunakan perhitungan lapangan, bisa memberikan gambaran jumlah CO₂ yang dilepaskan ke atmosfer di area tersebut.

Materi dan Metode

Pendekatan “serial waktu buatan”/“*false time series*” untuk menghitung jumlah cadangan C di dalam tanah dari beragam sistem tata guna lahan digunakan dalam penelitian ini. Perubahan tata guna lahan yang umum di area ini adalah konversi hutan karet pada tanah gambut menjadi perkebunan kelapa sawit yang selalu melibatkan drainase, penebangan dan pembakaran dalam satu rangkaian proses (bera).

Tabel 1. Daftar desa dan sistem tata guna lahan yang berbeda dan lamanya (dalam tahun)

Desa	Lokasi tidak diberi drainase		Petak-plot yang diberi drainase		
	Karet	Bera	Karet	Bera	Kelapa Sawit
Cot Pluh	X (48)	X (48)	X (48)	X (18)	
Cot Lambise	X (36)		X (36)		
Alue Peunyareng	X (12)		X (49)	X (18)	
Leuhan			X (27)	X (10)	X (3 & 12)
Suak Raya			X (28)	X (2)	X (16)
Suak Puntong			X (51)	X (51)	
Kuala Baru			X (50)	X (3)	X (18)

Kajian ini dilakukan di Aceh Barat, Sumatera, Indonesia dan areal penelitiannya terletak di kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Dari kabupaten-kabupaten ini empat desa dengan berbagai tipe tata guna lahan yang berbeda diseleksi (Suak Raya, Suak Puntong, Leuhan dan Kuala Baru) (Tabel 1). Hal yang menjadi dasar seleksi untuk lokasi penelitian adalah keterwakilan jenis-jenis tata guna lahan: karet tidak diberi drainase, karet dengan drainase, lahan bera, perkebunan kelapa sawit. Untuk kelapa sawit apabila tersedia dicari perwakilan lokasi dengan tanaman muda hingga berumur sedang dan perkebunan sawit yang sudah tua. Tiga desa yang lain (Tabel 1) dengan hutan karet yang diberi atau tidak diberi drainase dan juga lahan bera dicari di kabupaten yang sama. Sistem tata guna lahan yang berbeda berdempetan atau sedikitnya dekat satu sama lain.

Penentuan Cadangan Karbon Tanah

Sampel yang dikumpulkan dari tiap titik sampling dianalisa secara fisik (kepadatan dan kematangan gambut) dan kimiawi (karbon). Pada setiap titik sub-sampling, permukaan air tanah diukur menggunakan tongkat meteran, dan ketebalan gambut diukur dari sekurangnya dua titik sampling di tiap petak. Semua sampel tanah yang dikumpulkan dari lapangan dianalisis untuk mengetahui kepadatan gambut (*bulk*

density/BD) dan total karbon organik (*total organic carbon*/TOC) di laboratorium. Kepadatan gambut dihitung menggunakan formula:

$$BD = \frac{\text{Massa tanah (g)}}{\text{Total volume (cm}^3\text{)}}$$

di mana: BD = Kepadatan gambut (*Bulk density*) (g/cm³).

Karbon organik tanah (*Soil Organic Carbon*/SOC) ditentukan menggunakan metode *Loss on Ignition* (Schlichting, Blume dan Stahr 1995) yang dikalibrasi ke metode Walkley dan Black (ISRIC 1998) menggunakan persamaan linear berikut:

$$WB = (LoI/0,93) - 5,86$$

Di mana: WB = nilai karbon dari metode Walkley-Black; LoI = nilai karbon menggunakan metode LoI; 0,93= slope; 5.86 = intercept. SOM untuk tiap sampel dikomputasi menggunakan formula:

$$SOM(\%) = [(Gross\ wt.\ 105^{\circ}C - Gross\ wt\ 550^{\circ}C) / (Gross\ wt\ 105^{\circ}C - Tare\ wt)] \times 100$$

dan Karbon Organik :

$$Corg(\%) = SOM(\%) / 1.724$$

Cadangan karbon dalam tiap titik sampel diperkirakan dengan menggunakan formula:

$$CS(Mg/ha) = BD \times C \times D \times A,$$

di mana: BD = Kepadatan gambut (*Bulk density*) (g/cm³), C = Kandungan karbon organik (*Organic carbon content*)(%), D = Kedalaman gambut (*Peat depth*) (m), A = Area (ha)

Pengukuran Biomassa di Atas Permukaan Tanah

Pengukuran biomassa di atas tanah dilakukan pada sistem tata guna lahan yang berbeda-beda di dalam tiap petak berukuran 0,5 ha. Faktor rerata 0,5 dipakai untuk mengkonversi bahan kering biomassa menjadi karbon biomassa.

Dua sub petak 10 m x 10 m ditetapkan pada tiap petak 0,5 ha dari tiap sistem tata guna lahan. Lingkaran setiap pohon setinggi dada dan tinggi pohon dari semua pohon dengan diameter dasar di atas 5 cm dalam tiap sub petak diukur menggunakan pita meteran dan klinometer. Kemudian lingkaran pohon dikonversi menjadi diameter untuk mendapatkan diameter setinggi dada (dbh) menggunakan formula:

$d = c/\pi$, di mana, d = diameter; c = lingkaran (*circumference*), $\pi = 3,1416$.

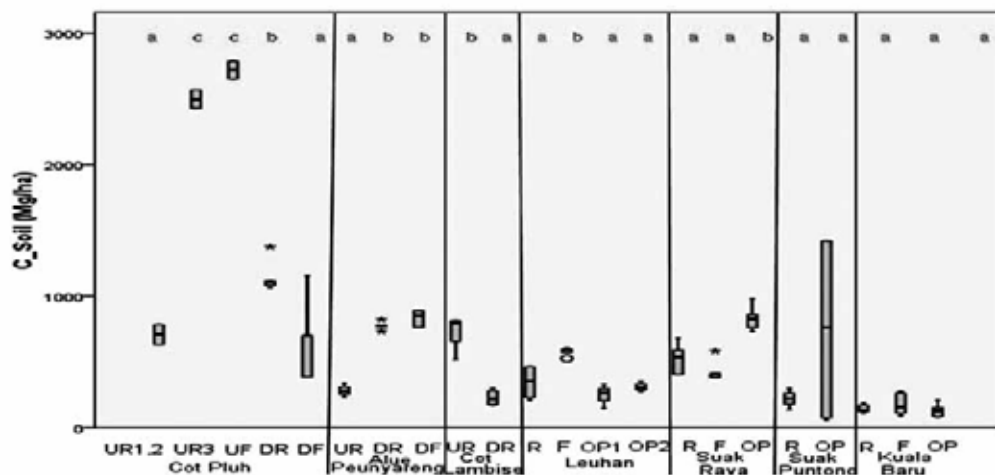
Untuk karet, total biomassa setiap pohon dihitung menggunakan persamaan empirik allometrik yang dikembangkan oleh ICRAF (Ketterings dkk 2001):

$B = a \cdot dbh^b = 0,066 \cdot dbh^{2,62}$, di mana: a = konstanta khusus - sebuah spesies empirik; dbh = diameter setinggi dada; b = konstanta khusus - sebuah spesies empirik.

Untuk kelapa sawit, metode silinder digunakan untuk memperkirakan biomassa di atas tanah (*aboveground biomass/ABG*), di mana volume batang kelapa sawit dikali kepadatan $0,66 \text{ g/cm}^3$ (Lim dan Gan 2005). Rasio akar: cabang 0,33 (Gemer dan Sauerborn 2006) dipakai untuk memperkirakan biomassa bawah tanah (*belowground biomass/BGB*). Kemudian, total biomassa kelapa sawit setiap petaknya dikalkulasi dengan menambah $AGB + BGB$ tiap pohon kelapa sawit di dalam sub petak 100 m^2 dikali kepadatan kebun dalam petak $8,5 \text{ m} \times 8,5 \text{ m}$.

Untuk lahan bera, dua sub petak $10 \text{ m} \times 10 \text{ m}$ ditetapkan di dalam tiap petak tanah bera 0,5 ha. Semua tumbuhan di dalam tiap sub petak dikumpulkan dan ditimbang bersih. Sekitar 1 kg sub sampel diambil, dikeringkan pada suhu 60°C selama 48 jam dan ditimbang untuk mendapatkan faktor konversi dalam menentukan berat kering.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 16.0. Selisih rerata antara tiap sistem tata guna lahan diuji menggunakan test MannWhitney. Korelasi antar tiap parameter yang mempengaruhi cadangan karbon dari sistem tata guna lahan dianalisis menggunakan analisis korelasi Pearson.



Gambar 1. Cadangan karbon tanah dari 7 situs sampel pada berbagai tipe penggunaan lahan

Legenda: UR1,2= undrained rubber sampling points=titik-titik sampling karet yang tidak diberi drainase 1&2; UR3= undrained rubber sampling point= titik-titik sampling karet yang tidak diberi drainase 3; UF= undrained fallow= bera yang tidak diberi drainase; DR= drained rubber= karet yang diberi drainase; DF= drained fallow= lahan bera yang diberi drainase; R= rubber= Karet; F= fallow= bera ; OP= oil palm/kelapa sawit; OP1= oil palm/kelapa sawit (umur 3 th); OP2= oil palm/Kelapa sawit (umur 4 th)

Cadangan Karbon Tanah dan Biomassa Tanaman

Untuk menentukan jumlah cadangan karbon tanah pada tiap plot, selain kedalaman gambut diukur juga kepadatan gambut dan kandungan karbon organik. Sekitar 3 – 54% kandungan karbon tanah organik diobservasi dari semua sampel tanah. Hasil uji Mann-Whitney ($\alpha=0,05$) memperlihatkan perbedaan cadangan karbon tanah yang jelas antara petak yang dikeringkan (diberi drainase) dan yang tidak dikeringkan (tidak diberi drainase), dalam 2 dari 3 situs sampling (Gambar 1). Bukti penurunan signifikan cadangan karbon tanah dari konversi tata guna lahan tidak dapat diperoleh dari data ini. Namun, hasil-hasil pengamatan tersebut memperlihatkan bahwa jumlah karbon dalam tanah 5-10 kali lebih tinggi daripada besaran biomassa karbon.

Cadangan karbon tanah berkisar antara 54 hingga 2.787 Mg C/ha. Nilai terendah diamati pada petak bera Suak Puntong dengan kedalaman gambut kurang dari 20 cm. Nilai tertinggi berasal dari tanah bera tidak diberi drainase di Cot Pluh dengan kedalaman gambut 490 cm. Cadangan karbon tanah sangat bervariasi, tergantung

pada lokasi. Penghitungan cadangan karbon juga dilakukan oleh Agus dan Wahdini (tak diterbitkan) pada 2008 di kabupaten yang sama tapi pada hutan sekunder dan kelapa sawit. Nilai cadangan karbon tanah yang dilaporkan adalah antara 382-1.879 Mg/ha untuk kedalaman gambut 115 – 505 cm. Kandungan karbon di tanah tidak hanya bervariasi dengan ketebalan gambut tapi juga pada kepadatan karbon. Untuk kedua kajian, gambut terdalam bukanlah gambut dengan cadangan karbon tanah tertinggi. Ini mungkin akibat perbedaan materi gambut yang menghasilkan kandungan karbon berbeda.

Di antara semua faktor yang mempengaruhi cadangan karbon tanah, peran terpenting dimainkan oleh ketebalan gambut. Dua variabel, karbon tanah dan kedalaman gambut, mempunyai korelasi sangat positif yaitu 0,944 yang secara statistik signifikan pada $\alpha=0,01$ (Tabel 2).

Tabel 2. Hasil analisis regresi berkala menunjukkan faktor terpenting yang mempengaruhi total cadangan karbon pada sistem tata guna lahan

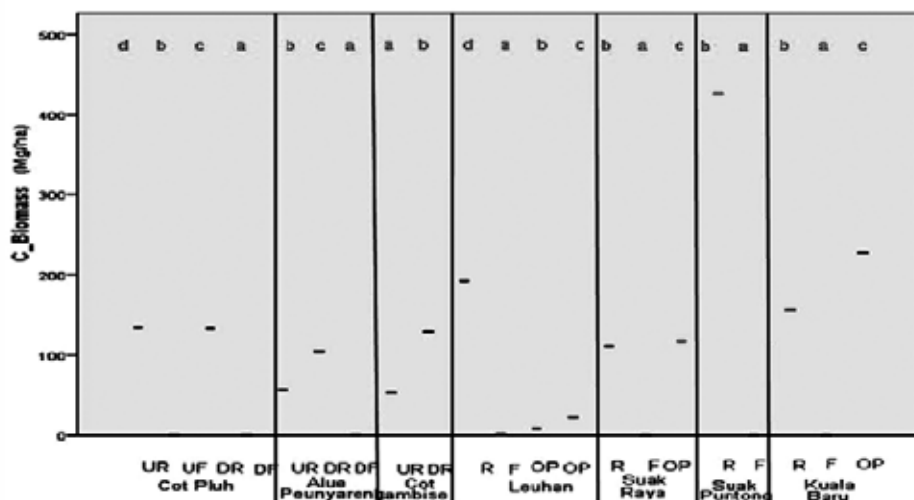
Model	R	$\sqrt{R}$	$\sqrt{R}$ yang disesuaikan	Std. Error dari Perkiraan
C_Tanah	0,995 ^a	0,991	0,990	61,964
C_Tanah, C_Biomassa	1,000 ^b	1,000	1,000	0,0193

Cadangan Karbon pada Biomassa Tanaman

Gambar 2 memperlihatkan perbedaan signifikan pada biomassa karbon antara berbagai tipe tata guna lahan. Ini terjadi pada semua situs sampling. Karet mempunyai cadangan karbon lebih tinggi daripada kelapa sawit, kecuali di Suak Raya dan Kuala Baru. Ini didukung oleh Gambar 3 di mana grafik memperlihatkan karet mempunyai cadangan karbon tertinggi diikuti kelapa sawit. Tanpa melihat apakah petak-petak tersebut diberi drainase (dikeringkan) atau tidak, ladang bera mengandung jumlah karbon jauh lebih rendah dalam biomasanya. Semakin tinggi kepadatan tanaman karet berumur 28 tahun, semakin tinggi karbon dalam biomasanya.

Untuk kelapa sawit, hasil pengukuran total biomassa karbon berkisar antara 8-277 Mg/ha untuk kelapa sawit berumur 3-16 tahun. Biomassa karbon dari petak bera adalah antara 0,3 hingga 1 Mg C/ha. Seluruh kebun bera, bila tidak baru dibakar, ditumbuhi rerumputan. Hal ini menjelaskan rendahnya cadangan karbon dalam biomassa.

Perbedaan signifikan antara biomassa karbon dari semua tipe penggunaan lahan menyiratkan perbedaan jumlah biomassa yang diubah menjadi tanah. Jelas, karet



Gambar 2. Cadangan biomassa karbon dari 7 situs sampel pada berbagai tipe penggunaan lahan

mempunyai kandungan biomassa karbon lebih tinggi daripada tanah bera, terutama karena petak bera yang diteliti merupakan lahan rumput. Inilah alasan mengapa nilai tanah bera selalu mendekati nol, dengan maksimum cadangan karbon hanya 1 Mg/ha. Tebang dan bakar juga dipraktikkan di tiap petak bera, yang mengendalikan vegetasi untuk tumbuh dan menghasilkan biomassa lebih banyak.

Hasil dari korelasi Pearson (Tabel 3) memperlihatkan bahwa karbon pada biomassa tumbuhan tidak berpengaruh kuat pada total karbon pada sistem penggunaan lahan. Pada usia penggunaan lahan terakhirlah yang berpengaruh positif kuat terhadap biomassa karbon. Gambar 3 menunjukkan kenaikan biomassa karbon pada kelapa sawit dan karet sebagai sebuah fungsi umur.

Total Cadangan Karbon

Untuk menghitung total jumlah cadangan karbon pada keseluruhan sistem penggunaan lahan, cadangan karbon tanah dan cadangan biomassa karbon ditambahkan. Hasil uji Mann-Whitney ($\alpha = 0,05$) tidak menunjukkan bukti jelas adanya perbedaan signifikan pada cadangan total karbon di keseluruhan sistem pengolahan lahan antara petak kering dan tak kering. Selain itu, penurunan signifikan pada cadangan karbon dari rangkaian karet-bera-kelapa sawit tidak terlihat dari data yang diperoleh.

Tabel 3. Analisis korelasi Pearson antara berbagai faktor yang mempengaruhi total cadangan karbon pada suatu sistem tata guna lahan

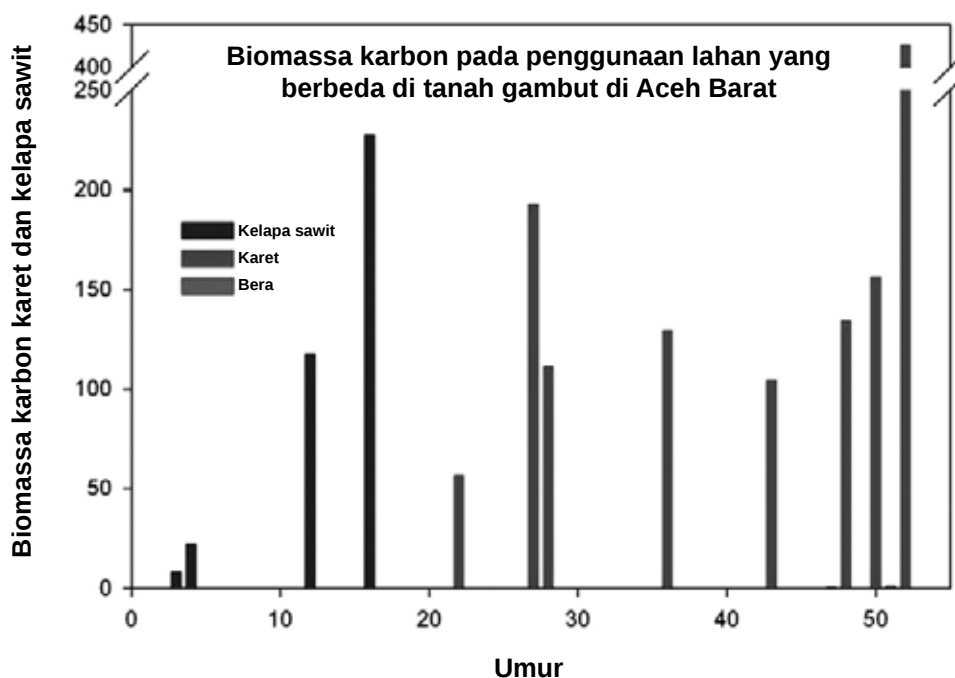
	C_Tanah	C_Total	Kedalaman gambut	Tahun drainase	Umur tata guna lahan terakhir	G_Air	Tipe tata guna lahan	Kedalam drainase
C_Biomassa	-0,218*	-0,054	-0,255*	0,228*	0,447**	0,278*	-0,275**	-0,016
C_Tanah		0,986**	0,944**	-0,406**	0,379**	-0,429**	-0,082	-0,293**
C_Total			0,922**	-0,377**	0,464**	-0,402**	-0,131	-0,303**
Kedalaman_gambut				-0,411**	0,296**	-0,327**	-0,087	-0,160
Tahun_drainase					0,018	0,080	0,130	0,682**
Umur tata guna lahan terakhir						-0,391**	-0,636**	-0,335**
G_Air							0,302*	0,354**
Tipe tata guna lahan								0,306**

Catatan: ** signifikan pada $\alpha = 0,01$, * signifikan pada $\alpha = 0,05$

Analisis regresi bertahap mengungkapkan cadangan karbon tanah dan karbon pada biomassa merupakan dua faktor utama yang mempengaruhi cadangan total karbon pada keseluruhan sistem penggunaan lahan (Tabel 2). Dengan C_tanah sendiri, diperoleh sebuah $R^2 = 0,991$. Di sisi lain, berdasarkan korelasi Pearson, kedalaman gambut dan umur tata guna lahan terakhir mempunyai pengaruh terkuat pada cadangan total karbon (Tabel 3). Kedalaman gambut berpengaruh sangat positif ($0,922^{**}$) dengan total karbon. Ini berarti ketika ketebalan gambut bertambah terdapat kemungkinan sangat kuat bagi total karbon bertambah. Hal yang sama terjadi pada hubungan antara total karbon dan umur tata guna lahan terakhir. Korelasi antara kedua variabel ini adalah $0,464$ yang sangat signifikan pada $\alpha = 0,01$. Karena itu, total karbon merupakan sebuah fungsi bagi karbon tanah, biomassa karbon, kedalaman gambut dan umur tata guna lahan terakhir.

Pembahasan

Sebagai akibat kenaikan konversi tata guna lahan di Indonesia, dari hutan karet ke kelapa sawit, sulit menemukan sebuah area tata guna lahan yang berbeda, yang diberi drainase dan tidak diberi drainase yang berdekatan. Di Aceh Barat, walaupun ada kedua sistem tata guna lahan tersebut, dipisahkan jarak paling sedikit 500 m. Di dalam area kajian, hampir semua lahan gambut telah diberi drainase. Pengeringan



Gambar 3. Karbon biomassa karet dan kelapa sawit pada berbagai umur setelah tanam

biasanya dimulai sebelum atau selama masa penebangan dan pembersihan hutan. Tipe konversi tata guna lahan ini (karet-bera-kelapa sawit) yang disertai dengan drainase telah dipraktekkan sejak sekitar pertengahan abad lalu.

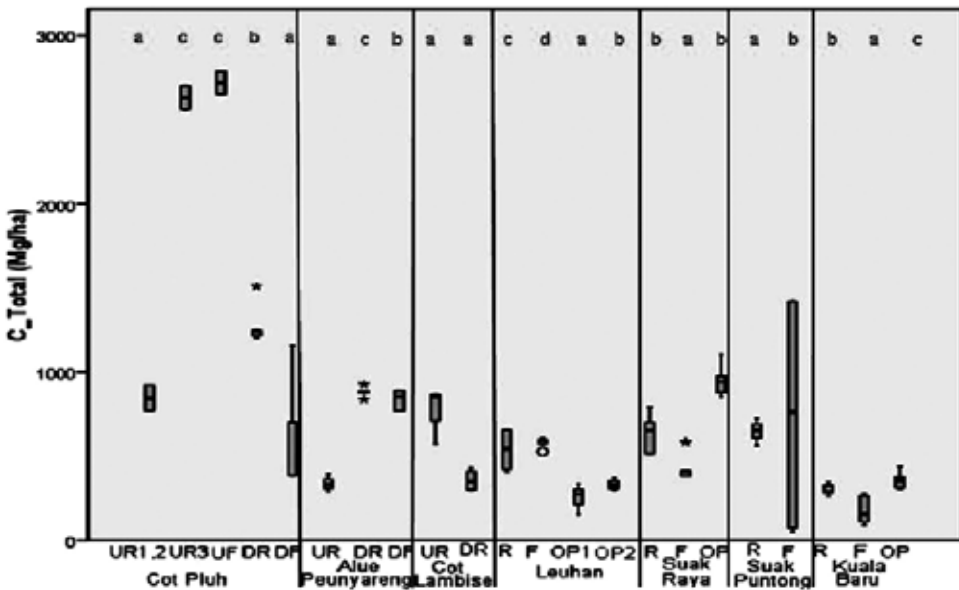
Kedalaman gambut sangat bervariasi yang sangat mungkin disebabkan oleh tidak rataanya dasar kubah gambut akibat proses pertumbuhan kubah gambut. Tidak meratanya permukaan gambut juga dapat menjadi penyebab variasi tersebut. Sebagaimana dijumpai di lapangan, lapisan tanah mineral kadang-kadang terbentuk di antara lapisan gambut akibat tumpukan tanah liat yang terbawa banjir. Kemungkinan pengambilan sampel di area ini dapat menimbulkan tingginya variasi ketinggian gambut di dalam petak.

Biomassa karbon karet hutan berkisar antara 104 hingga 193 Mg C/ha, kecuali untuk Suak Puntong yang mempunyai nilai sangat tinggi yakni mencapai 426 Mg C/ha. Variasi pada biomassa karbon adalah akibat perbedaan umur dan heterogenitas distribusi ruang pepohonan. Nilai biomassa karbon yang sangat tinggi di Suak Puntong kemungkinan disebabkan oleh tingginya kepadatan tanaman.

Tanah gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar. Tingginya C tanah di lahan yang tidak diberi drainase di Cot Pluh dan Cot Lambise lebih disebabkan oleh

kedalaman gambut yang menunjukkan pengaruh paling kuat terhadap cadangan C tanah. Apabila diasumsikan bahwa awalnya kedua petak tersebut mempunyai kedalaman gambut yang sama, penurunan cadangan karbon tanah pada petak dengan drainase dan tanpa drainase kemungkinan disebabkan oleh pengeringan yang menurunkan permukaan air tanah. Pengeringan berperan penting bagi simpanan C tanah. Dampak pengeringan tergantung pada kedalaman dan umur drainase. Semakin dalam dan semakin tua usia drainase, semakin banyak air terbuang dari sistem tersebut. Hal inilah yang mempercepat dekomposisi gambut.

Cadangan karbon dalam biomassa tidak berpengaruh kuat terhadap total cadangan karbon sebuah sistem tata guna lahan. Ini karena sangat sedikit kandungan karbonnya dibandingkan karbon tanah yang 4-10 kali lipat lebih tinggi dari karbon biomassa. Namun, di wilayah dengan lapisan tanah organik yang sangat dangkal seperti di Kuala Baru, karbon biomassa berperan sangat penting terhadap total cadangan karbon dari keseluruhan sistem tata guna lahan. Penambahan karbon biomassa menyebabkan penambahan pada total karbon yang bisa diamati.



Gambar 4. Total cadangan karbon dari 7 situs sampel pada berbagai tipe penggunaan lahan

Legenda: UR1,2= *undrained rubber sampling points*= titik-titik sampling karet yang tidak diberi drainase 1&2; UR3= *undrained rubber sampling point*= titik-titik sampling karet yang tidak diberi drainase 3; UF= *undrained fallow*= bera yang tidak diberi drainase; DR= *drained rubber*= karet yang diberi drainase; DF= *drained fallow*= lahan bera yang diberi drainase; R= *rubber*= Karet; F= *fallow*= bera; OP= *oil palm*/kelapa sawit; OP1= *oil palm/kelapa sawit (umur 3 th)*; OP2= *oil palm/Kelapa sawit (umur 4 th)*

Penutup

Konversi tata guna lahan terutama dari karet ke kelapa sawit melibatkan kegiatan yang berdampak negatif pada ekosistem. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup pengeringan rawa gambut, pembukaan hutan dan pembakaran biomassa, dan akan membawa pada pemanasan global karena percepatan emisi CO₂. Namun demikian kajian yang dilakukan ini hanya terpusat pada pengkajian cadangan C dari tanah gambut. Metan dan nitro oksida yang juga terbentuk dari C tanah, yang merupakan gas-gas rumah kaca yang lebih efisien, tidak dipertimbangkan di dalam kajian ini. Penelitian yang terpusat pada metan serta nitro oksida harus dilaksanakan.

Untuk menghindari berbagai efek negatif ini, tanah gambut di Aceh harus dikelola secara hati-hati. Pengelolaan tata guna lahan harus diubah dan diterapkan. Perencanaan tata guna lahan harus diubah untuk mengurangi dampak seperti di atas. Sebagai contoh, pembangunan perkebunan kelapa sawit di rawa gambut yang telah dipraktekkan di kawasan ini harus dihentikan. Seharusnya, tipe penggunaan lahan ini diterapkan di area bukan gambut. Salah satu pilihan dapat berupa pembangunan drainase dangkal untuk perkebunan kelapa sawit dan tanaman pertanian lainnya. Sebagaimana diamati di lapangan, kanal-kanal drainase tersier di perkebunan kelapa sawit bahkan mencapai kedalaman hingga 2 m. Untuk mengurangi dampak merugikan dari drainase, kedalaman ini bisa dikurangi. Opsi lain dapat berupa perubahan sistem budi daya. Di semua situs sampling, karet dan kelapa sawit ditanam dengan pola monokultur. Untuk meningkatkan keragaman hayati perkebunan ini, bisa diterapkan pola tanaman sela atau tumpang sari. Keanekaan hayati ini tidak hanya berdampak positif terhadap ekologi tapi juga membantu ekonomi petani Aceh. Namun demikian, pemilihan spesies tanaman yang akan dipadukan di perkebunan kelapa sawit atau karet harus dipilih secara berhati-hati mengingat rendahnya kandungan nutrisi tanah gambut.

Daftar Pustaka

- Agus F dan Wahdini W. Assessment of carbon stock of peatland at Tripa, Nagan Raya District, Naggroe Aceh Darussalam Province of Indonesia. Indonesian Centre for Agricultural Land Resources Research and Development. (*laporan tak diterbitkan*).
- Germer J dan Sauerborn J. 2006. Estimation of the impact of oil palm plantation establishment on greenhouse gas balance. *Environ Dev Sustain*. 10 (6), 697-716.

- Hooijer A, Silvius M, Wösten H dan Page S. 2006. PEAT-CO₂, Assessment of CO₂ emissions from drained peatlands in SE Asia. Delft Hydraulics Report Q3943.
- Immirzi P, Maltby E, dan Clymo RS. 1992. The global status of peatlands and their role in carbon cycling. Report No.11. The Wetland Ecosystem Ecosystems Research Group. University of Exeter, UK.
- IPCC. 2007. IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007
- ISRIC. 1998. A Soils and Terrain Digital Database for Latin and Central America and the Caribbean (SOTERLAC). <http://www.isric.nl>.
- Ketterings QM, Coe R, van Noordwijk M, Ambagau Y dan Palm CA. 2001. Reducing uncertainty in the use of allometric biomass equations for predicting above-ground tree biomass in mixed secondary forests. *Forest Ecology and Management* 146, 199-209.
- Lim SC dan Gan KS. 2005. Characteristics and utilization of oil palm stem. *Forest Research Institute* 35, 1-9.
- Rastogi M, Singh S dan Pathak H. 2002. Emissions of carbon dioxide from soil. *Current Science* 82 (5), 510-517.
- Schlichting E, Blume HP dan Stahr K. 1995. *Bodenkundliches Praktikum*. 2nd ed. Blackwell, Berlin, Germany.
- Wahyunto, Ritung S dan Subagjo H. 2003. Map of Peatland Distribution Area and Carbon Content in Sumatera. Wetland International-Indonesia Program and Wildlife Habitat Canada (WHC).

Akumulasi Karbon pada Sistem Agroforestri Karet di Lahan Gambut dan Mineral di Aceh Barat

Degi Harja¹, Janudianto¹, Laxman Joshi^{1,2}, Suyitno¹

¹World Agroforestry Centre (ICRAF)

²The International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD)

Pendahuluan

Peralihan lahan gambut dipercaya menyebabkan emisi karbon dalam jumlah tertentu (Agus dan Subiksa 2008, Agus dkk 2011, Maswar 2010). Walaupun Minkinen dan Laine (1998) berpendapat bahwa penurunan permukaan gambut (*subsiden*) setelah diberi drainase lebih karena perubahan struktur fisik akibat pengeringan, sementara oksidasi lahan gambut menjadi tidak lebih penting. Hal ini mungkin dapat dipahami jika terjadi pada daerah *temperate*, namun pada daerah tropis oksidasi lahan gambut akibat pengeringan ternyata cukup tinggi (Maswar 2010). Pada perkebunan karet, contohnya, diperkirakan terdapat emisi sebesar 18 t CO₂/ha/tahun ketika lahan tersebut di drainase (Agus dan Subiksa 2008). Dan bahkan dapat mencapai hingga lebih dari 50 t CO₂/ha/tahun dengan drainase yang lebih tinggi (pada perkebunan kelapa sawit dan lainnya). Hasil ini cukup jauh jika dibandingkan dengan Hargreaves dkk (2003) yang menunjukkan bahwa dekomposisi lahan gambut di Scotland hanya sekitar 1 ton C/ha/tahun atau setara dengan emisi 3,7 t CO₂/ha/tahun.

Konversi lahan gambut menjadi perkebunan dengan cadangan karbon yang lebih tinggi hingga saat ini belum mampu melampaui laju emisi karbon akibat dekomposisi gambut itu sendiri. Dengan asumsi rotasi 25 tahun, perkebunan sawit masih menyisakan emisi sekitar 50 t CO₂/ha/tahun dan perkebunan karet 15 t CO₂/ha/tahun walaupun dikonversi dari jenis tutupan lahan belukar (Agus dan Subiksa 2008). Sehingga pemanfaatan lahan gambut dalam hal ini hampir akan selalu menyebabkan emisi berlebih dan menjadi konsekuensi yang harus ditanggung pada kebijakan penggunaan lahan.

Agroforestri karet di Aceh Barat, Provinsi Aceh, pada saat ini memanfaatkan baik lahan mineral maupun lahan gambut. Pemanfaatan lahan gambut untuk

perkebunan dalam hal ini tak dapat dihindari karena belum adanya kebijakan untuk membatasinya. Namun dari kegiatan masyarakat setempat dengan pemanfaatannya sebagai agroforest karet, minimal kita dapat melihat sejauh mana efektifitas jenis perkebunan ini pada lahan gambut dibandingkan pada lahan mineral. Dalam hal ini dilakukan penelitian dengan melakukan pengamatan pertumbuhan pohon karet dengan tujuan: (1) Melihat performa karet unggul pada agroforestri karet di dua jenis tanah yang berbeda, tanah mineral dan gambut, dan (2) Mengukur dinamika karbon tersimpan pada sistem agroforestri karet di lahan gambut dan mineral.

Metode

Serangkaian percobaan lapangan penanaman karet unggul dilakukan dengan melibatkan petani sebagai salah satu komponen dalam penelitian ini. Sebanyak 24 buah kebun percobaan dengan luas sekitar 0,5 ha dibangun di 20 desa pada delapan kecamatan di Kabupaten Aceh Barat (lihat Tabel 1). Kebun percobaan ini umumnya terletak di daerah yang strategis, mudah dijangkau, berada dekat dengan jalan sehingga mudah terlihat oleh masyarakat umum. ICRAF memberikan dukungan teknis dan sarana pertanian meliputi bibit karet unggul, pupuk dan obat-obatan yang diperlukan petani.

Kegiatan pengamatan pertumbuhan karet dan tanaman sela dilakukan sejak akhir tahun 2007, pada saat kebun percobaan pertama kali dibangun. Pengamatan pertumbuhan tanaman karet di semua demo plot dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali sejak ditanam. Faktor-faktor yang diamati dalam pengamatan meliputi:

- diameter dan lingkaran batang
- tinggi tanaman
- status serangan hama dan penyakit

Tabel 1. Daftar petani kebun percobaan agroforestri karet di Aceh Barat, Aceh

Desa	Petani	Jenis klon karet	Jarak tanam	Jenis tanaman lainnya	Luas area (Ha)	Jenis tanah	Lingkungan sekitar
Alue Raya	M. Yatin Amin	IRR 118	normal	nilam dan palawija	0,4	mineral	kebun buah-buahan
Blang Brandang	Mustapa	PB 260	normal	palawija	0,5	mineral	kebun karet tua
Cot Darat	Ismail Muaz	PB 260	ganda	durian, salak, dan nilam	0,4	mineral	kebun palawija
Cot Lada	Abdurahman	PB 260	ganda	durian, duku, jeruk manis, dan palawija	0,5	mineral	kebun palawija
Cot Lada	Muslim	PB 330	ganda	durian dan rambutan	0,5	mineral	kebun palawija
Deah	Yusup	PB 260	ganda	duku, mangga, rambutan	0,5	gambut	kebun karet tua
Kubu	A.Raof P	IRR 118	ganda	durian, duku, Jati, dan palawija	0,5	mineral	kebun palawija
Lapang	Zakariya	PB 260	normal	nanas, mangga, petai, dan rambutan	0,5	gambut	kebun palawija
Leubok	Sudarmi	PB 330	normal	palawija dan nilam	0,4	mineral	perumahan dan sawah
Lhok Guci	T. Ubit	PB 260	ganda	duku, durian, sawo, dan palawija	0,5	mineral	kebun palawija
Pasi Janeng	Yusrawati	PB 330	ganda	duku, nilam, langsung, cokelat, dan nilam	0,4	mineral	kebun kopi, coklat dan karet
Payalumpat	Said Ismail	IRR 118	ganda	nilam dan nilam	0,5	gambut	kebun karet tua
Penia	Umi Hanisah	PB 260	ganda	duku, nilam, sawo, kopi	0,4	gambut	kebun karet tua
Peunaga Cut Ujung	Baharudin	PB 260	ganda	duku, durian, dan petai	0,5	gambut	hutan dan kebun karet
Peunaga Cut Ujung	Mardian	PB 260	normal	cokelat, kopi, pisang, mahoni, nilam dan palawija	0,5	mineral	kebun karet dan palawija
Ranto Panjang	Ratna K	IRR 118	ganda	durian, duku, cokelat, petai, dan palawija	0,4	mineral	kebun palawija
Rimba Langge	Ruslan	PB 260	normal	palawija dan nilam	0,5	mineral	sawah
Semara	Lanta	PB 260	ganda	rambutan, durian, jeruk manis dan palawija	0,5	mineral	semak dan kebun karet
Semara	Ali Burhan	PB 260	normal	palawija dan nilam	0,5	mineral	semak dan kebun karet
Seunebok Tengoh	Yufnan	PB 260	normal	palawija	0,5	mineral	semak dan lahan kosong

Seunebok Tengoh	Dahlan	PB 260	normal	nilam	0,5	mineral	semak dan lahan kosong
Suak Nie	Nurdin	PB 330	ganda	kedondong, sawo dan palawija	0,4	mineral	kebun karet tua
Suak Pangkat	Zainal Idris	PB 260	ganda	durian, rambutan, sawo, nilam, dan palawija	0,5	mineral	perumahan dan kebun palawija
Ule Blang	T. Abdurahman	PB 330	ganda	durian, duku, dan palawija	0,4	mineral	sawah, kebun palawija

Catatan:

Jarak tanam karet normal menggunakan 3m x 6m, sedangkan jarak tanam ganda menggunakan 2,5m x 6m x 10m

Jenis karet yang ditanam merupakan klon karet unggul seperti PB260, PB330, dan IRR118. Jarak tanam yang diterapkan adalah jarak tanam normal (3 m x 6 m) dan jarak tanam ganda (2,5 m x 6 m x 10 m). Selain karet, petani juga menanam beberapa jenis pohon dan buah-buahan yang mereka butuhkan seperti duku, durian, rambutan, jati, mangga, cokelat, mahoni, nilam serta tanaman hortikultur lainnya ke dalam kebun karetanya.

Kebun percobaan ini menerapkan jenis dan dosis pemupukan yang sama. Pemupukan dasar menggunakan SP36 sebanyak 150 g/pohon/tahun yang diberikan hanya pada tahun pertama saja dalam satu kali aplikasi. Kemudian ditambah dengan Urea sebanyak 200 g/pohon/tahun yang diberikan dalam empat kali aplikasi pemupukan. Urea terus diberikan hingga tahun kedua setelah tanam.

Tiap-tiap petani berbeda dalam menjalankan manajemen pengelolaan kebun. Pengelolaan kebun yang dimaksud adalah, sebagai contoh, melakukan pemupukan tiap tiga bulan sekali yang didahului dengan pembersihan barisan tanam. Dimana petani lain ada yang hanya melakukan pembersihan pada masing-masing individu tanaman karet.

Manajemen petani yang berbeda-beda ini dapat menjadi penyebab perbedaan performa karet. Sehingga petani kemudian dikelompokkan menurut tingkat kerajinan atau keaktifannya: sangat baik dan cukup. Status ini ditetapkan pada masa awal pertumbuhan karet yang merupakan masa pemeliharaan intensif.

Disamping perbedaan manajemen pengelolaan kebun tersebut, dilihat pula status kondisi plot-plot yang dimiliki oleh petani-petani yang bersangkutan. Status-status kebun tersebut dikategorikan menurut kondisinya sebagai berikut:

- Sangat baik : kondisi kebun pada tahun pertama sangat baik dan terawat, dan survival karet tinggi (>90%).
- Baik : kondisi kebun pada tahun pertama baik dan terawat, survival karet tinggi (70-90%)
- Cukup : kondisi kebun cukup baik dan terawat, survival karet sedang (50-70%)
- Kurang : kondisi kebun tidak terawat, bersemak tinggi dan survival karet sangat rendah (<50%) atau bahkan karet mati semua.

Karena manajemen pengelolaan kebun dan status kebun berbanding lurus maka tingkat manajemen pengelolaan kebun dikelompokkan menjadi hanya dua kelompok yaitu manajemen yang baik dan cukup. status kebun A dan B dimasukkan kedalam kelompok manajemen yang “baik” dan status C dan D dimasukkan kedalam kelompok manajemen “cukup”.

Perhitungan biomasa dan karbon dihitung menggunakan persamaan allometrik dari Chave dkk (2005) dengan memasukan parameter diameter dan tinggi untuk jenis iklim humid tropika.

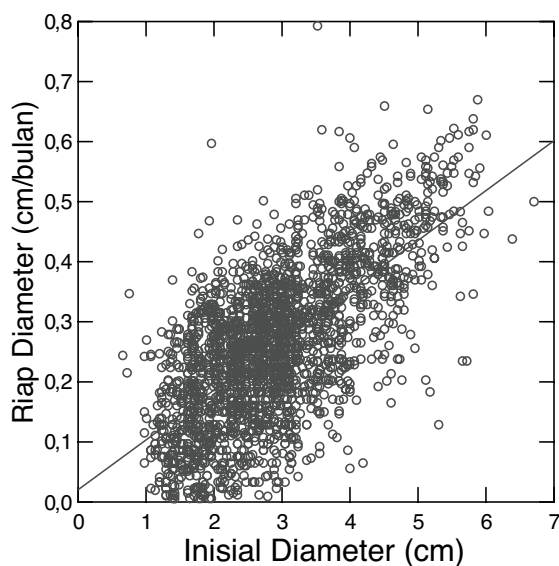
Lokasi penelitian adalah Kabupaten Aceh Barat, terletak di wilayah pantai bagian Barat Provinsi Aceh, pada posisi 04°06' - 04°47' Lintang Utara dan 95°52' - 96°30' bujur Timur. Suhu udara dan curah hujan rata-rata per bulan mencapai 26°C dan 300,3 mm (BPS Aceh Barat 2008).

Hasil

Secara umum pertumbuhan karet memperlihatkan hubungan yang sebanding dengan besar kecilnya inisial diameter pohon (Gambar 1). Namun beberapa faktor memperlihatkan pengaruh yang cukup signifikan pada variasi pertumbuhan tersebut.

Dari jumlah data sebanyak 2.294, dilakukan *Analysis of Co-variance* (ANCOVA) terhadap faktor Tanah dan faktor Manajemen. Tanah terdiri dari dua tipe yaitu mineral dan gambut, dan manajemen dibagi menjadi dua tipe yaitu ‘baik’ dan ‘cukup’. Diameter inisial dijadikan sebagai covariance pada analisa ini.

Hasil ANCOVA menunjukan pengaruh yang signifikan dari faktor Tanah dan Manajemen terhadap pertumbuhan karet ($R^2 = 0,472$). Tabel 2 menunjukan pengaruh dari masing-masing faktor dari hasil ANCOVA. Dari nilai *Sum of Square*, faktor Manajemen menunjukan pengaruh yang lebih besar terhadap besarnya variasi



Gambar 1. Plot riap diameter per perbulan untuk semua pohon karet umur 1-2 tahun berdasarkan ukuran diameter inisial. Secara umum pertumbuhan diameter berbanding linier dengan besarnya diameter inisial untuk pohon dengan diameter kurang dari 7 cm.

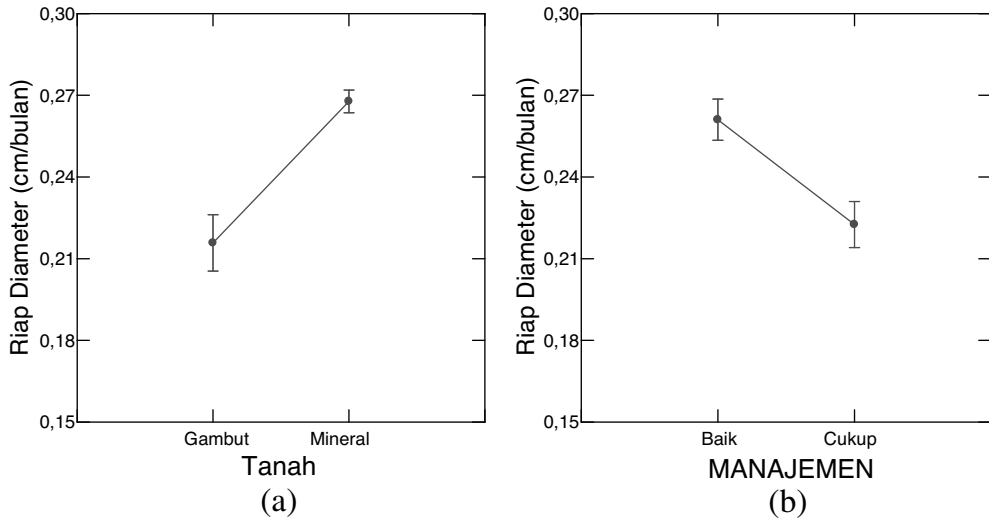
pertumbuhan pada karet dibandingkan dengan faktor Tanah. Faktor Manajemen menjadi berkurang pengaruhnya jika dikombinasikan dengan faktor Tanah, yang menunjukkan bahwa faktor Manajemen dan faktor Tanah kemungkinan tidak saling mendukung.

Tabel 2. Hasil ANCOVA dari pertumbuhan karet terhadap faktor Tanah dan Manajemen

Faktor	Sum of Square	Df	Mean Squares	F-ratio	p-value
Tanah	0,714	1	0,714	84,026	0,000
Manajemen	0,372	1	0,372	43,795	0,000
Tanah*Manajemen	0,477	1	0,477	56,106	0,000
Diameter	13,369	1	13,369	1.573,715	0,000
Error	19,445	2,289	0,008		

Pengaruh Jenis Tanah dan perbedaan Manajemen ditunjukkan pada Gambar 2. Nilai *Least Square Means* menunjukkan bahwa pertumbuhan karet pada tanah mineral, yang memang cenderung lebih subur, menghasilkan pertumbuhan rata-rata sekitar

25% lebih tinggi dibanding pada tanah gambut (Gambar 2a). Namun tanpa melihat jenis tanahnya, dengan manajemen yang baik dapat dilihat pula bahwa performa karet sekitar 25% lebih tinggi dibandingkan pengelolaan yang kurang baik (Gambar 2b).

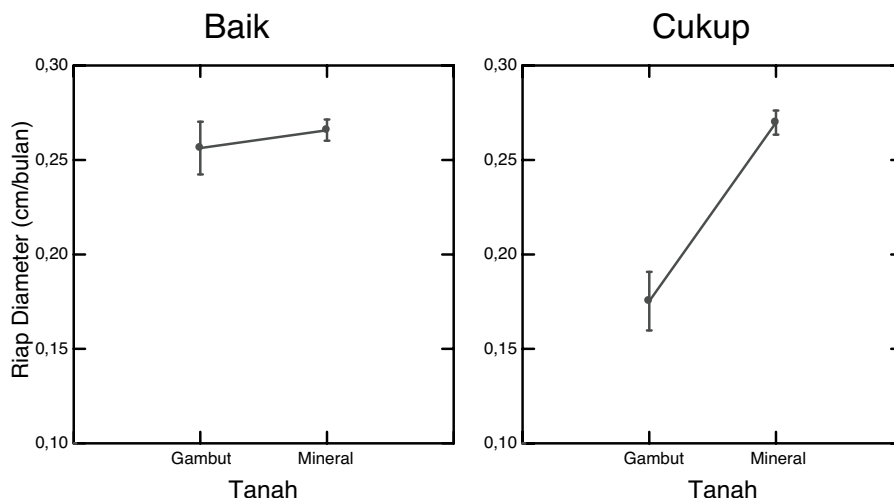


Gambar 2. *Least Squares Means* untuk kategori tanah 'Gambut' dan 'Mineral' pada riap diameter (a) dan untuk kategori manajemen 'Baik' dan 'Cukup' (b). Tanah mineral menunjukkan rata-rata riap yang lebih tinggi dibandingkan tanah gambut (a). Dan sesuai dengan yang diharapkan, manajemen yang baik menghasilkan riap diameter yang lebih tinggi (b).

Selanjutnya jika melihat nilai *Least Square Means* pada kombinasi antara Manajemen dan Tanah (Gambar 3), dapat dilihat bahwa diantara keduanya tidak saling mendukung. Dengan manajemen pengelolaan yang baik pertumbuhan karet pada tanah gambut dapat menyamai performa karet pada tanah mineral. Namun pada tanah mineral, walaupun manajemennya kurang begitu baik, pertumbuhan karet masih tetap menunjukkan performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada tanah gambut (Gambar 3).

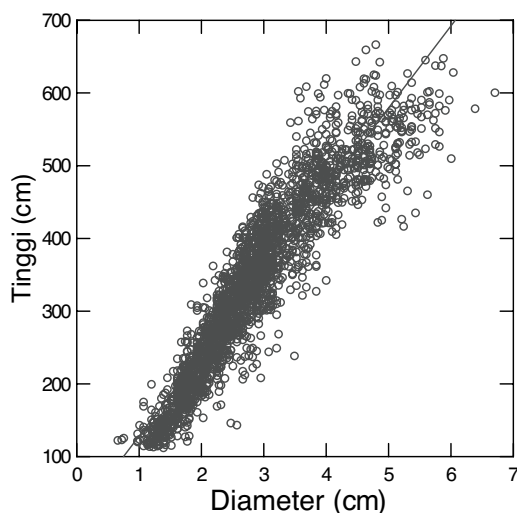
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan karet pada tanah gambut, yang cenderung kurang subur, memang lebih rendah dibandingkan pada tanah mineral. Namun dengan pengelolaan yang baik maka performanya dapat meningkat menyamai hasil yang didapatkan pada tanah mineral.

Hubungan diameter dan tinggi tidak menunjukkan variasi yang tinggi pada awal-awal pertumbuhan (Gambar 4). Hubungan *allometric* antara diameter tinggi cukup



Gambar 3. *Least Squares Means* untuk kategori tanah 'Gambut' dan 'Mineral' dikombinasikan dengan tipe manajemen. Tanah mineral menunjukkan rata-rata riap yang lebih tinggi dibandingkan tanah gambut pada kondisi manajemen yang cukup dan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada kondisi manajemen yang baik.

penting untuk melihat potensi kompetisi karet terhadap pohon dan tanaman lain, terutama pada sistem agroforestri. Hubungan ini dapat dipakai sebagai acuan untuk mengetahui berapa lama kebun karet masih dapat disisipi dengan tanaman penyla sebelum karet tersebut terlalu kompetitif karena bertambah tinggi dan menaungi yang lain.



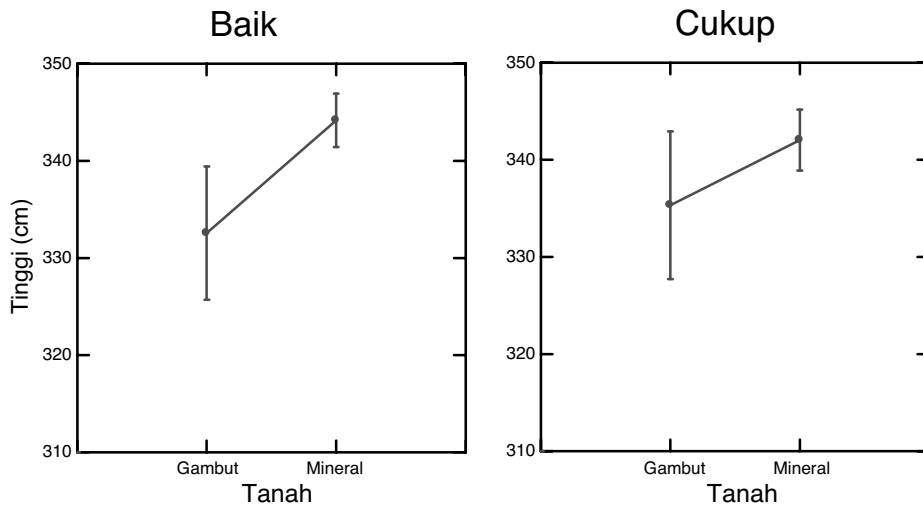
Gambar 4. Diameter tanaman karet berkorelasi positif dengan tingginya, dan menunjukkan tidak terlalu banyak variasi pada perbedaan tanah dan manajemen.

Hasil ANCOVA menunjukkan pengaruh tanah yang cukup signifikan ($P < 0,01$) pada hubungan diameter-tinggi, dan tidak ada pengaruh dari tipe manajemen dalam hal ini (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil ANCOVA dari hubungan diameter-tinggi karet terhadap faktor Tanah dan Manajemen ($R^2 = 0,862$)

Faktor	Sum of Square	df	Mean Squares	F-ratio	p-value
Tanah	22.603,056	1	22.603,056	10,744	0,001
Manajemen	25,716	1	25,716	0,012	0,912
Tanah*Manajemen	1.626,311	1	1.626,311	0,773	0,379
Diameter	26.363.896,982	1	26.363.896,982	12.531,212	0,000
Error	4.815.731,944	2.289	2.103,858		

Tinggi tanaman karet pada tanah mineral menunjukkan rata-rata rasio lebih tinggi dibandingkan pada tanah gambut (Gambar 5).



Gambar 5. *Least Squares Means* untuk hubungan diameter-tinggi pada kategori tanah 'Gambut' dan 'Mineral' dikombinasikan dengan tipe manajemen. Tinggi tanaman karet pada tanah mineral menunjukkan rata-rata rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada tanah gambut.

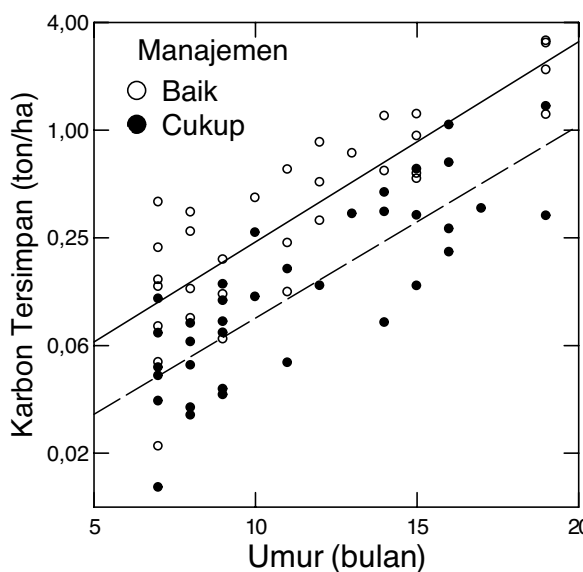
Dengan manajemen pengelolaan kebun yang baik maka dapat dihasilkan performa pertumbuhan karet yang tinggi, baik pada tanah gambut maupun mineral. Namun pada tanah mineral pertumbuhan tinggi karet menunjukkan performa yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa akumulasi biomasa lebih banyak terjadi pada tanah mineral dibandingkan pada tanah gambut, terlepas dari manajemen pengelolaan kebun yang diterapkan. Namun biomasa tersebut lebih banyak dialokasikan untuk pertumbuhan tinggi pohon.

Perubahan dinamika biomasa yang dikonversi menjadi karbon yang tersimpan pada plot karet ditunjukkan pada Gambar 6. Hasil ANCOVA dari hubungan umur dan stok karbon dapat dilihat pada Tabel 4 ($R^2=0,758$). Analisa karbon yang tersimpan dari 68 data menunjukkan pengaruh yang cukup tinggi dari tipe Manajemen ($P<0,001$). Dan jenis tanah tidak terlalu berpengaruh pada dinamika karbon tersimpan. Hal ini mungkin disebabkan karena data untuk memisahkan kategori ini (gambut 5 plot dan mineral 20 plot) tidak cukup banyak.

Tabel 4. Hasil ANCOVA dari hubungan umur-karbon tersimpan terhadap faktor Tanah dan Manajemen ($R^2=0,758$)

Faktor	Sum of Square	df	Mean Squares	F-ratio	p-value
Tanah	0,002	1	0,002	0,004	0,948
Manajemen	13,720	1	13,720	32,739	0,000
Tanah*Manajemen	1,304	1	1,304	3,112	0,083
Umur	64,982	1	64,982	155,068	0,000
Error	26,401	63	0,419		

Karbon tersimpan menunjukkan rata-rata yang lebih tinggi pada plot yang dikelola dengan baik (Gambar 6). Hingga umur 1,5 tahun, karbon tersimpan pada plot yang dikelola dengan baik bisa mencapai 3 t/ha, tiga kali lebih banyak dibandingkan jika tidak dikelola dengan baik.



Gambar 6. Hubungan umur dan karbon tersimpan pada plot karet. Untuk diperhatikan, X axis menggunakan skala log. Manajemen yang baik menghasilkan karbon tersimpan yang lebih tinggi

Rata-rata penyerapan karbon per tahun pada agroforestri karet dengan manajemen yang baik berarti sekitar 2 t/ha/tahun atau sekitar 7 t CO₂/ha/tahun penyerapan emisi. Ini masih jauh dibawah laju emisi dari dekomposisi gambut sekitar 18 t CO₂/ha/tahun pada perkebunan karet (Agus dan Subiksa 2008). Atau bahkan hanya sekitar 2,5 t CO₂/ha/tahun jika pengelolaannya kurang baik.

Penutup

Lahan gambut termasuk lahan yang kurang subur (Agus dan Subiksa 2008). Hal ini sejalan dengan hasil yang diperlihatkan disini dimana pada lahan gambut pertumbuhan karet 25% lebih rendah dibandingkan pada lahan mineral. Namun dengan manajemen pengelolaan baik ditunjukan bahwa performa karet pada lahan gambut dapat menyamai performa karet pada lahan mineral. Hal ini menunjukan bahwa lahan gambut dapat digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, namun harus dengan perlakuan khusus sehingga dapat menghasilkan performa yang sama pada lahan mineral.

Jika dilihat dari pertumbuhan dan allometrik tinggi individual pohon, maka penyerapan biomasa terjadi lebih banyak pada karet di lahan mineral. Namun

biomasa tersebut lebih banyak dialokasikan pada tinggi pohon. Manajemen yang baik menunjukkan pertumbuhan diameter yang baik pada lahan gambut, namun pohonnya cenderung lebih pendek dibandingkan dengan pada tanah mineral.

Manajemen pengelolaan kebun yang baik terlihat lebih berpengaruh daripada perbedaan jenis tanah pada performa agroforestri karet. Peningkatan performa 25% pada riap pertumbuhan karet menghasilkan karbon tersimpan tiga kali lipat lebih banyak pada plot yang dikelola dengan baik. Namun rata-rata penyerapan karbon sebanyak 2 t/ha/tahun atau sekitar 7 t CO₂/ha/tahun penyerapan emisi, masih dibawah rata-rata emisi karbon dari dekomposisi gambut untuk lahan perkebunan karet (Agus dan Subiksa 2008).

Daftar Pustaka

- Agus F, Hairiah K, Mulyani A. 2011. Pengukuran Cadangan Karbon Tanah Gambut. Petunjuk Praktis. World Agroforestry Centre-ICRAF, SEA Regional Office dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Bogor, Indonesia. 58 p.
- Agus F, Subiksa IGM. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk pertanian dan aspek lingkungan. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre, Bogor. 36p.
- Chave J, Andalo C, Brown S, Cairns MA, Chambers JQ, Eamus D, Folster H, Fromard F, Higuchi N, Kira T, Lescure JP, Nelson BW, Ogawa H, Puig H, Riera B, Yamakura T. 2005. Tree allometry and improved estimation of carbon stocks and balance in tropical forests. *Oecologia* 145: 87–99.
- Maswar. 2010. Kajian Cadangan Karbon Pada Lahan Gambut Tropika Yang Didrainase Untuk Tanaman Tahunan. Disertasi Doktor, Program Studi Ilmu Tanah, Institut Pertanian Bogor.
- Minkinen K, Laine J. 1998. Long-term effect of forest drainage on the peat carbon stores of pine mires in Finland. *Can. J. For. Res* 28: 1267-1275.
- Hargreaves KJ, Milne R, Cannell MGR. 2003. Carbon balance of afforested peatland in Scotland. *Forestry*, Vol. 76, No. 3: 299-317.

Pengelolaan Lahan Gambut

Fahmuddin Agus¹, I. GM. Subiksa¹ dan Wahyunto²

¹Balai Penelitian Tanah, Bogor

²Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor

Pendahuluan

Meningkatnya kebutuhan akan sumberdaya lahan, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan produk pertanian, menyebabkan perluasan lahan pertanian terjadi tidak hanya pada lahan yang sesuai, tetapi juga pada lahan yang dulunya dianggap sebagai lahan marjinal ataupun lahan sisa (*wasteland*). Lahan gambut adalah salah satu contoh lahan marjinal yang dewasa ini dijadikan tumpuan perluasan lahan pertanian. Di Povinsi Riau, misalnya, sekitar 57% (1.831.193 ha) hutan gambut sudah hilang dalam 25 tahun terakhir antara tahun 1982 dan 2007 (WWF 2008). Konversi serupa juga bisa terjadi di Provinsi Aceh pada lahan gambutnya seluas 0,27 juta ha karena situasi keamanan dalam beberapa tahun terakhir ini lebih baik sehingga lebih kondusif untuk berbisnis

Tingginya konversi hutan gambut menjadi lahan pertanian menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktifis lingkungan. Ini disebabkan karena lahan gambut merupakan penyimpan karbon (C) yang sangat besar. Setiap satu meter ketebalan tanah gambut menyimpan sekitar 300 sampai lebih dari 700 t C/ha (Agus dan Subiksa 2008). Dalam keadaan hutan alami, lahan gambut berfungsi sebagai penambat (*sequester*) karbon sehingga berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca di atmosfer, walaupun proses penambatan berjalan sangat pelan hanya setinggi 0 – 3 mm gambut per tahun (Parish dkk 2007) atau setara dengan penambatan 0 - 5,4 t CO₂/ha/tahun (Agus 2009). Apabila hutan gambut ditebang dan diberi drainase, maka karbon yang tersimpan dalam gambut mudah teroksidasi menjadi gas CO₂ (salah satu Gas Rumah Kaca atau GRK terpenting). Selain itu apabila hutan gambut dibuka, dengan mudah akan mengalami penurunan permukaan (*subsiden*). Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dan perencanaan yang matang apabila akan mengkonversi hutan gambut.

Selain sebagai penyimpan karbon, ekosistem lahan gambut sangat penting dalam sistem hidrologi kawasan hilir suatu DAS karena gambut mampu menyerap air sampai 13 kali lipat dari bobotnya. Dengan demikian lahan gambut berfungsi sebagai

penyangga (*buffer*) air. Artinya, pada musim hujan lahan gambut menyimpan air dalam jumlah besar dan pada musim kemarau air yang disimpan tersebut dilepas secara perlahan-lahan.

Bab ini menguraikan tentang sifat gambut, penggunaannya untuk pertanian, serta pengelolaannya untuk mengurangi emisi GRK dan mengoptimalkan tingkat manfaatnya. Uraian yang berkenaan dengan pengelolaan lahan gambut, tidak spesifik untuk keadaan Aceh tapi berlaku untuk lahan gambut sejenis, terutama lahan gambut di pantai barat Sumatera.

Definisi, Pembentukan dan Sifat Gambut

Definisi

Lahan gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik (C-organik >18%) (USDA 2010). Secara umum dalam klasifikasi tanah, tanah gambut dikenal sebagai Organosol atau Histosols. Tanah ini memiliki lapisan bahan organik dengan berat jenis (BD) dalam keadaan lembab <0,1 g/cm³ dengan tebal >60 cm atau lapisan organik dengan BD >0,1 g/cm³ dengan tebal >40 cm (Soil Survey Staff 2003).

Bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi jenuh air. Oleh karenanya lahan gambut banyak dijumpai di daerah rawa belakang (*back swamp*) atau daerah cekungan yang drainasenya buruk.

Pembentukan

Pembentukan gambut diduga terjadi antara 10.000-5.000 tahun yang lalu (pada periode Holosin) dan gambut di Indonesia terjadi antara 6.800 - 4.200 tahun yang lalu (Andriess 1994). Proses pembentukan gambut dimulai dari adanya cekungan atau danau dangkal yang secara perlahan ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah dari pinggirnya. Tanaman yang mati dan melapuk secara bertahap membentuk lapisan yang kemudian menjadi lapisan transisi antara lapisan gambut dengan substratum (lapisan di bawahnya) berupa tanah mineral. Tanaman berikutnya tumbuh pada bagian yang lebih tengah dari danau dangkal ini dan secara bertahap membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga danau tersebut menjadi penuh.

Bagian gambut yang tumbuh mengisi danau dangkal tersebut disebut dengan gambut topogen karena proses pembentukannya ditentukan oleh topografi berupa cekungan yang menciptakan keadaan jenuh air. Gambut topogen biasanya relatif subur karena

adanya pengkayaan tanah mineral, misalnya jika ada banjir besar. Tanaman tertentu tumbuh subur di atas gambut topogen dan pelapukannya menambah tebal gambut tersebut yang lama kelamaan membentuk kubah (*dome*) gambut yang permukaannya cembung. Gambut yang tumbuh di atas gambut topogen dikenal dengan gambut ombrogen, karena pembentukannya ditentukan oleh air hujan. Gambut ombrogen lebih rendah kesuburannya dibandingkan dengan gambut topogen karena hampir tidak ada pengkayaan mineral. Pada umumnya, semakin tipis tanah gambut maka semakin tinggi kesuburannya dan sebaliknya semakin tebal gambut, terutama pada bagian kubah, maka semakin rendah kesuburannya, terutama bila lapisan bawah dari gambut tersebut terdiri dari pasir kwarsa.

Jenis

Gambut dikelompokkan berdasarkan tingkat kematangan, pembentukan, ketebalan dan kesuburannya. Berdasarkan tingkat kematangannya, gambut dibedakan menjadi:

1. Gambut saprik (matang) adalah gambut yang sudah melapuk lanjut dan bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam, dan bila diremas dengan tangan, kandungan seratnya yang tertinggal di telapak tangan <15%.
2. Gambut hemik (setengah matang) adalah gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan bila diremas bahan seratnya 15 - 75%.
3. Gambut fibrik (mentah) adalah gambut yang belum melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan bila diremas >75% seratnya masih tersisa.

Berdasarkan tingkat kesuburannya, gambut dibedakan menjadi:

1. Gambut eutrofik adalah gambut yang relatif subur yang kaya akan bahan mineral dan basa-basa serta unsur hara lainnya. Gambut yang relatif subur biasanya adalah gambut yang tipis dan dipengaruhi oleh sedimen sungai atau laut.
2. Mesotrofik adalah gambut yang agak subur karena memiliki kandungan mineral dan basa-basa sedang.
3. Gambut oligotrofik adalah gambut yang tidak subur karena miskin mineral dan basa-basa. Bagian kubah gambut dan gambut tebal yang jauh dari pengaruh lumpur sungai biasanya tergolong gambut oligotrofik.
4. Gambut di Indonesia sebagian besar tergolong gambut mesotrofik dan oligotrofik (Radjagukguk 1997). Gambut eutrofik di Indonesia hanya sedikit dan umumnya tersebar di daerah pantai dan di sepanjang jalur aliran sungai. Tingkat kesuburan

gambut ditentukan oleh kandungan bahan mineral dan basa-basa, bahan substratum/dasar gambut dan ketebalan lapisan gambut. Gambut di Sumatera relatif lebih subur dibandingkan dengan gambut di Kalimantan.

Berdasarkan lingkungan pembentukannya, gambut dibedakan atas:

1. Gambut ombrogen yaitu gambut yang terbentuk pada lingkungan yang hanya dipengaruhi oleh air hujan.
2. Gambut topogen yaitu gambut yang terbentuk di lingkungan yang mendapat pengayaan air pasang. Dengan demikian gambut topogen akan lebih kaya mineral dan lebih subur dibandingkan dengan gambut ombrogen.

Berdasarkan kedalamannya gambut dibedakan menjadi:

1. Gambut dangkal (50 – 100 cm).
2. Gambut sedang (100 – 200 cm).
3. Gambut dalam (200 – 300 cm).
4. Gambut sangat dalam (>300 cm).

Berdasarkan proses dan lokasi pembentukannya, gambut dibagi menjadi:

1. Gambut pantai, adalah gambut yang terbentuk dekat pantai laut dan mendapat pengayaan mineral dari air laut.
2. Gambut pedalaman, adalah gambut yang terbentuk di daerah yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut tetapi hanya oleh air hujan.
3. Gambut transisi, adalah gambut yang terbentuk di antara kedua wilayah tersebut, yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh air pasang laut.

Sifat Fisik

Sifat fisik gambut yang penting dalam pemanfaatannya untuk pertanian meliputi kadar air, kerapatan lindak tanah (*bulk density*/BD), daya menahan beban (*bearing capacity*), penurunan permukaan (*subsiden*), dan sifat mengering tidak balik (*irreversible drying*).

Kadar air tanah gambut berkisar antara 100 – 1.300% dari berat keringnya (Mutalib dkk 1991). Artinya bahwa gambut mampu menyerap air sampai 13 kali bobotnya. Kadar air yang tinggi menyebabkan BD menjadi rendah, gambut menjadi lembek dan daya menahan bebannya rendah (Nugroho dkk 1997, Widjaja-Adhi 1997). BD



Gambar 1. Akar tanaman yang menggantung di atas permukaan tanah merupakan bukti adanya *subsiden* gambut

tanah gambut lapisan atas bervariasi antara 0,1 sampai 0,2 g cm⁻³ tergantung pada tingkat dekomposisinya. Gambut dengan tingkat kematangan fibrik mempunyai BD lebih rendah dari 0,1 g/cm³, tapi gambut pantai dan gambut di jalur aliran sungai bisa mempunyai BD > 0,2 g/cm³ (Tie dan Lim 1991) karena adanya pengaruh tanah mineral.

Volume gambut akan menyusut bila lahan gambut diberi drainase, sehingga terjadi penurunan permukaan tanah (*subsiden*). Selain karena penyusutan volume, *subsiden* juga terjadi karena adanya proses dekomposisi dan erosi. Dalam 2 tahun pertama setelah lahan gambut diberi drainase, laju *subsiden* bisa mencapai 50 cm. Pada tahun berikutnya laju *subsiden* sekitar 2 – 6 cm/tahun tergantung kematangan gambut dan kedalaman saluran drainase. Adanya *subsiden* bisa dilihat dari akar tanaman yang menggantung (Gambar 1).

Rendahnya BD gambut menyebabkan daya menahan atau menyangga beban (*bearing capacity*) menjadi sangat rendah. Hal ini menyulitkan beroperasinya peralatan mekanis karena tanahnya yang empuk. Gambut juga tidak bisa menahan pokok tanaman tahunan untuk berdiri tegak. Tanaman perkebunan seperti karet, kelapa sawit atau kelapa seringkali doyong atau bahkan roboh.

Sifat fisik tanah gambut lainnya adalah sifat mengering tidak balik (*irreversible drying*). Gambut yang telah mengering, dengan kadar air <100% (berdasarkan berat kering), tidak bisa menyerap air kembali kalau dibasahi. Gambut yang mengering ini sifatnya sama dengan kayu kering yang mudah hanyut dibawa aliran air dan mudah terbakar dalam keadaan kering (Widjaja-Adhi 1988). Gambut yang terbakar menghasilkan energi panas yang lebih besar dari kayu atau arang terbakar. Gambut yang terbakar juga sulit dipadamkan dan apinya bisa merambat di bawah permukaan sehingga kebakaran lahan bisa meluas tidak terkendali.

Sifat Kimia

Karakteristik kimia lahan gambut di Indonesia sangat ditentukan oleh kandungan mineral, ketebalan, jenis mineral pada substratum (di dasar gambut), dan tingkat dekomposisi gambut. Kandungan mineral gambut di Indonesia umumnya kurang dari 5% dan sisanya adalah bahan organik. Fraksi organik terdiri dari senyawa-senyawa humat sekitar 10 hingga 20% dan sebagian besar lainnya adalah senyawa lignin, selulosa, hemiselulosa, lilin, tannin, resin, suberin, protein, dan senyawa lainnya.

Lahan gambut umumnya mempunyai tingkat kemasaman yang relatif tinggi dengan kisaran pH 3.5. Gambut oligotropik, seperti banyak ditemukan di Kalimantan, mempunyai kandungan kation basa seperti Ca, Mg, K, dan Na sangat rendah terutama bila gambutnya tebal. Semakin tebal gambut, basa-basa yang dikandungnya semakin rendah dan reaksi tanah menjadi semakin masam (Driessen dan Suhardjo 1976). Kapasitas Tukar Kation (KTK) gambut tergolong tinggi, namun Kejenuhan Basa (KB) sangat rendah (<10%) (Suhardjo dan Widjaja-Adhi 1976).

Muatan negatif (yang menentukan KTK) pada tanah gambut seluruhnya adalah muatan tergantung pH (*pH dependent charge*). KTK akan naik bila pH gambut ditingkatkan dan sebaliknya. Oleh karenanya penetapan KTK menggunakan pengekstrak amonium acetat pH 7 akan menghasilkan nilai KTK yang tinggi, sedangkan penetapan KTK dengan pengekstrak amonium klorida (pada pH aktual) akan menghasilkan nilai yang lebih rendah. KTK tinggi menunjukkan kapasitas jerapan (*sorption capacity*) gambut tinggi, namun kekuatan jerapan (*sorption power*) lemah, sehingga kation-kation K, Ca, Mg dan Na yang tidak membentuk ikatan koordinasi akan mudah tercuci.

Secara alamiah lahan gambut memiliki tingkat kesuburan rendah karena kandungan unsur haranya rendah dan mengandung beragam asam-asam organik yang sebagian bersifat racun bagi tanaman. Namun asam-asam tersebut merupakan bagian aktif dari tanah yang menentukan kemampuan gambut untuk menahan unsur hara. Karakteristik dari asam-asam organik ini akan menentukan sifat kimia gambut. Untuk mengurangi pengaruh buruk asam-asam organik yang beracun dapat dilakukan dengan menambahkan bahan-bahan yang banyak mengandung kation polivalen seperti Fe, Al, Cu dan Zn. Kation-kation tersebut membentuk ikatan koordinasi dengan ligan organik membentuk senyawa kompleks/khelat (Sabiham dkk 1997, Saragih 1996).

Tanah gambut juga mengandung unsur mikro yang sangat rendah dan diikat cukup kuat (khelat) oleh bahan organik sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Kondisi reduksi yang kuat pada gambut menyebabkan unsur mikro direduksi ke bentuk

yang tidak dapat diserap tanaman. Kandungan unsur mikro pada tanah gambut dapat ditingkatkan dengan menambahkan tanah mineral atau menambahkan pupuk mikro.

Gambut di Indonesia (dan di daerah tropis lainnya) mempunyai kandungan lignin yang lebih tinggi dibandingkan dengan gambut yang berada di daerah beriklim sedang, karena terbentuk dari pohon-pohonan (Driessen dan Suhardjo 1976). Lignin yang mengalami proses degradasi dalam keadaan anaerob akan terurai menjadi senyawa humat dan asam-asam fenolat (Kononova 1968). Asam-asam fenolat dan derivatnya bersifat fitotoksik (meracuni tanaman) dan menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat (Driessen 1978, Stevenson 1994, Rachim 1995). Asam fenolat merusak sel akar tanaman, sehingga asam-asam amino dan bahan lain mengalir keluar dari sel, menghambat pertumbuhan akar dan serapan hara sehingga pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, daun mengalami klorosis (menguning) dan pada akhirnya tanaman akan mati. Turunan asam fenolat yang bersifat fitotoksik antara lain adalah asam ferulat, siringat, p-hidroksibenzoat, vanilat, p-kumarat, sinapat, suksinat, propionat, butirat, dan tartrat (Dr. Wiwik Hartatik dan Dr. Diah Setyorini, komunikasi pribadi 2008).

Sebaran Lahan Gambut di Provinsi Aceh

Di Provinsi Aceh, lahan gambut didominasi oleh gambut saprik dan hemik dengan luas total 267.150 ha dan tersebar di 6 kabupaten (Tabel 1). Bila diurutkan dari kabupaten dengan lahan gambut terluas, maka berturut-turut: Aceh Selatan (29,4%), Aceh Singkil (23,7%), Nagan Raya (22,5%), Aceh Barat (9,7%), Aceh Barat Daya (9,3%) dan Aceh Jaya (5,5%).

Berdasarkan ketebalannya, lahan gambut di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan menjadi gambut dangkal (tebal <100 cm) sekitar 18,1%, gambut sedang (tebal 100 - <200 cm) sekitar 55,4%, gambut dalam (200-300 cm) sekitar 9,2% dan gambut sangat dalam (>300 cm) sekitar 17,5%. Penyebaran lahan gambut Provinsi Aceh disajikan pada Gambar 2.



Tabel 1. Lahan gambut di Provinsi Aceh

No.	Simbol	Ketebalan (cm)	Kematanagan Gambut	Proporsi (%)	Luas (ha)					Jumlah (ha)	Jumlah (%)	
					Aceh Jaya	Aceh Barat	Nagan Raya	Aceh Barat Daya	Aceh Selatan			Aceh Singkil
1	H1b	50-100	Hemists/Mineral	60/40	-	-	-	-	5.247	324	5.571	2,1
2	S1a	50-100	Sapristis/Hemists	60/40	853	-	-	-	10.631	2.757	14.241	5,3
3	S0a	50-100	Sapristis/mineral	50/50	1.821	-	14.321	12.517	-	-	28.659	10,7
4	S1d	100-200	Sapristis/ Mineral	90/10	-	3.738	-	-	-	-	3.738	1,4
5	H2a	100-200	Hemists/Sapristis	60/40	-	-	10.440	1.543	-	-	11.983	4,5
6	H2b	100-200	Hemists/Mineral	60/40	-	-	6.502	3.957	5.642	9.043	25.144	9,4
7	S2a	100-200	Sapristis/Hemists	60/40	10.996	5.926	12.967	3.082	37.273	35.168	105.412	39,5
8	S2d	100-200	Sapristis/Mineral	90/10	-	1.164	-	-	-	-	1.164	0,4
9	H3a	200-300	Hemists/Sapristis	60/40	949	1.289	13.100	3.635	5.641	-	24.614	9,2
10	S3a	>300	Sapristis/Hemists	60/40	-	13.882	2.803	-	14.038	15.901	46.624	17,5
Jumlah (Ha)					14.619	25.999	60.133	24.734	78.472	63.193	267.150	100,0
Jumlah (persen)					5,5	9,7	22,5	9,3	29,4	23,7	100,0	.

Sumber: diolah dari Wahyunto dkk 2005

Simpanan carbon (*carbon stock*) gambut dapat dihitung dengan rumus :

$$SC = BD \times A \times D \times C$$

Dimana: SC = Simpanan karbon (ton), BD = kerapatan lindak tanah dalam $t\ m^{-3}$, A= luas tanah gambut dalam m^2 , D= ketebalan gambut (m) dan C = kadar karbon organik dalam satuan t C per ton gambut kering. Nilai BD dan kandungan C-organik merupakan nilai rata-rata hasil analisis contoh tanah gambut pada setiap jenis/tingkat kematangan tanah gambut. Bulk Density (BD) tanah gambut di Aceh adalah: Fibrik = 0,10 – 0,12 gr/cc; Hemik = 0,12 – 0,22 gr/cc dan Saprik = 0,22-0,27 gr/cc. Kandungan C-organik adalah: Fibrik = 32,5 – 41,3%; Hemik = 40,2-49,6% dan Saprik = 38,9 – 63,8% (Wahyunto dkk 2005).

Cadangan karbon (C) pada lahan gambut seluas 267.150 ha di Aceh terhitung sebesar 482,5 juta ton (Tabel 2). Besarnya cadangan karbon pada lahan gambut tidak hanya ditentukan oleh luas gambut, tetapi juga tergantung tingkat kematangan (*degree of decomposition*) dan ketebalan gambutnya. Umumnya semakin tebal dan matang gambutnya (*high decomposed*) cadangan karbonnya semakin tinggi.

Potensi dan Pengelolaan Lahan Gambut

Potensi dan Pengelolaan Lahan Gambut untuk Tanaman Semusim

Lahan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan adalah gambut tipis (<100 cm) karena memiliki tingkat kesuburan relatif lebih tinggi dan memiliki resiko lingkungan lebih rendah dibandingkan gambut dalam. Lahan gambut dengan kedalaman 1,4 - 2 m tergolong sesuai marjinal (kelas kesesuaian S3) untuk berbagai jenis tanaman pangan semusim. Faktor pembatas utama adalah kondisi media perakaran dan unsur hara yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman. Tanaman pangan yang mampu beradaptasi antara lain padi, jagung, kedelai, ubi kayu, kacang panjang dan berbagai jenis sayuran lainnya (BB Litbang SDLP 2008).

Budi daya tanaman pangan di lahan gambut harus menerapkan teknologi pengelolaan air, yang disesuaikan dengan karakteristik gambut dan jenis tanaman. Pembuatan saluran drainase mikro sedalam 10-50 cm diperlukan untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman pangan pada lahan gambut. Tanaman padi sawah pada lahan gambut hanya memerlukan parit sedalam 10-30 cm. Fungsi drainase adalah untuk membuang kelebihan air, menciptakan keadaan tidak jenuh untuk pernapasan akar tanaman, dan untuk mencuci sebagian asam-asam organik. Semakin pendek interval/jarak antar parit drainase maka hasil tanaman semakin tinggi. Namun perlu diingat bahwa walaupun drainase penting untuk pertumbuhan tanaman, semakin dalam saluran drainase dibuat akan semakin cepat laju *subsiden* dan dekomposisi gambut.

Tabel 2. Cadangan karbon pada lahan gambut di Provinsi Aceh

No.	Sim- bol	Ketebalan (cm)	Kema- tang an Gambut	Pro porsi (%)	Aceh Jaya	Aceh Barat	Nagan Raya	Cadangan Karbon (ton)	Aceh Selatan	Aceh Singkil	Jumlah (ton)	Juml (%)
1	H1b	50-100	Hemists/ Mineral	60/40	-	-	-	-	1.620.693	120.092	1.740.785	0,4
2	S1a	50-100	Sapristis/ Hemists	60/40	1.577.357	-	-	-	8.610.645	2.239.401	12.427.403	2,6
3	S0a	50-100	Sapristis/ mineral	50/50	2.949.861	-	3.877.460	3.107.470	-	-	9.934.791	2,1
4	S1d	100-200	Hemists/ Sapristis	90/10	-	1.760.462	-	-	-	-	1.760.462	0,4
5	H2a	100-200	Hemists/ Sapristis	60/40	-	-	15.606.273	2.835.242	-	-	18.441.515	3,8
6	H2b	100-200	Hemists/ Mineral	60/40	-	-	4.820.010	6.409.994	4.182.482	6.703.684	22.116.170	4,6
7	S2a	100-200	Sapristis/ Hemists	60/40	32.758.403	9.599.602	24.427.941	5.000.051	60.379.006	57.131.143	189.296.146	39,2
8	S2d	100-200	Sapristis/ Mineral	90/10	-	1.318.509	-	-	-	-	1.318.509	0,3
9	H3a	200-300	Hemists/ Sapristis	60/40	871.887	3.840.085	39.165.169	13.443.596	16.864.940	-	74.185.677	15,4
10	S3a	>300	Sapristis/ Hemists	60/40	-	45.042.647	9.107.063	-	45.480.668	51.663.007	151.293.385	31,4
Jumlah (ton)					38.157.508	61.561.305	97.003.916	30.796.353	137.138.434	117.857.327	482.514.843	100,0
Jumlah (persen)					7,9	12,8	20,1	6,4	28,4	24,4	100,0	-

Sumber: diolah dari Wahyunto dkk 2005

Untuk meningkatkan kesuburan gambut diperlukan upaya ameliorasi. Kapur, tanah mineral, pupuk kandang dan abu sisa pembakaran dapat diberikan sebagai bahan amelioran untuk meningkatkan pH dan basa-basa tanah (Subiksa dkk 1997, Mario 2002, Salampak 1999, Tabel 3). Tidak seperti tanah mineral, pH tanah gambut cukup ditingkatkan sampai 5 karena gambut tidak memiliki potensi Al yang beracun. Peningkatan pH sampai tidak lebih dari 5 dapat memperlambat laju dekomposisi gambut. Pengaruh buruk asam-asam organik beracun juga dapat dikurangi dengan menambahkan bahan-bahan amelioran yang banyak mengandung kation polivalen seperti terak baja, tanah mineral laterit atau lumpur sungai (Salampak 1999, Sabiham dkk 1997). Pemberian tanah mineral berkadar besi tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman padi (Mario 2002, Salampak 1999, Suastika 2004, Subiksa dkk 1997).

Tabel 3. Dosis anjuran dan manfaat pemberian amelioran pada tanah gambut

Jenis amelioran	Dosis (t/ha/tahun)	Manfaat
Kapur	1 – 2	Meningkatkan basa-basa dan pH tanah
Pupuk kandang	5 – 10	Memperkaya unsur hara makro/mikro
Terak baja	2 – 5	Mengurangi fitotoksik asam organik, meningkatkan efisiensi pupuk P
Tanah mineral	10 – 20	Mengurangi fitotoksik asam organik, meningkatkan kadar hara makro dan mikro, besi dan Al yang dikandungnya membentuk kelat dengan asam organik sederhana sehingga dekomposisi gambut diperlambat.
Abu	10 – 20	Meningkatkan basa-basa, dan pH tanah
Lumpur sungai	10 – 20	Mengurangi fitotoksik asam organik, meningkatkan basa-basa, unsur hara

Keterangan: Beberapa amelioran dapat menggantikan fungsi amelioran lainnya. Misalnya, dengan pemberian kapur, pemberian abu dapat dikurangi dan sebaliknya.

Jenis pupuk yang diperlukan adalah yang mengandung N, P, K, Ca dan Mg. Walaupun KTK gambut tinggi, daya pegangnya rendah terhadap kation yang dapat dipertukarkan sehingga pemupukan harus dilakukan beberapa kali (*split application*) dengan dosis rendah agar hara tidak banyak tercuci. Penggunaan pupuk yang tersedianya lambat seperti fosfat alam akan lebih baik dibandingkan dengan SP36, karena akan lebih efisien, harganya murah dan dapat meningkatkan pH tanah (Subiksa dkk 1991). Penambahan kation polivalen seperti Fe dan Al akan menciptakan tapak jerapan bagi ion fosfat sehingga bisa mengurangi kehilangan hara P melalui pencucian (Rachim 1995).

Tanah gambut juga kahat (kekurangan) unsur mikro karena diikat (diikat) oleh bahan organik (Rachim 1995). Oleh karenanya diperlukan pemupukan unsur mikro seperti terusi (sumber Cu), magnesium sulfat dan seng sulfat masing-masing 15 kg/

ha/tahun, mangan sulfat 7 kg/ha/tahun, sodium molibdat dan borax masing-masing 0,5 kg/ha/tahun. Kekurangan unsur mikro dapat menyebabkan kehampaan pada tanaman padi, tongkol kosong pada jagung atau polong hampa pada kacang tanah.

Karena keterbatasan akses dan kemampuan untuk mendapatkan pupuk dan bahan amelioran, maka petani biasanya membakar serasah tanaman dan sebagian lapisan gambut kering sebelum bertanam. Praktek ini dapat ditemukan di kalangan petani yang menanam sayuran dan tanaman pangan secara tradisional. Dengan cara ini petani mendapatkan amelioran berupa abu yang dapat memperbaiki produktivitas gambut. Namun abu hasil pembakaran mudah hanyut dan efektivitasnya terhadap peningkatan kesuburan tanah tidak berlangsung lama. Lagi pula cara ini bisa memicu kebakaran hutan dan lahan secara lebih luas, mempercepat *subsiden*, meningkatkan emisi CO₂ dan mendatangkan asap yang mengganggu kesehatan serta mempengaruhi lalu lintas.

Untuk menghindari kebakaran, maka pembakaran serasah harus dilakukan secara terkendali di satu tempat khusus berupa lubang yang dilapisi dengan tanah mineral sehingga api tidak sampai membakar gambut. Cara ini diterapkan dengan baik di lahan gambut di Pontianak, Kalimantan Barat. Bila pembakaran serasah harus dilakukan langsung di lapangan, maka harus dipastikan bahwa gambut di bawahnya jenuh air supaya gambutnya tidak ikut terbakar.

Dalam jangka panjang pembakaran serasah dan gambut perlu dicegah untuk menjaga keberlangsungan pertanian di lahan gambut. Untuk itu diperlukan bimbingan cara bertani tanpa bakar dan pemberian bantuan amelioran serta pupuk bagi petani.

Potensi dan Pengelolaan Lahan Gambut untuk Tanaman Tahunan

Lahan gambut dengan ketebalan antara 1,4-2,0 m tergolong sesuai marjinal (kelas kesesuaian S3) untuk beberapa tanaman tahunan seperti karet dan kelapa sawit, sedangkan gambut yang tipis termasuk agak sesuai (kelas kesesuaian S2). Gambut dengan ketebalan 2-3 m tidak sesuai untuk tanaman tahunan kecuali jika ada sisipan/pengkayaan lapisan tanah atau lumpur mineral (Djainudin dkk 2003). Gambut yang relatif tipis (<100 cm) dan subur juga dapat ditanami dengan tanaman kopi dan kakao dengan saluran drainase sedalam 30-50 cm. Gambut dengan ketebalan >3m diperuntukkan sebagai kawasan konservasi sesuai dengan Keputusan Presiden No. 32/1990 dan Permentan 14/2009. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan lahan gambut dalam yang rapuh (*fragile*) apabila dikonversi menjadi lahan pertanian.

Reklamasi gambut untuk pertanian tanaman tahunan memerlukan jaringan drainase makro yang dapat mengendalikan tata air dalam satu wilayah dan drainase mikro untuk mengendalikan tata air di tingkat lahan. Sistem drainase yang tepat dan

benar sangat diperlukan pada lahan gambut, baik untuk tanaman pangan maupun perkebunan. Sistem drainase yang tidak tepat akan mempercepat kerusakan lahan gambut. Salah satu komponen penting dalam pengaturan tata air lahan gambut adalah bangunan pengendali berupa pintu air di setiap saluran. Pintu air berfungsi untuk mengatur muka air tanah supaya tidak terlalu dangkal dan tidak terlalu dalam.

Tanaman tahunan memerlukan saluran drainase dengan kedalaman berbeda-beda. Tanaman karet memerlukan saluran drainase mikro sekitar 20 cm, tanaman kelapa sedalam 30-50 cm, sedangkan tanaman kelapa sawit memerlukan saluran drainase sedalam 50-80 cm. Semakin dalam saluran drainase semakin cepat terjadi penurunan permukaan (*subsiden*) dan dekomposisi gambut sehingga ketebalan gambut akan cepat berkurang dan daya sangganya terhadap air menjadi menurun.

Jika lahan gambut digunakan untuk perkebunan sagu atau nipah, pembuatan saluran drainase tidak diperlukan karena kedua jenis tanaman ini merupakan tanaman rawa yang toleran terhadap genangan. Sagu dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat selain beras. Tanaman nipah menghasilkan nira, bahan baku gula dengan rendemen tinggi dan kualitas yang tidak kalah dibandingkan gula aren.

Unsur hara utama yang perlu ditambahkan untuk berbagai tanaman tahunan di lahan gambut terutama adalah unsur P dan K. Tanpa unsur tersebut pertumbuhan tanaman sangat merana dan hasil tanaman yang diperoleh sangat rendah. Sedangkan unsur hara lainnya seperti N dibutuhkan dalam jumlah yang relatif rendah karena bisa tersedia dari proses dekomposisi gambut.

Aspek Lingkungan Lahan Gambut

Lahan gambut hanya meliputi 3% dari luas daratan di seluruh dunia, namun menyimpan 550 Gigaton C atau setara dengan 30% karbon tanah, 75% dari seluruh karbon atmosfer, setara dengan seluruh karbon yang dikandung biomassa (massa total makhluk hidup) daratan dan setara dengan dua kali simpanan karbon hutan di seluruh dunia (Joosten 2007). Lahan gambut menyimpan karbon pada biomassa tanaman, serasah di bawah hutan gambut, lapisan gambut dan lapisan tanah mineral di bawah gambut (*substratum*). Dari berbagai simpanan tersebut, lapisan gambut dan biomassa tanaman menyimpan karbon dalam jumlah tertinggi.

Lahan gambut menyimpan karbon yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanah mineral. Di daerah tropis karbon yang disimpan tanah dan tanaman pada lahan gambut bisa lebih dari 10 kali karbon yang disimpan oleh tanah dan tanaman pada tanah mineral (Tabel 4). Karbon yang tersimpan pada lahan gambut relatif stabil (bertahan sebagai karbon bahan organik tanah dan jaringan tanaman) bila lahan gambut berada dalam keadaan hutan alam. Kehilangan karbon dalam jumlah

relatif kecil terjadi dalam bentuk CH₄. Apabila hutan gambut dibuka dan diberi drainase untuk berbagai keperluan, maka karbon yang disimpannya akan mudah teremisi dalam bentuk CO₂; gas rumah kaca utama. Besar kecilnya emisi ditentukan oleh kedalaman drainase, pemupukan dan suhu lingkungan.

Tabel 4. Kandungan karbon di atas permukaan tanah (dalam biomassa tanaman) dan di bawah permukaan tanah pada hutan gambut dan hutan tanah mineral (t/ha).

Komponen	Hutan gambut (tC/ha)	Hutan primer tanah mineral (tC/ha)
Atas permukaan tanah	150-200	200-350
Bawah permukaan tanah	300-7.000	30-300

Konversi hutan dan pengelolaan lahan gambut, terutama yang berhubungan dengan drainase dan pembakaran, merubah fungsi lahan gambut dari penambat karbon menjadi sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Lahan hutan yang terganggu (yang kayunya baru ditebang secara selektif) dan terpengaruh drainase, emisinya meningkat tajam, bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan emisi dari lahan pertanian yang juga diberi drainase. Hal ini disebabkan oleh banyaknya bahan organik segar yang mudah terdekomposisi pada hutan terganggu.

Bentuk intervensi manusia yang sangat mempengaruhi fungsi lingkungan lahan gambut adalah penebangan hutan gambut, pembakaran hutan gambut dan drainase untuk berbagai tujuan; baik untuk pertanian, kehutanan (hutan tanaman industri), maupun untuk pemukiman. Pembakaran atau kebakaran gambut tidak saja mempercepat emisi dari jaringan tanaman, tapi juga bisa mengakibatkan terbakarnya lapisan tanah gambut. Agus dkk (2009) menguraikan proses emisi dan metode penghitungan emisi dari lahan gambut dan lahan mineral.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penyusutan luasan gambut di beberapa tempat di Indonesia. Di kawasan Delta Pulau Petak pada tahun 1952 masih tercatat sekitar 51.360 ha lahan gambut. Pada tahun 1972 kawasan gambut di daerah tersebut menyusut menjadi 26.400 ha dan selanjutnya pada tahun 1992 menyusut lagi menjadi 9.600 ha (Sarwani dan Widjaja-Adhi 1994). Hal ini menunjukkan bahwa laju kerusakan gambut berjalan sangat cepat. Selain hilangnya fungsi hidrologis lahan gambut, bila tanah mineral di bawah lapisan gambut mengandung pirit, ada bahaya sulfat masam yang disebabkan teroksidasinya pirit. Lahan sulfat masam mempunyai pH sangat rendah (<3) merupakan lahan yang tidak bisa ditanami dan menjadi sumber pencemaran lingkungan perairan di daerah sekitarnya.

Untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, diperlukan konservasi kawasan gambut. Widjaja-Adhi (1997) menyarankan agar wilayah ekosistem lahan gambut dibagi menjadi 2 kawasan yaitu: kawasan non-budi daya dan kawasan budi daya. Kawasan non-budi daya terdiri dari (a) jalur hijau sepanjang pantai dan tanggul sungai dan (b) areal tampung hujan yang luasnya minimal 1/3 dari seluruh kawasan.

Kawasan yang dijadikan sebagai areal tampung hujan adalah bagian kubah gambut (*peat dome*) sehingga harus menjadi kawasan konservasi. Kubah gambut berfungsi sebagai penyimpan air (*resevoir*) yang bisa mensuplai air bagi wilayah di sekitarnya, terutama pada musim kemarau, baik untuk air minum maupun usaha tani. Pada musim hujan kawasan ini berfungsi sebagai penampung air sehingga mengurangi risiko banjir bagi wilayah di sekitarnya. Hal ini dimungkinkan karena gambut memiliki daya memegang air sangat besar yaitu sampai 13 kali bobot keringnya.

Apabila dikelola dengan baik dan benar lahan gambut bisa mendatangkan keuntungan ekonomi dan sekaligus mempertahankan karbon yang tersimpan serta memelihara keanekaragaman hayati. Pemanfaatan lahan gambut dengan merubah ekosistemnya tidak menjamin keuntungan ekonomi, bahkan seringkali mendatangkan kerugian bagi masyarakat, seperti yang terjadi pada lahan bekas Pembukaan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Selatan.

Untuk konservasi lahan gambut diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dengan menempuh langkah berikut:

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut

Hutan dan lahan gambut dapat terbakar karena kesengajaan atau ketidaksengajaan. Faktor pemicu parahnya kebakaran hutan dan lahan gambut adalah musim kemarau yang ekstrim (misalnya pada tahun-tahun El-Nino) dan/atau penggalian drainase lahan gambut secara berlebihan. Api dapat dicegah melalui perbaikan sistem pengelolaan air (meninggikan muka air tanah), peningkatan kewaspadaan terhadap api serta pengendalian api apabila terjadi kebakaran.

Sistem pertanian tradisional di beberapa lahan gambut, memakai praktek pembakaran sebagai salah satu cara untuk menyuburkan tanah. Praktek tersebut dilakukan karena petani tidak mempunyai sarana untuk mendapatkan pupuk dan/atau amelioran untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dengan adanya kendala tersebut, petani perlu dibantu untuk menerapkan sistem alternatif yang tidak melibatkan pembakaran gambut.

Penanaman Kembali dengan Tanaman Penambat Karbon Tinggi (Tanaman Pohon-Pohonan) di Lahan Gambut

Tanaman pohon-pohonan menyumbangkan karbon lebih tinggi dibandingkan tanaman semusim. Penambatan karbon mendekati nol pada sistem padi dan sekitar 9 t CO₂/ha/tahun untuk tanaman sagu, karet atau kelapa sawit. Kelapa sawit memerlukan drainase yang relatif dalam sehingga netto (*net*) penambatan karbon oleh tanaman ini untuk di lahan gambut biasanya negatif. Penambatan oleh tanaman jauh lebih rendah dibandingkan dengan emisi yang dikarenakan terdekomposisinya gambut. Dengan demikian, gabungan dari tanaman yang menambat CO₂ dalam jumlah banyak serta yang toleran dengan drainase dangkal atau tanpa drainase, seperti sagu dan karet, merupakan pilihan utama dalam konservasi lahan gambut (terutama kubah gambut yang produktivitasnya rendah).

Pengaturan Tinggi Muka Air Tanah di Lahan Gambut

Penggunaan lahan yang memerlukan drainase dangkal seperti perkebunan karet, sagu, atau sawah dapat mengurangi jumlah emisi dibandingkan dengan sistem yang memerlukan drainase dalam. Selain itu lahan yang sudah terlanjur diberi drainase, apalagi belukar atau padang rumput yang terlantar, perlu dinaikkan kembali muka air tanahnya, misalnya dengan membuat pintu air sehingga proses dekomposisi aerob dapat dikurangi.

Memfaatkan Lahan Gambut Berupa Semak Belukar yang Terlantar

Sebagian lahan gambut yang sudah diambil hasil kayunya ditinggal sebagai lahan yang terlantar yang ditutupi paku resam atau semak belukar. Lahan terlantar ini perlu diprioritaskan untuk perluasan areal pertanian.

Pemberian Insentif pada Konservasi Gambut

Lahan gambut dulunya dianggap sebagai lahan sisa (*wasteland*). Dengan perbaikan pengelolaan lahan, lahan gambut bisa menjadi lahan yang sangat produktif. Tanaman yang umum ditanami pada lahan gambut adalah kelapa sawit, karet sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini berarti bila lahan gambut dikonservasi ada biaya yang disebut *opportunity cost* (hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan) yang ditanggung oleh pemilik lahan. Mengkonservasi gambut merupakan pemberian jasa publik (berupa pengurangan emisi, pemeliharaan fungsi hidrologi dan keanekaragaman hayati), namun saat ini *opportunity cost* ditanggung secara pribadi oleh pemilik lahan.

Pada lahan gambut yang sesuai untuk perkebunan kelapa sawit, petani berpeluang untuk mendapatkan keuntungan bersih (*net present value/ NPV*) antara Rp. 216.000,- hingga Rp. 2.076.000,-/ha/tahun pada tingkat suku bunga 15% dengan kisaran harga minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) antara Rp. 6.000,- hingga Rp. 10.000,-/kg. Bila lahan dipertahankan sebagai hutan gambut sehingga karbon yang disimpannya dapat dipertahankan, pemilik lahan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan (*opportunity cost*) senilai Rp. 216.000,- hingga Rp. 2.076.000,-/ha/tahun (Herman dkk 2009). Dengan demikian tidak adil apabila pemilik lahan yang mengkonservasi gambut tidak mendapatkan kompensasi untuk mengganti kerugiannya.

Kompensasi tersebut dapat diberikan melalui mekanisme perdagangan karbon atau melalui mekanisme insentif lokal dan nasional.

Mekanisme Perdagangan Karbon di bawah PBB

Forum Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Penanggulangan Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) tengah merumuskan mekanisme imbalan untuk jasa konservasi karbon melalui mekanisme yang disebut dengan REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Degradation*) atau pengurangan emisi dari konversi hutan (deforestasi) dan degradasi hutan. Apabila tercapai kesempatan di kalangan negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) maka REDD+ diharapkan akan menjadi kelanjutan dari Kyoto Protocol yang masa berlakunya akan berakhir pada tahun 2012. Selain REDD+, kelihatannya mekanisme seperti AR-CDM (Penghijauan dan penghutanan kembali sebagai Mekanisme Pembangunan Bersih/*Aforestation Reforestation – Clean Development Mechanism*) akan tetap penting sehingga mekanisme pembayaran jasa karbon akan merupakan gabungan dari mekanisme REDD+ dan AR-CDM.

Mekanisme REDD+ ataupun AR-CDM merupakan perjanjian jangka panjang dengan banyak persyaratan. Perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat dalam skim REDD+ pada saat ini harus dipatuhi oleh pemerintah dan masyarakat yang akan datang selama masa berlakunya perjanjian tersebut. REDD+ juga mensyaratkan tidak terjadinya kebocoran (*leakage*) yaitu meningkatnya konversi lahan pada tempat lain akibat pembatasan pembukaan lahan pada suatu tempat. Jika perjanjian dilakukan pada suatu kabupaten, harus ada jaminan bahwa di kabupaten lain tidak terjadi peningkatan konversi lahan di atas tingkat referensi (*Reference Emission Level/ REL*). Apabila ada pelanggaran terhadap isi perjanjian, maka pelanggar dikenakan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian. Dengan demikian diperlukan kehati-hatian sebelum pemerintah dan masyarakat mengikat diri dalam perjanjian karbon. Jika pemerintah dan masyarakat yang ada sekarang tidak yakin bahwa

pemerintah dan masyarakat yang akan datang bisa mentaati perjanjian, sebaiknya tidak terburu-buru mengikat diri dalam perjanjian ini.

Mekanisme Insentif Bilateral dan Unilateral

Kerusakan hutan dan lahan gambut sebenarnya bukan semata-mata masalah internasional, tetapi juga merupakan masalah yang sangat berpengaruh di tingkat nasional, regional dan lokal. Pada keadaan tertentu dua negara bisa membuat perjanjian untuk mencapai suatu tujuan penurunan emisi.

Pemerintah Indonesia mencanangkan untuk mengurangi emisi secara unilateral sampai 26% dari tingkat *bussiness as usual* (BAU) pada tahun 2020 (dalam hal ini BAU dijadikan sebagai REL). Bahkan apabila didukung pendanaan yang cukup dari luar negeri, target penurunan emisi Indonesia meningkat menjadi 41% dari tingkat BAU pada tahun 2020. *Letter of Intent* (LOI) antara Indonesia dengan Norwegia merupakan contoh mekanisme bilateral untuk mengurangi emisi.

Daftar Pustaka

- Agus F, Runtunuwu E, June T, Susanti E, Komara H, Syahbuddin H, Las I dan van Noordwijk M. 2009. Carbon budget in land use transitions to plantation. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 29(4): 119–126.
- Agus F dan Subiksa IGM. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan (Peatland: Potential for Agriculture and the Environmental Aspects). Booklet. Balai Penelitian Tanah (Indonesian Soil Research Institute) dan World Agroforestry Centre (ICRAF) SE Asia, Bogor, Indonesia.
- Agus F. 2009. Cadangan karbon, emisi gas rumah kaca dan konservasi lahan gambut. *Prosiding Seminar Dies Natalis Universitas Brawidjaya ke 46*, 31 Januari 2009, Malang.
- Andriesse JP. 1994. Constraints and opportunities for alternative use options of tropical peat land. In Aminuddin BY (Ed.). *Tropical Peat; Proceedings of International Symposium on Tropical Peatland*, 6-10 May 1991, Kuching, Sarawak, Malaysia.
- BB Litbang SDLP (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. 2008. Laporan Tahunan 2008, Konsorsium Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor.

- Djaenudin D, Marwan H, Subagjo H dan Hidayat A. 2003. Petunjuk Teknis Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Pertanian. Balai Penelitian Tanah, Bogor.
- Driessen PM. 1978. Peat soils. pp: 763-779. In: IRRI. Soil and Rice. IRRI. Los Banos. Philippines.
- Driessen PM, dan Suhardjo H. 1976. On the defective grain formation of sawah rice on peat. Soil Res. Inst. Bull. 3: 20 – 44.
- Herman et al dan Agus F. 2009. Analisis finansial dan opportunity cost emisi CO₂ dari perkebunan kelapa sawit. Laporan Tahunan 2008, Konsorsium Litbang Perubahan Iklim Sektor Pertanian. Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, Bogor.
- Joosten H. 2007. Peatland and carbon. pp. 99-117 In. Parish, F, Siri, A., Chapman, D., Joosten H., Minayeva, T., dan Silvius M (eds.) Assessment on Peatland, Biodiversity and Climate Change. Global Environmental Centre, Kuala Lumpur dan Wetland International, Wageningen.
- Kononova MM. 1968. Transformation of organic matter and their relation to soil fertility. Sov. Soil. Sci. 8:1047-1056.
- Mario MD. 2002. Peningkatan Produktivitas dan Stabilitas Tanah Gambut dengan Pemberian Tanah Mineral yang Diperkaya oleh Bahan Berkadar Besi Tinggi. Disertasi Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Mutalib AAa, Lim JS, Wong MH dan Koonvai L. 1991. Characterization, distribution and utilization of peat in Malaysia. Proc. International Symposium on Tropical Peatland. 6-10 May 1991, Kuching, Serawak, Malaysia.
- Nugroho K, Gianinazzi G dan Widjaja-Adhi IPG. 1997. Soil hydraulic properties of Indonesian peat. In: Rieley dan Page (Eds.). pp. 147-156 In Biodiversity and Sustainability of Tropical Peat and Peatland. Samara Publishing Ltd. Cardigan. UK.
- Parish F, Sirin A, Charman D, Joosten H, Minayeva T, Silvius M, dan Stringer L (Eds.). 2007. Assessment on Peatlands, Biodiversity and Climate Change: Main Report. Global Environment Centre, Kuala Lumpur dan Wetlands International, Wageningen.
- Rachim A. 1995. Penggunaan Kation-kation Polivalen dalam Kaitannya dengan Ketersediaan Fosfat untuk Meningkatkan Produksi Jagung pada Tanah Gambut. Disertasi. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

- Radjagukguk B. 1997. Peat soil of Indonesia: Location, classification, and problems for sustainability. In: Rieley dan Page (Eds.). pp. 45-54. Biodiversity and Sustainability of Tropical Peat and Peatland. Samara Publishing Ltd. Cardigan. UK.
- Sabiham S, Prasetyo TB dan Dohong S. 1997. Phenolic acid in Indonesian peat. In: Rieley dan Page (Eds.). pp. 289-292. Biodiversity and Sustainability of Tropical Peat and Peatland. Samara Publishing Ltd. Cardigan. UK.
- Salampak. 1999. Peningkatan Produktivitas Tanah Gambut yang Disawahkan dengan Pemberian Bahan Amelioran Tanah Mineral Berkadar Besi Tinggi. Disertasi Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Saragih ES. 1996. Pengendalian Asam-Asam Organik Meracun dengan Penambahan Fe (III) pada Tanah Gambut Jambi, Sumatera. Tesis S2. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sarwani M dan Widjaja Adhi IPG. 1994. Penyusutan lahan gambut dan dampaknya terhadap produktivitas lahan pertanian di sekitarnya. Kasus Delta Pulau Petak, Kalimantan Selatan. Prosiding Seminar Nasional 25 Tahun Pemanfaatan Lahan Gambut dan Pengembangan Kawasan Pasang Surut. Jakarta, 14-15 Desember 1994.
- Soil Survey Staff. 2003. Key to Soil Taxonomy. 9th Edition. United States Department of Agriculture. Natural Resources Conservation Service.
- Stevenson FJ. 1994. Humus Chemistry. Genesis, Composition, and Reactions. John Wiley and Sons. Inc. New York. 443 p.
- Suastika IW. 2004. Efektivitas Amelioran Tanah Mineral Berpirit yang Telah Diturunkan Kadar Sulfatnya pada Peningkatan Produktivitas Tanah Gambut. Tesis S2. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Subiksa IGM, Nugroho K, Sholeh dan Widjaja Adhi IPG. 1997. The effect of ameliorants on the chemical properties and productivity of peat soil. In: Rieley dan Page (Eds). Pp:321-326. Biodiversity and Sustainability of Tropical Peatlands. Samara Publishing Limited, UK.
- Suhardjo H dan Widjaja-Adhi IPG. 1976. Chemical characteristics of the upper 30 cm of peat soils from Riau. ATA 106. Bull. 3: 74-92. Soil Res. Inst. Bogor.
- Tie YL dan Lim JS. 1991. Characteristics and classification of organic soils in Malaysia. Proc. International Symposium on Tropical Peatland. 6-10 May 1991, Kuching, Serawak, Malaysia.

- Wahyunto, Ritung S, Suparto dan Subagjo. 2005. Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Sumatera dan Kalimantan. Wetland International Indonesian Programme. Jalan Ahmad Yani 53 Bogor. Indonesia.
- Widjaja-Adhi IPG. 1988. Physical and chemical characteristic of peat soil of Indonesia. Ind. Agric. Res. Dev. J. 10:59-64.
- Widjaja-Adhi IPG. 1997. Developing tropical peatlands for agriculture. In: Rieley JO dan Page SE (Eds.). pp. 45-54. Biodiversity and sustainability of tropical peat and peatland. Proceedings of the International Symposium on Biodiversity, Environmental Importance and Sustainability of Tropical Peat and Peatlands, Palangka Raya, Central Kalimantan 4-8 September 1999. Samara Publishing Ltd. Cardigan. UK.
- WWF. 2008. Deforestation, forest degradation, biodiversity loss and CO₂ emission in Riau, Sumatera, Indonesia: one Indonesian province's forest and peat soil carbon loss, over a quarter century and it's plans for the future. WWF Indonesia Technical Rep.

Evaluasi Kesesuaian dan Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk Pertanian Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh

Wahyunto dan Fahmuddin Agus

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor

Pendahuluan

Dalam sistem pertanian tradisional, petani cenderung memilih jenis tanaman yang cocok, dan pada tahap selanjutnya memutuskan apakah akan tetap memelihara tanaman tersebut atau menggantinya dengan tanaman yang lebih sesuai dan lebih menguntungkan. Tenaga ahli di bidang evaluasi lahan, berdasarkan penelitian bertahun-tahun mengkorelasikan pertumbuhan tanaman dengan faktor iklim dan sifat-sifat tanah untuk pewilayahan kesesuaian tanaman berdasarkan basis data tanah dan iklim. Berdasarkan basis data yang terpercaya dan pengetahuan tentang kesesuaian lahan seseorang dapat memilih lahan berdasarkan tanaman yang sesuai atau memilih daerah di mana tanaman tertentu sesuai untuk dikembangkan (Wahyunto dkk 2008).

Informasi kesesuaian lahan untuk berbagai pilihan tanaman pangan dan tanaman tahunan sangat diperlukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Data dan informasi ini baik berupa data tabular maupun peta dapat menjadi masukan dalam perencanaan penggunaan lahan tingkat kabupaten serta memberikan pilihan keragaman tanaman dalam tata guna lahan. Untuk tujuan evaluasi kesesuaian lahan, lahan gambut atau sering disebut “kubah gambut” dibedakan antara gambut tebal (≥ 3 m) yang tidak direkomendasikan untuk pertanian dan gambut dengan ketebalan < 3 m yang pada umumnya sesuai marginal untuk pertanian, karena adanya resiko lingkungan bila dialihfungsikan dari hutan (Agus dan Subiksa 2008). Penilaian dan evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman pertanian (pangan dan tahunan) pada tulisan ini, mengacu pada buku Ritung dkk (2007) yang menguraikan tentang pendekatan dan metode evaluasi lahan dan tidak hanya terpusat untuk tanaman tahunan, tetapi juga tanaman semusim.

Rekomendasi penggunaan lahan, memberikan berbagai pilihan jenis tanaman pada setiap satuan peta tanah (SPT atau *SMU/Soil Map Unit*) berdasarkan karakteristik

tanah dan iklimnya. Rekomendasi mencakup wilayah yang telah digunakan untuk berbagai tanaman dan juga lahan terlantar yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sistem pertanian yang produktif. Dalam penerapannya, dari pilihan tanaman yang disarankan perlu dipilih lagi agar sesuai dengan kebutuhan pasar, status lahan, dan arah perencanaan pembangunan pertanian di daerah tersebut. Tulisan ini membahas tentang kesesuaian lahan Kabupaten Aceh Barat untuk Pertanian.

Keadaan Umum Kabupaten Aceh Barat

Menurut Oldeman dkk (1979) wilayah kabupaten Aceh Barat termasuk ke dalam zona A (dengan bulan basah >9 bulan dan tanpa bulan kering) dan zona B (dengan bulan basah 7-9 bulan dan kurang dari dua bulan kering). Secara umum semakin kearah pantai barat curah hujannya semakin tinggi. Di sekitar Kota Meulaboh, curah hujan bulanan rata-rata mencapai >200 mm dengan puncak musim hujan terjadi pada bulan April dan Oktober. Zona B menempati wilayah antara pantai barat yang basah dan dataran sebelah timurnya serta sebagian besar lereng Bukit Barisan. Curah hujan bulanan, dan jumlah hari hujan berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Bandar Udara Cut Nyak Dien, Kabupaten Nagan Raya disajikan pada Tabel 1. Fluktuasi suhu udara rata-rata bulanan dalam setahun kecil. Perbedaan suhu antara bulan terpanas (sekitar Mei dan Nopember-Desember) dan bulan terdingin (Januari dan Juni) kurang dari 2°C. Variasi suhu udara umumnya berkaitan dengan ketinggian tempat dari permukaan laut.

Jumlah curah hujan dan penyebarannya serta suhu udara rata-rata tahunan merupakan faktor iklim yang penting dalam evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan. Umumnya pada fase pertumbuhan vegetatif, tanaman memerlukan air lebih banyak dibandingkan masa pembungaan dan pemasakan biji/buah. Sebagai contoh, untuk tanaman mangga, diperlukan beberapa bulan kering (curah hujan bulanan <100 mm) yang berurutan untuk fase pembungaan, pembentukan dan pematangan buah. Bulan basah didefinisikan sebagai bulan dengan curah hujan rata-rata bulanan ≥ 200 mm, dan bulan kering mempunyai rata-rata curah hujan bulanan ≤ 200 mm (Oldeman dkk 1979). Dalam satu musim tanam untuk padi sawah tadah hujan, paling tidak diperlukan bulan basah selama 2 bulan berturut-turut, untuk jagung dan kacang tanah diperlukan curah hujan rata-rata bulanan antara 100-200 mm dan idealnya dengan distribusi yang merata. Tanaman semusim lahan kering lainnya seperti kacang hijau dan kacang tunggak toleran terhadap keadaan lebih kering.

Tabel 1. Jumlah curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Aceh Barat, 2005-2006

B u l a n	Curah Hujan (mm)		Hari Hujan	
	2005	2006	2005	2006
Januari	.*	295	-	14
Februari	-	135	-	17
Maret	-	351	-	13
April	358	401	20	17
Mei	240	171	15	14
Juni	297	181	16	13
Juli	290	94	14	12
Agustus	246	179	17	11
September	265	464	12	19
Oktober	398	473	23	20
November	486	405	24	24
Desember	283	548	31	21
Jumah	2.866	3.702	172	195
Rata-rata	318	308	19	16

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2006, berdasarkan pengamatan di Stasiun Meteorologi dan Geofisika Bandar Udara Cut Nyak Dhien.

*Catatan : - = tidak ada data

Dalam sistem Taksonomi Tanah, tanah-tanah dipilah dalam berbagai tingkatan klasifikasi (kategori), dari kategori tinggi dengan generalisasi paling umum sampai kategori rendah dengan generalisasi sifat tanah yang sangat detil, urutan kategorinya adalah ordo, sub-ordo, group, subgroup, famili dan seri tanah (Soil Survey Staff 1975 dan 1999).

Berdasarkan sistem klasifikasi tersebut, di daerah tropis lembab (*tropic humid*) di Indonesia terdapat 10 ordo tanah, yaitu (1)Histosols, (2)Entisols, (3)Inceptisols, (4)Vertisols, (5)Andisols, (6)Alfisols, (7)Mollisols, (8)Ultisols, (9)Oxisols, dan (10) Spodosols atau menurut sistem klasifikasi tanah nasional (Dudal Soepraptohardjo 1961) setara dengan tanah-tanah gambut atau Organosol, Regosol, Aluvial, Grumusol, Andosol, Mediteran, Podsolik dan Laterik . Dari 10 ordo tanah yang ditemukan penyebarannya di Indonesia, 5 ordo yaitu Entisols, Inceptisols, Histosols, Ultisols dan Mollisols atau setara dengan tanah gambut/ Organosol, Regosol, Aluvial, Podsolik dan Mediteran, didapatkan di kabupaten Aceh Barat.

Entisols di Aceh Barat kecuali pasir pantai resen umumnya berada dalam kondisi jenuh air (mempunyai daya dukung/*bearing capacity* yang rendah). Inceptisols terbentuk dalam kondisi lingkungan yang lebih kering dengan kedalaman air tanah (*ground water*) sekitar 40 cm atau lebih dalam, yang memungkinkan berlangsungnya proses pelapukan (oksidasi dan perkembangan struktur tanah).

Histosols, adalah tanah yang terbentuk dari endapan bahan organik dalam kondisi jenuh air dan berada di daerah cekungan, dan bisa menciptakan ketebalan gambut yang berkisar antara 0,5 – 3 m, ditengah kubahnya ada yang mencapai ketebalan lebih dari 3 m bahkan di beberapa tempat ada yang mencapai 9 m. Tingkat kematangan gambut mulai dari mentah (serat-serat tumbuhan masih tampak – Fibrik), sedang (sebagian serat-serat telah melapuk – Hemik), dan matang (serat-serat sudah sangat sedikit – Saprik).

Inceptisols, terdapat di wilayah datar sampai berombak yang posisinya berada di belakang dataran aluvial atau kubah gambut, berkembang dari bahan aluvium dan marin muda (*recent sediment*). Ultisols terdapat di wilayah bergelombang, perbukitan dan pegunungan yang berkembang dari bahan batuliat dan batupasir yang sebagian lapisan bawahnya berupa bahan endapan marin purba yang mengalami pengangkatan (*uplifted*). Lebih dari 60% daerah ini merupakan kawasan lindung.

Didaerah bergunung yang berasal dari bahan volkan tua, terdapat tanah-tanah Ultisols berasosiasi dengan tanah Inceptisols yang bersolum dangkal dan berbatu (*lithic group*). Tanah Mollisols terdapat pada daerah-daerah perbukitan kapur, yang dicirikan oleh solum tanah yang dangkal <25 cm dan banyak singkapan batuan kapur.

Penggunaan lahan didaerah marin sekitar pantai dan dataran sekitar jalur aliran sungai umumnya ditumbuhi semak dan belukar, beberapa tempat digunakan untuk permukiman dan pekarangan, kebun campuran termasuk kebun karet dan kelapa sawit. Kubah gambut didominasi oleh hutan dan belukar rawa gambut, di beberapa tempat telah dibuka untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. Daerah dataran dan pelebahan, didominasi hutan rawa dan sebagian digunakan untuk persawahan. Di bagian lereng bawah daerah perbukitan, sebagian besar digunakan untuk pertanian lahan kering dan kebun campuran, juga perkebunan (kelapa sawit dan karet), sedangkan lereng bagian tengah dan atas umumnya masih berupa hutan. Hampir sebagian besar daerah pegunungan masih berupa hutan alami.

Penggunaan lahan, jenis-jenis tanah utama dan karakteristiknya di Kabupaten Aceh Barat disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat

Tipe penggunaan lahan	Luas (ha)
Sawah	41.538
Irigasi teknis	1.391
Irigasi semi teknis	10.380
Irigasi tradisional	6.199
Tadah hujan	22.363
Sawah lebak	1.205
Lahan kering	251.258
Permukiman & Pekarangan	9.710
Tegalan Tanaman Pangan	36.727
Ladang	28.850
Rawa	43.340
Lahan terlantar tidak diusahakan	36.673
Kebun Campuran	21.058
Hutan, semak-belukar dan Perkebunan	74.900
JUMLAH	292.796

Sumber: Kantor Badan Pusat Statistik, Provinsi Aceh (2003).

Tabel 3. Grup fisiografi, jenis-jenis tanah dominan dan sifat-sifat utama tanah, dan penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat (diolah dari Peta Satuan Lahan dan Tanah lembar 0519 – Takengon, Darul Sukma dkk 1990)

Grup Fisiografi	Sub-grup	Tanah	Kedalaman, kemasaman, tekstur tanah	Penggunaan lahan
Alluvial (endapan halus dan kasar/	Dataran aluvial (peralihan ke marin)	Hydraquepts, Endoaquepts, Endoaquepts	Dalam-sangat dalam, agak masam, halus	Sawah, tambak, rawa-rawa
	Dataran banjir	Endoaquepts, Endoaquepts, Fluventic Eutrudepts	Dalam-sangat dalam, agak masam- netral, agak kasar-halus	Sawah, semak, belukar
	Teras sungai	Dystrudepts, Fluventic Eutrudepts, Endoaquepts	Dalam-sangat dalam, masam- netral, agak halus-halus	Sawah, pemukiman, tegalan
	Rawa belakang sungai	Endoaquepts, Endoaquepts	Sangat dalam, masam, halus	Hutan, semak, belukar

Marine (bahan halus dan kasar)	Beting pantai dan rawa belakang pantai	Udipsamments Hydraquents	Dalam-sangat dalam, netral, agak kasar- bergambut	Kebun kelapa, permukiman, sawah, semak, belukar
	Dataran pasang surut	Hydraquents Sulfaquents Endoaquepts Fluvaquents	Sangat dalam, netral, agak kasar - halus	Semak, belukar, hutan rawa
	Dataran estuari	Fluvaquents, Halaquepts,	Sangat dalam, netral, agak kasar- halus	Hutan manggrove, hutan rawa
	Dataran pantai	Udi Psamments Endoaquepts, Eutrudepts	Sangat dalam, netral, agak kasar-agak halus	Tambak, permukiman, sawah, semak, belukar
	Teras marin	Dystrudepts, Eutrudepts Endoaquepts	Dalam-sangat dalam, masam-netral, agak halus	Tegalan, kebun campuran
Kubah Gambut (Bahan organik)	Kubah gambut oligotrofik air tawar	Haplosaprists Haplohemists	Tanah gambut, tebal 0,5 - >6 m, tingkat kematangan: saprist, hemists, fibrists	Hutan rawa, belukar rawa, karet rakyat, kebun kelapa sawit, sayuran
Tectonic (bahan halus dan kasar)	Dataran berombak- bergelombang, tertoreh	Hapludults Endoaquepts	Dalam-sangat dalam, masam, halus	Hutan, karet rakyat, kebun sawit, belukar, kebun campuran
	Dataran bergelombang dan perbukitan, tertoreh, lereng 15-40%	Hapludults Dystrudepts Endoaquepts	Dalam-agak dalam, agak masam-netral, agak kasar-halus	Semak- belukar, hutan tanaman industri, tegalan
	Pegunungan tertoreh, lereng >40%	Hapludults Dystrudepts	Agak dalam, masam-netral, halus-kasar	Hutan lindung, agroforestri
Karstic (batu kapur)	Berbukit- bergunung, lereng >60%	Eutrudepts Haprendolls Batuan kukuh	Dangkal, netral-basis, halus-berbatu	Hutan lindung
Volcanic/ Dyke (Vokanic intermedier)	Berbukit –bergunung lereng >60%	Dystrudepts Batuan kukuh	Dangkal-agak dalam, masam-netral, halus- berbatu	Hutan Lindung

Metode Pendekatan Evaluasi Lahan

Kegiatan dan proses evaluasi lahan dilakukan melalui tahap-tahap : (1) analisis citra satelit dan pengolahan data pendukung untuk identifikasi karakteristik lahan, (2) survei dan pengamatan lapang, serta pengambilan contoh tanah perwakilan, (3) analisis contoh tanah untuk mengetahui sifat kimia dan kesuburan tanah, (4) kompilasi informasi persyaratan tumbuh tanaman pertanian, pengolahan data karakteristik tanah, lingkungan, sifat kimia dan kesuburan tanah serta penyesuaian (*matching*) antara karakteristik lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman, dan (5) pemilihan (*screening*) alternatif tanaman yang sesuai untuk menyusun rekomendasi penggunaan lahan. Syarat tumbuh tanaman untuk berbagai tanaman komoditas pertanian mengacu pada bahan pustaka yang ada seperti Djaenudin dkk 2003. Penyesuaian antara karakteristik lahan pada setiap satuan peta (*mapping unit*) dengan persyaratan tumbuh tanaman dilakukan dengan bantuan perangkat lunak komputer, yaitu menggunakan paket program *Automated Land Evaluation System* – ALES (Rossiter dan van Wambeke 1997 dan 1995). Kriteria dan indikator yang digunakan untuk evaluasi kesesuaian lahan disajikan pada Tabel 4. Evaluasi dengan bantuan perangkat lunak komputer akan memberikan hasil yang sangat cepat walaupun banyak tanaman yang dievaluasi, serta dapat menghindari subyektivitas.

Evaluasi kesesuaian lahan ditentukan berdasarkan faktor pembatas terberat seperti disajikan pada Tabel 5. Misalnya, jika suatu lahan pH-nya sangat rendah dan termasuk dalam kelas Sesuai marginal (S3), walaupun karakteristik lahan lainnya termasuk kelas Sangat sesuai (S1), dan Cukup sesuai (S2), kesesuaian lahan tersebut akan termasuk kelas S3, walaupun masalah pH rendah sebetulnya masih relatif mudah diatasi. Dengan pengelolaan lahan, potensi kesesuaian lahan (*potential land suitability*) kelas sesuai marginal (S3) dapat ditingkatkan menjadi kelas cukup sesuai (S2) bahkan kelas sangat sesuai (S1). Penggunaan lahan yang direkomendasikan akan didasarkan pada kesesuaian lahan potensial.

Penyaringan dari sejumlah alternatif (*screening*) penggunaan lahan diperlukan untuk mencocokkan tanaman yang sesuai dengan prioritas rencana pembangunan wilayah kabupaten dan penggunaan lahan yang berlaku saat ini. Tanaman semusim yang direkomendasikan adalah tanaman yang dinilai sangat sesuai (S1) dan cukup sesuai (S2), sedangkan untuk tanaman tahunan yang dinilai sesuai termasuk tanaman sesuai marginal (S3) karena lebih tingginya daya lentur serta pentingnya peran tanaman tahunan untuk perlindungan kawasan pantai.

Tabel 4. Kriteria dan indikator yang digunakan untuk evaluasi kesesuaian lahan (Djaenudin dkk 2003).

Kriteria	Indikator
Temperatur/ suhu udara (tc)	Temperatur rata-rata
Ketersediaan air (wa)	Curah hujan (mm), kelembaban (%), jumlah bulan kering
Ketersediaan oksigen (oa)	Drainase
Keadaan media perakaran (rc)	Tekstur, bahan kasar, kedalaman tanah
Gambut	Ketebalan (cm), kedalaman sisipan bahan mineral, kematangan, ketebalan
Retensi hara (nr)	KTK liat (cmol+/kg), kejenuhan basa (%), pH _{H2O} , C Organik (%)
Toksistas (xc)	Salinitas (dS/m)
Sodisitas (xn)	Alkalinitas, ESP (%)
Bahaya sulfidik (xs)	Kedalaman sulfidik (cm)
Bahaya erosi (eh)	Lereng (%), erosi
Bahaya Banjir (fh)	Genangan
Penyiapan Lahan (lp)	Batuan di permukaan/ Singkapan Batuan (%)

Tabel 5. Evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman pisang

Karakteristik Lahan	Klas Kesesuaian Lahan		
	Nilai	Klas Kesesuaian Lahan Aktual	Klas Kesesuaian Lahan Potensial
Temperature (tc)		S2	S2
Temperature rata-rata (°C)	28,8	S2	S2
Ketersediaan air (wa)		S2	S2
Curah hujan (mm)	3 109	S2	S2
Jumlah Bulan Kering (bulan)	0	S1	S1
Ketersediaan Oksigen (oa)		S1	S1
Drainase	Baik	S1	S1
Kondisi Perakaran (rc)		S1	S1
Tekstur	Sic/C	S1	S1
Bahan kasar (%)	0	S1	S1
Kedalaman tanah (cm)	> 100	S1	S1
Gambut :		S1	S1
Kedalaman (cm)	0	S1	S1
Ketebalan (cm) lapisan mineral sisipan (jika ada)			
Kematangan gambut			

Retensi hara (nr)		S3	S2
KTK liat (cmol/kg)	>16	S1	S1
KejenuhanBasa (%)	< 50	S2	S1
pH H ₂ O	4,5	S3	S2
Bahan Organik C (%)	1,1	S1	S1
Toksistasitas (xc)		S1	S1
Salinitas (dS/m)	< 0,5	S1	S1
Sodisitas (xn)			
Alkalinitas/ESP (%)	-		
Bahan Sulfidik (xs)			
Kedalaman Sulfidik (cm)			
Bahaya erosi (eh)		S1	S1
Lereng (%)	3-8	S1	S1
Bahaya erosi			
Bahaya Banjir (fh)		S1	S1
Genangan	F0	S1	S1
Penyiapan lahan (lp)		S1	S1
Batuan di permukaan tanah (%)	0	S1	S1
Batuan induk/ kukuh (%)	0	S1	S1
Klas kesesuaian lahan		S3	S2

Rekomendasi Penggunaan Lahan

Tanaman Pertanian

Evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman tahunan dilakukan untuk komoditas tanaman: kelapa sawit, coklat, kopi, karet, kelapa, rambutan, mangga, manggis, durian, pisang, jeruk, nenas, nilam, pepaya, cengkeh dan duku. Evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman semusim telah dilakukan untuk tanaman: padi sawah, padi gogo, jagung, buncis, sawi, semangka, talas, kacang panjang, kacang tanah, cabai, terong, ubi jalar dan ubi kayu.

Kabupaten Aceh Barat dipetakan menjadi 57 satuan peta tanah (SPT), dimana setiap satuan peta mempunyai potensi dan kendala/faktor pembatas untuk budi daya pertanian (peta tanah disajikan dalam Gambar 1). Faktor pembatas utama yang digunakan dalam evaluasi kesesuaian lahan adalah: nr = *nutrition retention*/ kandungan hara tanah (hara rendah/kesuburan rendah); eh = *erosion hazzard*/

bahaya erosi (lereng); oa = *oxygen availability*/ketersediaan oksigen (drainase tanah); rc = *root condition*/kondisi perakaran (sub-soil berpasir); fh = *flood hazzard*/bahaya banjir (genangan air); ps = *peat soil*/tanah bergambut, dan wa = *water availability*/ketersediaan air (dipengaruhi oleh curah hujan tahunan). Hasil evaluasi kesesuaian lahan untuk setiap satuan peta tanah (SPT/SMU = *soil mapping unit*), adalah seperti berikut ini:

SPT 1, Beting pasir resen, tidak sesuai (*Not Suitable-N*) untuk tanaman pertanian. Pembatas utama adalah tanah berpasir lepas, merupakan akumulasi dari timbunan pasir dampak bencana Tsunami.

SPT 2, 3, 4, dan 5 (komplek beting pantai resen dan rawa belakang pantai di daerah marin), sesuai marginal (*Marginally suitable-S3*) untuk cokelat, kelapa, kopi, semangka dan nilam. Faktor pembatas utama diantaranya adalah kandungan hara/kesuburan rendah, lapisan tanah bawah (*sub-soil*) I berpasir, dan berair payau.

SPT 6 dan 8 (komplek beting pantai dan rawa belakang pantai resen dengan drainase terhambat, lahan ini tidak sesuai (N) untuk tanaman tahunan, tetapi cukup sesuai (*moderately suitable-S2*) untuk padi sawah. Faktor pembatas berupa luapan/genangan air pasang, kandungan hara rendah dan sub-soil berpasir

SPT 9 dan 10 (komplek beting pantai dan rawa belakang pantai sub-resen), sesuai marginal-S3 untuk tanaman cokelat, kelapa, kopi, karet, kelapa sawit, duku, rambutan, durian, mangga, jeruk dan semangka. Faktor pembatas utama diantaranya adalah kandungan hara/ kesuburan rendah dan sub-soil berpasir.

SPT 7 dan 14 (beting pantai dan rawa belakang pantai sub-resen tertutup lapisan gambut dangkal), sesuai marginal-S3 untuk karet, kelapa sawit dan padi. Faktor pembatas berupa: genangan air, kandungan hara rendah dan sub-soil berpasir.

SPT 13 (beting pantai sub resen), unit lahan ini cukup sesuai dan sesuai marginal (S2 dan S3) untuk tanaman kelapa, kopi, coklat, duku, mangga, manggis, rambutan, pisang, semangka, jagung dan kacang tanah. Faktor pembatas berupa kandungan hara rendah dan sub-soil berpasir.

SPT 15 (gambut tipis, ketebalan: 0,5-1,0 m), unit lahan ini sesuai marginal (S3) untuk tanaman karet, kelapa sawit, kelapa, sawi, terong, kacang panjang dan semangka. Faktor pembatas berupa genangan air, kandungan hara rendah dan tanah bergambut.

SPT 16 dan 17 (gambut agak tebal, ketebalan gambut :1-3 m), lahan ini sesuai marginal untuk karet, kelapa sawit dan kelapa. Faktor pembatasnya berupa genangan air dan kandungan hara rendah

SPT 18 (gambut tebal, ketebalan gambut >3 m), lahan ini tidak sesuai untuk pertanian, karena bila ekosistem lahan rawa gambut terganggu, kualitas lingkungan akan menurun drastis, disarankan untuk tetap dihutankan.

SPT 19 (tanggul sungai-*levee*), unit lahan ini cukup sesuai dan sesuai marginal (S2 dan S3) untuk tanaman cokelat, kopi, duku, durian, manggis, dan rambutan. Faktor pembatas berupa kandungan hara rendah dan luapan banjir.

SPT 11, 12, 20, 21, 22 dan 23 (rawa belakang pantai, pelembahan sungai, endapan aluvio-marin yang didominasi oleh tanah-tanah jenuh air (*aquept and aquents*), lahan ini cukup sesuai (S2) untuk padi sawah. Faktor pembatas utama berupa kandungan hara/ kesuburan tanah rendah.

SPT 24 dan 28 (dataran aluvial dan dataran tektonik berombak), kedua unit lahan ini cukup sesuai (S2) dan sesuai marginal (S3) untuk karet, kelapa sawit dan padi sawah. Faktor pembatas berupa kandungan hara rendah, drainase agak terhambat.

SPT 25, 26, 27, 29 dan 51 (dataran tektonik bergelombang dan graben), unit lahan ini sesuai marginal (S3) untuk tanaman karet, kelapa sawit, coklat, cengkeh dan pisang. Faktor pembatas berupa kandungan hara rendah dan bahaya erosi.

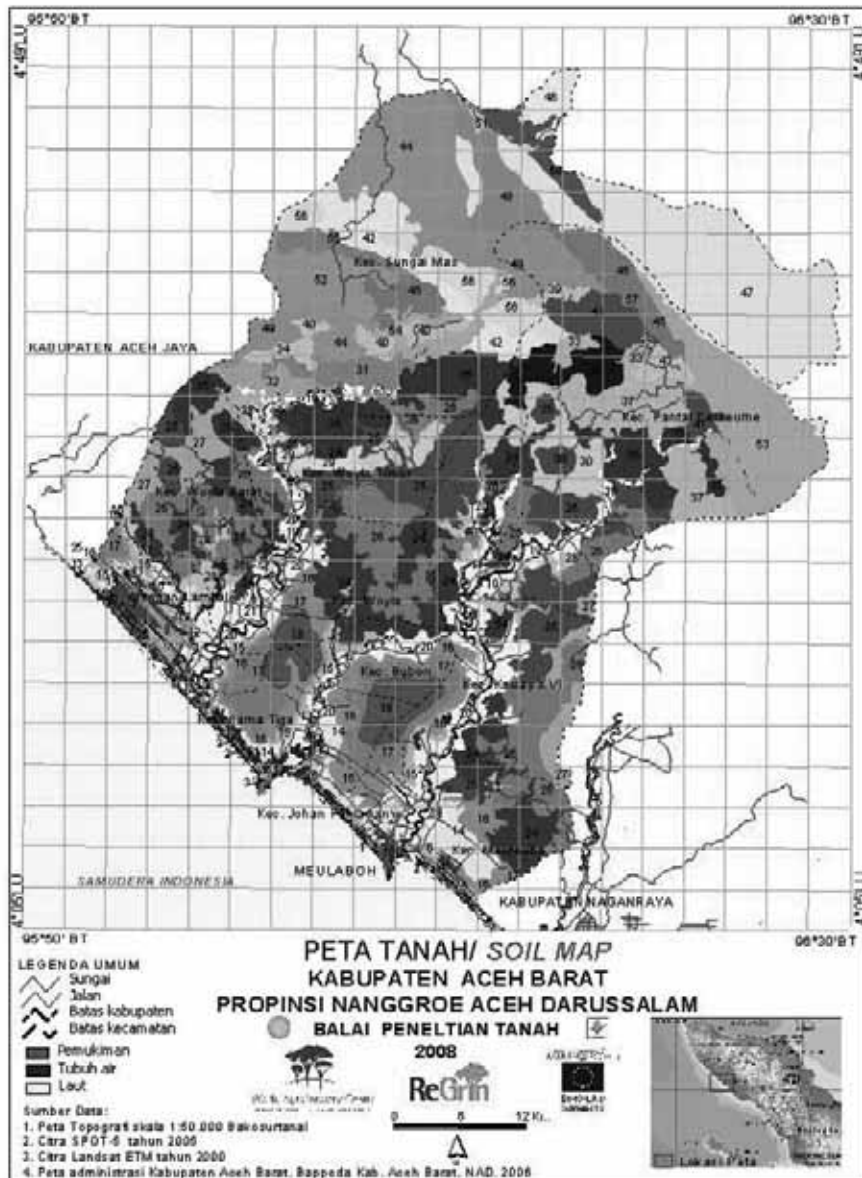
SPT 31, 32 dan 33 (grup perbukitan tektonik), sesuai marginal untuk karet, rambutan, mangga, coklat, cengkeh, duku, durian, jeruk, manggis, nenas dan pisang. Faktor pembatas berupa bahaya erosi dan kandungan hara rendah.

SPT 30, 34, 35, 36, 37, dan 38 (grup perbukitan tektonik, telah mengalami erosi berat, dengan lereng 30-50%), sesuai marginal untuk sistem hutan tanaman industri-agroforestri (beberapa tanaman yang bisa dikembangkan antara lain: karet, kopi, cokelat, mangga, rambutan dan durian. Faktor pembatas berupa bahaya erosi dan kandungan hara rendah.

SPT 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 dan 57 (Pegunungan tektonik dengan lereng >40%, bahan vulkan dan batu kapur /karst). Lahan ini tidak sesuai untuk pengembangan pertanian, sebaiknya tetap dihutankan, untuk menjaga ekosistem di kawasannya.

Hasil evaluasi kesesuaian lahan untuk beberapa komoditas tanaman pertanian menunjukkan hampir semua lahan termasuk dalam kelas sesuai marginal (S3) kecuali beberapa unit lahan yang cukup sesuai (S2). Pasir lepas sepanjang garis pantai tidak sesuai untuk tanaman pertanian (semusim dan tahunan). Gambut dalam >3 m disarankan untuk tetap di konservasi dan dihutankan. Perbukitan dan pegunungan tektonik dengan lereng >40% tidak disarankan untuk pengembangan pertanian, karena dapat menimbulkan bahaya erosi dan mengganggu ekosistem di kawasannya.

Arahan penggunaan lahan untuk berbagai macam tanaman tahunan, padi sawah dan tanaman semusim lainnya disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 2 (Peta Rekomendasi Penggunaan Lahan).

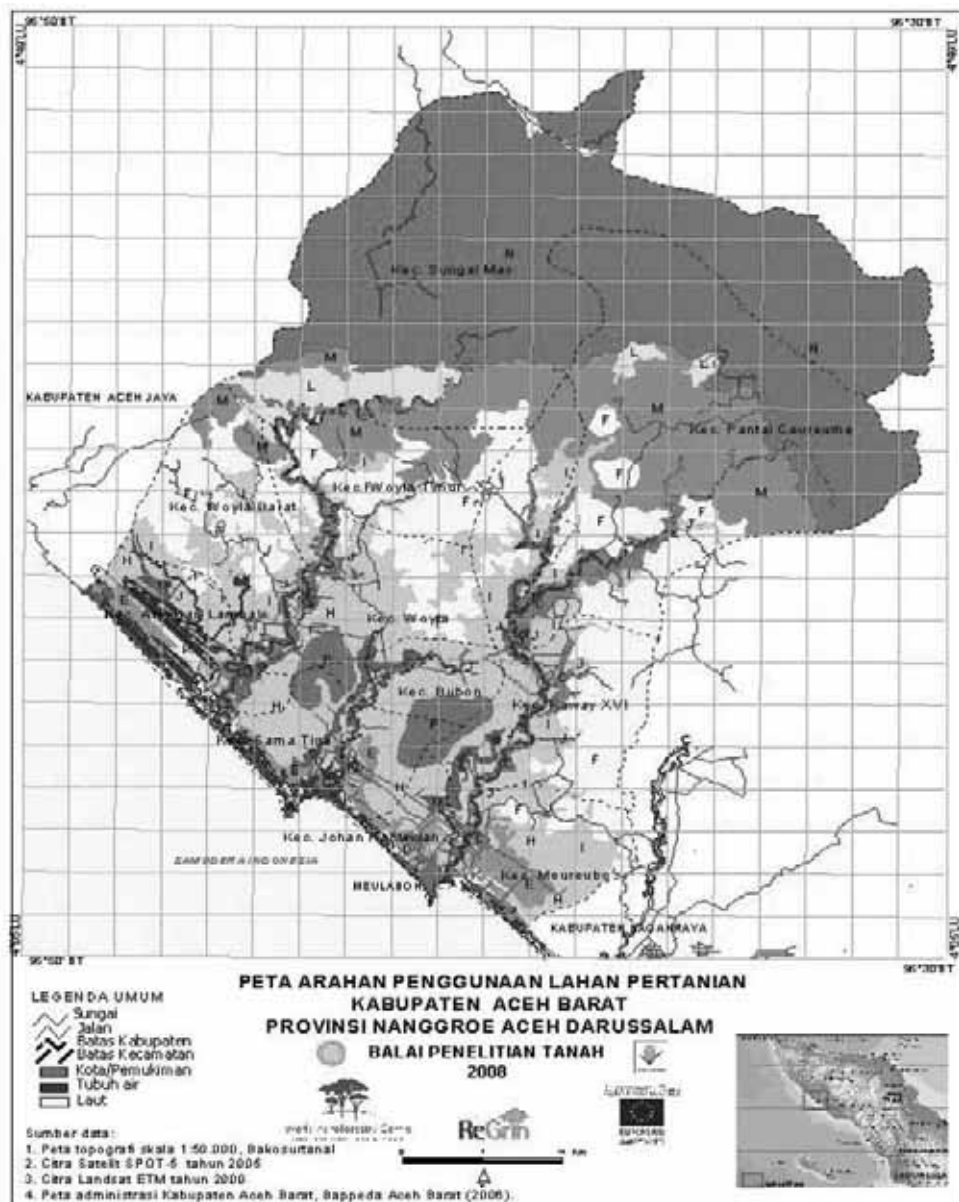


Gambar 1. Peta Tanah (*Soil Map*) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh

Tabel 6. Rekomendasi penggunaan lahan untuk tanaman pertanian di kabupaten Aceh Barat

Simbol	SPT* (Satuan Peta Tanah)	Faktor pembatas	Rekomendasi jenis tanaman	Luas (ha)
A	2,3,4,5	Hara rendah, sub-soil berpasir, air payau	Cokelat, kelapa, kopi, semangka, dan nilam	2 343
B	9,10	Hara rendah, sub-soil berpasir (air tawar)	Kelapa, cokelat, kopi, kelapa sawit, durian, mangga, jeruk, rambutan, duku, dan semangka	1 144
C	19	Genangan air, hara rendah	Kelapa, cokelat, kopi, mangga, jeruk, duku, durian, manggis, dan rambutan	12 108
D	13	Hara rendah, sub-soil berpasir	Kelapa, coklat, kopi, duku, mangga, manggis, rambutan, pisang, semangka, jagung, dan kacang tanah	1 441
E	7,14	Genangan air, tanah bergambut, hara rendah, sub-soil berpasir	Karet, kelapa sawit, dan padi sawah	5 938
F	25, 26, 27; 29, 51	Hara rendah, bahaya erosi	Karet, kelapa sawit, coklat, cengkeh, dan pisang	49 232
G	15	Genangan air, hara rendah, gambut tipis (<1m)	Karet, kelapa sawit, kelapa, sawi, terong, kacang panjang, dan semangka	2 980
H	16;17	Genangan air, hara rendah, gambut agak tebal (1- 3m)	Karet, kelapa sawit, dan kelapa	16 474
I	24, 28	Hara rendah, drainase terhambat	Karet, dan kelapa sawit	23 964
J	11,12,20, 21, 22, 23	Hara rendah	Padi sawah	14 401
K	6,8	Genangan air, hara rendah	Padi sawah	2 354
L	31, 32, 33	Hara rendah, bahaya erosi	Cengkeh, duku, durian, jeruk, cokelat, karet, rambutan, kelapa, kopi, mangga, manggis dan nilam	6 246
M	30,34,35,36, 37, 38	Bahaya erosi, hara rendah	Agroforestri (karet, kopi, mangga, rambutan, dan durian)	32 707
N	39,40,41,42 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57	Bahaya erosi, hara rendah	Kawasan hutan lindung	115 822
O	1	Pasir lepas (timbunan Tsunami)	Tidak sesuai untuk pertanian	88
P	18	Drainase terhambat, gambut tebal (>3m)	Tidak sesuai untuk pertanian, dihutankan untuk pengamanan lingkungan	5 554
Jumlah				292 796

*SPT = Satuan peta tanah/SMU (sebarannya dapat dilihat pada Gambar 1).



Gambar 2. Peta Rekomendasi (Arahan) Penggunaan Lahan Pertanian Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh

Kawasan Lindung

Kawasan yang direkomendasikan untuk dijadikan kawasan lindung, tidak dibuka sebagai kawasan budi daya (dikonservasi) adalah: wilayah yang berlereng curam dan kubah gambut dalam. Kawasan yang berlereng >40% merupakan lahan yang peka terhadap erosi dan sangat riskan untuk budi daya pertanian secara intensif. Gambut tebal lebih dari 3 m, juga sangat riskan bila dimanfaatkan untuk pertanian karena dapat mempercepat proses dekomposisi dan konsolidasi lahan bila lahan diberi drainase. Lapisan gambut ini akan cepat hilang dalam beberapa dekade, terutama bila penggunaan lahannya memerlukan drainase yang dalam.

Keputusan Presiden No. 32/1990 mengatur pemanfaatan lahan gambut dengan ketebalan 3 m atau lebih, agar tetap dipertahankan sebagai hutan rawa gambut untuk menjaga kestabilan ekosistem di kawasan tersebut. Kawasan yang direkomendasikan untuk pengamanan lingkungan disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 1.

Penutup

Berdasarkan beberapa pilihan tanaman yang direkomendasikan, para pemangku kepentingan atau petani setempat dapat menentukan pilihan komoditas tanaman terbaik yang akan dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar setempat dan ketersediaan infrastruktur. Untuk memutuskan pilihan sistem pertanian (monokultur atau tumpang sari), serta prioritas komoditas tanaman yang memiliki prospek ekonomi untuk dikembangkan dapat berkonsultasi dan meminta saran kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan setempat.

Untuk lahan yang saat ini telah digunakan/dimanfaatkan, terutama untuk tanaman tahunan atau padi sawah, disarankan agar lahan tersebut untuk tetap digunakan seperti semula, kecuali bila pertumbuhan tanamannya tidak subur dan produktivitasnya rendah. Lahan tersebut disarankan dijadikan wilayah intensifikasi untuk ditingkatkan produktivitasnya. Pada kawasan lahan tidur/terlantar terutama yang berupa rerumputan dan semak-belukar disarankan untuk dimanfaatkan untuk mengembangkan beberapa komoditas tanaman pertanian. Perluasan lahan pertanian ditekankan pada pemanfaatan lahan tidur/terlantar yang berupa rerumputan, semak-belukar daripada membuka hutan alami atau hutan rawa gambut. Hutan alami dan hutan gambut difungsikan sebagai pengamanan lingkungan strategis baik secara lokal, nasional maupun global.

Daftar Pustaka

- Agus F, Subiksa IGM. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2006. Aceh Barat Dalam Angka tahun 2006. Badan Pusat Statistik- Kabupaten Aceh Barat. Jalan Sisingamangaraja No.2 Meulaboh.
- Darul Sukma WP, Verhagen A, Dai J, Buurman P, Balsem T dan Suratman. 1990. Explanatory Booklet of the Land Unit and Soil Map of The Takengon Sheet (0520), Scale 1:250,000, Sumatera. Soil Database Management, Centre For Soil and Agroclimate Research. Bogor.
- Djaenudin D, Marwan H, Subagjo H, dan Hidayat A. 2003. Petunjuk Teknis Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Pertanian. Balai Penelitian Tanah, Bogor.
- Oldeman LR, Las I, dan Darwis SN. 1979. An agroclimatic map of Sumatera, Contributions of Central Research Institute for Agriculture, Bogor 52 (1979): 35
- Ritung S, Wahyunto, Agus F dan Hidayat H. 2007. Guidelines for Land Suitability Evaluation. With a case Map of Aceh Barat District. Indonesian Soil Research Institute dan World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor.
- Rossiter DG dan Van Wambeke AR. 1995. ALES (Automated Land Evaluation System) Version 4.5 User's Manual. SCAS Teaching Series No. T93-2 Revision 5. Cornell University, Departement of Soil, Crop and Atmospheric Science, Ithaca, New York.
- Rossiter DG dan Van Wambeke AR. 1997. Automated Land Evaluation System. ALES Version 4.5d. SCAS Teaching Series No. T93-2 Revision 5. Cornell University, Departement of Soil, Crop and Atmospheric Science, SCS, Ithaca, New York.
- Soil Survey Staff. 2003. Key to Soil taxonomy. 9th Edition. United States Department of Agriculture. Natural Resources Conservation Service. Blackburb, Virginia.
- Wahyunto, Ritung S, Agus F dan Wahdini W. 2008. Pilihan Tanaman pertanian untuk Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Balai Penelitian Tanah. Bogor.

BAB 2

Merubah Penghidupan dan Kesempatan Baru Pasca Tsunami di Aceh Barat

Merubah Penghidupan dan Kesempatan Baru Pasca Tsunami di Aceh dan Nias

Laxman Joshi

World Agroforestry Centre (ICRAF)¹

Pendahuluan

Gempa bumi yang disusul dengan terpaan gelombang Tsunami telah menyebabkan kerusakan luar biasa pada kehidupan masyarakat dan harta bendanya di sekitar kawasan pantai di Aceh dan Sumatera Utara di Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, India dan Maladewa. Lebih dari 300 ribu orang meninggal dan banyak yang mengungsi. Ketinggian gelombang Tsunami yang dilaporkan mencapai 30 m. Di antara negara-negara yang terkena bencana, Indonesia adalah yang terparah, sekitar 170 ribu orang meninggal (termasuk mereka yang hilang) di sepanjang kawasan pantai (1.000 km garis pantai, dengan luas 12 ribu km²) di Aceh dan pulau-pulau di sekitarnya, dan sekitar 600 ribu orang mengungsi. Kerusakan infrastruktur dan perniagaan menyebabkan 600 ribu – 800 ribu orang kehilangan pekerjaan, atau sekitar 20% dari total angkatan kerja di Aceh.

Aceh tetap menjadi salah satu dari provinsi termiskin di Indonesia walau sumber daya alamnya berlimpah. Sesungguhnya, kekayaan sumber daya terkait erat dengan konflik yang menimpa Aceh selama lebih dari tiga dekade yang telah membunuh lebih-kurang 15 ribu orang dan menyebabkan 35 orang mengungsi. Di banyak kawasan pedesaan, infrastruktur mengalami kerusakan berat dan diperparah lagi dengan kurangnya keamanan dan akses untuk pembangunan. Kenyataan ini menyebabkan perekonomian tidak berkembang, bahkan negatif, tingkat layanan publik yang rendah dan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingginya angka Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita di Aceh, utamanya berkat kontribusi cadangan gas dan minyak di pantai timur Aceh, tapi tidak menyentuh golongan kelas

1 Meski saat ini Laxman Joshi bekerja untuk *International Centre for Integrated Mountain Development* (ICI-MOD), namun lebih dari satu dekade pernah bekerja bersama ICRAF dan memimpin proyek REGRIN yang berbasis di Aceh Barat, dan CFC dimana Aceh Barat merupakan salah satu situs penelitian, selain Jambi dan Kalimantan Barat.

bawah. Gempa bumi dan Tsunami yang terjadi pada 2004 menambah parah derita provinsi yang selama ini telah bergulat dengan bencana dan kerusakan berskala besar.

Tidak lama setelah gempa bumi dan Tsunami Desember 2004, bantuan keuangan dalam jumlah besar mengalir dari badan-badan pembangunan internasional dan pemerintahan negara lain yang digunakan untuk proyek-proyek besar rekonstruksi, rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Kawasan pantai yang relatif kecil, yang terkena dampak langsung Tsunami tetap menjadi perhatian utama, sebagian besar proyek-proyek yang ada. Namun demikian, aktivitas-aktivitas tanggap darurat dan pemulihan pasca Tsunami serta 'ledakan' pembangunan fisik, telah menimbulkan masalah besar bagi hutan dan sumber daya alam lain di kawasan pantai dan pedalaman.

Ditinjau dari perspektif Tsunami dan kemiskinan di Aceh, terdapat dua kelompok masyarakat yang berbeda namun saling bersinggungan (Bank Dunia 2008). Kelompok pertama adalah penduduk kawasan pantai yang secara langsung atau tak langsung terkena dampak gelombang Tsunami. Harta benda, anggota keluarga, mata pencaharian mereka rusak atau hancur. Kelompok kedua adalah "kaum miskin terstruktur" yang terdiri dari penduduk pedalaman dan para korban pertikaian politik berkepanjangan. Sebagian besar dari kelompok pertama masih memiliki kemampuan produktif, seperti pendidikan, sedangkan hanya sebagian kecil kelompok "miskin terstruktur" yang menikmati pendidikan. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, sumber pendapatan beragam, pemusatan dukungan dan bantuan eksternal, kelompok pertama mampu pulih relatif cepat. Sedangkan, sebagian besar "kelompok miskin terstruktur" tetap terabaikan dalam program-program "bantuan Tsunami".

Sebelum Tsunami, perekonomian pedesaan di Aceh dan Nias sudah tergantung pada tanaman perkebunan seperti karet, kakao, kelapa. Meskipun dukungan pembangunan pasca Tsunami lebih terpusat pada bantuan tanggap darurat dan pemulihan jangka pendek, adanya pembangunan sektor tanaman perkebunan, melalui pengusungan teknologi tepat-guna, pemasaran dan dukungan kelembagaan lainnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemulihan kehidupan serta lingkungan di Aceh dan Nias.

Kemiskinan dan Tanaman Perkebunan

Kemiskinan adalah gejala pedesaan yang meluas (Tabel 1). Bila mencermati angka kemiskinan di Aceh, tampak perbedaan angka kemiskinan antara penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan dan mereka yang tinggal di pedesaan. Kebanyakan

kawasan perkotaan terdapat di sepanjang pantai, sedangkan kawasan pedesaan berada di pedalaman dan dataran tinggi. Kembali terlihat di tabel ini, angka kemiskinan jauh lebih tinggi di Aceh dibandingkan angka rata-rata kemiskinan di seluruh negeri.

Tabel 1. Persentase angka kemiskinan di Aceh dan Indonesia, 2004 hingga 2006

Tahun	2004 (%)	2005 (%)	2006 (%)
Aceh Provinsi	28,4	32,6	26,5
Kota	17,6	20,4	14,7
Desa	32,6	36,2	30,1
Indonesia	16,7	16,0	17,8

Sumber: World Bank 2008

Sebelum peristiwa Tsunami, sumber utama pendapatan rumah tangga di kawasan pantai di Kabupaten Aceh Barat meliputi perikanan, pertanian sawah, tanaman perkebunan, kebun pekarangan (kebun campuran), buruh kasar dan perdagangan (Tabel 2). Tanaman perkebunan seperti karet, kelapa dan kakao memberikan kontribusi 45 persen dari pendapatan di kecamatan-kecamatan. Di Kecamatan Johan Pahlawan, ibukota Kabupaten Meulaboh, buruh kasar lebih dominan. Tsunami mengacaukan tatanan ini, program pembangunan fisik dan bantuan memberikan peluang lain. Enam bulan setelah Tsunami, buruh kasar dan perdagangan menjadi lebih penting daripada sebelumnya (Tabel 3), sedangkan arti penting pertanian sawah dan tanaman perkebunan telah berkurang. Penyebab utamanya adalah peralihan pekerjaan dari aktivitas bercocok tanam ke pekerjaan konstruksi (utamanya pembuatan bangunan dan jalan), dan karena kerusakan sawah dan ladang.

Tabel 2. Aktivitas-aktivitas pendukung perekonomian lokal di empat kecamatan pantai di Aceh Barat (pra-Tsunami).

Kecamatan	Perikanan	Sawah	Ladang	Tanaman Keras	Kebun	Buruh	Perdagangan
Arongan Lambalek	5	30	45	5	3	10	2
Samatiga	7	35	40	8	2	3	5
Johan Pahlawan	8	12	15	5	2	40	18
Meureubo	10	30	40	5	2	8	5

Tabel 3. Perubahan mata pencaharian di Aceh Barat enam bulan setelah Tsunami (nilai negatif bermakna penurunan positif bermakna kenaikan)

Kecamatan	Perikanan	Sawah	Ladang	Tanaman Keras	Kebun	Buruh	Perdagangan
Arongan Lambalek	5	-28	-35	-2	2	35	23
Samatiga	3	-33	5	-5	3	17	10
Johan Pahlawan	6	-11	-10	-2	0	20	-3
Meureubo	-5	-28	3	5	3	17	5
Rata-rata	2,3	-25	-9,3	-1	2	22,3	8,8

Sebuah penelitian dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2007 di kawasan pantai dan perbukitan di tiga lokasi: Aceh Timur dengan sejarah konflik yang kuat, Aceh Barat dengan sejarah konflik sedang, dan Nias yang relatif damai. Data primer dan informasi sekunder dikumpulkan melalui wawancara per rumah tangga, penilaian kelompok dan konsultasi dengan ahli dari desa-desa sampel, baik di kawasan pantai maupun pedalaman. Data deforestasi dianalisa, dan dibuat perbandingan yang terkait: strategi mata pencaharian, pendapatan dari pemanfaatan tanah, kerusakan lingkungan antara kawasan pantai dan pedalaman setelah Desember 2004.

Sekitar 54% penduduk kabupaten tinggal di pedalaman dan hampir 94% dari mereka mengandalkan mata pencaharian pada pertanian dibandingkan jumlah 55% di kawasan pantai. Pada masyarakat pedesaan di perbukitan Aceh dan Nias, pertanian adalah hidup keseharian. Di pedalaman, rata-rata 76% dari total pendapatan bersumber dari aktivitas pertanian dan 21% dari aktivitas non-tani. Dalam sektor pertanian, tanaman perkebunan merupakan sumber pendapatan utama menyediakan 78% dari pendapatan. Dibandingkan dengan masyarakat pantai, masyarakat perbukitan lebih bergantung pada tanaman perkebunan dan sumber daya hutan karena peluang untuk bekerja di luar sektor non-pertanian lebih sedikit (Tabel 4). Masyarakat di kawasan pedalaman jauh lebih miskin dibandingkan masyarakat yang hidup di kawasan pantai.

Di antara tanaman-tanaman perkebunan, karet, kakao dan kelapa adalah yang paling banyak ditanam di Aceh dan Nias (Tabel 5). Karet memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan rumah tangga di kawasan pantai dan pedalaman Aceh Barat dan Nias. Kakao lebih dominan di Pidie, sedangkan kelapa yang dijumpai di hampir semua kawasan, hanya berpengaruh besar terhadap pendapatan rumah tangga di kawasan pantai di Kabupaten Pidie. Pinang juga penting di pedalaman Pidie, tetapi

Tabel 4. Kontribusi berbagai sumber kepada pendapatan rumah tangga (%) di kawasan pantai dan pedalaman di Aceh dan Nias

Sumber	Kawasan Pantai			Kawasan Pedalaman		
	Aceh Barat	Pidie	Nias	Aceh Barat	Pidie	Nias
Pertanian	87,0	56,3	75,9	79,6	64,3	79,0
Tanaman pangan	4,1	0,3	20,8	8,7	25,4	
Tanaman budi daya	59,5	0,7	32,7	62,1	36,0	77,8
Perikanan	1,0	54,6	8,3			
Peternakan	22,4	0,8	14,2	8,9	2,8	1,2
Non-pertanian	12,2	41,7	13,4	18,4	35,6	14,5
Lain-lain	0,8	2,0	10,8	2,0	0,1	6,5
Upah	0,8	2,0	1,3	2,0	0,1	
Program bantuan	0,1		9,5			6,5
Angka kemiskinan	0,4	0,4	0,7	0,5	0,7	0,7

Sumber: Budidarsono dkk 2007.

kurang berarti di kawasan lain. Kopi dan kelapa sawit juga ditanam oleh para petani dalam skala kecil.

Tabel 5. Kepentingan relatif (*relative importance*) dari tanaman perkebunan, didasarkan pendapatan keseluruhan dari rumah tangga sampel

	Daerah Pantai		Daerah Pedalaman			
	Aceh Barat N=31	Pidie N=29	Nias N=35	Aceh Barat N=32	Pidie N=31	Nias N=34
Karet	97,8	-	85,5	43,2	-	93,3
Kakao	0,9	54,5	-	44,2	44,8	6,7
Kelapa	1,3	45,5	14,5	0,3	2,3	
Pinang	-	-	-	8,9	41,1	-
Kopi	-	-	-	2,4	11,7	-
Kelapa sawit	-	-	-	1,1	-	-

Sumber: Budidarsono dkk 2007.

Survey yang dilaksanakan pada 2007 di tiga lokasi di Aceh dan Nias juga menghasilkan sebuah daftar “spesies tanaman yang diinginkan masyarakat” (Tabel 6). Tanaman perkebunan, terutama karet dan kakao, adalah yang paling disukai, kecuali di Pidie. Spesies *Pandanus* yang digunakan untuk bahan kerajinan lebih disukai oleh masyarakat pantai di Pidie. Tanaman tahunan hanya penting di kawasan pantai di Aceh Barat. Penemuan itu tidak mengejutkan dan sejalan dengan kontribusi tanaman tersebut terhadap sumber pendapatan keseluruhan (Tabel 6).

Tabel 6. Spesies tanaman yang diinginkan masyarakat (% responden)

	Kawasan pantai			Kawasan pedalaman		
	Aceh Barat	Pidie	Nias	Aceh Barat	Pidie	Nias
Tanaman perkebunan	61,3	52	66,7	93,8	90	65,7
Karet	45,2		57,6	59,4		51,4
Kakao	6,5		9,1	31,3	77,4	14,3
Kelapa	6,5	13,8				
Kelapa sawit	3,2			3,1	3,2	
Pinang					9,7	
<i>Pandanus</i>		37,9				
Pohon kayu	3,2	3,4	24,2			34,3
Tanaman buah		6,9			3,2	
Tanaman semusim	22,6	3,4		3,1	6,5	
Tidak berminat	12,9	34,5	9,1	3,1		

Sumber: Budidarsono dkk 2007

Meskipun tanaman budi daya merupakan bagian penting bagi rumah tangga dan perekonomian setempat, sektor ini kurang berkembang di berbagai lini. Tanaman-tanaman utama seperti karet, kakao, kelapa, dan tanaman buah-buahan di Aceh dan Nias sangat kekurangan plasma nutfah. Dukungan penting seperti: pasokan material tanam, perawatan tanaman, pengetahuan teknis, infrastruktur pasar, dan akses jalan masih sangat buruk di berbagai daerah di Aceh dan Nias. Meskipun karet merupakan tanaman yang dominan (dan juga merupakan tanaman pilihan petani), prospek produksi kayu dari tanaman karet belum mendapat perhatian yang semestinya. Patut dicatat, industri kayu karet, terutama digunakan untuk furnitur, telah menjadi sumber kayu penting di Thailand dan Malaysia, tapi tidak terlalu berkembang di Indonesia.

Agroforestri Karet Alam

Di antara tanaman-tanaman perkebunan tersebut, karet (*Hevea brasiliensis*) mempunyai potensi tertinggi dalam hal kontribusinya terhadap mata pencaharian dan perekonomian di Aceh dan Nias. Minat menanam karet di antara petani kecil meningkat. Namun demikian, potensi dan minat tersebut masih terkendala oleh kurangnya bibit tanaman bermutu tinggi, pengetahuan teknis, pemrosesan dan fasilitas pemasaran.

ICRAF dan para mitranya telah membuat kemajuan penting dalam pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan mengenai sistem agroforestri berbasis karet yang sudah dikembangkan. Kebun pembibitan untuk bibit-bibit tanaman bermutu tinggi telah dibangun. Pelatihan dan plot demonstrasi dari agroforestri karet sudah didirikan di Aceh Barat. Agroforestri yang terdiri dari karet dicampur dengan tanaman bernilai ekonomis tinggi seperti nilam dan tanaman buah-buahan bisa sangat menguntungkan. Praktek di kebun dan plot-plot pengamatan observasi dapat memberikan informasi penting mengenai fakta-fakta ketika petani mengadopsi atau beradaptasi dengan teknologi baru. Para petani seyogyanya mempunyai keleluasaan untuk beradaptasi dengan teknologi baru, disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia (untuk pengendalian gulma, penyiapan, pemberian pupuk, tumpang-sari).

Manfaat plasma nutfah klon karet yang sudah dikembangkan terbukti dari data produktivitas lateks di Kalimantan Barat dan Jambi. Bahkan pada pengelolaan tingkat menengah, para petani berpotensi memperoleh lateks tiga kali lebih banyak dibandingkan hasil yang diperoleh dari benih karet yang tidak diseleksi (Wibawa dkk 2005). Pada kebun percontohan, pohon karet mencapai ukuran layak sadap setelah mencapai usia tanam 4,5 hingga 8,5 tahun. Dan tingkat pertumbuhan pohon ditentukan oleh intensitas perawatan. Data panen lateks dari kebun percontohan *Rubber Agroforestry System* (RAS) dapat dibandingkan dengan perkebunan monokultur. Produktivitas karet monokultur intensif dapat mencapai 70% atau lebih melalui perkebunan kecil RAS yang terkelola dengan baik. Para petani di sekitar kebun percontohan mulai mengadopsi pendekatan RAS sebagai sebuah alternatif untuk karet monokultur intensif dan karet hutan ekstensif. Pendekatan RAS terpadu yang mengawinkan teknologi baru (klon karet) dengan praktek tradisional dari agroforestri karet terbukti berhasil di berbagai pelosok di Indonesia. Teknologi yang sama punya potensi yang sangat besar untuk diterapkan di Aceh dan Nias.

Aktivitas Pasca Tsunami dan Sumber Daya Alam

Selama tahap 'ledakan pembangunan fisik' (masa tiga tahun pasca Tsunami), tingginya permintaan bahan pembangunan (pasir, batu, kayu dan bata) telah menambah aktivitas penebangan kayu dan penambangan pasir/batu di seluruh Aceh dan Nias. Pekerjaan rekonstruksi, terutama di kawasan pantai Aceh diperkirakan telah menghabiskan 850 ribu meter kubik kayu dari penebangan ilegal (hampir 50% dari total kayu yang digunakan). Tiap tahun, diperkirakan, penebangan ilegal menghancurkan hutan hujan seluas 20.769 ha di Aceh. Pada umumnya, aktivitas penebangan ilegal terjadi di kawasan pedalaman yang relatif tidak tersentuh selama konflik bertahun-tahun. Kerusakan hutan meningkat tajam setelah gempa bumi dan Tsunami. Harga beras menjadi dua kali lipat setelah Tsunami, yang menyebabkan kenaikan pembukaan lahan untuk persawahan. Pembersihan lahan gambut untuk pemukiman dan kebun kelapa sawit juga menjadi tambahan masalah lingkungan hidup.

Kesimpulan

Aceh dan Nias tengah mengalami transformasi pesat. Meskipun pada masa lampau didera oleh isolasi politik, konflik dan terabaikan, peristiwa Tsunami dan gempa bumi pada Desember 2004 telah membuka babak baru dalam pembangunan ekonomi di Aceh dan Nias. Pemulihan tidak hanya mengembalikan pada kondisi pra-Tsunami. Konteks politik, peluang ekonomi dan kebutuhan masyarakat daerah membuka jalan bagi percepatan pembangunan di Aceh dan Nias. Seyogyanya rencana-rencana pembangunan harus bergerak di luar fokus 'pasca Tsunami', tetapi lebih mengarah kepada kemakmuran ekonomi dan peluang-peluang yang muncul. Patut dicatat bahwa konflik politik yang berkepanjangan di Aceh lebih berdampak pada kemiskinan daripada peristiwa Tsunami Desember 2004.

Di banyak area pedesaan, hutan dan sumber daya alam lain yang memberikan perlindungan bagi lingkungan juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Penelitian di Aceh dan Nias jelas memperlihatkan bahwa banyak masalah lingkungan dalam konteks pasca bencana, tidak dapat dipecahkan melalui tindakan jangka pendek, tetapi diatasi melalui program-program berorientasi pelestarian. Sebuah pendekatan terpadu dan seimbang, serta terpusat pada tanaman yang diminati masyarakat (bernilai ekonomi) dan sistem berbasis pepohonan (*tree-based system*), diyakini merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dan pemulihan lingkungan di Aceh dan Nias.

Teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan seperti karet dan kakao telah tersedia dan harus didorong melalui pengembangan keterampilan dan pembangunan kapasitas yang memadai. Dengan menggunakan bibit yang bermutu, tanaman yang sesuai dan pengelolaan lahan yang tepat, proses panen dan pasca panen yang tepat, disertai jaringan pasar yang baik, pembangunan infrastruktur akan mengarahkan transformasi pola budi daya tanaman perkebunan dan pembangunan ekonomi di Aceh dan Nias. Peluang bagi budi daya tanaman perkebunan untuk mata pencaharian dan pengembangan lingkungan harus menjadi bagian integral dari rencana tata guna lahan dan pembangunan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Budidarsono S, Wulan YC, Budi, Joshi L dan Hendratno S. 2007. Livelihoods and Forest Resources in Aceh and Nias for a Sustainable Forest Resource Management and Economic Progress. ICRAF Working Paper 55. World Agroforestry Centre, Bogor, Indonesia: 39 pp.
- World Bank. 2008. Aceh Poverty Assessment 2008 -. The Impact of the Conflict, the Tsunami and Reconstruction on Poverty in Aceh. World Bank, Jakarta: 75 pp.
- Wibawa G, Hendratno S dan van Noordwijk M. 2005. Permanent smallholder rubber agroforestry systems in Sumatra, Indonesia. In: Palm C, Vosti SA, Sanchez PA, Ericksen PJ and Juo A, eds. Slash and Burn: The search for alternatives. . New York, USA. Columbia University Press. P. 222-232

Pelibatan Pengetahuan Lokal dalam Kesiapsiagaan Bencana

Elok Mulyoutami

World Agroforestry Centre (ICRAF)

Pendahuluan

Sebagai masyarakat agraris, masyarakat Aceh dituntut untuk dapat memahami kondisi fisik wilayahnya demi mengolah lahan mereka sebagai sumber penghidupan. Mereka memiliki pengetahuan tentang bagaimana harus mengolah lahannya dengan mengupayakan sawah, kebun karet, dan kebun buah-buahan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, perubahan struktur tanah dan kondisi fisik lainnya yang terjadi pasca Tsunami Desember 2004, menjadi stimulan bagi petani setempat untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam mengolah lahan. Tanah yang semula mereka gunakan untuk sawah, menjadi tidak layak diolah karena salinitas atau kandungan garamnya yang semakin meningkat. Karena itu, mereka perlu mengembangkan strategi dan pola adaptasi baru mengenai bagaimana mereka harus mengolah lahan yang ada.

Tulisan ini mencoba menggali beberapa respon spontan dari petani Aceh yang lahannya terkena dampak Tsunami dalam mengembangkan khasanah pengetahuan dan keahlian mereka mengolah lahan yang merupakan harta terpenting yang masih tertinggal.

Pengetahuan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam terpadu yang seringkali digaungkan dalam program pembangunan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat. Dengan demikian, perangkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat sebagai aktornya menjadi hal yang penting karena menjadi basis pengelolaan yang mudah diimplementasikan oleh masyarakat.

Masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mengembangkan suatu strategi yang berkaitan dengan bagaimana ia mengelola sumber daya yang dia miliki (Berkes dkk 2000, Warren dkk 1998). Kemampuan tersebut terwujud dalam sistem pengetahuan

yang diwarisi baik secara turun temurun maupun yang baru mereka dapatkan dari pengaruh luar, mengenai perubahan lingkungan alam serta berbagai pertanda dan dampak dari perubahan itu yang kemudian melembaga dalam institusi lokal serta tradisi kehidupan mereka sehari-hari. Sistem pengetahuan tersebut merupakan suatu bentuk modal sosial atau modal budaya yang perlu diperhatikan benar dalam upaya pembangunan masyarakat dan dalam hal ini dalam upaya pemulihan masyarakat dalam menghadapi kondisi pasca Tsunami (Dekens 2007a, 2007b).

Menggali pengetahuan lokal

Upaya menggali pengetahuan lokal ini dilakukan selama 10 hari, satu tahun setengah setelah kejadian Tsunami. Dengan mengadopsi pendekatan yang dikembangkan oleh Walker dan Sinclair (1998) yaitu “Sistem berbasis pengetahuan”, serangkaian kegiatan wawancara dilakukan terhadap 12 narasumber kunci dan dilakukan beberapa diskusi kelompok. Informasi yang digali adalah pengetahuan akan kejadian Tsunami, kerusakan fisik yang diamati, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi bencana (strategi bertahan). Narasumber dipilih secara acak yang dianggap paling memiliki pengetahuan tentang lahan dan tanaman. Metoda bola salju diterapkan dengan menentukan kriteria pemilihan narasumber yaitu yang berprofesi sebagai petani sebelum Tsunami, dan masih melakukan aktivitas pertanian pasca Tsunami. Tiga rangkaian diskusi kelompok dilakukan untuk memperdalam studi serta triangulasi hasil yang diperoleh dalam wawancara individu.

Persepsi masyarakat terhadap kerusakan yang terjadi

Manusia, melalui panca inderanya, memiliki kemampuan untuk mengamati dan menganalisa kondisi lingkungan dan perubahan yang terjadi pada lingkungannya (Berkes dkk 2000, Warren dkk 1998). Dalam kejadian bencana alam dimana perubahan yang terjadi cukup dramatis, manusia juga mengembangkan upaya antisipasi bencana dan pada masa kritis hanya bergantung pada dirinya sendiri serta lingkungan yang ada untuk bertahan (Bankoff 2004). Upaya memahami pengetahuan masyarakat yang sebagian terbentuk dari respon alami terhadap bencana akan memberikan gambaran hubungan sebab akibat atas kerusakan fisik yang terjadi di lingkungan mereka.

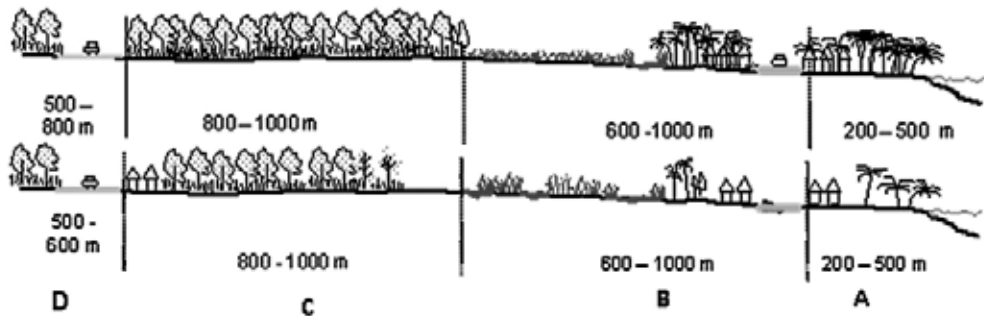
Perubahan Penggunaan Lahan

Untuk memahami pengetahuan petani mengenai kerusakan akibat Tsunami yang terjadi, pola penggunaan lahan dalam satu transek diidentifikasi. Transek yang

diamati meliputi transek dimana pola penggunaan lahan yang ada merupakan representasi dari kondisi yang umum di wilayah ini. Ilustrasi pola penggunaan lahan ini diperoleh di daerah Kecamatan Samatiga di Desa Lhok Bubon yang berada di pesisir, sampai ke arah tengah yaitu desa Gampong Tengah, Peucok Lung, Aloe Raya dan Cot Selamat.

Empat zonasi ditentukan berdasarkan sistem penggunaan lahan dari bibir pantai hingga 3 km ke arah daratan (Gambar 1). Zona A yang merupakan wilayah bibir pantai, memiliki tanaman kelapa yang cukup dominan. Zona B meliputi areal pemukiman, pekarangan dan pertanian pangan. Di lahan pekarangan sekitar pemukiman, ditanam buah-buahan seperti rambutan, durian, kakao, semangka dan labu air. Sekitar 800 m ke arah daratan terdapat areal pesawahan dan tanaman pangan lainnya. Di zona ini pula terdapat areal yang digunakan untuk tambak, bakau serta nipah dan rumbia. Lebih ke dalam lagi, di Zona C, terdapat kebun karet masyarakat yang umumnya menggunakan bibit lokal. Zona D merupakan areal pemukiman masyarakat dan didefinisikan sebagai zona terjauh yang dijangkau air laut pada saat Tsunami.

Dari kesaksian masyarakat Aceh yang selamat, mereka menyatakan bahwa ada tiga gelombang besar yang menyapu, dan lokasi dimana kondisi tanah berubah adalah lokasi dimana ombak-ombak tersebut pecah (yaitu : Zona C dan/atau Zona B). Di lokasi tersebut, tanah seakan-akan terangkat oleh pecahan ombak, dan berpindah ke lokasi lain saat air ombak tersebut mengalir kembali ke laut. Lahan sawah yang berjarak sekitar 800 – 1.000 m dari laut dan terhempas oleh pecahan ombak berubah menjadi laguna yang berair asin. Tanah sawah yang terangkat ini terbawa oleh air laut ke arah dalam, dan kemudian menumpuk di daerah dimana air laut berakhir (Zona D). Sementara itu laguna dimanfaatkan masyarakat setempat menjadi sumber beragam jenis ikan dan udang. Beberapa spesies ikan laut seperti jenis-jenis kakap terutama kakap merah banyak ditemukan di laguna ini.



Gambar 1. Penggunaan lahan sebelum dan kerusakan lahan setelah Tsunami

Tabel 1. Penggunaan lahan, perubahan dan kerusakan akibat Tsunami, serta jenis tanaman

Kerusakan	Zona D: Kerusakan 20%	Zona C: Kerusakan 40%	Zona B: Kerusakan 60%	Zona A: Kerusakan 90%
Tinggi air laut	0.5 – 2 m	2 – 5 m	5 – 15 m	15 – 25 m
Perubahan pasca Tsunami	Tanah Tsunami	20% pohon karet hilang, 30% pohon karet belum berproduksi	Sawah menjadi laguna, danau atau rawa Pendangkalan lahan sawah dan sungai	
Penggunaan lahan saat penelitian	Pemukiman (relokasi) Pekarangan Lahan pangan Kebun karet	Pemukiman (relokasi) Pekarangan Kebun karet	Pemukiman Pekarangan Kebun kelapa (80% tersisa) Tambak/Kolam	Pemukiman Kebun kelapa (40 % selamat)
Jenis tanaman	Semusim: cabai, jagung, kacang panjang, singkong. Tahunan: karet, mangga, kueni, sawo, pepaya, kakao	Semusim: cabai, jagung, kacang panjang, singkong, semangka. Tahunan: karet, pinang, mangga, kueni, semangka, pepaya dan kakao	Semusim: cabai, semangka Tahunan: mangga, kueni, pinang, kelapa Tanaman lain: Nipah, Waru, Rumput-rumputan, Bakau (daerah riparian)	Tahunan: Kelapa, Bakau (baru ditanam), Waru (baru ditanam), Cemara laut (baru ditanam)

Masih di Zona B dan/atau C, ada bagian dimana lubang-lubang semakin dalam, sementara di areal lain dimana air ombak mengalir pelan, tanah yang terbawa air laut tersebut mengendap dan berakumulasi sehingga semakin menambah tinggi tanah. Beberapa lahan padi dan rawa mendangkal (naik sekitar 2 m) karena sedimentasi pasir dan tanah serta puing-puing (Gambar 1a dan 1b).



Gambar 1a. Rawa terbentuk akibat pecahan ombak Tsunami di belakang kebun karet, asal lahan adalah sawah.



Gambar 1b. Sawah yang mengalami pendangkalan karena timbunan tanah dan puing, kandungan garamnya tinggi.

Hal menarik yang berhasil didokumentasikan oleh masyarakat adalah lokasi serumpun pohon nipah yang bergeser hingga sekitar setengah kilometer lebih jauh ke pedalaman dan tidak berubah. Pohon tersebut masih tumbuh dengan baik. Seorang narasumber menjelaskan, pecahan ombak Tsunami seolah mengangkat pohon tersebut berikut tanah di sekitarnya dan memindahkannya ke tempat lain seiring dengan aliran ombak. Narasumber tersebut lebih lanjut menggambarkan seolah-olah tanaman nipah itu dikeruk oleh tangan dan dipindahkan ke tempat lain.

Pohon kelapa yang tersisa di wilayah ini sekitar 40% dari jumlah sebelumnya. Sebagian narasumber juga menyatakan bibir pantai bergeser 100 hingga 200 m ke arah daratan (Zona A).

Masyarakat lokal menyatakan bahwa perubahan fisik lahan yang terjadi tidak hanya di pesisir pantai saja, namun juga di pesisir sungai. Banjir sungai akibat dorongan ombak Tsunami terjadi di areal riparian. Meski daerah itu terletak jauh dari pantai, namun karena berada di pesisir sungai maka terkena imbas air laut. Sebagai dampaknya, beberapa tanaman pionir yang sejatinya tumbuh di pesisir laut bisa ditemukan di daerah riparian sungai.

Tanah Tsunami

Konsep baru yang muncul pasca Tsunami adalah ‘tanah Tsunami’ yang dipahami masyarakat sebagai bagian lahan yang tertutup tanah yang terbawa oleh air laut ke daratan. Bagi sebagian besar petani, tanah ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Sebagian berpendapat bahwa tanah ini berasal dari tanah sawah yang terhempas ke daerah lain akibat pecahnya gelombang laut dan ikut mengalir bersama aliran ombak tersebut ke daratan, dan menumpuk di daerah dimana air laut berakhir. Tanah tersebut sangat gembur, bahkan sebagian masyarakat masih berupaya memanfaatkan tanah Tsunami ini untuk menanam jenis tanaman semusim. Menurut beberapa petani yang ditemui, struktur tanah Tsunami gembur dan berwarna hitam dan memiliki kandungan zat organik yang cukup tinggi.

Salinitas dan toleransi tanah

Petani di Aceh memahami dengan cukup baik kondisi tanah yang terimbas air laut dan menyebutkan bahwa tanah tersebut memiliki tingkat salinitas tertentu yang membuat beberapa jenis tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Berdasarkan pengamatan petani yang dilakukan satu setengah tahun setelah Tsunami, beberapa jenis tanaman ditemukan memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap garam, salah

satunya adalah karet. Kakao dinilai sangat rentan terhadap garam, karena banyak tanaman kakao yang mati karena terendam oleh air laut.

Pohon kelapa diyakini oleh petani di pesisir merupakan tanaman yang mempunyai toleransi cukup tinggi terhadap garam sehingga banyak ditanam di pesisir pantai yang memiliki tingkat salinitas tinggi. Hal ini selaras dengan pernyataan ahli tanah dan agroklimat (Djaenudin dkk 2000) yang menyatakan bahwa kelapa cocok ditanam di daerah yang memiliki tingkat salinitas maximum 12mS/cm (*micro siemens per sentimeter*). Selain itu, perannya dalam mengurangi dampak terjangan ombak Tsunami terbukti cukup efektif.

Pohon rambutan, manggis dan durian sangat rentan terhadap garam. Dari hasil pengamatan masyarakat lokal, beberapa hari setelah Tsunami pohon-pohon tersebut masih bertahan, tapi tidak lama kemudian daunnya menguning dan mulai berguguran, hingga akhirnya mati. Pohon mangga diamati lebih mampu bertahan, setelah lebih kurang 2 – 4 bulan daunnya menguning dan berguguran, namun kembali menghijau dan bahkan beberapa pohon masih bisa berbunga.

Tabel 2. Persepsi petani terhadap jenis tanaman dan toleransi terhadap salinitas tanah

Jenis pohon	Toleransi terhadap salinitas tanah	Waktu untuk berbunga kembali	Kemungkinan tumbuh di tanah Tsunami
Mangga (<i>Mangifera sp</i>)	*	8 – 15 bulan	**
Kweni (<i>Mangifera odorata</i>)	*	Tidak ada data	**
Rambutan (<i>Nephelium lappaceum</i>)	-	-	Tidak ada pengalaman
Kakao (<i>Theobroma cacao</i>)	-	-	*
Durian (<i>Durio zibethinus</i>)	-	-	*
Sawo (<i>Manilkara kauki</i>)	-	-	*
Manggis (<i>Garcinia mangostana</i>)			
Jambu Boto (<i>Psidium guava</i>)	*	8 – 15 bulan	*
Sukun (<i>Artocarpus communis</i>)	**	12 – 15 bulan	**
Pinang (<i>Areca catechu</i>)			
Petai (<i>Parkia speciosa</i>)	-	-	*
Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>)	***	4 – 9 bulan	***
Rumbia (<i>Metroxylon sagu</i>)	***	-	***
Nipah (<i>Nypa fruticans</i>)	***	-	***
Kelapa sawit (<i>Elaeis sp</i>)	**	Tidak ada data	***

Padi dan Tanaman Semusim

Pasca Tsunami, sejumlah tanaman semusim yang ditanam menurun hasilnya, bahkan beberapa tidak dapat tumbuh dengan baik. Cabai dan singkong memiliki resistensi yang cukup kuat terhadap kandungan garam di tanah. Jenis lainnya, meski mereka mampu tumbuh dengan baik namun tidak memberikan hasil maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas.

Semangka, labu air dan pepaya merupakan beberapa jenis tanaman semusim yang tumbuh alami setelah tiga bulan pasca Tsunami. Mereka menyebutnya sebagai “semangka Tsunami”, “labu Tsunami” dan “pepaya Tsunami”, dan ketika dikonsumsi ketiga buah ini memiliki rasa yang asin. Beberapa narasumber menjelaskan bahwa hal ini mungkin disebabkan karena lahan sawah yang subur berpindah ke lokasi lahan mereka dan beberapa benih dalam tanah yang terbawa tersebut tumbuh. Hingga artikel ini ditulis, masyarakat setempat sudah sangat jarang menemukan lagi jenis semangka, pepaya dan labu yang rasanya asin. Mungkin hal ini disebabkan karena salinitas tanah yang semakin berkurang.

Tabel 3. Kondisi pertumbuhan tanaman pangan sebelum dan sesudah Tsunami berdasarkan pengamatan petani

Tanaman	Sebelum Tsunami	3 bulan setelah	Setahun setelah
Kacang tanah	Tumbuh baik	Tidak tumbuh	Tumbuh dan menghasilkan namun kualitasnya rendah
Jagung	Tumbuh baik	Tidak tumbuh	Berbuah, hasilnya berkurang
Cabai	Tumbuh baik	Sebagian berbuah	Tumbuh dan berbuah
Timun	Tumbuh baik	Tidak tumbuh	Tumbuh dan berbuah
Terong	Tumbuh baik	Tidak tumbuh	Tumbuh dan berbuah

Peran ‘Pohon’ untuk Meminimalisir Dampak Bencana

Beberapa ahli telah mengkaji efektifitas hutan sebagai benteng alami yang dapat mereduksi dampak terjangan ombak Tsunami ke daratan (Danielsen dan Sorensen 2005, Laso dkk 2007, Marohn dkk 2007). Hal yang sama juga diyakini oleh masyarakat setempat. Seorang perempuan yang tinggal dua kilometer dari tepi laut menyatakan bahwa tempat tinggalnya habis dihantam ombak karena tidak ada tanaman berkayu yang tumbuh di antara rumah dan laut. Ia menyatakan bahwa rumah tetangganya yang berada di balik kebun karet tidak begitu rusak, karena hantaman ombak Tsunami sudah tereduksi oleh barisan pohon tersebut. Meski demikian, perempuan tersebut menyatakan bahwa pohon karet yang tersisa saat ini kurang lebih hanya tinggal 60%, karena pohon-pohon tersebut terangkat oleh kekuatan ombak Tsunami.

Jenis tanaman seperti Cemara laut (*Casuaria equisetifolia*), Ketapang (*Terminalia catapa*), Kelapa (*Cocos nucifera*), Angsana (*Pterocarpus indicus*), Pandan (*Pandanus tectorius*) and Waru laut (*Hibiscus tiliaceus*) memiliki fungsi yang baik sebagai pemecah ombak maupun sebagai pemecah angin (*wind breaker*) di daerah pesisir. Masyarakat menyebutkan bahwa jenis-jenis tersebut memiliki nilai proteksi lingkungan yang tinggi akan tetapi nilai ekonomisnya rendah.

Upaya penanaman telah dilakukan oleh beberapa organisasi, lembaga dan institusi yang peduli dengan pemulihan daerah ini. Akan tetapi, tanaman yang ditanam tersebut rusak akibat abrasi air laut. Dari pengamatan ini, seorang petani yang diwawancara menyatakan bahwa sebaiknya ada tanggul yang dibuat untuk menahan air pasang yang datang terutama pada malam hari. Beliau menyatakan bahwa tanggul dibangun sekitar 100 m dari tepi pantai, dan tanaman pantai bisa ditanam sekitar 200 m dari tepi pantai. Jenis-jenis tanaman seperti tersebut di atas, apabila tumbuh dengan populasi yang padat mampu berperan sebagai penahan angin.

Sebagian masyarakat merasakan bahwa pasca Tsunami, tiupan angin cukup kuat dan mengganggu aktivitas pertanian mereka, karena jumlah pohon di tepi pantai semakin sedikit.

Peran pohon ini juga dinilai penting di daerah riparian, karena Tsunami yang terjadi di muara sungai, membuat arus sungai menjadi kuat dan luapannya terjadi di pesisir sungai. Daerah yang mempunyai tanaman riparian cukup padat memiliki tingkat kerusakan yang lebih rendah daripada di daerah yang lebih terbuka.

Strategi Memulihkan Lahan

Untuk melihat upaya masyarakat bertahan dan beradaptasi pada kondisi pasca Tsunami perlu dilihat dari beberapa periode. Periode pertama (tiga bulan pertama pasca Tsunami), merupakan periode darurat (*emergency*) dimana prioritas kegiatan masyarakat adalah untuk memenuhi sumber pangan dan papan dalam jangka pendek. Sebagian besar masih menggantungkan diri dari bantuan luar.

Periode kedua (tiga bulan hingga setahun setelah Tsunami), merupakan fase dimana masyarakat sudah mulai membangun tempat tinggalnya, dan sebagian sudah mulai melakukan aktivitas pertanian di lahan yang bisa diolah. Beberapa dari mereka mencoba menanam beberapa jenis tanaman pangan semusim untuk melihat apakah tanaman tersebut masih bisa menghasilkan atau tidak. Namun, sangat sedikit petani yang berhasil, mereka harus terlebih dulu menghilangkan kadar garam di lahan mereka sebelum padi ditanam. Untuk mengurangi kandungan garam, sebagian

masyarakat mencoba mengairi lahan sawahnya kemudian dibuang airnya, lalu diairi kembali. Karena kekurangan dana dan tenaga, tidak banyak petani yang mau mengolah lahannya pada fase ini. Di akhir fase kedua ini, yaitu kira-kira hampir satu tahun setelah Tsunami, beberapa petani karet sudah berani menyadap pohon karetnya yang masih bertahan. Namun demikian, mereka melaporkan bahwa hasil getah yang diperoleh sangat sedikit.

Periode ketiga (lebih dari setahun setelah Tsunami), merupakan fase yang ditandai dengan kegiatan rehabilitasi lahan. Masyarakat petani mulai kembali ke aktifitas utama mereka yaitu bertani. Ternyata, curah hujan yang cukup tinggi dan intensitasnya yang sering telah membantu mengurangi kadar garam secara alami. Petanipun mulai mengolah lahan sawahnya. Akan tetapi, kesuburan tanah sawah akibat tanah permukaan (*top soil*) yang tergerus air laut juga sangat berkurang sehingga kebutuhan pupuk menjadi lebih tinggi. Beberapa petani sudah mulai melakukan penanaman pohon buah-buahan dan pohon kayu. Pohon mangga merupakan jenis yang cukup banyak ditanam mengingat pohon ini cukup mampu bertahan di lahan yang terkontaminasi garam.

Peran eksternal

Pihak eksternal baik pemerintah, badan rehabilitasi pasca Tsunami, serta LSM lokal dan internasional cukup banyak berperan dalam upaya rehabilitasi. Berbagai program mereka laksanakan dalam upaya untuk membangun kembali areal yang terkena dampak Tsunami.

Upaya pembersihan lahan pasca bencana baik yang spontan dilakukan masyarakat, maupun melalui program yang didukung oleh beberapa LSM dan lembaga pemerintah, menentukan terjadinya perubahan fisik lahan dan tanah. Misalnya, masyarakat membuang tanah Tsunami dan puing-puing ke lokasi-lokasi tertentu tanpa mengetahui bahwa tanah tersebut sebetulnya berasal dari tanah sawah yang memiliki kesuburan tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk produksi pertanian.

Peran eksternal ini juga turut menentukan strategi pengelolaan lahan yang kemudian dipilih oleh petani. Melalui program pengembangan pertanian, petani sawah diberi pemahaman dan pelatihan mengenai jenis padi yang sesuai pada lahan dengan salinitas tinggi, pupuk yang seimbang, dan upaya pengelolaan lahan yang baik untuk mengurangi kadar garam. Beberapa kegiatan pengembangan kapasitas petani juga dilakukan untuk meningkatkan produksi beberapa tanaman perkebunan seperti kakao, karet, kelapa hibrida, dll.

Pengetahuan Masyarakat dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Dua hal penting yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah: (i) pengetahuan lokal bersifat dinamis dan senantiasa berkembang sejalan dengan perubahan fisik lahan (Dekens 2007a). Pengalaman manusia dalam merespon perubahan fisik lingkungan yang menjadi penopang kehidupan mereka, telah mendorong masyarakat untuk berinovasi mengembangkan strategi yang kelak menjadi modal pengetahuan mereka. Faktor yang berpengaruh dalam hal ini selain kemampuan pengamatan manusia sebagai subyek pengetahuan, juga dipengaruhi oleh introduksi pengetahuan dari pihak luar yang sangat berperan dalam program pembangunan dan rehabilitasi lahan (Dekens 2007b).

Perkembangan pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat dalam merespon kejadian pasca bencana merupakan masukan yang berharga dalam upaya pemulihan daerah, bilamana terjadi bencana yang serupa di kemudian hari (Dekens 2007a, 2007b). Fungsi pohon untuk mereduksi dampak Tsunami sekaligus sebagai pemecah angin laut serta jenis-jenis pohon yang dipilih juga dapat juga dimasukkan dalam upaya mitigasi di daerah yang rawan bencana. Beberapa indikator kerusakan lahan pasca Tsunami dan faktor yang paling menentukan kerusakan sebagaimana dipahami oleh masyarakat lokal dari pengamatan mereka dapat dimanfaatkan dalam tahap awal rehabilitasi lahan. Hal ini mendorong diskusi yang lebih dalam tentang hal penting kedua yang dibahas dalam tulisan ini yaitu (ii) pelibatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan bencana.

Sebagaimana dengan jenis pengetahuan lainnya, pengetahuan lokal memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda tergantung dari konteks, geografis dan waktu yang berbeda (Bankoff 2004). Masyarakat memiliki cara sendiri untuk mendefinisikan kondisi mereka, definisi ini bervariasi tergantung kepekaan masyarakat pada kerentanan dan ancaman yang mereka hadapi (Hilhorst 2004). Upaya menciptakan masyarakat sadar bencana perlu berawal dari definisi bencana yang dipahami oleh masyarakat itu sendiri.

Sebagai suatu respon yang bersifat adaptif terhadap perubahan baik internal maupun eksternal, sistem pengetahuan lokal bilamana dikombinasikan dengan pemahaman dalam konteks yang lebih luas dalam pembangunan berkelanjutan dapat bernilai penting untuk mengurangi dampak bencana. Sistem pengetahuan ini tidak hanya merupakan hal-hal yang diketahui oleh manusia, namun juga apa yang mereka terapkan dan mereka yakini yaitu kepercayaan, nilai, persepsi dan pandangan umum. Karena itu melalui kombinasi dari praktek lokal serta pengembangan pengetahuan yang ilmiah dapat diilustrasikan upaya adaptasi terhadap bencana yang tepat dengan kebutuhan lokal dan dapat menjadi contoh yang baik untuk wilayah lain.

Pengetahuan ini berkembang tidak hanya secara horizontal diantara komunitas dan interaksinya dengan eksternal namun juga secara vertikal dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pengetahuan lokal yang berasal dari kemampuan manusia untuk mengamati perubahan lingkungan mereka sendiri (Warren dkk 1995), serta berasal dari strategi adaptasi mereka sendiri menjadi lebih mudah diadopsi oleh masyarakat yang bersangkutan (Berkes dkk 2000). Kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri terhadap bencana harus lebih dipahami dalam konteks yang lebih luas dalam kaitannya dengan pengamanan sumber penghidupan dan prinsip keberlanjutan serta membangun daya lenting masyarakat dalam menghadapi krisis di masa yang lebih panjang.

Upaya mengurangi efek bencana seringkali hanya bersifat dari atas ke bawah (*topdown*) dan menempatkan masyarakat sebagai pihak korban yang tidak berdaya. Melalui pelibatan pengetahuan lokal dalam perencanaan kesiapsiagaan bencana, masyarakat diposisikan lebih aktif dan mampu keluar dari tekanan musibah yang mereka hadapi. Kolaborasi dan integrasi pengetahuan lokal dan ilmiah kiranya diperlukan untuk membangun komunikasi dasar demi terbangunnya program perencanaan (Mercer dkk 2010). Bila pengetahuan lokal menjadi dasar dari mekanisme kesiapsiagaan bencana yang sesuai dengan prioritas masyarakat, dan memperhitungkan aspek fisik, sosial-budaya masyarakat, serta menempatkan masyarakat sebagai aktor perubahan, maka pengetahuan ilmiah akan membantu menguatkan beberapa argumentasi ilmiah dari pengetahuan masyarakat, membangun prakiraan akan hal-hal penting yang tidak hanya akan bersandar dari pengamatan saja, tapi juga pada aspek pembangunan atau perubahan lain.

Daftar Pustaka

- Bankoff G. 2004. The Historical Geography of Disaster: Vulnerability and Local Knowledge in Western Discourse. In Bankoff G, Frerks G, Hilhorst D. *Mapping vulnerability: disasters, development, and people*. Earthscan, 2004 - Nature - Page 25 - 36. http://books.google.co.id/books?id=uGBYX4wVMkC&dq=%22local+knowledge%22,+cope,+disaster,&hl=en&source=gbs_navlinks_s. Diakses pada 2010-11-01 16:14:42.
- Berkes F, Colding J, Folke C. 2000. Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological Applications* 10(5):1251 - 1262.
- Dekens J. 2007a. Local Knowledge for Disaster Preparedness: a Literature Review. Kathmandu: ICIMOD (84p.).

- Dekens J. 2007b. *Herders of Chitral: the Lost Messengers? Local Knowledge on Disaster Preparedness in Chitral District, Pakistan*. Kathmandu: ICIMOD. www.disasterpreparedness.icimod.org.
- Djaenudin D, Henrisman M, Subagyo, Mulyani A, Suharta N. 2000. Kriteria kesesuaian lahan untuk beberapa komoditas pertanian. Versi 2. Bogor: Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. p 264.
- Hilhorst D. 2004. Complexity and Diversity: Unlocking Social Domains of Disaster Response. In Bankoff G, Frerks G, Hilhorst D. *Mapping vulnerability: disasters, development, and people*. Earthscan, 2004 - Nature - Page 52 – 66. http://books.google.co.id/books?id=uGBYX4wVMkkC&dq=%22local+knowledge%22,+cope,+disaster,&hl=en&source=gbs_navlinks_s. Diakses pada 2010-11-01 , 16:14:42.
- Laso JC, Marohn C, Dercon G, Dewi S, Ekadinata A, Joshi L, Van Noordwijk M, Cadisch G. 2007. *Assessment of Physical Mitigation Provided by Tree Crops In The 2004 Tsunami Event In West Aceh-Indonesia*. Paper Presented on Deutscher Tropentag 2007. Danielsen F, Sorensen MK. 2005. The Asian Tsunami: A protective role for coastal vegetation. *Science* 310(5748): 643
- Marohn C, Distel A, Laso J, Yusvita D, Dercon G, Dewi S, Lusiana B, Joshi L, Agus F, Meyer U, Van Noordwijk M, Cadisch G. 2007. *Assessing short and long term time dimensions of the Tsunami impact on the green infrastructure in Aceh, Indonesia: A challenge to data collection and methodological Approaches*. Paper Presented on Conference on International Agricultural Research for Development October 9-11, 2007 University Of Kassel-Witzenhausen and University Of Göttingen.
- Mercer J, Kelman I, Taranis L, dan Suchet-Pearson S. 2010. Framework for integrating indigenous and scientific knowledge for disaster risk reduction. *Disasters* 34, no. 1: 214–239.
- Pomeroy RS, Ratner BD, Hall SJ, Pimoljinda J, Vivekanandan V. 2006. Coping with disaster: Rehabilitating coastal livelihoods and communities. *Marine Policy* 30: 786–793.
- Walker D, Sinclair FL. 1998. Acquiring qualitative knowledge about complex agroecosystems. Part 2: Formal representation. *Agricultural Systems*, 56(3): 365-386.
- Warren DM, Slikkerveer LJ, Brokensha D. 1995. *The cultural dimension of development: indigenous knowledge systems*. Intermediate Technology Publications, London.

Pemberdayaan Petani Perempuan Korban Konflik Melalui Pengembangan Teknologi dan Akses Pasar

Abdul Wahab

Yayasan HIJRAH

Pendahuluan

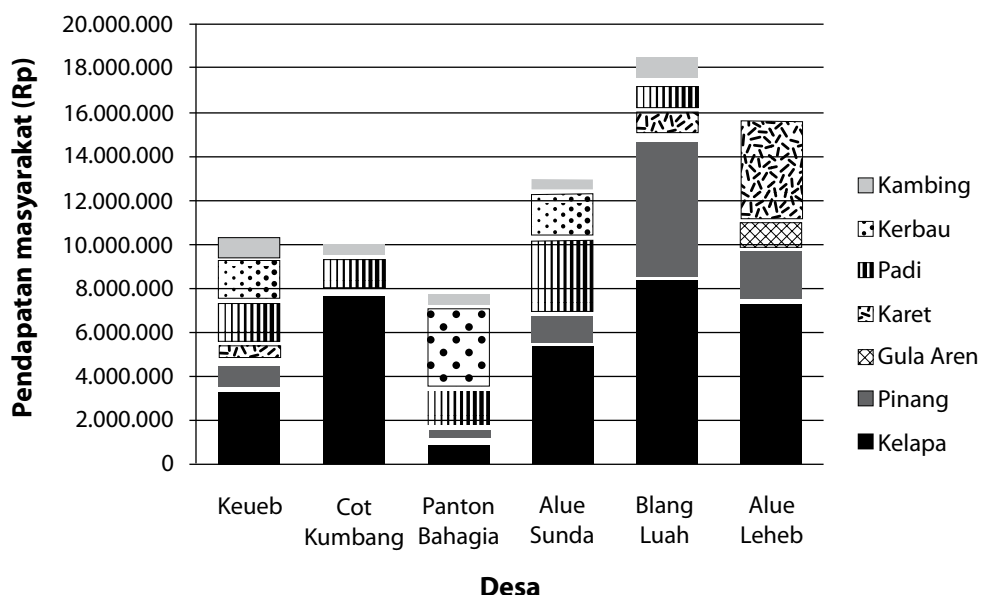
Pertanian, perkebunan dan ternak merupakan mata pencaharian bagi masyarakat di desa Alue Leuhob dan desa Blang Luah, Kecamatan Woyla Barat; desa Keueb, desa Alue Sunda, desa Panton Bahagia dan desa Cot Kumbang, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Desa-desanya tersebut pernah menjadi bagian dari wilayah konflik di Aceh. Sumber penghasilan masyarakat di enam desa tersebut berasal dari karet, pinang, kelapa, aren, sawah, lahan kering dan ternak (Tabel 1). Keragaman tanaman yang mereka usahakan merupakan aset yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkesinambungan. Namun stabilitas harga komoditi tersebut bervariasi, sebagai contoh, harga kopra bisa berkisar antara Rp. 2.000,-/kg (pada bulan Oktober 2008) hingga mencapai Rp. 3.200,-/kg, sementara harga pinang masih berkisar antara Rp. 2.000,- sampai Rp. 2.700,-/kg.

Upaya untuk mengembangkan usaha keluarga pada kelapa (kopra) dan pinang merupakan pilihan karena kedua komoditi tersebut dimiliki oleh hampir semua keluarga dengan jumlah yang cukup banyak. Di enam desa yang terdiri dari 403 kepala keluarga (KK) terdapat 25.935 batang pinang dan 34.368 batang kelapa, yang berarti tiap KK rata-rata memiliki 64 batang pinang dan 85 batang kelapa, jumlah yang cukup potensial sebagai sumber pendapatan.

Dilihat dari sumbangan kedua komoditi tersebut terhadap pendapatan masyarakat, terlihat bahwa kelapa dan pinang adalah komponen yang paling besar, berkisar antara Rp. 5.000.000,- (50% dari total pendapatan masyarakat) di desa Keueb hingga Rp. 15.000.000,- (80% dari total pendapatan masyarakat) di desa Blang Luas, meskipun di desa Panton Bahagia hanya kurang dari Rp. 2.000.000,- (25% dari total pendapatan masyarakat) (Gambar 1).

Tabel 1. Asset tanaman, sawah dan ternak milik masyarakat dampingan HIJRAH

No	Nama Desa	Kk	Anggota keluarga		Sumber Penghasilan								
			Laki-Laki	Perempuan	Total	Karet (Batang)	Pinang (Batang)	Kelapa (Batang)	Aren (Batang)	Sawah (Ha.)	Lahan Kering (Ha)	Kerbau (Ekor)	Kambing (Ekor)
1	Alue Leheb	54	87	92	179	16.020	3.682	4.772	1.104	28,6	20		
2	Keueb	176	316	304	620	5.710	10.426	11.332	174	98	183	168	247
3	Alue Sunda	81	134	134	268	20	5.092	9.374	13	79	81	86	65
4	Panton Bahagia	37	68	89	157	115	1055	880	-	18	4	68	33
5	Blang Luah	18	38	27	65	930	5.380	3.180	69	6	11	2	33
6	Cot Kumbang	37	57	56	113	-	300	4.830	-	16	17	-	33
JUMLAH		403	700	702	1.402	22.795	25.935	34.368	1.360	243	316	324	411



Gambar 1. Sumbangan beberapa hasil pertanian, perkebunan dan ternak terhadap pendapatan masyarakat

Pengembangan pengelolaan hasil panen kelapa dan pinang mempunyai beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan dalam mengelola hasil panen, sehingga banyak kelapa dan pinang busuk pada musim hujan, karena tidak bisa dikeringkan. Bahkan pada musim hujan kelapa tumbuh tunas, apabila dikeringkan hasilnya akan turun sekitar 35% (Gambar 2).
2. Teknologi yang ada di masyarakat belum mampu menjawab permasalahan teknis, sebagai contoh:
 - a. Alat pengering kopra tradisional hanya mampu dioperasikan pada musim kemarau, dan memerlukan 3 hari untuk pengeringan dengan bahan bakar berupa kayu, tempurung 100% dan serabut 100% (Gambar 3)
 - b. Dapur pengering kelapa dan pinang tidak dibangun permanen, hanya dapat dipakai sekali atau dua kali karena terbakar
 - c. Pengeringan kelapa mengandalkan sinar matahari dan memerlukan waktu sekitar 7 hari, pengeringan pinang memerlukan waktu 30 hari pada musim hujan (Gambar 4). Pengeringan dengan cara ini juga rawan terhadap gangguan ternak dan pembusukan

3. Aktivitas produksi dan pemasaran masih dilakukan sendiri-sendiri, sehingga sangat rentan terhadap permainan para agen dan *'tauke'* atau pedagang pengumpul yang ingin mendapatkan keuntungan lebih besar
4. Sebagian besar sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi yang tersedia belum layak.
5. Belum ada organisasi petani perempuan sebagai wadah untuk membicarakan berbagai permasalahan, baik permasalahan sosial kemasyarakatan perempuan maupun permasalahan usaha ekonomi keluarga, padahal, peran perempuan tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan kelapa dan pinang
6. Minimnya akses petani perempuan terhadap berbagai sumber informasi terutama terkait perkembangan pasar komoditi yang mereka usahakan.



Gambar 2. Kelapa menjadi busuk (atas) dan bertunas (bawah) saat musim hujan karena tidak bisa dikeringkan



Gambar 3. Alat pengering kopra tradisional yang terbakar setelah sekali atau dua kali dipakai

Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya mengatasi permasalahan dalam pengembangan sumberdaya alam (komoditi) di desa-desa dampingan terutama kopra dan pinang, maka HIJRAH mencoba melakukan program pendampingan khususnya kepada para perempuan korban konflik. Adapun tujuan dari program tersebut adalah:

1. Memberikan pembinaan kepada petani perempuan dalam kaitannya dengan penyelesaian persoalan terutama persoalan ekonomi dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya manusia. Pembinaan dilakukan dalam wadah kelompok usaha bersama (Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM). KSM dipilih sebagai pendekatan agar pengumpulan modal lokal bisa segera terwujud. Selain itu, KSM juga berfungsi untuk saling menumbuhkan kepercayaan dan saling kontrol, sehingga pengembangan ekonomi menjadi bagian dari keseharian dan menjadi kekuatan sosial



Gambar 4. Pengerinan kopra dan pinang dengan mengandalkan panas matahari

2. Mendorong masyarakat untuk memiliki sarana dan alat kerja yang memadai agar produksi petani kopra dan pinang meningkat dan berkelanjutan baik di musim kemarau maupun penghujan sehingga hasil yang didapat bisa maksimal
3. Mengupayakan agar jumlah kelapa dan pinang yang terbuang sia-sia karena terbatasnya fasilitas pengeringan berkurang
4. Meningkatkan kapasitas petani kopra dan pinang dalam mengakses pasar sehingga usahanya lebih menguntungkan.
5. Meningkatkan partisipasi petani perempuan pada setiap tahapan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di wilayahnya
6. Mendorong terciptanya peluang kerja untuk para korban bencana yang dapat menyerap tenaga kerja dan menghasilkan pendapatan
7. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kemandirian masyarakat korban bencana

Tahapan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat perempuan di lokasi pasca konflik dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra program dan pelaksanaan program. Pra-program adalah kegiatan yang dilakukan sebelum program dilaksanakan. Langkah pertama adalah membangun hubungan atau silaturahmi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, aparat desa dan keluarga mereka sehingga bisa berkomunikasi dan meningkatkan pemahaman mereka, bahwa kearifan lokal yang ada di desa setempat adalah media untuk “berfikir bersama” dan bukan “memikirkan masyarakat”. Silaturahmi dilakukan dengan menghadiri acara-acara seperti kenduri untuk mengawali waktu tanam padi (Gambar 5).

Kemudian, membangun komunikasi/koordinasi dengan instansi pemerintah (Kantor Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Sumber Daya Air, dan Disperindagkop) dengan menjadi Konsultan Sosiologis Program ETESP ADB Bidang Pertanian, Perikanan dan Irigasi dan mengikutsertakan staf instansi dalam kunjungan ke lapangan agar lebih memahami permasalahan masyarakat (Gambar 6). Membangun hubungan dengan keluarga relawan sehingga terbangun kepercayaan antara HIJRAH dengan keluarga relawan. Membina hubungan antara masyarakat dengan staf pendamping dilakukan melalui kunjungan lapangan dimana staf mengajak serta orang tua atau keluarganya. Dan selain itu, dilakukan penggalan informasi (data) potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat bersama relawan, staf, tokoh masyarakat dan aparat desa.



Gambar 5. Aktivitas Pra Program: acara adat kenduri untuk mengawali musim tanam padi di Desa Blang



Gambar 6. Aktivitas Pra Program: koordinasi dengan dinas atau instansi terkait dalam bentuk formal atau informal dan mengajak staf Dinas atau Instansi untuk melakukan kunjungan ke lapangan

Pelaksanaan program mencakup beberapa kegiatan, seperti persiapan sosial dan kelompok. Sosialisasi dengan melibatkan masyarakat biasa dan tokoh masyarakat untuk menyepakati mekanisme program yang akan dilaksanakan, misalnya: swadaya lahan, swadaya material dan program yang dikelola melalui wadah KSM merupakan awal pelaksanaan program dalam persiapan sosial.

Kajian Bersama Masyarakat (*Participatory Rural Appraisal/PRA*) dilakukan untuk membangun komunikasi/ silaturahmi dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat desa dan bersama-sama mengkaji dengan mendalam sumber daya dan pranata social dari masyarakat setempat. Hasil kegiatan ini diantaranya peta sumber daya desa berdasarkan kunjungan lapangan atau transek dan diskusi. Kedua aktifitas tersebut melibatkan laki-laki serta perempuan (Gambar 7 dan 8). Selain itu, diperoleh informasi sejarah desa versi masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat desa; klasifikasi kesejahteraan sesuai dengan kearifan lokal yang ada di masing-masing desa; data peta sumber daya desa berdasarkan asset ekonomi dan aktifitas produksi yang dilakukan oleh masyarakat desa; data perubahan kecenderungan dari sisi sosial ekonomi maupun sosial budaya; data para pihak (*stakeholders*) yang berpengaruh terhadap aktifitas sosial ekonomi, sosial budaya maupun pemerintahan; serta data pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aktifitas sosial ekonomi dan kemasyarakatan.



Gambar 7. Aktivitas pemetaan sumber daya usaha bersama masyarakat melalui kegiatan transek dilakukan dengan melibatkan kaum laki-laki dan perempuan



Gambar 8. Diskusi-diskusi di desa dampingan dengan melibatkan partisipasi petani laki-laki maupun perempuan

Kelompok dibentuk di masing-masing desa sesuai dengan kebutuhan. Perlu adanya kesepakatan bagaimana penggalian modal swadaya dilakukan di masing-masing kelompok. Salah satunya adalah dengan membentuk Badan Koordinasi Kelompok Swadaya Masyarakat (BKKSMM) sebagai media komunikasi kelompok antar desa. Kapasitas kelompok diperkuat melalui pelatihan dasar KSM bagi sebagian anggota dan pengurus (Gambar 9) sedangkan penguatan kapasitas pengurus melalui pelatihan Manajemen Kelompok (Gambar 10).



Gambar 9. Proses penguatan kelompok melalui pelatihan dasar KSM dengan metode partisipatif



Gambar 10. Para pengurus beserta fasilitator dari HIJRAH belajar bersama melalui pelatihan manajemen administrasi kelompok untuk membangun transparansi

Kegiatan yang dilakukan dalam persiapan untuk penerimaan bantuan adalah menyusun rencana kerja dan indikator capaian program bersama masyarakat agar masyarakat mengetahui dan menyadari apa yang harus dilakukan bersama HIJRAH. Rencana kerja yang disusun antara lain: penentuan waktu pelaksanaan untuk swadaya lahan, swadaya material, gotong royong membangun dapur pengering, aktifitas produksi dan pemasaran secara kolektif dan lain sebagainya.

Kegiatan konstruksi dapur pengering kopra dan pinang dilakukan dengan pembagian kelompok dan sub kelompok di masing-masing kelompok. Lahan

dan material dipersiapkan secara swadaya. Jadwal kerja dan kesiapan tenaga tukang disusun sedemikian rupa agar kegiatan dapat berlangsung lancar. Dalam memberikan bimbingan teknis, dilakukan dua program dimana yang pertama, HIJRAH menanggung tenaga tukang, dan masyarakat sebagai tenaga kuli bangunan. Pada program kedua, HIJRAH memberikan bimbingan teknis dalam kajian desain gambar dan studi banding ke lokasi yang sudah dibangun (Gambar 11).



Gambar 11. Kunjungan ke lokasi lain untuk melihat langsung pembangunan dapur pengering kopra dan pinang permanen



Gambar 12. Pelaksanaan pembangunan dapur pengering kopra dan pinang dengan keterlibatan perempuan dan laki-laki penerima manfaat



Gambar 13. Penyelesaian konstruksi dapur pengering kopra dan pinang yang dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat penerima manfaat baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kapasitas atau kemampuannya masing-masing

Pendampingan kelompok melalui pertemuan rutin (Gambar 14) untuk membahas hal terkait dengan administrasi umum dan keuangan serta juga permodalan. Pendampingan usaha dilakukan melalui kegiatan membuat dokumentasi berkaitan dengan pemanfaatan dapur pengering kopra dan pinang serta dokumentasi harga beli bahan baku dan penjualan produk. Pendampingan juga dilakukan dalam survey pasar lokal ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten, survey pasar antar kabupaten dan propinsi, serta dalam aktifitas produksi dan pemasaran bersama (Gambar 15).



Gambar 14. Pertemuan rutin pengurus KSM untuk membahas pengelolaan kelompok dan usaha bersama serta kunjungan informal sebagai sarana belajar bagi kaum perempuan



Gambar 15. Proses produksi dan pemasaran kopra yang dilakukan secara kolektif sehingga petani kopra mampu mendapat harga yang layak di pasaran

Hasil yang Telah Dicapai

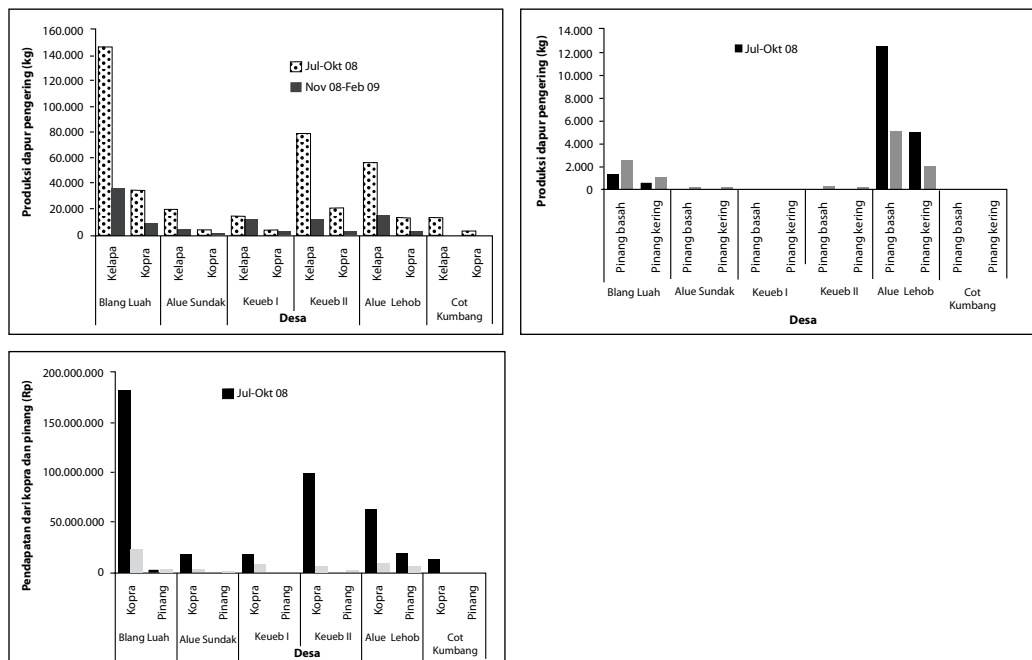
Kegiatan pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh HIJRAH selama 24 bulan di Kecamatan Arongan Lambalek dan Kecamatan Woyla Barat, Aceh Barat, telah menunjukkan hasil beberapa indikator capaian nya antara lain :

1. Berdirinya 6 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dikelola oleh petani perempuan di 5 desa sebagai media belajar berkelompok dan mengelola usaha bersama
2. Berdirinya BKKSM (Badan Koordinasi Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai media komunikasi antar kelompok, antar desa dalam membangun kelompok yang dikelola oleh petani perempuan untuk belajar menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi petani secara bersama-sama
3. Terbangunnya 31 unit dapur pengering kopra dan pinang hemat energi dan ramah lingkungan melalui swadaya masyarakat (tenaga 100%, material 5%) . Dapur pengering ini dikelola oleh sub-kelompok yang telah dibentuk oleh masing-masing KSM. Dan dapur pengering tersebut mampu mengeringkan kopra dan pinang hanya dalam waktu 5 jam dengan bahan bakar 25% nya dari serabut kelapa.
4. Dari Juli 2008 sampai Februari 2009, tiga puluh satu (31) unit dapur pengering telah beroperasi dan memproduksi kopra kering 87.658 kg yang berasal dari 414.805 butir kelapa dari volume usaha 476 kali dan pendapatan total yang diperoleh sebesar Rp. 442.992.450,-. Selain untuk mengeringkan kelapa, dapur pengering juga telah mampu menghasilkan pinang kering sebanyak 8.621 kg yang berasal dari 21.645 kg pinang basah dari volume usaha 126 kali dan pendapatan total yang diperoleh sebesar Rp. 30.406.300,- (Gambar 16 dan Tabel 2).
5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap petani perempuan pengelola kelompok sehingga mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan berbagai pengambilan keputusan di desa. Sebagai contoh; dipilihnya 2 orang pengurus KSM menjadi anggota *tuhapeut*, petani perempuan sudah dilibatkan dalam kegiatan rapat desa serta dipercaya mengelola bantuan pertanian dari Pemda, pengurus kelompok dilibatkan mengelola keuangan desa atau keuangan program PPK dan juga beberapa kegiatan lainnya.
6. Lima KSM telah melakukan aktifitas produksi dan pemasaran bersama sehingga mampu mendapatkan harga pasar yang lebih layak. Pemasaran bersama dilakukan dengan memanfaatkan bantuan modal dari HIJRAH berupa sistem bagi hasil keuntungan (50% HIJRAH, 12,5% BKKSM, 12,5% KSM dan 25% penanggung jawab di KSM).
7. Lima KSM yang dikoordinir oleh BKKSM sudah mempunyai posisi tawar dihadapan pelaku pasar baik ditingkat agen keliling, pedagang pengumpul di kecamatan dan tauke antar kabupaten dari Bireun.

Hal-Hal yang Mempengaruhi Pencapaian Program

Beberapa hal yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian program adalah; proses yang terjadi dalam mencapai tujuan, berbagai potensi dan sumber daya para pihak (*stakeholders*) dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan program yang menentukan “kesenjangan pemahaman” yang akan berdampak pada perbedaan pola dukungan yang diberikan terhadap kelancaran program.

Peran tokoh masyarakat dan aparat desa sangat berpengaruh terhadap capaian yang telah direncanakan. Hal ini dianggap penting karena proses pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Selama ini peran tokoh masyarakat dan aparat desa masih cukup dominan, karena mereka lebih berpengalaman di lingkungan masyarakat desa.



Gambar 16. Produksi kelapa dan pinang basah yang mampu dikeringkan pada dapur pengering yang dikembangkan di enam desa, dan pendapatan yang diperoleh dari proses pengeringan

Tabel 2. Jumlah petani, volume usaha, produksi kelapa dan pinang dalam kondisi basah dan kering serta pendapatan di enam desa

Desa	Komoditi	Jumlah petani		Volume Usaha		Jumlah bahan baku (kg)				Jumlah produksi (kg)		Pendapatan (Rp.)	
		Jul-Oct 08	Nov 08-Feb 09	Jul-Oct 08	Nov 08-Feb 09	Jul-Oct 08	Nov 08-Feb 09	Jul-Oct 08	Nov 08-Feb 09	Jul-Oct 08	Nov 08-Feb 09	Jul-Oct 08	Nov 08-Feb 09
Blang Luah	Kopra	19	16	107	47	147.465	37.057	35.677	9.364	183.391.000	22.340.700		
	Pinang		8		18		2.475		965		3.003.000		
Alue Sundak	Kopra	43	7	52	10	19.900	4.560	4.281	1.005	18.083.900	2.605.500		
	Pinang	1			1		100		40		140.000		
Keueb I	Kopra	11	7	20	13	14.780	12.210	4.012	2.906	19.078.000	7.236.200		
	Pinang												
Keub II	Kopra	32	15	95	21	80.109	13.250	21.096	2.700	99.049.500	6.716.000		
	Pinang		1		1		150		60		180.000		
Alue Lehob	Kopra	20	8	81	20	56.859	15.115	13.609	3.492	63.024.250	8.472.400		
	Pinang		6		31		5.145		2.065		6.495.800		
Cot Kumbang	Kopra	5	0	10	0	13.500	0	3.125	0	12.925.000	0		
	Pinang												

Jangka waktu yang cukup pendek yaitu 12 bulan, dengan pengalaman berorganisasi, bergaul, pendidikan serta keterampilan kaum perempuan penerima manfaat yang masih terbatas, maka beban program ini cukup berat untuk mencapai target atau tujuannya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh manajemen HIJRAH adalah menempatkan empat orang staf lapangan, dimana dua orang diantaranya berasal dari masyarakat setempat. Hal ini untuk mempermudah proses pendekatan dan pendampingan di dalam program ini. Strategi tersebut dilakukan karena pendampingan yang dilakukan HIJRAH hanya untuk waktu tertentu dan bersifat mengawali, memberikan contoh dan mendorong motivasi masyarakat desa setempat.

Banyaknya bantuan di Aceh pasca gempa dan Tsunami serta konflik yang terjadi telah disalah-artikan oleh masyarakat sehingga berdampak pada perubahan orientasi dan motivasi masyarakat dalam mengelola dukungan dari berbagai pihak. Hal ini terjadi baik di masyarakat maupun aparat pemerintah di tingkat pedesaan.

Adanya kendala pemasaran kopra dan pinang, yang disebabkan karena masuknya agen keliling yang mempermainkan harga, meskipun sebelumnya sudah ada kesepakatan harga di tingkat kecamatan yang diinisiasi oleh HIJRAH. Perbedaan harga yang diberikan oleh agen keliling dengan pedagang pengumpul di tingkat kecamatan berkisar antara Rp. 500,- sampai Rp. 2.000,-. Melihat hal tersebut, HIJRAH mencoba mengatasi persoalan tersebut dengan bekerja sama dengan salah satu agen keliling yang menjadi anggota kelompok untuk melakukan pemasaran secara kolektif untuk petani kopra yang tergabung dalam wadah kelompok. Upaya tersebut mampu membantu KSM, hingga program berakhir lima KSM mampu mendapatkan harga kopra yang layak, setara dengan harga yang diberikan oleh pedagang pengumpul di kecamatan.

Pemahaman staf pelaksana dalam menganalisa kondisi masyarakat dampingan juga berpengaruh terhadap pencapaian program. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya pencapaian program, yaitu, pertama adalah staf pelaksana program mampu menganalisa apakah dukungan program melalui pengembangan teknologi yang dilakukan oleh HIJRAH sudah dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan kaum perempuan selain kaum laki-laki. Kedua, staf pelaksana HIJRAH mampu menganalisa apakah program yang dilaksanakan mampu mensejahterakan kaum perempuan atau justru menjadi beban ganda bagi mereka. Dan yang terakhir, staf pelaksana program semakin percaya diri dan punya kebanggaan di dalam memfasilitasi kelompok pemberdayaan perempuan.

Proses pelaksanaan dan capaian program selayaknya disesuaikan dengan rencana tanpa mengesampingkan proses partisipasi masyarakat. Hal tersebut tentunya tidak

lepas dari kekompakan tim pelaksana program secara keseluruhan, agar konsolidasi internal tim pelaksana program bisa menunjang keberhasilan program. Konsolidasi tim juga bermanfaat untuk menunjang proses peningkatan motivasi dan kapasitas staf yang umumnya mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda agar berbagai kesenjangan pemahaman terhadap proses dan capaian program antara staf dengan masyarakat, atau diantara sesama staf secara perlahan-lahan “dapat dikelola dengan baik”.

Monitoring dan asistensi yang dilakukan oleh Hivos² selaku lembaga donor sangat menunjang komitmen pelaksana program di lapangan untuk menjaga agar proses dan capaian program dilaksanakan sesuai dengan tahapan program yang telah disepakati antara HIJRAH dan Hivos, dengan tanpa mengesampingkan terjadinya perubahan rencana atau tahapan program dalam proses implementasi di masyarakat. Selain itu, juga sangat bermanfaat dalam proses penyamaan persepsi dan perspektif program yang berorientasi pada kesejahteraan dan keterbukaan pada masyarakat yang berkeadilan gender dengan tetap mengakui keberadaan dan karunia Tuhan.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini diantaranya adalah belum terintegrasinya program ini dengan usaha komoditi pertanian atau komoditi non pertanian, misalnya petani karet dan nelayan membutuhkan bahan pengawet asap cair organik yang potensial bisa dihasilkan dari penyulingan tempurung. Petani kopra baru mampu mendapat nilai tambah dari kelapa berupa kopra kering, sementara serabut dan tempurung kelapa dijual dalam kondisi mentah, sehingga nilai tambahnya masih kecil hanya sekitar Rp. 150.000,- untuk satu truk serabut dan Rp. 200.000,- untuk tempurung kelapa (Gambar 17). Petani secara umum belum mengetahui informasi berbagai produk turunan yang dihasilkan dari kelapa, dan belum mampu mengelola bahan baku kelapa selain kopra dan buahnya

Kebijakan pemerintah belum memihak pada petani kelapa yang mayoritas adalah masyarakat, justru prioritas diberikan pada komoditi sawit yang umumnya dikelola oleh para pengusaha besar dengan usaha yang padat teknologi dan permodalan. Kelapa masih menjadi produk unggulan kelima.

Selain itu, kelapa-kelapa yang ada kondisinya sudah berumur sangat tua, produktifitasnya rendah berkisar antara 20 sampai 30 butir per batang per tiga bulan. Lagipula, pengetahuan petani untuk merawat kebun kelapa sangat terbatas.

2 Sebuah organisasi nirlaba dari Belanda yang memiliki misi sosial untuk melayani masyarakat dan mendukung transparansi, keterbukaan, serta kesetaraan gender.



Gambar 17. Serabut dan tempurung kelapa yang dihasilkan masyarakat masih dijual dalam bentuk bahan baku

Penutup

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi dari masyarakat yang didampingi HIJRAH, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain:

1. Perlu dikembangkan program pertanian kelapa terpadu baik dari sisi pengelolaan kebun maupun pengelolaan produk turunan kelapa untuk dikembangkan lebih lanjut
2. Perlu dikembangkan teknologi yang mampu membangun usaha pengolahan kelapa menjadi usaha yang terpadu atau saling mendukung dengan kelompok usaha lain, misalnya dengan petani karet, nelayan dan usaha lainnya
3. Perlu adanya peremajaan kebun kelapa yang usianya sudah tua (lebih dari 40 tahun) karena produktifitasnya rendah
4. Perlu adanya peningkatan kapasitas petani dalam hal manajemen kebun
5. Perlu adanya kebijakan pemerintah untuk pengembangan perkebunan kelapa yang 90% lebih merupakan kebun milik masyarakat.

Setelah ada upaya pendampingan, maka rencana program yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

1. Peningkatan kapasitas staf dan manajemen
2. Pengembangan kapasitas organisasi
3. Peningkatan kapasitas KSM dalam mengembangkan organisasi dan mengelola usaha bersama
4. Replikasi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan hemat energi untuk menghasilkan berbagai produk turunan kelapa/pinang sehingga mampu mendukung berbagai usaha tani lainnya seperti karet, kakao, usaha perikanan nelayan dan lain sebagainya
5. Pengembangan usaha tani kelapa terpadu
6. Tanaman yang beragam (manajemen kebun)
7. Pengolahan pasca panen hingga pemasaran
8. Peremajaan kebun kelapa rakyat
9. Membangun komunikasi dengan para pihak untuk mencari dukungan dana (*fund raising*).

BAB 3

Peluang Pengembangan Pertanian, Peternakan, Tambak dan Agroforestri

Produksi Pertanian Aceh Barat Sebelum dan Sesudah Tsunami sebagai Pembelajaran untuk Ketahanan Pangan

T. Helmy P¹, T. Zainal Abidin² dan T. Irwansyah³

¹Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat

²Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat

³Kepala Seksi Peningkatan Produksi Pangan pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat

Pendahuluan

Aceh Barat adalah salah satu kabupaten dari 22 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah yang terletak pada bagian paling barat Provinsi Aceh, dengan posisi 04°06' – 04°47' Lintang Utara dan 95°52' – 96°30' Bujur Timur. Kabupaten Aceh Barat memiliki luas wilayah 2.927,95 km² (297.795 ha) dan dengan batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan, 46 kemukiman dan 321 'gampong' (setingkat desa) dengan jumlah penduduk sekitar 163.943 jiwa. Dari 321 gampong di Kabupaten Aceh Barat sekitar 213 gampong (66,36%) merupakan wilayah datar, sedangkan sisanya 108 gampong (34,64%) merupakan wilayah pesisir, lembah dan lereng. Sebagai daerah pertanian Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi sangat baik untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian, selain tersedia lahan yang luas, iklim dan curah hujan juga mendukung (beriklim basah). Rata-rata curah hujan di Kabupaten Aceh Barat mencapai 356,01 mm/tahun dengan rerata hari hujan 229 hari/tahun. Pertanian adalah sumber penghidupan pokok bagi lebih dari 70% penduduk di Kabupaten Aceh Barat. Merupakan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan bagi lebih dari 25 ribu rumah tangga petani.

Produksi beras merupakan komoditas politik yang sangat strategis, sehingga produksi beras dalam negeri menjadi tolok ukur ketersediaan pangan bagi Indonesia (Suryana 2002). Oleh sebab itu, campur tangan pemerintah sangat besar dalam upaya peningkatan produksi dan stabilitas harga beras di Indonesia. Kecukupan pangan (terutama beras) dengan harga yang terjangkau telah menjadi tujuan utama kebijakan pembangunan pertanian. Kekurangan pangan bisa menyebabkan kerawanan ekonomi, sosial, dan politik yang dapat menggoyahkan stabilitas daerah dan nasional.

Pada dekade 1980-an Kabupaten Aceh Barat pernah mengalami kemajuan yang pesat di sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan. Salah satu yang menjadi catatan penting adalah ketika dicapainya swasembada pangan pada tahun 1984. Akan tetapi swasembada yang dicapai hanya sesaat, produksi pertanian khususnya beras kemudian merosot tajam dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dan tergantung pada daerah lain atau beras impor. Hal itu lebih jelas terlihat selama kurun waktu 10 tahun terakhir (1999-2008) atau tepatnya lima tahun sebelum dan lima tahun sesudah Tsunami menghantam bumi Aceh, Nias dan beberapa negara lainnya di Asia pada 26 Desember 2004.

Pasang surut laju pertumbuhan produksi pertanian Kabupaten Aceh Barat selama 10 tahun terakhir dipengaruhi oleh, antara lain: (i) pemekaran kabupaten Aceh Barat menjadi tiga kabupaten (Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya), sebagian besar lahan dan infrastruktur pertanian yang sebelumnya merupakan aset dari Kabupaten Aceh Barat sebagai kabupaten induk, setelah pemekaran lahan dan infrastruktur tersebut pindah menjadi milik kabupaten baru hasil pemekaran. Akibatnya luas lahan dan infrastruktur pertanian di Kabupaten Aceh Barat berkurang; (ii) situasi konflik yang kian memanas dan mencekam pada tahun 1998-2004, yang membuat ruang gerak masyarakat untuk melakukan usaha khususnya usaha pertanian menjadi terbatas, akibatnya banyak lahan dan infrastruktur pertanian tidak bisa difungsikan, kemudian rusak dan hancur; (iii) bencana Tsunami membuat ribuan hektar lahan, sarana prasarana pertanian khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat rusak dan hancur total; (iv) perubahan iklim yang tidak mampu diikuti atau diadaptasi oleh petani dan ditambah dengan minimnya infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi juga menjadi faktor kemerosotan produksi pertanian khususnya tanaman pangan di Aceh Barat.

Sebagai wilayah agraris dimana lebih dari 70% penduduk berpenghidupan di sektor pertanian, maka sektor pertanian menjadi basis kekuatan utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Karena itu, sektor pertanian

menjadi komponen yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih maksimal dan fokus untuk mendorong laju pertumbuhan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat. Pertumbuhan ekonomi tidak mungkin dicapai, tanpa didukung oleh pertumbuhan produksi pertanian yang maksimal. Jika sektor pertanian tidak tertangani dengan baik, maka dalam jangka panjang akan terjadi ancaman tingginya angka pengangguran, kemiskinan serta ketersediaan dan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Barat. Tabel 1 menunjukkan luas dan produksi pertanian di Aceh Barat pada tahun 2008.

Tabel 1. Luas tanam, luas panen dan produksi padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Aceh Barat, tahun 2008

No	Komoditi	Luas tanam (ha)	Luas panen (ha)	Produksi (Ton)
1	Padi			
	Padi sawah	10.449,00	10.449,00	44.199,00
	Jumlah	10.449,00	10.449,00	44.199,00
2	Palawija			
	Jagung	419,00	419,00	854,76
	Kedele	250,00	250,00	253,00
	Ubi Kayu	154,00	145,00	2.107,00
	Ubi Jalar	46,00	46,00	621,00
	Kacang Tanah	1.012,00	1.012,00	1.639,40
	Kacang Hijau	20,00	20,00	20,20
	Jumlah	1.901,00	1.901,00	5.495,36
3	Sayur-sayuran			
	Kacang Panjang	149,00	149,00	530,00
	Cabe	160,00	160,00	738,00
	Kangkung	92,00	92,00	571,00
	Ketimun	66,00	66,00	368,00
	Tomat	00,00	00,00	0,00
	Terong	64,00	64,00	360,00
	Bayam	66,00	66,00	141,00
	Jumlah	597,00	597,00	2.708,00
4	Buah-buahan			
	Mangga	13.452,00	4.580,00	3.939,00
	Rambutan	94.645,00	36.570,00	27.431,00

Jeruk Manis	19.021,00	3.527,00	1.694,00
Langsat	12.478,00	3.644,00	2.373,00
Durian	56.752,00	25.085,00	45.153,00
Sawo	3.745,00	2.260,00	949,00
Jambu	692,00	1.103,00	650,80
Nenas	0,00	0,00	0,00
Pisang	4.238,00	3.382,00	1.082,00
Pepaya	5.239,00	912,00	593,00
Semangka	76,00	76,00	1.154,00
Jumlah	210.338,00	82.139,00	120.649,80

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat 2009

Produksi Pertanian Sebelum Tsunami

Laju produksi pertanian tidak hanya tergantung pada berapa luas lahan yang tersedia, berapa luas lahan yang ditanami dan berapa luas lahan yang di panen, faktor lain yang lebih menentukan adalah bagaimana kondisi sosial, politik dan tingkat kerawanan pada wilayah tersebut. Kondisi sosial, politik, keamanan yang kondusif akan berkontribusi besar dalam meningkatkan gairah dan semangat usaha tani masyarakat pedesaan. Dan secara otomatis akan berdampak pada peningkatan produksi dan keberhasilan pembangunan pertanian di Kabupaten Aceh Barat.

Seperti halnya dengan sektor yang lain, sektor industri, perdagangan dan jasa yang terkena dampak parah akibat krisis ekonomi pada tahun 1997, sektor pertanian juga tidak terlepas dari guncangan krisis pada masa itu. Akan tetapi sebagai sektor riil ekonomi rakyat di pedesaan, sektor pertanian mampu bertahan menghadapi ancaman krisis tersebut, meskipun produksi tidak maksimal tidak berdampak serius pada ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Barat. Pasang surut produksi pertanian Kabupaten Aceh Barat sebelum Tsunami (5 tahun sebelumnya), disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana produksi, iklim, curah hujan, dan juga situasi keamanan yang kurang kondusif akibat konflik yang berkepanjangan dan kian memanas di Kabupaten Aceh Barat selama tahun 1999 hingga 2004.

Konflik yang terjadi membuat masyarakat, khususnya di pedesaan tidak bisa leluasa bergerak dan tidak merasa nyaman untuk bekerja termasuk di sektor pertanian. Berbagai kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk mendorong pembangunan pertanian tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Banyak lahan pertanian ditinggalkan

dan tidak diusahakan petani, banyak peralatan dan infrastruktur pertanian tidak dimanfaatkan petani, bahkan sebagian masyarakat mengungsi dan mengalihkan mata pencahariannya dari sektor pertanian. Kondisi itu membuat produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat tidak maksimal. Tabel 2 menunjukkan perkembangan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat sebelum Tsunami (1999-2004).

Tabel 2. Data produksi padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan Kabupaten Aceh Barat, tahun 1999-2004

No	Komoditi	Produksi (Ton)					
		1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	Padi						
	Padi sawah	58.051,00	88.335,00	80.183,00	89.919,00	116.085,00	114.807,00
	Jumlah	58.051,00	88.335,00	80.183,00	89.919,00	116.085,00	114.807,00
2	Palawija						
	Jagung	362,00	570,00	989,00	992,00	1.016,00	756,00
	Kedele	150,00	93,00	108,00	112,00	121,00	95,00
	Ubi Kayu	1.047,00	1.106,00	1.471,00	1.505,00	1.698,00	1.805,00
	Ubi Jalar	420,00	468,00	1.320,00	1.230,00	1.483,00	1.513,00
	Kacang Tanah	1.346,00	2.209,00	2.099,00	7.040,00	7.475,00	7.328,00
	Kacang Hijau	37,00	44,00	81,00	80,00	94,00	38,00
	Jumlah	3.362,00	4.490,00	6.068,00	10.968,00	11.887,00	11.535,00
3	Sayur-Sayuran						
	Kacang Panjang	372,00	582,00	880,00	717,00	1.005,00	1.067,00
	Cabe	594,00	594,00	853,00	852,00	1.230,00	1.919,00
	Kangkung	112,00	98,00	143,00	145,00	175,00	210,00
	Ketimun	560,00	860,00	1.676,00	1.700,00	210,00	1.040,00
	Tomat	369,00	504,00	840,00	913,00	1.940,00	2.067,00
	Terong	36,00	180,00	266,00	236,00	1.189,00	990,00
	Bayam	134,00	104,00	132,00	132,00	201,00	207,00
	Jumlah	2.177,00	2.922,00	4.790,00	4.695,00	5.950,00	7.500,00
4	Buah-Buahan						
	Mangga	859,00	587,00	876,00	969,00	995,00	1.003,00
	Rambutan	2.936,00	2.606,00	3.072,00	3.277,00	3.349,00	3.365,00
	Jeruk Manis	262,00	117,00	252,00	259,00	259,00	259,00
	Langsat	626,00	419,00	626,00	611,00	665,00	665,00

Durian	8.710	3.236,00	8.906,00	9.248,00	9.248,00	9.274,00
Sawo	148,00	120,00	148,00	124,00	148,00	148,00
Jambu	92,00	69,00	85,00	94,00	94,00	94,00
Nenas	52,00	35,00	52,00	54,00	54,00	54,00
Pisang	988,00	494,00	1.027,00	1.077,00	1.079,00	1.079,00
Pepaya	134,00	84,00	134,00	151,00	151,00	151,00
Semangka	198,00	276,00	583,00	697,00	1.218,00	1.347,00
Jumlah	6.303,71	8.043,00	15.761,00	16.561,00	17.260,00	17.439,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat 2009

Produksi Pertanian Setelah Tsunami

Bencana Tsunami telah menghantam hampir semua aspek kehidupan masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang hidup di sepanjang wilayah pesisir Aceh Barat. Ribuan hektar lahan, infrastruktur dan peralatan pertanian rusak dan hancur total, masyarakat kembali ke titik nol. Setelah bencana berbagai pihak ikut memberi perhatian sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan kepentingannya untuk membantu proses rehabilitasi dan pemulihan kembali kehidupan masyarakat.

Setelah bencana Tsunami, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan pertanian di Kabupaten Aceh Barat, menfokuskan perhatian dan pro-aktif dalam melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong proses rehabilitasi dan pemulihan kembali kehidupan masyarakat berbasis pertanian di kawasan bencana. Berbagai program dilaksanakan untuk membangun kembali sektor pertanian di kawasan pesisir lewat dukungan dana yang bersumber dari negara maupun lewat kerjasama dengan berbagai pihak atau organisasi lainnya, seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), Bank Pembangunan Asia (ADB), LSM internasional dan lokal yang ikut serta memberi perhatian pada rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berbasis pertanian. Program yang dilakukan difokuskan pada: rehabilitasi lahan yang terkena dampak bencana, rehabilitasi infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan jalan untuk usaha tani, mencetak sawah baru, penyediaan peralatan pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian seperti benih/bibit, pupuk dan obat-obatan pertanian, pelatihan dan penyuluhan kepada petani, dan kegiatan pendukung lainnya.

Tidak hanya itu, untuk menjaga ketersediaan pangan, keseimbangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pedalaman serta stabilitas produksi pertanian di

Kabupaten Aceh Barat, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, meskipun disibukkan dengan berbagai program dan tugas-tugas berat rehabilitasi di kawasan pesisir, secara bersamaan tetap memberikan perhatian maksimal untuk pembangunan pertanian di wilayah pedalaman di luar kawasan bencana Tsunami. Semua itu adalah upaya Dinas Pertanian dan Peternakan untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian, peningkatan pendapatan petani dan ketahanan pangan masyarakat, khususnya rumah tangga petani di Kabupaten Aceh Barat.

Saat ini rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh setelah bencana Tsunami, khususnya di Kabupaten Aceh Barat telah berlangsung lebih dari empat tahun. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk pemulihan kembali Aceh setelah bencana telah mengakhiri masa tugasnya pada 15 April 2009. Secara perlahan Aceh dan Aceh Barat khususnya mulai menghilang dari perhatian dunia. Berbagai organisasi lokal dan internasional juga telah mengakhiri programnya dan hanya sebagian kecil yang masih bertahan di Kabupaten Aceh Barat. Ketika perhatian dunia melemah, sebuah pertanyaan mendasar muncul “Sejauh mana milyaran dan bahkan trilyunan rupiah dana bantuan serta banyaknya energi yang tercurah, telah membantu masyarakat petani di Aceh khususnya di Aceh Barat untuk bangkit dari keterpurukannya?” Sebuah pertanyaan yang jawabannya tidak sederhana. Pertanyaan yang menuntut keberanian berbagai pihak di Aceh, khususnya di Aceh Barat dan juga segenap LSM internasional dan lokal untuk berintrospeksi, apa yang sudah dilakukan ketika tersedia bantuan yang begitu besar untuk membuat masyarakat khususnya masyarakat petani di Aceh Barat bangkit?

Empat tahun setelah rekonstruksi berlangsung, laju pembangunan fisik khususnya di Kabupaten Aceh Barat terlihat sangat nyata. Jalan, jembatan, rumah, sekolah, kantor pemerintah, rumah sakit, puskesmas, telah dibangun di setiap sudut. Gedung-gedung tampil begitu megah, dengan kualitas bangunan yang boleh jadi membuat iri orang-orang di luar Aceh. Namun, pemulihan pasca bencana bukanlah sekadar cerita fisik, pemulihan non fisik adalah jalan untuk membangun kemandirian masyarakat agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan potensinya dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, dan hal ini membutuhkan kerja yang jauh lebih keras.

Harus diakui, bahwa persoalan di Kabupaten Aceh Barat, di ‘Bumi Teuku Umar Johan Pahlawan’ ini adalah jauh dari sederhana. Wilayah ini tidak hanya dilukai secara fisik oleh Tsunami, tetapi juga telah terluka parah secara fisik dan mental oleh konflik yang berkepanjangan. Kepercayaan, solidaritas, tatanan sosial, telah lama dibuat rapuh oleh konflik. Hal ini membuat upaya pemulihan pasca Tsunami lebih sulit.

Ratusan LSM dari seluruh penjuru dunia, tumpah di bumi Aceh setelah Tsunami. Ada prestasi, tapi ada pula pengaruh buruknya. Berbagai kalangan menyebutkan

ada kemunduran etos kerja pada masyarakat Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Sebagian orang Aceh jadi tergantung pada bantuan, suatu hal yang sebenarnya wajar terjadi di daerah pasca bencana. Ketergantungan pada bantuan juga terjadi di wilayah lain seperti Iran dan Afganistan pasca bencana gempa.

Kondisi ini adalah bagian lain dari dampak yang sampai sekarang harus dihadapi di tengah-tengah masyarakat Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Beragamnya masalah yang dihadapi berbanding terbalik dengan kemampuan masyarakat dan bahkan para pihak untuk menganalisa situasi dan melakukan langkah-langkah antisipatif, atau melakukan upaya-upaya adaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Situasi ini semakin memburuk akibat dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang kurang memperhatikan sistem interaksi sosial atau budaya setempat, sehingga kesadaran masyarakat untuk menolong dirinya sendiri sebagai warga masyarakat agraris sangat kurang.

Dari berbagai hal yang telah di gambarkan di atas, terkait dengan kondisi pertanian dan kondisi Aceh Barat setelah Tsunami, menarik untuk dicermati bagaimana implikasi dari kondisi tersebut terhadap laju pertumbuhan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Laju pertumbuhan produksi pertanian Kabupaten Aceh Barat setelah Tsunami ada mengalami kemajuan, meskipun terjadi fluktuasi setiap tahunnya, dan tidak sebanding dengan luas lahan yang tersedia serta rumah tangga petani yang bekerja di sektor pertanian.

Produksi pertanian Kabupaten Aceh Barat selama empat tahun terakhir (2005-2008), khususnya komoditi padi, tercatat pada tahun 2005 dengan luas tanam 17.282 ha produksi yang dicapai adalah 56.358 ton, turun 51,49% dari tahun 2004; tahun 2006 dengan luas tanam 5.970 ha produksi yang dicapai adalah 25.253 ton atau turun 55,19% dari tahun 2005; sedangkan tahun 2007 dengan luas tanam 16.872 ha produksi yang dicapai adalah 71.370 ton atau meningkat 64,62% dari tahun 2006; dan pada tahun 2008 dengan luas tanam 10.449 ha produksi yang dicapai adalah 44,199 ton atau turun 38,07% dari tahun 2007.

Produksi palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan, rata-rata mengalami kemajuan, dengan capaian ini sektor pertanian tetap menjadi fokus perhatian untuk dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 3. Produksi padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan Aceh Barat, Tahun 2005-2008

No	Komoditi	Produksi (Ton)			
		2005	2006	2007	2008
1	Padi				
	Padi sawah	58.458,00	25.253,00	71.370,00	44.199,00
2	Palawija				
	Jagung	344,00	394,00	1.330,00	854,76
	Kedele	54,00	71,00	95,00	253,00
	Ubi Kayu	1.191,00	1.763,00	1.003,00	2.107,00
	Ubi Jalar	1.325,00	1.293,00	1.459,00	621,00
	Kacang Tanah	3.133,00	2.364,00	2.728,00	1.639,40
	Kacang Hijau	51,00	47,00	25,00	20,20
3	Sayur-Sayuran				
	Kacang Panjang	612,00	621,00	445,00	530,00
	Cabe	680,00	611,00	655,00	738,00
	Kangkung	235,00	435,00	440,00	571,00
	Ketimun	940,00	690,00	414,00	368,00
	Tomat	0,00	0,000	0,00	0,00
	Terong	828,00	601,00	570,00	360,00
	Bayam	195,00	142,00	155,00	141,00
4	Buah-Buahan				
	Mangga	904,00	3.999,00	898,50	3.939,00
	Rambutan	3.333,00	766,00	825,00	27.431,00
	Jeruk Manis	226,00	21,00	225,10	1.694,00
	Langsat	584,50	245,00	327,00	2.373,00
	Durian	8.969,00	14.082,00	11.021,00	45.153,00
	Sawo	138,00	23,00	108,00	949,00
	Jambu	92,00	4,00	195,40	650,80
	Nenas	36,00	0,00	0,00	0,00
	Pisang	942,00	98,00	757,00	1.082,00
	Pepaya	144,00	27,00	247,00	593,00
	Semangka	725,00	1.300,00	1.323,00	1.154,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat 2009

Potensi, Peluang, Kendala dan Ancaman

Potensi

Kabupaten Aceh Barat memiliki lahan dan potensi lahan yang sangat luas dan cocok untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian. Berbasis pada potensi lahan, kesesuaian lahan dan sumber daya petani, Kabupaten Aceh Barat sangat menjanjikan untuk tumbuh dan berkembang lewat sektor pertanian. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada sektor pertanian yang kian membaik, menjadi rujukan untuk mendorong pertanian yang lebih maju di Kabupaten Aceh Barat melalui penguatan investasi di sektor pertanian pangan, palawija, hortikultura, peternakan dan industri pengolahan hasil pertanian. Investasi pada sektor pertanian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan pembangunan kawasan terpadu dan terintegrasi dengan konsep agribisnis dan agrowisata.

Tabel 4. Data potensi dan baku fungsi lahan pertanian (lahan sawah dan lahan kering menurut kategori lahan) di Kabupaten Aceh Barat, tahun 2008

No	Jenis/Kategori Lahan	Potensial (ha)	Baku Fungsi (ha)	Jumlah (ha)
1	Sawah	9.502,00	15.308,38	24.810,38
2	Tegalan	-	14.851,00	14.851,00
3	Pekarangan	-	1.940,00	1.940,00
4	Madang	-	16.523,00	16.523,00
5	Lahan tidur	-	9.536,00	9.536,00
	Total	9.502,00	58.158,38	67.660,38

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat 2009

Peluang inventasi dan bisnis pada sektor pertanian terbuka lebar di Kabupaten Aceh Barat. Di samping didukung oleh lahan dan potensi lahan yang luas serta sumber daya petani yang besar, juga didukung oleh berbagai infrastruktur yang semakin baik, seperti jaringan irigasi dan jalan dari dan ke sentra produksi yang dapat menjangkau semua wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Juga terdapat pelabuhan laut yang representatif dan mampu mendukung pemasaran hasil produksi pertanian. Jika semua potensi ini dipadukan, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan berusaha masyarakat akan semakin meningkat dan angka pengangguran serta kemiskinan akan turun di Kabupaten Aceh Barat.

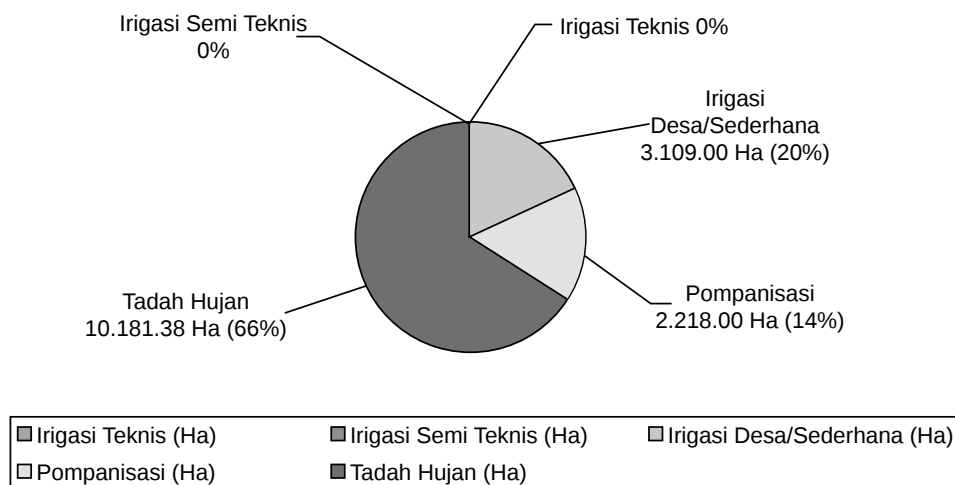
Potensi lain yang merupakan kekuatan dalam rangka peningkatan produksi pertanian adalah teknologi usaha tani yang sudah cukup maju dan relatif dikuasai petani. Varietas unggul berdaya hasil tinggi dan toleran terhadap cekaman lingkungan biotik dan abiotik cukup tersedia. Teknologi pemupukan, pengelolaan tanaman, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara umum sudah dikuasai petani. Juga tenaga kerja untuk usaha tani cukup tersedia. Potensi ini sangat mendukung upaya peningkatan produksi pertanian di Aceh Barat.

Potensi sosial ekonomi yang merupakan kekuatan sekaligus modal dasar bagi pengembangan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat, antara lain: (i) pertanian merupakan sumber penghidupan bagi lebih dari 70% penduduk di Kabupaten Aceh Barat; (ii) pertanian sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat sehingga berpotensi menciptakan lapangan kerja yang besar; dan (iii) kontribusi dari usaha pertanian terhadap pendapatan rumah tangga petani cukup besar. Khusus produksi pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, permintaan pasarnya akan semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dari titik pandang petani di Kabupaten Aceh Barat, selama ada cukup air, hampir bisa dipastikan akan menanam dan melakukan usaha pertanian.

Peluang

Konversi lahan pertanian untuk keperluan non-pertanian dapat dipastikan akan terus berlangsung, akibatnya luas areal pertanian khususnya untuk tanaman padi akan terus berkurang. Upaya untuk meningkatkan produksi pangan sebagai kompensasi dari konversi lahan pertanian di Kabupaten Aceh Barat perlu dilakukan. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat akan memanfaatkan beberapa peluang dalam meningkatkan produksi, antara lain: (i) peningkatan permintaan pangan yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk; (ii) dukungan pemerintah dalam perluasan dan peningkatan produksi pertanian khususnya padi; dan (iii) program rehabilitasi infrastruktur, terutama jaringan irigasi. Kedua peluang terakhir merupakan bagian dari program revitalisasi pertanian yang dilaksanakan mulai tahun 2007-2012 di Kabupaten Aceh Barat. Gambar 3 di bawah ini menunjukkan kebutuhan yang tinggi untuk revitalisasi jaringan irigasi.

Dari aspek sosial ekonomi, peluang yang mendukung upaya peningkatan produksi pertanian, antara lain adalah: (i) peningkatan permintaan kebutuhan bahan pangan merupakan jaminan pasar bagi petani; (ii) sistem pemasaran yang semakin baik, stabil dan efisien membuat biaya pemasaran semakin ringan; dan (iii) subsidi sarana produksi (pupuk dan benih) dapat memperkecil biaya produksi. Ketiga faktor di atas merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan keuntungan dan daya saing usaha tani. Semua peluang ini dapat meningkatkan gairah dan motivasi petani untuk melakukan usaha di sektor pertanian.



Gambar 3. Luas lahan sawah menurut sistem irigasi di Kabupaten Aceh Barat tahun 2008 (Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat 2009)

Kendala

Selain potensi dan peluang dalam peningkatan produksi pertanian khususnya padi, juga terdapat kendala baik dari dalam sistem (kelemahan internal) maupun dari luar sistem (ancaman eksternal). Kelemahan internal, adalah kelemahan biofisik dalam peningkatan produksi, antara lain: (i) konversi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang terus berlangsung; (ii) produktivitas pertanian khususnya padi cenderung tetap; dan (iii) sarana produksi yang semakin terbatas.

Sementara ancaman eksternal diantaranya: (i) cekaman lingkungan biotik dan abiotik; (ii) nilai jual tanah sawah yang semakin tinggi untuk kepentingan non pertanian; dan (iii) terjadi peralihan dari usaha tani padi ke usaha lain. Serangan hama dan penyakit merupakan cekaman biotik yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kegagalan panen. Demikian juga ancaman banjir atau kekeringan yang merupakan cekaman abiotik, dapat menyebabkan gagal panen. Nilai jual lahan yang tinggi untuk fungsi non pertanian merupakan godaan bagi petani untuk menjual lahannya. Usaha lain yang dinilai lebih menjanjikan, seperti usaha perkebunan, bisnis atau industri lain, membuat petani beralih usaha. Kelemahan internal dan ancaman eksternal ini menjadi kendala untuk mempertahankan atau meningkatkan penggunaan lahan untuk tanaman pertanian terutama padi.

Kendala lainnya adalah kendala ekonomi, baik secara internal maupun eksternal. Kelemahan internal antara lain: (i) keterbatasan modal petani; (ii) skala

penguasaan lahan yang sempit dan sarana produksi yang makin mahal. Kedua faktor ini menyebabkan petani tidak mampu menerapkan teknologi maju, sehingga produktivitas tidak mencapai potensinya. Penguasaan lahan yang sempit menyebabkan usaha tani kurang efisien, pendapatan relatif rendah, sehingga hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar tanpa mampu melakukan investasi untuk usaha produktif yang lebih maju dan menguntungkan.

Ancaman eksternal antara lain: (i) posisi tawar petani dalam perdagangan hasil pertanian masih lemah, sehingga harga hasil pertanian di tingkat petani menjadi fluktuatif murah saat musim panen dan mahal saat musim paceklik; dan (ii) konversi lahan tidak mudah diganti dengan pembukaan lahan baru, karena pembukaan lahan baru membutuhkan biaya yang tinggi. Dalam kondisi keuangan negara dan daerah yang sulit, hampir tidak memungkinkan untuk melakukan pembukaan sawah baru dengan prasarana irigasinya, sementara lahan yang bisa dijadikan sawah dan sumber daya air semakin terbatas. Semua kelemahan internal dan ancaman eksternal yang dikemukakan di atas merupakan kendala yang cukup serius dalam upaya peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan di Aceh Barat.

Penutup: Arah Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian

Arah kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Aceh Barat diselaraskan dengan Rencana Strategis Pembangunan Nasional dan Rencana Strategis Pembangunan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat dengan menitikberatkan pada: (1) Pemeliharaan dan peningkatan ketahanan pangan; (2) Peningkatan penghasilan dan kesejahteraan petani; (3) Peningkatan produksi dan ekspor komoditas andalan pertanian Kabupaten Aceh Barat.

Secara umum arah kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2012 antara lain adalah :

1. Peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan ketahanan pangan melalui pemberian akses permodalan usaha masyarakat miskin melalui pembangunan ekonomi gampong berbasis pertanian yang produktif
3. Peningkatan produk hasil pertanian melalui pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh pada wilayah sentra produksi komoditi andalan di Kabupaten Aceh Barat

4. Revitalisasi pertanian dengan memfokuskan kegiatan pada pengembangan komoditi pertanian unggulan, pembangunan industri pengolahan hasil pertanian dan pertanian terpadu (*integrated farming*) dalam kawasan-kawasan agribisnis dan agrowisata
5. Penyediaan sarana dan prasarana produksi, pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil produksi melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian
6. Memperkuat ketersediaan infrastruktur pendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku berikut jaringannya untuk kebutuhan air irigasi pertanian
7. Meningkatkan realisasi investasi daerah melalui kerjasama sektor pertanian dengan lembaga-lembaga lokal, regional, nasional dan internasional
8. Penyederhanaan prosedur perizinan serta membangun sistem infrastruktur ekonomi pertanian yang handal, efektif dan efisien.

Dalam kurun waktu lima tahun (2007-2012) kondisi pertanian Kabupaten Aceh Barat dengan sistem kemitraan agribisnis dan agrowisata diharapkan akan mengalami lebih banyak kemajuan dengan proyeksi yang diinginkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan infrastruktur pertanian yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah hasil pertanian, seperti Terminal Agribisnis, Pembangunan Kilang Penggilingan Padi Modern (*Rice Huller*) dan infrastruktur pendukung lainnya
2. Produktivitas lahan pertanian dengan upaya rehabilitasi lahan, jaringan irigasi dan sarana fisik lainnya
3. Produksi komoditas unggulan dan komoditas andalan ditingkatkan, dengan memberikan bantuan langsung bagi masyarakat (BLM), dan menumbuhkan klaster-klaster pengolahan hasil pertanian
4. Kelembagaan petani yang dapat menunjang efektifitas dan efesiensi pembangunan pertanian terbina dengan baik
5. Sistem agribisnis akan dikembangkan dengan menumbuhkan unit-unit bisnis bidang pertanian dan sistem pasar yang efisien
6. Mengurangi angka kemiskinan di sektor pertanian.

Pembangunan pertanian Kabupaten Aceh Barat diselaraskan dengan fokus sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun (2007-2012). Sasaran yang ingin dicapai adalah kemandirian petani dan sistem agribisnis yang berkelanjutan. Oleh karena

itu, strategi yang dikembangkan akan terkait dengan pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengembangan komoditas andalan Kabupaten Aceh Barat. Dalam pelaksanaannya strategi itu dideskripsikan dan diintegrasikan dengan pendekatan pemberdayaan petani mulai dari kelembagaan, penyuluhan pertanian, permodalan, dan promosi komoditas andalan petani di kawasan-kawasan agribisnis. Selanjutnya pembangunan kelembagaan petani akan dilakukan melalui revitalisasi kelompok tani dan menumbuhkan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) andalan di kawasan agribisnis. Secara umum strategi pembangunan pertanian Kabupaten Aceh Barat adalah:

1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian
2. Penguatan kelembagaan pertanian melalui revitalisasi kelompok
3. Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian dengan bantuan saprodi dan bimbingan teknis
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian
5. Pengembangan komoditas pertanian unggulan
6. Revitalisasi sistem pembangunan pertanian dan penguatan struktur kelembagaan teknis pelaksana kegiatan pembangunan pertanian
7. Promosi produk, informasi pasar dan efisiensi pemasaran hasil-hasil pertanian yang berdaya saing tinggi dan menguntungkan.

Berbagai kebijakan untuk meningkatkan produksi pertanian, seperti: pembangunan sarana irigasi, bantuan benih, pupuk, pestisida, kredit usaha tani, dan pembinaan kelembagaan usaha tani perlu dikembangkan. Kondisi menurunnya produksi diperburuk oleh terbatasnya infrastruktur, sehingga pertumbuhan produksi cenderung menurun. Pasca Tsunami dan konflik, jumlah lahan yang rusak mencapai puluhan ribu hektar, tapi pembukaan sawah baru sangat kecil, karena keterbatasan dana pembangunan, sangat sulit mempertahankan luas areal tanam di Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, sekitar 80% lahan sawah di Kabupaten Aceh Barat masih tadah hujan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan kondisi pertanian di Aceh Barat, dan hal ini akan berpengaruh buruk terhadap produksi dan memperlemah ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Barat bila tidak segera diantisipasi.

Potensi dan Peluang Pengembangan Peternakan dalam Rekonstruksi Aceh Barat Pasca Tsunami

*L. Hardi Prasetyo
Balai Penelitian Ternak, Ciawi, Bogor*

Pendahuluan

Ternak selama ini telah menjadi bagian integral dari kegiatan usaha tani petani di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, seringkali ternak tidak dimanfaatkan sebagai usaha tani yang berorientasi ekonomis dan belum merupakan sumber pendapatan yang penting bagi keluarga petani. Ternak belum memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan keluarga petani secara umum. Diduga hanya dalam proporsi yang kecil sekali ternak digunakan sebagai sumber pendapatan utama atau sekunder bagi petani.

Kondisi tersebut di atas tidak berbeda dengan kondisi di Kabupaten Aceh Barat, di mana ternak kebanyakan hanya sebagai sambilan atau tabungan bagi keluarga petani di pedesaan, dan umumnya hanya dipelihara secara tradisional. Dalam kondisi yang demikian maka setiap program pembangunan tidak akan banyak memberikan dampak yang nyata, oleh karena itu, tantangan utama setiap program pembangunan peternakan adalah bagaimana mengubah persepsi dan pandangan petani terhadap pemeliharaan ternak sebagai suatu kegiatan ekonomis atau berorientasi komersial. Jika ini berhasil maka program pengembangan usaha peternakan akan memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan pendapatan dan perbaikan kehidupan petani.

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten yang mengalami dampak cukup parah akibat Tsunami 26 Desember 2004. Sebagai bagian dari program rehabilitasi dan pemulihan kehidupan di Aceh Barat, pengembangan sistem produksi ternak bisa merupakan salah satu alternatif program yang cocok dengan keinginan dan atau kebutuhan para petani. Usaha tani ternak telah terbukti dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan keluarga yang penting bagi petani di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini juga bisa berlaku bagi para petani di Aceh Barat korban Tsunami

karena pada umumnya para petani telah mengenal dan memelihara berbagai jenis ternak secara turun temurun, melalui pengembangan pemeliharaan (ekstensifikasi) secara tradisional maupun cara-cara intensifikasi. Ternak kecil seperti ayam atau itik dapat digunakan sebagai penghasil uang tunai yang cepat (*quick yielding*) sebagai pendapatan harian keluarga. Ternak domba atau kambing dapat menghasilkan penghasilan bulanan tambahan, sedangkan sapi atau kerbau dapat digunakan sebagai sumber pendapatan jangka panjang. Selain itu, ternak juga dapat diintegrasikan dengan komoditas pertanian yang lain seperti tanaman pangan atau tanaman pohon sebagai bagian dari upaya rehabilitasi pasca Tsunami. Ternak dapat berguna sebagai sumber pendapatan dan juga dapat membantu memperbaiki kondisi dan kesuburan tanah yang rusak.

Kerusakan akibat Tsunami dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun sistem produksi ternak yang baik dan benar mulai dari nol. Sistem produksi ternak yang baik hendaknya dibangun dengan memperhatikan potensi yang ada secara seksama, dan dengan penyusunan rencana dan strategi pelaksanaan yang baik dan benar. Sumber daya lokal yang tersedia harus digali dengan tepat dan bijak agar bermanfaat dan berkelanjutan bagi kepentingan penduduk setempat dalam jangka panjang. Berbagai paket teknologi sebagai faktor pendukung telah tersedia yang merupakan hasil penelitian dari berbagai lembaga penelitian, untuk menjamin keberhasilan program pengembangan. Beberapa komponen ataupun paket teknologi telah siap diterapkan dan beberapa masih memerlukan tahapan pengkajian agar betul-betul tepat guna dan berdaya guna sesuai dengan kondisi agro-ekosistem setempat.

Suatu kajian telah dilakukan oleh TEARFUND bekerjasama dengan Balai Penelitian Ternak untuk mempelajari potensi dan berbagai faktor pendukung yang tersedia di Kabupaten Aceh Barat dalam upaya pengembangan peternakan sebagai bagian dari pemulihan kehidupan masyarakat di Aceh Barat pasca Tsunami. Survei terstruktur telah dilakukan di empat kecamatan yang terkena dampak Tsunami paling parah yaitu Johan Pahlawan, Meurebo, Samatiga dan Arongan Lambalek. Hasil kajian ini telah disusun dalam laporan bersama kedua institusi berjudul '*Survey Report : Livestock Potentials and Development Programs in Kabupaten Aceh Barat*', April 2007. Sebagian dari laporan tersebut ditulis ulang dalam tulisan ini, ditambah dengan berbagai informasi yang diambil dari Laporan Kegiatan 'Lokakarya Internasional Inovasi Peternakan dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Korban Tsunami', yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan di Bogor pada tanggal 14 September 2005.

Potensi Sumber daya Alam

Daya Dukung Wilayah

Dalam pengembangan peternakan di suatu daerah, faktor pendukung utama yang perlu dilihat adalah ketersediaan sumber daya pakan dan hal ini dapat digambarkan oleh tata-guna lahan serta luasan lahan-lahan produktif. Dari informasi ketersediaan sumber daya pakan tersebut kemudian dapat ditentukan jumlah unit ternak yang dapat ditampung oleh daerah tersebut, atau disebut juga daya dukung wilayah (*carrying capacity*).

Tabel 1. Tata guna lahan dan luas arealnya di Kecamatan Johan Pahlawan, Meurebo, Samatiga dan Arongan Lambalek

Kecamatan	Sawah	Pekarangan	Tegalan	Kebun karet	Rawa	Lahan tidur	Hutan
Johan Pahlawan	926	267	2.389	4.284	4.275	tt	6.625
Samatiga	1.381	396	546	785	254	65	tt
Meurebo	1.775	228	4.972	1.088	tt	2.395	1.254
A. Lambalek	1.805	tt	178	3.823	tt	tt	tt

Sumber : BPP (2007) ; tt = tidak tersedia data.

Berdasarkan total luas lahan produktif yang terdiri dari sawah, kebun karet, dan tegalan yang potensial sebagai penghasil hijauan pakan, dapat diperkirakan jumlah satuan ternak yang dapat ditampung dalam tiap kecamatan. Informasi ini dapat dikombinasikan dengan total populasi ternak yang ada sekarang untuk menghitung jumlah satuan ternak yang dapat ditambahkan ke tiap kecamatan. Informasi tersebut sangat berguna untuk merencanakan program pengembangan produksi peternakan karena potensi produksi hijauan sangat menentukan keberhasilan program. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa Samatiga dan Arongan Lambalek masih dapat menampung lebih dari 3.000 satuan ternak tambahan, dan hanya sejumlah kecil pada Johan Pahlawan dan Meurebo. Daya dukung ini bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi jika sejumlah lahan tidur dapat dikonversi menjadi lahan produktif.

Tabel 2. Daya dukung wilayah dan potensi penambahan ternak di tiap kecamatan (dalam satuan ternak)

Kecamatan	Daya dukung	Populasi ternak	Penambahan ternak
Johan Pahlawan	1.859	1.031	828
Samatiga	6.691	2.075	4.616
Arongan Lambalek	4.802	1.716	3.086
Meurebo	2.433	2.253	180
Bubon	5.787	1.169	4.618
Woyla	3.100	3.164	-64
Woyla Barat	6.207	1.655	4.552
Woyla Timur	1.890	1.390	500
Kaway XVI	5.433	3.412	2.021
Pante Ceureumen	5.699	1.558	4.141

Secara total, Aceh Barat dapat menampung penambahan ternak sebesar 24.624 satuan ternak, dan hal ini menunjukkan potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk mendukung program pengembangan peternakan, seperti terlihat pada waktu lampau dimana Aceh Barat merupakan sumber bibit ternak bagi kabupaten lain dan bahkan provinsi lain. Di antara semua kecamatan, ternyata hanya Woyla yang tidak mempunyai potensi untuk penambahan ternak berdasarkan sumber daya lokalnya, setiap program pengembangan ternak di kecamatan ini harus mengandalkan sumber pakan dari luar daerah.

Kapasitas Kelembagaan

Keberadaan kelompok tani dan ketersediaan petugas penyuluh di tiap kecamatan merupakan potensi penting dalam pengembangan sistem produksi ternak. Seperti tercantum dalam Tabel 3, jumlah kelompok tani cukup besar karena sebagai bagian dari pelaksanaan program bantuan korban Tsunami, setiap desa harus mempunyai minimal satu kelompok tani. Beberapa desa memiliki lebih dari satu kelompok, namun demikian belum semua kelompok tersebut berfungsi seperti yang diharapkan. Struktur organisasi kelompok tani umumnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa kepala seksi. Sementara itu, jumlah petugas penyuluh masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah desa dan jumlah kelompok tani yang harus dilayani.



Gambar 1. Pengembalaan ternak besar pada lahan-lahan tidur

Tabel 3. Jumlah tenaga penyuluh dan kelompok tani per kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penyuluh	Jumlah desa/ penyuluh	Jumlah kelompok tani
Johan Pahlawan	5	4	44
Samatiga	6	5-6	52
Meurebo	6	tt	63
Arongan Lambalek	2	tt	60

Sumber : BPP Kab. Aceh Barat (2007); tt = tidak tersedia data

Usulan Program Pengembangan Peternakan di Kabupaten Aceh Barat

Program pengembangan peternakan di Aceh Barat hendaknya diarahkan pada pencapaian tiga tujuan, yaitu (i) peningkatan populasi ternak, (ii) pemahaman tentang potensi ternak sebagai sumber pendapatan keluarga yang dapat diandalkan, dan (iii) pembentukan pusat-pusat produksi ternak sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut sistem pemeliharaan yang ada sekarang harus diubah menjadi sistem produksi semi-intensif atau intensif dengan orientasi ekonomis dan komersial. Ternak dapat menjadi sumber pendapatan, pupuk kandang, dan energi terbarukan dalam bentuk biogas.



Gambar 2. Kambing kacang digembalakan di ladang

Program Jangka Pendek

Program-program berikut dapat segera dimulai dan hasilnya dapat dirasakan dalam jangka pendek (1-2 tahun).

a) Pembentukan Unit-Unit Percontohan (*Demonstration Plots*)

Sudah selayaknya jika setiap kecamatan memiliki satu atau lebih unit percontohan yang berfungsi sebagai tempat belajar bagi para peternak yang ingin memperbaiki sistem pemeliharaan ternaknya, baik dalam aspek teori maupun praktek. Unit ini juga dapat berfungsi sebagai stasiun pengujian teknologi atau inovasi baru sebelum diadopsi oleh para peternak.

1. Lokasi unit harus cukup strategis, mudah dicapai, dan dekat dengan daerah padat ternak. Kecamatan Meurebo dan Samatiga dapat digunakan sebagai pengembangan awal unit percontohan ini.
2. Areal percontohan hendaknya berpagar untuk alasan keamanan dan kebutuhan *bio-security*, dan sebaiknya dengan sistem pengairan serta drainase yang memadai.
3. Unit sebaiknya mempunyai lahan hijau sendiri sebagai sumber pakan ternak percontohan, dan yang juga dapat berfungsi sebagai tempat pengenalan berbagai jenis hijauan pakan ternak baik yang lokal maupun yang diintroduksi.

4. Unit percontohan hendaknya dilengkapi dengan fasilitas (i) perkantoran, (ii) kandang ternak untuk berbagai keperluan pengajaran, (iii) gudang penyimpanan, (iv) unit pengolahan kompos, (v) unit produksi biogas, (vi) ruang karantina, dan (vii) ruang kelas.
5. Tersedia berbagai publikasi dan materi pelatihan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peternak.
6. Unit hendaknya dikelola oleh staf permanen dan dibimbing oleh petugas penyuluhan serta ilmuwan lain sebagai nara sumber bagi teknologi baru. Pengelolaan unit diharapkan dapat melibatkan peternak di sekitarnya.

b) Pengembangan Proyek Percontohan (*Pilot Project*)

Proyek percontohan (*pilot project*) dapat segera dimulai sebagai sarana memberikan penghasilan bagi korban Tsunami di pemukiman barunya dalam rangka membangun kehidupan mereka yang baru. Komoditas yang dipilih dan sistem produksinya harus sederhana dan cepat menghasilkan sehingga peternak dapat menikmati manfaatnya langsung dan segera. Beberapa contoh proyek misalnya pembibitan kambing, produksi telur itik, produksi telur dan daging ayam kampung



Gambar 3. Kombinasi pemeliharaan itik lokal dengan ayam ras di pekarangan

c) Pembangunan Unit Pengolahan Pakan

Sejalan dengan program pengembangan peternakan, keberadaan unit pengolahan pakan sangat diperlukan. Jika ternak dipelihara secara intensif sebagai suatu kegiatan komersial maka biaya pakan meliputi 60-70% dari biaya produksi keseluruhan, dan karena itu, formulasi serta produksi pakan harus dibuat seefisien mungkin. Ada dua hal penting dalam produksi pakan, yaitu : (i) memenuhi kebutuhan nutrisi ternak, dan (ii) menyusun formula dengan harga serendah mungkin. Adanya unit pengolahan pakan akan sangat membantu dalam memenuhi dua hal tersebut.

d) Pembangunan Pos Kesehatan Hewan dan Tempat Penampungan Ternak

Dengan tingginya frekuensi perdagangan ternak di Aceh Barat maka ketersediaan tempat penampungan ternak (*holding ground*) dan poskeswan sangat diperlukan. Sarana tersebut dapat berfungsi sebagai fasilitas karantina bagi ternak yang berasal dari luar daerah yang mungkin membawa bibit penyakit, dan bagi ternak lokal yang sakit yang memerlukan perawatan. Selain itu dapat juga menjadi fasilitas transit bagi ternak yang baru datang setelah perjalanan jauh dari luar daerah.

Program Jangka Menengah

Program-program berikut dapat segera dimulai namun hasilnya baru akan diperoleh dalam jangka waktu 3-5 tahun.

a) Pembangunan Pusat Pembibitan Desa (*Village Breeding Center/VBC*).

Dalam rangka meningkatkan populasi sapi dan kerbau di Aceh Barat, adanya pusat pembibitan sederhana diperlukan sebagai pusat penyebaran bibit. Pusat pembibitan diharapkan juga melibatkan beberapa kelompok peternak yang mampu menangani pembibitan sapi dan atau kerbau.

b) Pembangunan Sistem Produksi Ternak Berbasis Kelompok Peternak.

Sistem produksi ini pada dasarnya merupakan perluasan dari proyek percontohan (*pilot project*) yang telah ada, dan basis kelompok merupakan sarana yang lebih baik dalam meningkatkan skala usaha jika dibandingkan dengan pemeliharaan secara individu. Skala pengusahaan yang lebih besar akan dapat meningkatkan efisiensi usaha dan diharapkan juga dapat meningkatkan keuntungan.

c) Pengembangan Skema Perkreditan Bagi Peternak Kecil

Skema perkreditan dengan bunga rendah (sekitar 6%) akan sangat membantu peternak kecil untuk dapat merubah sistem pemeliharaan ternaknya menjadi lebih komersial.

d) Pembangunan Laboratorium Agribisnis

Laboratorium ini berfungsi sebagai klinik dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam produksi ternak. Teknologi ataupun inovasi alternatif hendaknya dapat tersedia bagi peternak untuk dipilih sesuai dengan tujuan dan kemampuan masing-masing peternak. Laboratorium ini juga dapat dipergunakan sebagai sarana dalam menyebarluaskan teknologi baru hasil penelitian.

Program Jangka Panjang

Program-program berikut merupakan pengembangan lebih lanjut dari program jangka pendek maupun menengah, dan program-program ini dirancang sedemikian rupa sehingga sistem produksi ternak yang terbentuk akan berkelanjutan dan mampu mendorong perkembangan ekonomi wilayah.

- a) Pembentukan Pusat Pembibitan Ternak yang intensif
- b) Pengembangan sentra-sentra produksi ternak
- c) Pengembangan sistem integrasi ternak dengan perkebunan karet atau kelapa sawit

Kegiatan Pendukung

Dalam mendukung program-program di atas agar dapat berhasil diperlukan berbagai kegiatan seperti berikut:

1. Penerapan standar kesehatan dan kriteria seleksi ternak, hal ini sangat penting dalam pengadaan ternak, khususnya ternak bibit.
2. Pelatihan kepada peternak secara teratur dan pembinaan yang intensif untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peternak.
3. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya lokal, khususnya pakan dan obat-obatan untuk ternak, untuk meningkatkan efisiensi usaha.
4. Perencanaan dan penerbitan aturan-aturan lokal yang kondusif untuk mendorong berkembangnya usaha peternakan, misalnya dalam hal alokasi kawasan peternakan, kebijakan harga bahan baku pakan dan produk ternak, serta pengendalian penyakit menular
5. Sosialisasi dan promosi tentang sistem integrasi ternak dengan komoditas pertanian demi meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi penggunaan sumber daya lokal.

6. Penyelenggaraan kontes ternak secara reguler untuk mendorong peternak menghasilkan ternak yang lebih baik
7. Pelaksanaan program vaksinasi secara simultan dan terkoordinir untuk penyakit-penyakit tertentu yang berbahaya.

Penutup

Hasil kajian di Aceh Barat menunjukkan bahwa kabupaten ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan program peternakan, bukan hanya sebagai bagian dari program rekonstruksi dan rehabilitasi masyarakat pasca Tsunami tetapi juga untuk mengembalikan Aceh Barat sebagai sumber bibit ternak. Pasar untuk ternak dan produk-produk ternak sangat terbuka lebar baik pada tingkat lokal maupun nasional. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengubah persepsi dan pandangan peternak bahwa ternak bukan hanya bermanfaat sebagai tabungan tetapi dapat dikembangkan menjadi suatu kegiatan ekonomis dan menjadi sumber pendapatan keluarga yang dapat diandalkan.

Pengembangan sistem produksi peternakan memerlukan perencanaan dan pelaksanaan program yang bagus dan akurat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, program yang disusun haruslah disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam serta daya dukung wilayahnya. Program pengembangan yang baik juga harus didukung oleh aturan dan kebijaksanaan pemerintah yang tepat dan kondusif. Berbagai paket teknologi peternakan telah dihasilkan dan tersedia untuk diadopsi oleh para peternak dalam meningkatkan produktivitas ternak dan efisiensi usahanya.

Potret Budi Daya Tambak di Aceh Pasca Tsunami 2004 – Kajian Sosial Ekonomi (Bagian Pertama)

Suseno Budidarsono

World Agroforestry Centre (ICRAF)

Pendahuluan

Gempa bumi tektonik yang diikuti gelombang pasang Tsunami pada akhir tahun 2004 meluluh-lantakkan sebagian besar budi daya tambak di Provinsi Aceh. Ribuan hektar tambak siap panen yang menjadi sumber kehidupan sebagian besar masyarakat di wilayah pantai provinsi tersebut tersapu gelombang pasang dalam waktu sekejap. Kajian singkat yang dilakukan FAO (Philip dan Budiman 2005) mencatat 20.429 ha atau 42,9% dari tambak di Provinsi Aceh dengan berbagai tingkat kerusakan, kehilangan kapasitas produksinya. Sekitar 7.300 ha di antaranya mengalami kerusakan sangat parah, dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Sementara itu tercatat kurang lebih 1.000 ha tambak musnah karena perubahan garis pantai. Prasarana utama budi daya tambak seperti sistem irigasi sepanjang 810 km (67%) dan 193 unit (87%) pusat pemijahan udang dan bandeng juga mengalami kerusakan; sebagian besar rusak berat.

Kerusakan tidak terbatas pada fisik tambak dan infrastrukturnya. Petani tambak yang lahannya terkena dampak bencana Tsunami, selain kehilangan sumber pendapatan, mereka juga kehilangan modal kerja pada saat yang sama. Hal ini berdampak cukup serius pada kehilangan modal finansial masyarakat, dan termasuk di dalamnya modal para *tauke* sebagai pihak yang menyediakan modal kerja dan sekaligus agen pemasaran bagi sebagian besar petani tambak.

Tulisan ini, yang merupakan bagian pertama dari dua buah tulisan, menyajikan kajian tentang gambaran tambak di Aceh pasca Tsunami, dengan mengacu pada kajian budi daya tambak di Provinsi Aceh yang dilakukan oleh ICRAF Indonesia (Zainun dkk 2007) tepat satu tahun setelah Aceh didera gelombang Tsunami pada akhir tahun 2004. Penelitian tersebut merupakan salah satu bagian dari pengkajian ICRAF yang didanai oleh *the Ford Foundation Indonesia* dengan tajuk kegiatan

“Integrated Natural Resource Management & Livelihood Paradigms in Recovery from the Tsunami in Aceh”.

Terkait dengan hal di atas, tulisan berikut akan memotret beberapa aspek sosial – ekonomi budi daya tambak di Provinsi Aceh yang mencakup: (1) perkembangan budi daya tambak di Aceh dan konversi hutan bakau, (2) kepemilikan, penguasaan dan status lahan, (3) pengelolaan dan fungsi sosial dalam budi daya tambak, (3) sistem budi daya tambak, dan (4) pemasaran

Metoda, Pendekatan dan Daerah Studi

Kajian sosial-ekonomi budi daya tambak ini dilakukan dengan menggunakan teknik kajian cepat pedesaan atau *Rapid Rural Appraisal* (Chambers dkk 1989). Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2005 melalui pencatatan data sekunder, pengamatan lapangan, wawancara kelompok, dan diskusi kelompok terarah dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur.

Pada aras provinsi pengumpulan data diarahkan untuk memperoleh informasi keadaan umum budi daya tambak di Provinsi Aceh dan dampak dari gelombang Tsunami. Sedangkan pada aras kabupaten, kajian ini memilih enam kabupaten yang memiliki tambak cukup luas dan terkena dampak Tsunami paling nyata. Dari enam kabupaten dipilih sepuluh kecamatan yang mengalami bencana Tsunami cukup serius. Selanjutnya pada tingkat desa dipilih 12 desa di 10 kecamatan tersebut yang mengalami bencana Tsunami cukup parah. Tabel 1 dan Gambar 1 berikut menyajikan informasi dan gambaran daerah studi, dimana informasi data primer dikumpulkan melalui pengamatan dan diskusi terarah (*Focus Group Discussion/FGD*).

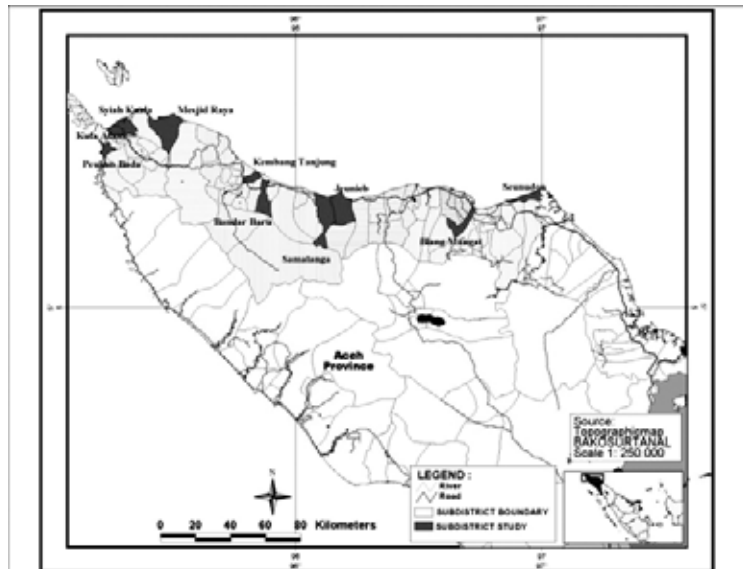
Desa-desa/kelurahan yang dipilih untuk studi berada di wilayah perkotaan (sekitar kota Banda Aceh dan Kota Lhok Seumawe) dan wilayah pedesaan di Kabupaten Aceh besar, Pidie, Bireun dan Aceh Utara. Jumlah penduduk di daerah studi bervariasi antara 633 di Desa Kuala Meiraksa dan 4.151 di Kelurahan Lambaro Skip. Kepadatan penduduk juga bervariasi antara 58 orang per km persegi (di Desa Gampong Baro) dan 2.606 orang per km persegi di Desa Lam Teungoh. Tingkat kerusakan tambak di daerah studi bervariasi dari 45% sampai 100%, yang parah kebanyakan terletak di bagian Utara Provinsi Aceh.

Tidak semua rumah tangga di kawasan pesisir daerah studi memiliki tambak, ada 2.141 KK atau 69% dari total rumah tangga di 12 desa daerah studi menggantungkan hidup mereka pada usaha tambak, 18% (559 KK) diantaranya tergantung pada

Tabel 1. Penduduk dan perkiraan kerusakan tambak

Kota/Kabu-paten	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk 2004		Luas tambak (ha)	Perkiraan kerusakan tambak	
			Jiwa	Kepala keluarga		ha	%
Kota Banda Aceh	Kec. Syiah Kuala	Tibang	1.198	244	130	130	100
	Kec. Kuta Alam	Lambaro Skip	4.151	789	150	150	100
Kab. Aceh Besar	Kec. Masjid Raya	Lamnga, Gampong Baro, dan Neuheun	2.910	708	192	192	100
	Kec. Peukan Bada	Lam Tengoh	912	249	50	50	100
Kab. Pidie	Kec. Kembang Tanjong	Lancang	1.469	336	216	194,4	90
	Kec. Bandar Baro	Baroh Lancok	1.621	313	207	144,9	70
Kab. Bireun	Kec. Samalanga	Meunasah Lancok	126	20	43	30.1	70
	Kec. Jeunib	Teupin Keupula	582	132	85	51	60
Kab. Aceh Utara	Kec. Seunedon	Matang Lada	809	154	260	130	50
Kota Lhok Seumawe	Kec. Blang Mangat	Kuala Meuraksa	633	158	100	45	45
			14.411	3.103	1.433	1.117,4	78

Sumber : Potensi Desa Provinsi Aceh 2003, sumber-sumber primer yang digali melalui diskusi kelompok terarah di setiap desa



Gambar 1. Lokasi daerah studi

perikanan tangkap dan 13% (403 KK) memperoleh pendapatan dari usaha lain (petani, pedagang, pegawai dan lain-lain). Di antara mereka yang menggantungkan hidupnya dari budi daya tambak, kebanyakan adalah pekerja atau pengelola tambak yang membudi dayakan tambak di lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil.

Potret Budi Daya Tambak di Aceh

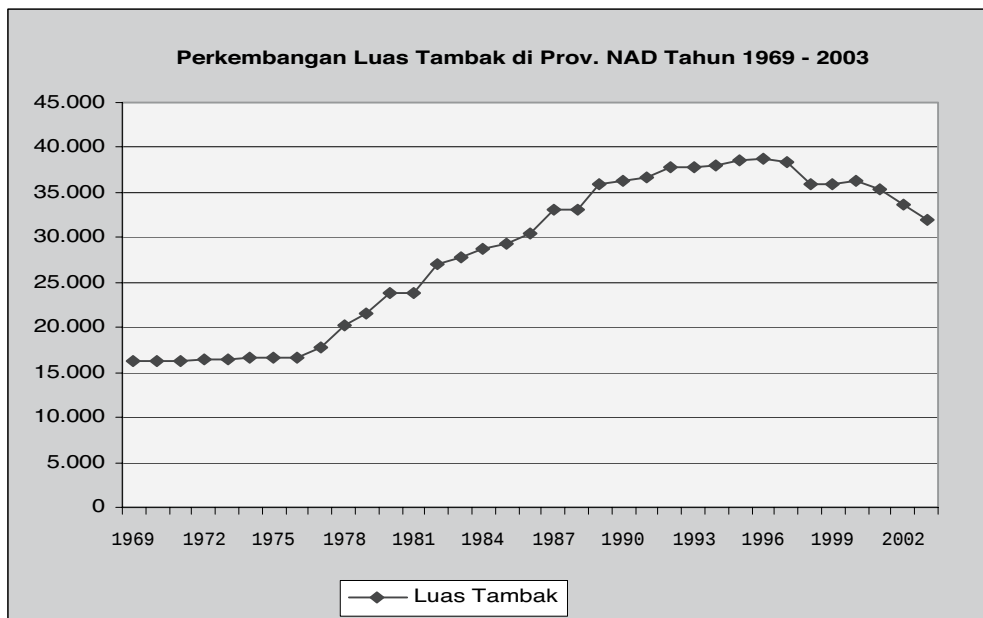
Perkembangan Budi Daya Tambak di Aceh dan Konversi Hutan Bakau

Budi daya tambak di Aceh (dalam bahasa lokal: *neuheun*) pertama kali dilakukan pada tahun 1940an oleh para *Ulee Balang* di Kecamatan Jeunib dan Samalanga di Kabupaten Bireun dan Kecamatan Seunedon dan Baktiya Barat di Kabupaten Aceh Utara. Pada awalnya budi daya tambak dilakukan secara sederhana berupa kolam-kolam penampungan air di sekitar muara-muara sungai dan sepanjang pantai dengan mengandalkan pasang-surut air laut untuk memerangkap udang dan ikan dari alam. Kegiatan budi daya tambak tersebut selanjutnya berkembang ke sepanjang pantai Timur Laut Aceh. Pada awal tahun 1950an tambak mulai diusahakan di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie. Di pesisir kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar budi daya tambak dimulai sejak 1963. Di Banda Aceh dan sekitarnya, seperti di Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Syiah Kuala, baru dimulai tahun 1974.

Pertumbuhan budi daya tambak secara pesat terjadi sejak pertengahan dekade kedua tahun 1970an sampai dengan akhir dekade tahun 1990an (Gambar 2). Hal ini seiring meningkatnya budi daya udang di Asia Tenggara dan meningkatnya harga udang di pasar domestik maupun internasional (Primavera 1997).

Ada tiga hal yang menarik untuk disimak dari perkembangan budi daya tambak di Provinsi Aceh, khususnya jika dikaitkan dengan keberadaan hutan bakau. Pertama, alih fungsi hutan bakau untuk budi daya tambak lebih banyak terjadi di bagian utara pantai timur Provinsi Aceh seperti di Banda Aceh dan Aceh Besar, dibandingkan dengan tambak-tambak di Bireun, Pidie, Aceh Utara dan Lhokseumawe yang sebagian besar merupakan alih fungsi lahan sawah-sawah yang berada di sekitar pantai dan muara sungai.

Kedua, konversi kawasan hutan bakau untuk budi daya tambak mulai marak dilakukan pada awal dekade tahun 1960an, pada saat investor dari Medan menyediakan pembiayaan budi daya udang bagi kelompok-kelompok petani (satu kelompok terdiri dari 40 petani), dengan syarat hasil udang harus dijual kepada investor yang bersangkutan. Tawaran itu ditanggapi dengan sangat antusias oleh masyarakat; hanya dengan Surat Ijin Menggarap yang dikeluarkan *Keuchik* (kepala

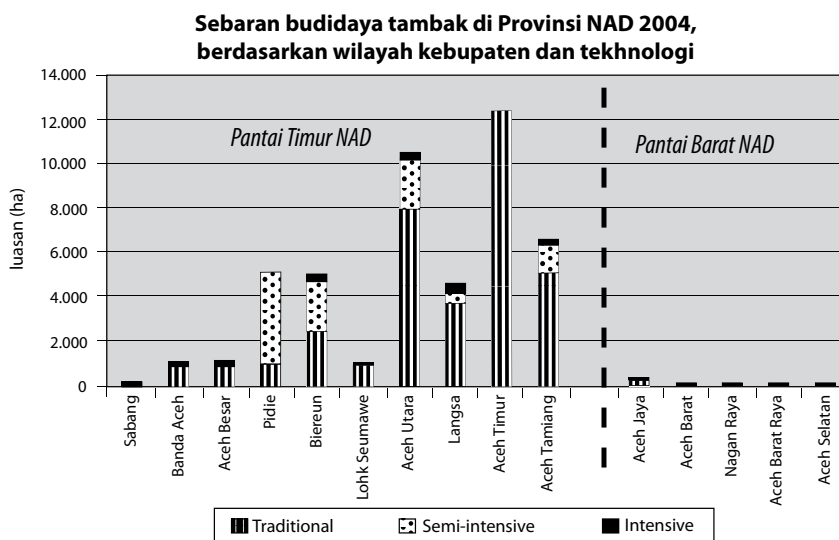


Gambar 2. Perkembangan luas tambak (ha) di Provinsi Aceh tahun 1969 – 2003

desa) setiap orang bisa menggunakan lahan yang ‘tidak terpakai’ (yang sebagian besar merupakan hutan bakau) untuk budi daya tambak. Pembabatan hutan bakau untuk budi daya udang semakin meluas pada pertengahan tahun 1970an, baik oleh masyarakat setempat maupun oleh investor dari luar Aceh.

Ketiga, perkembangan tambak di Provinsi Aceh (khususnya untuk budi daya udang) mencapai titik balik pada tahun 1995. Pada sekitar tahun 1995 muncul penyakit (virus, bakteri dan jamur) pada udang yang menyebabkan sebagian besar tambak gagal panen. Diduga hal ini terkait dengan pencemaran tambak akibat eksploitasi lahan tambak yang berlebihan

Memperhatikan sisi teknologi, dan statistik budi daya tambak di Provinsi Aceh tahun 2004, sebagai potret budi daya tambak menjelang Tsunami (BPS 2004), terlihat bahwa sebagian besar tambak (75%) dioperasikan secara tradisional dengan tingkat asupan sarana produksi yang rendah dan produksi utamanya udang dan bandeng. Sisanya merupakan budi daya tambak semi intensif (22%) yang banyak ditemukan di Biereun dan Pidie, dan hanya sekitar 3% merupakan budi daya udang intensif. Budi daya udang di pantai Barat Provinsi Aceh baru mulai dilakukan sekitar lima tahun yang lalu dan luasan tambak di wilayah tersebut juga masih relatif kecil.



Gambar 3. Sebaran budi daya tambak di Provinsi Aceh, 2004, berdasarkan teknologi dan kabupaten.
Sumber : Dinas Perikanan Provinsi Aceh (2005)

Kepemilikan, Penguasaan dan Status Lahan

Status lahan yang dimaksudkan di sini menyangkut kepemilikan atas lahan berdasarkan hukum positif yang berlaku (aspek legal), sedangkan ‘penguasaan lahan’ yang dimaksudkan di sini lebih diarahkan kepada *akses*¹ terhadap lahan untuk budi daya tambak. Sub pokok ini memberikan **gambaran secara umum** tentang aspek legal dari lahan-lahan yang digunakan untuk budi daya tambak di daerah studi, menyangkut status lahan dan penguasaan lahan. Penggalan kalimat ‘gambaran secara umum’ sengaja di tonjolkan untuk memperjelas bahwa sub pokok ini bukan merupakan inventarisasi status kepemilikan lahan, melainkan gambaran awal tentang status lahan dan penguasaan lahan yang selama ini digunakan untuk budi daya tambak, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang budi daya tambak di Provinsi Aceh.

Tabel 2 menyajikan luas lahan tambak di masing-masing desa daerah studi dan jumlah pemilik tambak (terlepas dari status kepemilikan tambak). Hasil diskusi kelompok terarah (FGD) menyebutkan bahwa sebagian besar tambak (70%) di lokasi studi merupakan lahan yang dimiliki dan atau dikuasai penduduk setempat (penduduk yang tinggal di dalam wilayah desa yang sama dengan lokasi tambak)

¹ Kata ‘akses’ yang digunakan di sini bermakna kemampuan untuk memanfaatkan lahan (Mengacu Ribot dan Peluso 2003), yang dalam hal ini digunakan untuk budi daya tambak

dan sisanya merupakan tambak milik penduduk luar desa, akan tetapi masih dalam satuan *mukim*² yang sama. Perlu dicatat bahwa kepemilikan tambak oleh orang luar desa, semata-mata berkaitan dengan perpindahan penduduk karena perkawinan (mengikuti suami/istri).

Tidak semua tambak yang ada di daerah studi dibangun di lahan milik perorangan yang sudah dilengkapi dengan sertifikat hak milik. Lahan yang digunakan untuk kegiatan budi daya tambak di lokasi studi terdiri atas: tanah hak milik adat (80%), tanah negara (16%), tanah wakaf milik *meunasah* (1%), dan tanah umum milik desa (3%). Sementara itu diperkirakan hanya 5% dari tanah hak milik adat yang sudah dilengkapi dengan alas hak dalam bentuk sertifikat. Hal lain yang menarik adalah luas lahan tambak per keluarga yang bervariasi antara 0,5 ha dan 30 ha. Mereka yang memiliki lahan tambak cukup luas, kebanyakan tidak dikelola sendiri.

Tabel 2. Luas tambak dan luas kepemilikan tambak di daerah studi

Kecamatan	Desa	Luas tambak (ha)	Pemilik Tambak (orang)	Rata-rata kepemilikan (ha)
Kec. Syiah Kuala	Tibang	130	8	16,25
Kec. Kuta Alam	Lambaro Skip	150	70	2,14
Kec. Masjid Raya	Lamnga Gampong Baro Neuheun	192	96	2,00
Kec. Peukan Bada	Lam Tengoh	50	20	2,50
Kec. Kembang Tanjong	Lancang	216	178	1,22
Kec. Bandar Baro	Baroh Lancok	207	176	1,17
Kec. Samalanga	Meunasah Lancok	43	20	2,15
Kec. Jeunib	Teupin Keupula	85	46	1,85
Kec. Seunedon	Matang Lada	260	150	1,73
Kec. Blang Mangat	Kuala Meuraksa	100	70	1,43
		1 433	834	1,72

Sumber: Hasil diskusi kelompok terfokus di 12 desa daerah studi dan catatan dari sumber-sumber sekunder yang ada, seperti Data Potensi Desa Provinsi Aceh dan catatan di tingkat desa.

Berdasarkan data status lahan dari Potensi Desa 2003 (BPS 2004), 20% lahan tambak di 12 desa daerah studi dibangun di lahan bukan milik perorangan. Sementara, di

² Mukim adalah satuan permukiman dari kelembagaan lokal masyarakat Aceh.

antara lahan milik perorangan, hanya 36,5% yang bersertifikat. Kebanyakan lahan milik perorangan yang bersertifikat berada di daerah sekitar perkotaan, seperti Banda Aceh (Tibang dan Lambaro Skip, masing-masing 99,5% dan 44,5%), Pidie (Baroh Lancok, 43,9%). Di daerah pedesaan, kurang dari 10% lahan milik perorangan yang dilengkapi dengan sertifikat hak milik; kebanyakan tambak berada di daerah pedesaan.

Keberadaan tanah milik adat yang dimanfaatkan untuk budi daya tambak, dari kaca mata hukum positif yang berlaku di Indonesia, memiliki beberapa persoalan. Pertama, tanah milik adat adalah tanah yang sebelum lahirnya Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 (UUPA) merupakan tanah yang secara adat telah dikuasai masyarakat setempat. Setelah diberlakukan UUPA 1960, tanah-tanah adat tersebut memerlukan pengelasan hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUPA. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2004 (sebelumnya terjadinya Tsunami), sangat sedikit lahan tambak di atas tanah milik adat yang sudah bersertifikat; hanya 5%.

Kedua, status hukum dari lahan budi daya tambak yang secara fisik terletak di tepi pantai dan/atau bantaran sungai. Pengamatan di lapangan dan diskusi kelompok terarah mencatat bahwa ada sejumlah lahan tambak yang terletak atau berada dalam jarak 100-150 m dari tepi pantai. Dalam ketentuan hukum adat setempat, laut dan pantai (yang berpasir) tidak bisa dimiliki atau menjadi hak perorangan; sebab dalam hal ini merupakan ruang publik. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai wilayah "*luen pukut*", yakni wilayah yang terletak seratus depa dari pasang tertinggi atau 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai (kira-kira 150 m dari tepi pantai). Dalam hukum positif yang termuat dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, wilayah yang berada di dalam jarak 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat, merupakan tanah publik yang dikuasai negara. Namun dalam kenyataannya, lahan/tanah dalam batas-batas tersebut banyak yang telah dijadikan tambak oleh masyarakat. Keadaan seperti ini sudah berlangsung sejak lama bahkan tanah-tanah yang sebenarnya merupakan tanah negara tersebut sudah berkali-kali diwariskan.

Masyarakat menguasai tanah/lahan tersebut hanya berdasarkan surat keterangan penggarap dari *Keuchik* (Kepala Desa). Umumnya masyarakat, hanya dengan surat keterangan penggarap yang dikeluarkan *keuchik* dan dengan membayar PBB (pajak atas bumi dan bangunan), merasa bahwa sudah mempunyai keabsahan hak milik atas tanah. Pemahaman seperti itu banyak ditemui hampir di seluruh lokasi studi. Kenyataan ini berpotensi untuk menimbulkan persoalan hak atas tanah dikemudian hari.

Pengelolaan dan Fungsi Sosial Budi Daya Tambak

Terlepas dari status lahan dalam perspektif hukum positif yang ada, seperti halnya kegiatan usaha tani lainnya, kepemilikan lahan (tambak) mempunyai fungsi sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitarnya, terutama dalam hal pengusahaannya. Pencacahan di daerah studi mencatat bahwa terdapat 2.141 keluarga (dengan sekitar 9.950 jiwa) menggantungkan hidupnya dari budi daya tambak seluas 1.433 ha yang dimiliki oleh 834 orang (baik sebagai pemilik, sebagai pengelola maupun sebagai pekerja). Hasil diskusi kelompok di 12 desa daerah studi juga mencatat bahwa 408 (19%) KK menggarap lahan milik orang lain secara bagi hasil (*mawah*). Sementara itu terdapat 136 KK (6.4%) yang bekerja pada lahan milik orang lain sebagai buruh tambak. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan tambak di daerah studi memiliki dimensi sosial.

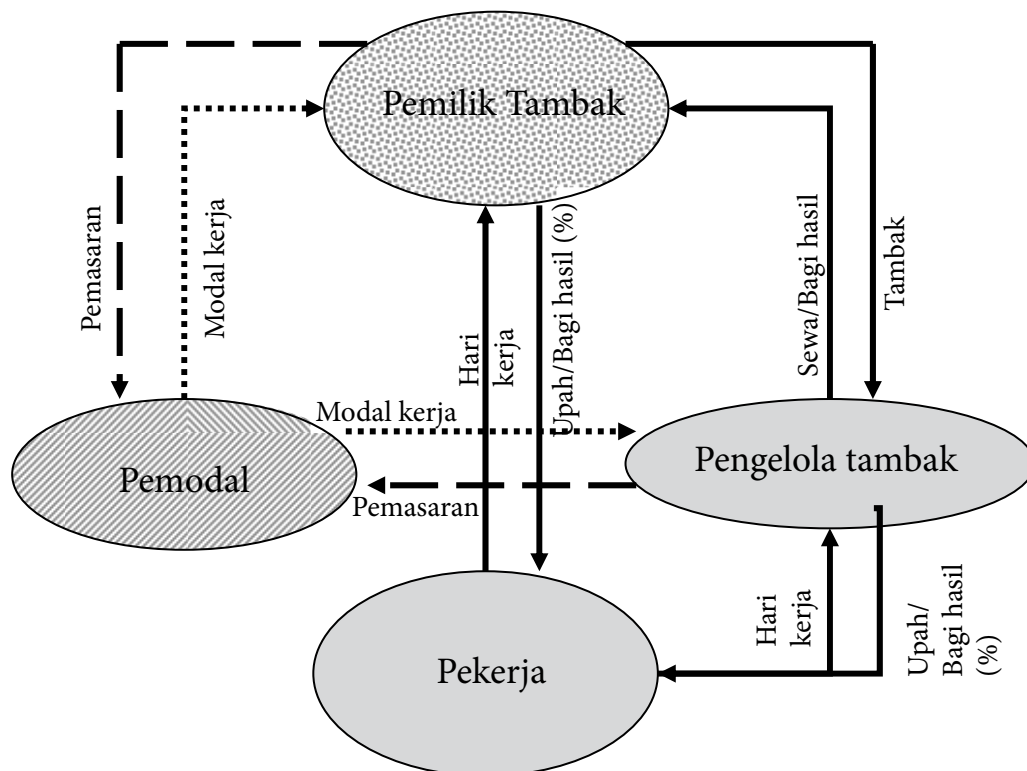
Terdapat dua aspek pengelolaan budi daya tambak yang perlu diperhatikan dari perspektif fungsi sosial, sebagai berikut :

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan tambak

Empat pihak yang secara langsung terlibat dalam budi daya tambak di daerah studi, adalah : pemilik tambak, pemodal, pengelola, dan tenaga kerja. Hubungan antar pihak dalam budi daya tambak sangatlah kompleks dan bekerja sebagai suatu sistem sosial yang saling tergantung antara satu dengan lainnya. Secara sederhana hubungan mereka digambarkan dalam Gambar 4.

Pemilik adalah orang yang memiliki hak milik atas lahan tambak, baik mereka yang bertempat tinggal di desa maupun di luar desa. Pemodal adalah pihak yang menyediakan dana untuk membiayai sebagian atau seluruh modal kerja yang dibutuhkan dalam budi daya tambak. Biasanya pemodal adalah *tauke*, yaitu pedagang pengumpul di tingkat desa/kecamatan yang juga membantu petani tambak dalam menyediakan input produksi maupun uang kas untuk modal kerja. Pengelola adalah orang yang melakukan budi daya tambak. Dalam banyak kasus pemilik tambak sekaligus juga pengelola. Kerja sama pemilik dan pengelola biasanya dilakukan dengan sistem bagi hasil yang dalam bahasa lokal disebut *mawah*, atau dengan cara sewa. Yang terakhir adalah pekerja, yaitu tenaga kerja yang terlibat dalam budi daya tambak, baik yang dikelola sendiri oleh pemilik tambak ataupun dikelola oleh *pe-mawah*. Sebagai tenaga kerja mereka menerima imbalan berupa upah (secara bulanan atau harian) atau per paket pekerjaan.

Dalam pengelolaan tambak, ada kemungkinan bahwa pemilik, pemodal dan pengelola adalah orang yang sama. Namun kasus serupa ini sangat kecil (butir 'b' dibawah). Kebanyakan pemilik tambak ataupun pengelola tambak membiayai



Gambar 4. Pola hubungan antar pihak dalam budi daya tambak di daerah studi

modal kerjanya (sebagian atau seluruh kebutuhan modal kerjanya) melalui pinjaman kepada pemodal. Pemodal tidak memungut bunga atas pinjaman yang diberikan, sebagai imbalan, penerima pinjaman harus menjual hasil panennya kepada pemodal dengan harga sedikit lebih murah dari harga pasar yang berlaku saat itu, disamping mengembalikan pokok pinjaman. Selisih harga yang berlaku menjelang Tsunami bervariasi antara Rp. 1.000,- sampai Rp. 2.000,-/kg hasil panen.

Untuk kasus dimana pemilik tambak menyerahkan lahan tambaknya kepada pengelola dengan sistem bagi hasil (*mawah*), pengelola memberikan balas jasa kepada pemilik berupa persentase hasil kepada pemilik dengan rasio yang bervariasi antara 1:4 sampai dengan 2:3 dengan ketentuan semua biaya produksi menjadi tanggung jawab pengelola. Besarnya proporsi bagi hasil antara pengelola dan pemilik tambak tergantung perjanjian kedua pihak, yang biasanya ditentukan oleh tingkat kesuburan dan lokasi lahan tambak. Jika pengelola mendapatkan bantuan pembiayaan modal kerja dari *tauke*, hasil panen harus dijual kepada pemodal. Hasil penjualan tersebut kemudian dibagi sesuai kesepakatan dengan pemilik.

Di samping itu terdapat pula pengelolaan tambak oleh pihak lain dengan cara sewa; yaitu pemilik tidak lagi memiliki akses kepada tambaknya selama masa sewa berlaku. Biasanya masa sewa berlangsung antara lima sampai dengan sepuluh tahun dengan harga (sebelum bencana Tsunami) bervariasi antara Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,-/ha/tahun, tergantung pada tingkat kesuburan tanah dan lokasi. Sistem sewa lahan ini sering dilakukan oleh investor dari luar Aceh.

Pemodal yang biasanya adalah juga *tauke*, berperan sebagai penyanggah dana sebagian besar tambak di Aceh. Walaupun terkadang tidak semua biaya input dapat didanai oleh *tauke*, namun petani tambak dapat meminjam uang kapan saja, selama *tauke* ada persediaan uang. Proses pinjam meminjam ini sangat sederhana, hanya dengan modal kepercayaan dan perjanjian hasil panen udang akan dijual kepada *tauke* tersebut dan sekaligus membayar pinjaman modal. Jika hasil panen bagus, maka pembayaran pinjaman harus dibayar lunas, namun jika panen kurang menguntungkan, pengembalian pinjaman dapat dicicil. Jika gagal panen, seperti kejadian ketika Tsunami, pembayaran pinjaman dapat ditunda. Bentuk bantuan modal kerja dari *tauke* bisa berupa barang (input usaha tambak) atau dapat berupa uang kas tergantung permintaan petani. Kerjasama antara pemilik dan/atau pengelola dan *tauke* ini tidak selalu untuk biaya operasional budi daya tambak semata. Sering juga petani tambak meminjam uang dari *tauke* untuk keperluan domestik yang mendesak sifatnya, seperti kesehatan, pendidikan dan bahkan pinjaman untuk keperluan sehari-hari lainnya.

Pola pengelolaan tambak

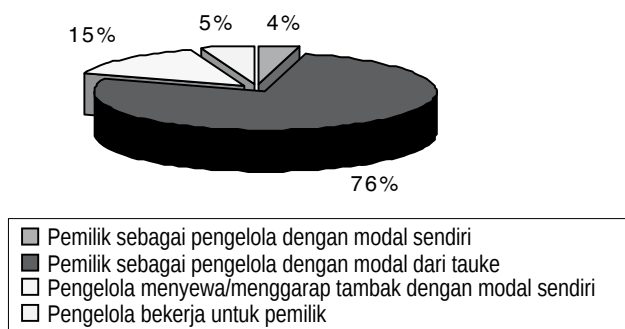
Tidak semua pemilik tambak di daerah studi mengelola dan/atau mengoperasikan tambaknya sendiri. Kebanyakan mereka menyerahkan pengelolaan dan/atau pembiayaannya kepada pihak lain. Dengan memperhatikan pembiayaan atas modal kerja, kepemilikan lahan dan pengelola tambak, pengelolaan tambak di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan menjadi lima pola:

1. Pemilik mengelola tambak sendiri dan dibiayai dengan modal sendiri (pemilik = pemodal = pengelola).
2. Pemilik tambak mengelola sendiri tambak mereka, akan tetapi sebagian atau seluruh modal kerja dibiayai *tauke* (pemilik = pengelola $\neq$ pemodal).
3. Pemilik tambak menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, sementara itu sebagian atau seluruh kebutuhan modal kerja dibiayai oleh *tauke* (pemilik $\neq$ pengelola $\neq$ pemodal).
4. Pemilik tambak menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain dengan sistem bagi hasil dan pengelola membiayai sendiri seluruh kebutuhan modal kerjanya (pemilik $\neq$ pengelola = pemodal).

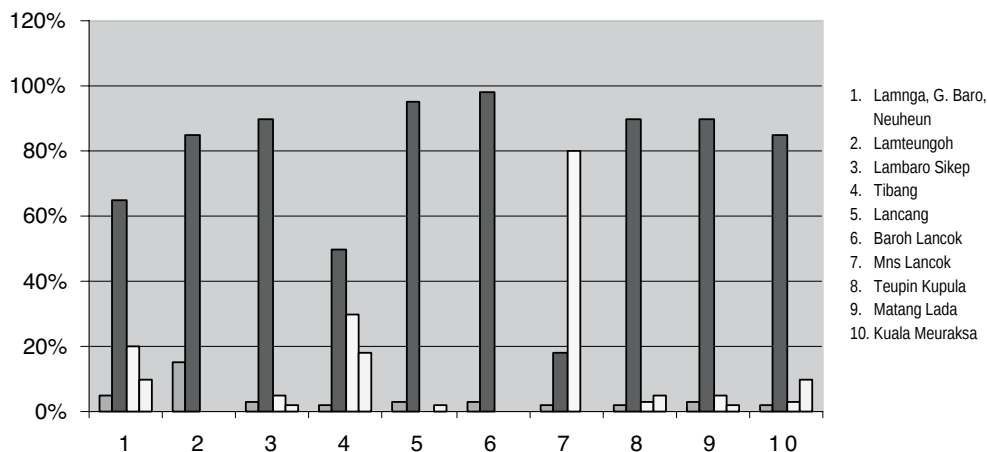
5. Pemilik membiayai seluruh kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan, akan tetapi pengelolaan tambak sepenuhnya diserahkan kepada pihak lain, baik dengan cara bagi hasil atau upahan (pemilik = pemodal $\neq$ pengelola).

Gambar 5 merangkum distribusi pola pengelolaan tambak di daerah studi. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pola kedua dan ketiga (yaitu pembiayaan modal kerja tergantung kepada *tauke*) merupakan pola pengelolaan yang dominan, yaitu 76% dari seluruh tambak di daerah studi.

Pola Pengelolaan Tambak



Pola pengelolaan tambak berdasarkan desa



Gambar 5. Distribusi pola pengelolaan tambak berdasarkan pihak yang terlibat dan desa

Kebanyakan dari mereka adalah pemilik tambak dengan skala kecil (dibawah 1 ha). Sementara pola pertama, yaitu pemilik membiayai modal kerja dan mengelolanya sendiri budi daya tambak, merupakan porsi terkecil (4%). Hasil pencacahan di daerah studi menunjukkan bahwa terdapat 408 (19%) KK menggarap lahan milik orang lain secara bagi hasil (*mawah*) terlepas apakah pembiayaan modal kerjanya bergantung kepada *tauke* atau atas biaya sendiri. Sementara itu, terdapat 136 KK (6.4%) yang bekerja pada lahan milik orang lain sebagai buruh tambak.

Keberadaan *tauke* (yang oleh sementara pihak sering dipandang negatif) dan lembaga *mawah* memberikan peluang bagi petani tanpa lahan bisa melakukan budi daya tambak. Kasus di desa Tibang misalnya, walaupun lahan tambak di desa ini dimiliki hanya oleh sekelompok kecil masyarakatnya, 85% dari masyarakat desa ini menggantungkan hidupnya pada budi daya tambak, baik sebagai pekerja maupun sebagai pengelola tambak dengan sistem *mawah*. Data tersebut memberikan indikasi bahwa bencana Tsunami yang menghancurkan sebagian besar tambak di Provinsi Aceh, tidak hanya berakibat pada pemilik tambak saja, melainkan juga menimpa anggota masyarakat lain yang menggantungkan hidupnya pada tambak.

Sistem Budi Daya Tambak

Seperti kebanyakan tambak yang ada di Indonesia, sistem budi daya tambak di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan berdasarkan asupan (input) produksi dan teknologi yang diterapkan. Djuhriansyah dan Abdusyahid (1999) misalnya mengelompokkan budi daya tambak berdasarkan sumber dan kuantitas benur yang digunakan, yaitu : primitif, tradisional, semi-intensif dan intensif. Dalam budi daya tambak primitif, benur dan nener yang digunakan semuanya berasal dari alam, yaitu benur yang masuk ke tambak sewaktu air pasang naik. Budi daya tambak primitif serupa ini hanya berlaku pada saat budi daya tambak berkembang pertama kali di Aceh; saat ini sudah tidak ada lagi jenis budi daya tambak seperti ini. Dalam budi daya tambak tradisional, bibit udang dan ikan (bandeng) yang digunakan, selain yang langsung masuk ke tambak lewat pasang naik dan pasang surut air, juga ditambah dengan benur yang dibeli sebanyak 1.000-20.000 ekor/ha. Untuk budi daya tambak semi intensif, petani tambak lebih berkonsentrasi pada satu jenis komoditas tertentu saja (pada umumnya udang) dan hanya menggunakan benur yang dibeli di pasaran sebanyak 20.000-100.000 ekor/ha. Sedangkan budi daya tambak intensif hanya membudi dayakan udang windu yang bibitnya (benur) dibeli dari sumber yang terpercaya dengan kepadatan yang sangat tinggi: antara 100.000 dan 600.000 ekor/ha untuk sekali tanam.

Pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan kunci dan dari diskusi kelompok terarah di 12 desa terpilih, secara umum sistem budi daya tambak di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu sistem tradisional, semi-intensif dan intensif. Tabel 3 merangkum ciri-ciri umum dari ketiga sistem budi daya tambak di Provinsi Aceh tersebut.

Tabel 3. Ciri-ciri umum budi daya tambak di Provinsi Aceh berdasarkan teknologi

	Tradisional	Semi Intensif	Intensif
Skala Usaha	0,5 – 5 ha	0,5– 10 ha	5 – 50 ha
Konstruksi Petak	Tata letak tambak tidak teratur dengan luasan bervariasi antara 0,25 – 5 ha per petak	Teratur dengan luasan per petak bervariasi 1 – 5 ha.	Tata letak tambak diatur mengacu pada efisiensi pengelolaan tambak dengan luasan per petak bervariasi antara 0.10 – 1 ha.
Irigasi dan drainase	Hanya terdapat satu pintu air per petak; intake dan outlet menjadi satu Pengaturan air irigasi mengandalkan pasang-surut air laut.	Setiap petak memiliki pintu intake dan outlet secara terpisah Pengaturan air dilakukan mengandalkan pasang-surut air laut dan pompa air	Setiap petak memiliki pintu intake dan outlet secara terpisah Pengaturan air sepenuhnya dilakukan dengan bantuan pompa air
Daur usaha	4- 8 bulan (1 – 2 kali panen setahun)	4- 8 bulan (1 – 2 kali panen setahun)	4 bulan (2 kali panen setahun)
Asupan (input) Bibit Benur	Benur berasal dari alam (mengandalkan pasang surut air laut) dan/atau dibeli di pasaran Kepadatan bervariasi antara 1.000 ekor dan 20.000 ekor/ha	Benur dibeli sumber terpercaya yang ada di pasaran Kepadatan bervariasi antara 20 ribu dan 60 ribu ekor/ha	Benur dibeli dari sumber yang terpercaya dan kualitas benur terjamin Kepadatan bervariasi antara 100 ribu – 600 ribu ekor/ha; pada umumnya kurang dari 200 ribu ekor/ha
Nener	Nener berasal dari alam (mencari sendiri) dan/atau yang ada di pasaran Kepadatan bervariasi antara 1.000 dan 2.000 ekor/ha	Nener berasal dari sumber terpercaya di pasaran Jumlah nener kurang dari 2.000 ekor; konsentrasi usaha terpusat pada udang	Tidak ada
Pakan	Pakan alami (klekap) merupakan sumber pakan utama. Jika diperlukan ditambah bekatul atau pellet, dengan dosis pakan lebih rendah dari pada yang direkomendasikan	Pakan alami (klekap) masih digunakan sampai benur dan/atau nener berusia satu bulan. Pakan utama adalah bekatul atau pellet, dengan dosis lebih rendah dari yang direkomendasikan	Pakan buatan berupa pellet; tidak tergantung keberadaan pakan alami (klekap); komposisi pakan diberikan sesuai dengan rekomendasi

Penerangan	Petromax	Petromax dan/atau listrik dengan menggunakan generator listrik	Listrik : menggunakan generator listrik atau listrik PLN apabila tersedia.
Aerator	Tidak ada; semata-mata mengandalkan pasang-surut air laut	Diperlukan jika kualitas air kurang bagus	Mutlak diperlukan
Keluaran (output) Jenis dan produktivitas	Udang putih dan/atau udang windu; 200 – 400 kg/ha/musim Bandeng: 200 – 300 kg/ha/musim	Udang windu : 600 – 800 kg/ha/musim Bandeng : 150 – 300 kg/ha/musim	Udang windu : 2 ribu - 15 ribu kg/ha/musim

Perbedaan yang paling menonjol dari ketiga sistem budi daya tersebut terletak pada tata letak tambak (konstruksi), pengaturan irigasi, jumlah asupan usaha tani seperti bibit (benur), pakan dan pemupukan, konsentrasi usaha, dan penggunaan energi untuk penerangan dan pengaturan irigasi. Keseluruhannya bermuara pada jumlah modal yang diperlukan per ha tambak dan besarnya produksi yang diharapkan.

Budi daya tambak tradisional, yang merupakan bentuk budi daya tambak paling banyak diusahakan di Provinsi Aceh (75% dari total), pada dasarnya sangat bervariasi dalam hal penerapan teknologi, maupun komoditas yang dihasilkan. Ada budi daya tambak tradisional yang berkonsentrasi pada budi daya udang dengan teknologi yang menyerupai sistem budi daya tambak semi intensif, tetapi dengan kepadatan benur yang masih berada dalam batas kepadatan sistem budi daya tambak tradisional, staf Dinas Perikanan Aceh Besar (komunikasi personal) menyebutnya dengan sistem budi daya **tambak tradisional plus**.

Umumnya budi daya tambak dengan teknologi tradisional plus ini mengandalkan komoditas utama udang windu dan bandeng secara bersamaan (polikultur), maksudnya untuk mengurangi resiko kerugian yang terlalu besar jika terjadi kegagalan panen udang, yang utamanya disebabkan karena penyakit. Strategi ini juga terkait dengan keterbatasan modal budi daya. Pemeliharaan bandeng bersamaan dengan udang windu dapat memperbaiki kualitas air tambak. Bandeng akan memanfaatkan makanan alami yang berlebihan pada tambak yang terlalu subur, dan jika dalam tambak terjadi pertumbuhan lumut sutera yang berlebihan, petani memelihara ikan bandeng untuk memakan dan mengurangi lumut yang ada.

Selain itu, di daerah Bireun, Lhokseumawe dan Aceh Utara, sejak tahun 1990 berkembang budi daya pembesaran anakan kerapu di tambak tradisional, atas permintaan investor dari luar daerahnya (Medan dan Banda Aceh). Ada dua jenis kerapu yang dibudi dayakan: kerapu macan dan kerapu lokal. Tugas petani dalam

hal ini hanya membesarkan anakan kerapu menjadi sepanjang tiga inci selama dua bulan. Untuk 10.000 ekor anakan kerapu, dengan asumsi tingkat kematian 30%, dan upah Rp. 25.000,- per HOK, petani tambak bisa menerima keuntungan bersih hingga Rp. 4,5 juta selama dua bulan, atau *return to labour* mencapai Rp. 61.500,- per HOK. Budi daya pembesaran ikan kerapu ini bisa dilakukan dengan menggunakan keramba (jaring di dalam tambak). Kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan pakan yang berupa ikan *rucah* (berbagai jenis ikan kecil yang ikut tertangkap nelayan akan tetapi tidak laku jika dijual). Pada mulanya ikan *rucah* dikembalikan ke laut. Adanya kecenderungan akan peningkatan kebutuhan ikan *rucah* untuk budi daya anakan kerapu ini telah menimbulkan kekhawatiran sementara pihak akan dampak lingkungan dari meningkatnya kebutuhan akan ikan *rucah* tersebut.

Pada budi daya semi intensif, petani memelihara campuran udang dan bandeng (polikultur), walaupun kebanyakan petani lebih berkonsentrasi pada budi daya udang windu. Kepadatan benih udang (benur) yang ditebarkan antara 20.000 – 60.000 ekor/ha tiap musim tanam. Pakan udang utama pada bulan pertama berasal dari alam (*klekap*), yang kemudian diganti dengan pakan dari luar berupa bekatul dan/atau pellet pada bulan berikutnya untuk mempercepat pertumbuhan udang. Pengendalian hama dilakukan lebih intensif pada waktu persiapan lahan, sebelum penebaran benur. Pengelolaan (pergantian) air juga dilakukan secara lebih baik; selain dengan memanfaatkan air pasang surut, juga dibantu dengan pompa (mesin).

Budi daya tambak secara intensif merupakan budi daya tambak yang padat modal yang menuntut tersedianya pompa air dan kincir, tata letak tambak yang baik (memiliki saluran irigasi dan drainase yang terpisah, penerangan bersumber dari listrik, pemberian pakan dengan dosis yang cukup tinggi (1.500 gram pakan untuk 1.000 gram udang). Konstruksi dan pengaturan tata letak tambak dalam sistem budi daya tambak intensif mengacu pada efisiensi dalam pengaturan irigasi, mobilisasi tenaga kerja untuk pengawasan dan pemberian pakan, dan pengangkutan hasil. Makanan sepenuhnya tergantung dari pakan (*pellet*) yang diberikan dengan komposisi yang ideal bagi pertumbuhan udang dengan rasio 1: 2 yang artinya untuk menghasilkan satu ton udang diperlukan pakan sebanyak dua ton pakan. Pemasangan kincir yang berfungsi sebagai *aerator* untuk menambah oksigen dalam air mutlak diperlukan. Penggantian air dilakukan dengan menggunakan pompa dalam frekuensi yang relatif sering untuk menjamin kualitas air. Pemeriksaan kualitas air dilakukan dengan seksama.

Produksi sistem budi daya tambak intensif yang berkonsentrasi pada udang bervariasi unggul ini cukup tinggi yaitu mencapai 30 ton/ha/tahun. Produksi rata-rata sistem budi daya tambak intensif di Aceh bervariasi antara 10 – 20 ton/ha/tahun;

lebih rendah dibandingkan Jepang, Taiwan, dan Thailand yang bisa mencapai 60 ton/ha/tahun.

Namun demikian, sistem budi daya tambak intensif jumlahnya terbatas dan kebanyakan diusahakan oleh investor pendatang dari luar Provinsi Aceh (Medan, Jakarta bahkan dari negara lain di Asia). Biasanya para investor tersebut menyewa lahan milik masyarakat setempat dalam priode waktu 5 – 10 tahun dengan sewa lahan tambak bervariasi antara Rp. 2 juta – Rp. 10 juta/ha/tahun, tergantung tingkat kesuburan dan lokasi tambak. Dalam diskusi kelompok terarah (FGD) dengan sejumlah petani tambak di 12 desa terpilih, tercatat beberapa persoalan dalam praktek budi daya tambak intensif tersebut. Pertama, dari aspek lingkungan, lahan tambak yang dibudi dayakan secara intensif biasanya setelah selama empat tahun berturut-turut, tidak bisa langsung dipakai untuk budi daya tambak; harus ‘diistirahatkan’ selama satu atau dua tahun. Di duga ini berkaitan dengan penggunaan pestisida, pupuk dan pakan yang terlalu besar. Kedua, dari aspek hubungan sosial. Para investor biasanya tidak memperkerjakan masyarakat setempat (tapi memperkerjakan tenaga kerja yang dibawa dari daerah asalnya), dan cenderung eksklusif. Hal ini sering menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat di sekitarnya, secara khusus berbenturan dengan kebiasaan lokal pada sistem pemanenan hasil. Dalam kebiasaan lokal, pada masa panen ada saatnya dimana semua penduduk di sekitar tambak diperbolehkan ikut membantu panen dengan imbalan satu kilo udang per orang.

Produksi

Budi daya tambak pada dasarnya merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembesaran biota perairan dalam suatu perairan tambak dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan hasil dengan cara memanennya (Ditjen Perikanan Budi daya 2002). Jenis biota perairan yang dibudi dayakan di tambak-tambak di daerah studi antara lain: udang windu (*Penaeus monodon*), udang putih (*Penaeus merguensis*), ikan bandeng (*Chanos chanos*), kakap (*Lates calcalifer*), kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*) dan kerapu lumpur (*Epinephelus lanceolatus*). Jenis yang paling banyak dibudi dayakan oleh petani tambak adalah udang **windu** (*Penaeus monodon*) karena harga jual yang relatif tinggi seiring dengan tingginya permintaan udang untuk ekspor dan **ikan bandeng** (*Chanos chanos*) yang sudah lama dikenal oleh petani tambak.

Udang windu merupakan komoditas utama dalam budi daya tambak di Provinsi Aceh (Tabel 4). Statistik perikanan tahun 2003 menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas budi daya udang di Provinsi Aceh (78%) maupun di daerah studi (71%) berupa udang windu. Ini dapat dimengerti karena udang windu memiliki jangkauan pasar ekspor yang lebih luas, sementara udang putih dan bandeng jangkauan

pasarnya relatif terbatas. Data dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa 52% dari total produksi tambak Provinsi Aceh berasal dari daerah dimana penelitian ini dilakukan.

Budi daya bandeng sudah lama dikenal oleh petani tambak dan pernah menjadi produksi unggulan. Akan tetapi, sejak meluasnya budi daya udang varietas unggul (udang windu) pada tahun 1960an, bandeng menjadi komoditas alternatif, khususnya setelah serangan penyakit dalam budi daya udang windu pada pertengahan tahun 1990an. Pilihan terhadap komoditas bandeng cukup beralasan, karena: (1) teknologi pembesaran dan pembenihan ikan bandeng sudah dikuasai dan berkembang di masyarakat, (2) persyaratan hidupnya mudah dan toleran terhadap perubahan lingkungan, (3) pasar bandeng sudah berkembang dan (5) mempunyai nilai jual relatif tinggi setelah udang.

Tabel 4. Komoditas budi daya tambak di Provinsi Aceh dan daerah studi tahun 2003

Jenis Komoditas	Provinsi Aceh (ton)	Persentase	Daerah Studi (ton)	Persentase
Udang windu	8.487,10	77,16%	4.091,60	71,21%
Udang putih	1.066,70	9,70%	1.014,90	17,66%
Ikan bandeng	1.445,50	13,14%	639,30	11,13%
Jumlah	10.999,30	100,00%	5.745,80	100,00%

Sumber: Statistik perikanan

Bireun dan Aceh Utara merupakan daerah produsen utama bandeng di Provinsi Aceh. Dari 639,30 ton bandeng hasil produksi di daerah studi pada tahun 2003, sebagian besar (84,66%) berasal dari budi daya tambak di Kabupaten Bireun dan Aceh Utara. Sementara itu Kabupaten Aceh Besar menyumbang 10,34%, sisanya dari Kabupaten Pidie (4,94%) dan Banda Aceh (kurang dari 1%).

Sementara itu, udang putih adalah hasil sampingan dari budi daya tambak (dengan teknologi tradisional dan semi intensif). Benur udang putih masuk ke dalam tambak bersamaan dengan air pasang pada saat dilakukan pengelolaan air tambak. Udang putih yang masuk melalui air pasang tersebut sebagian sudah siap panen (udang dewasa) dan sebagian lagi masih perlu dibesarkan lagi selama 1 – 2 bulan untuk mencapai ukuran panen tanpa perlu memberikan makanan tambahan. Umumnya petani tambak tradisional yang tidak memiliki cukup modal, bertumpu pada produksi udang putih yang keberadaannya di sepanjang pantai timur Aceh cukup melimpah. Dengan masa budi daya 2 – 3 bulan (4-5 kali panen per tahun), produksi udang ukuran 10 gr/ekor bisa mencapai 200300 kg/ha/panen atau mencapai 1.000 kg/ha/tahun. Dengan asumsi harga udang putih Rp. 20.000,-/kg (harga pada saat

pengamatan lapangan dilakukan; Desember 2005) petani menerima penghasilan kotor sekitar Rp. 20 juta/ha/tahun.

Permodalan

Dengan mengecualikan budi daya tambak yang dilakukan investor dalam skala besar dan padat modal, kebanyakan petani tambak di daerah studi (92%) membiayai kebutuhan modalnya dengan bantuan *tauke*. Hanya sebagian kecil yang bisa membiayai dengan modal sendiri. **Petani tambak tidak pernah mengambil kredit dari bank ataupun mendapat fasilitas pinjaman kredit dari pemerintah.** Kuat dugaan hal ini berkaitan dengan pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat Aceh.

Seperti telah disinggung di atas, fleksibilitas *tauke* dalam penyediaan dana bagi petani tambak merupakan keunggulan mereka. Modal sosial saling percaya antara petani tambak dan *tauke* merupakan jaminan hubungan kerja sama di antara mereka. *Tauke* menyediakan dana bagi petani tambak tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja saja, melainkan sampai kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Bentuk pinjaman bisa dalam bentuk natura maupun tunai. Sebagai imbalannya petani harus ‘menjual’ produksinya kepada *tauke*. Jumlah pengembalian pinjaman tergantung nilai penjualan hasil panen. Apabila hasil panen kurang bagus, petani tambak boleh menunda pembayaran atau mencicilnya.

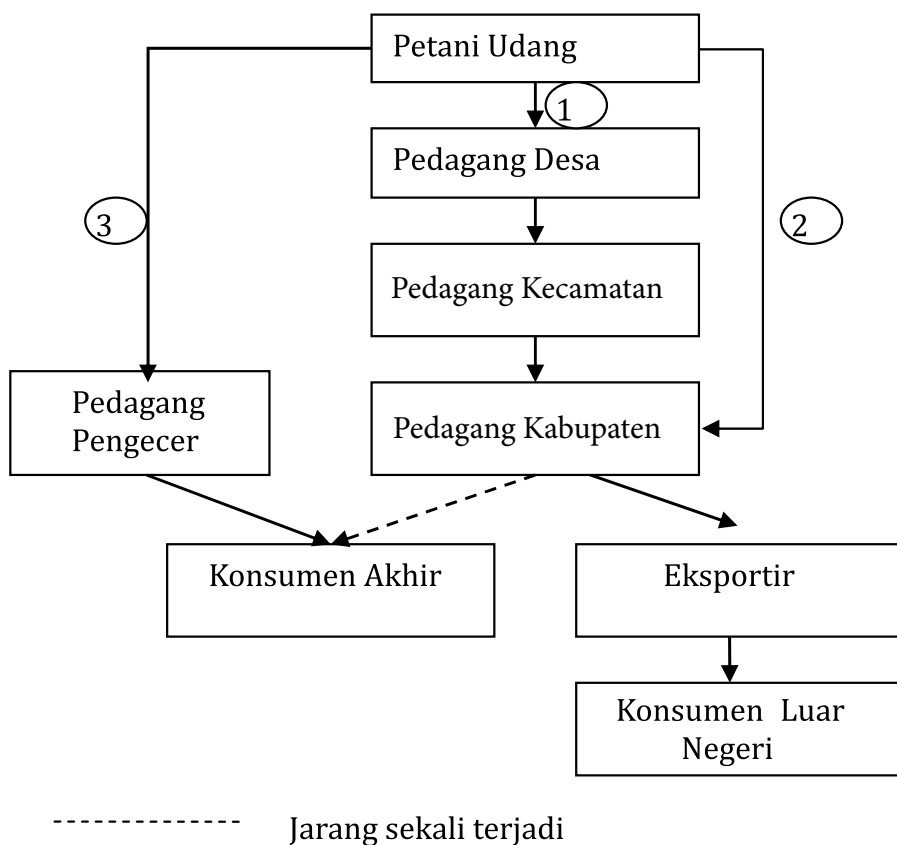
Pemasaran Hasil – Udang Windu

Skema dalam Gambar 6 berikut, merupakan gambaran secara umum rantai pemasaran udang di Aceh. Terdapat tiga kemungkinan rantai pemasaran yang bisa dipilih petani. Ketiga pilihan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang membiayai modal kerja budi daya udang dengan modal sendiri.

Bagi mereka yang menggunakan bantuan permodalan dari *tauke*, mata rantai terdepan adalah *tauke*. Untuk selanjutnya *tauke*, tergantung pada kedudukan usahanya, akan menentukan mata rantai yang mana yang akan mereka gunakan. Perlu dicatat di sini bahwa sebagian besar *tauke* adalah juga pedagang (bisa di tingkat desa maupun pedagang besar di Banda Aceh), sehingga kedudukan usahanya cukup menentukan mata rantai pemasarannya. Dalam hal ini *tauke* juga melayani pedagang pengecer.

Kecuali mereka yang ada di sekitar Banda Aceh, rantai pemasaran yang paling umum dipakai petani (dan juga *tauke*) di daerah studi adalah alur pemasaran satu. Di Banda Aceh, umumnya melalui alur dua. Sedangkan alur pemasaran tiga hanya terjadi untuk komoditas udang yang kualitasnya rendah, seperti udang putih atau udang windu yang kecil.

Terlepas dari saluran pemasaran yang mana yang digunakan petani tambak dalam menjual hasil panen udangnya, margin keuntungan terbesar berada di produsen, yang kemudian diikuti oleh pedagang besar/eksportir yang biasanya berkedudukan di Medan. Tabel 5 memberikan perhitungan sederhana margin keuntungan di setiap rantai pemasaran per kg udang windu. Margin keuntungan petani tambak adalah sebesar 27,9% dari harga jual ke konsumen akhir (\$ 10 = Rp. 90.000)/kg udang.



Gambar 6. Rantai pemasaran udang windu di daerah studi

Tabel 5. Margin keuntungan udang windu di lokasi studi

Uraian	Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	(%)
1. Harga jual petani tambak (udang 30 ekor/kg)		60.000	66,67
biaya produksi udang per kg	34.886		38,76
Margin keuntungan petani tambak (1-a)		25.114	27,90
2. Harga beli pedagang pengumpul desa		60.000	66,67
biaya keranjang (penyusutan)	2,5		0,00
biaya peti (penyusutan)	50		0,06
biaya angkut (transport)	200		0,22
lain-lain	25		0,03
harga jual pedagang desa		61.000	67,78
Margin keuntungan pedagang pengumpul desa (e-2-a-b-c-d)		723	0,80
3. Harga beli pedagang pengumpul kecamatan		61.000	67,78
biaya keranjang (penyusutan)	0		0,00
biaya peti (penyusutan)	50		0,06
biaya angkut (transport)	250		0,28
lain-lain	50		0,06
harga jual pedagang kecamatan		62.000	68,89
Margin keuntungan pedagang pengumpul kecamatan (e-3-a-b-c-d)		650	0,72
4. Harga beli pedagang Kabupaten (Agen)		62.000	68,89
biaya keranjang (penyusutan)	0		0,00
biaya peti (penyusutan)	100		0,11
biaya angkut (transport)	1.000		1,11
lain-lain	300		0,33
harga jual pedagang Kabupaten (agen)		65.000	0,00
Margin keuntungan pedagang kabupaten (e-4-a-b-c-d)		1.600	1,78
5. Harga beli eksportir Medan		65.000	72,22
biaya keranjang (penyusutan)	0		0,00
biaya peti (penyusutan)	1.000		1,11
biaya angkut (transport)	10.000		11,11
lain-lain	2.000		2,22
harga jual eksportir Medan (asumsi nilai tukar per US \$ = Rp.9 000,-)	\$ 10	90.000	100,00
Margin keuntungan eksportir Medan (e-5-a-b-c-d)		12.000	13,33

Penutup

Budi daya tambak pada dasarnya merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembesaran biota perairan dalam suatu perairan tambak dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan hasil dengan cara memanennya. Jenis biota perairan yang dibudi dayakan di tambak-tambak di Provinsi Aceh antara lain: udang windu (*Penaeus monodon*), udang putih (*Penaeus merguensis*), ikan bandeng (*Chanos chanos*), kakap (*Lates calcalifer*), kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*) dan kerapu lumpur (*Epinephelus lanceolatus*).

Udang windu merupakan komoditas utama dalam budi daya tambak di Provinsi Aceh. Statistik perikanan tahun 2003 menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas budi daya udang di Provinsi Aceh (78%) maupun di daerah studi (71%) berupa udang windu. Budi daya bandeng sudah lama dikenal oleh petani tambak dan pernah menjadi produksi unggulan. Akan tetapi, sejak meluasnya budi daya udang varietas unggul (udang windu) mulai tahun 1960an, bandeng menjadi komoditas alternatif, khususnya setelah serangan penyakit dalam budi daya udang windu pada pertengahan tahun 1990an. Pilihan terhadap komoditas bandeng cukup beralasan, karena: (1) teknologi pembesaran dan pembenihan ikan bandeng sudah dikuasai dan berkembang di masyarakat, (2) persyaratan hidupnya mudah dan toleran terhadap perubahan lingkungan, (3) pasar bandeng sudah berkembang dan (5) mempunyai nilai jual relatif tinggi setelah udang.

Melihat perkembangan budi daya tambak di Provinsi Aceh, ada tiga hal yang menarik untuk disimak khususnya jika dikaitkan dengan keberadaan hutan bakau. Pertama, alih fungsi hutan bakau untuk budi daya tambak lebih banyak terjadi di bagian utara pantai timur Provinsi Aceh seperti di Banda Aceh dan Aceh Besar, dibandingkan dengan di bagian lain seperti Bireun, Pidie, Aceh Utara dan Lhokseumawe yang sebagian besar tambaknya berasal dari alih fungsi lahan sawah yang berada di sekitar pantai dan muara sungai. Kedua, konversi kawasan hutan bakau untuk budi daya tambak mulai marak dilakukan pada awal dekade tahun 1960an, pada saat investor dari Medan menyediakan pembiayaan budi daya udang bagi kelompok-kelompok petani (satu kelompok terdiri dari 40 petani), dengan syarat hasil udang harus dijual kepada investor yang bersangkutan. Tawaran itu ditanggapi dengan sangat antusias oleh masyarakat; dan hanya dengan Surat Ijin Menggarap yang dikeluarkan *Keuchik* (kepala desa) setiap orang bisa menggunakan lahan yang 'tidak terpakai' (yang sebagian besar merupakan hutan bakau) untuk budi daya tambak. Pembabatan hutan bakau untuk budi daya udang semakin meluas pada pertengahan tahun 1970an, yang dilakukan baik oleh masyarakat setempat maupun oleh investor dari luar Aceh. Ketiga, perkembangan tambak di Provinsi Aceh (khususnya untuk budi daya udang)

mencapai titik balik pada tahun 1995, di tahun tersebut muncul penyakit (virus, bakteri dan jamur) pada udang yang menyebabkan sebagian besar tambak gagal panen. Diduga hal ini terkait dengan pencemaran tambak akibat eksploitasi lahan tambak yang berlebihan

Secara umum sistem budi daya tambak di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu sistem tradisional, semi-intensif dan intensif. Dengan memperhatikan sisi teknologi dan statistik budi daya tambak di Provinsi Aceh tahun 2004, sebagai potret menjelang Tsunami (BPS 2004), sebagian besar tambak (75%) diketahui dioperasikan secara tradisional dengan tingkat asupan sarana produksi yang rendah dan produksi utama udang dan bandeng. Sisanya merupakan budi daya tambak semi intensif (22%) yang banyak ditemukan di Biereun dan Pidie, dan hanya sekitar 3% merupakan budi daya udang intensif. Budi daya udang di pantai Barat Provinsi Aceh baru mulai dilakukan sekitar lima tahun yang lalu dan luasan tambak di wilayah itu juga masih relatif kecil.

Memperhatikan lahan yang digunakan untuk tambak, tidak semua tambak yang ada di daerah studi dibangun di lahan milik perorangan yang sudah dilengkapi dengan sertifikat hak milik. Lahan yang digunakan untuk kegiatan budi daya tambak di lokasi studi terdiri atas: tanah hak milik adat (80%), tanah negara (16%), tanah wakaf milik *meunasah* (1%), dan tanah umum milik desa (3%). Sementara itu diperkirakan hanya 5% dari tanah hak milik adat yang sudah dilengkapi dengan alas hak dalam bentuk sertifikat.

Keberadaan tanah milik adat yang dimanfaatkan untuk budi daya tambak, dari kaca mata hukum positif yang berlaku di Indonesia, memiliki beberapa persoalan. Pertama, tanah milik adat adalah tanah yang sebelum lahirnya Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 (UUPA) merupakan lahan-lahan yang secara adat telah dikuasai masyarakat setempat. Setelah diberlakukan UUPA 1960, tanah-tanah adat tersebut memerlukan penegasan hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUPA. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2004 (sebelum terjadinya Tsunami), sangat sedikit lahan tambak di atas tanah milik adat yang sudah bersertifikat, hanya 5%.

Berdasarkan data status lahan dari Potensi Desa 2003 (BPS 2004), 20% lahan tambak di 12 desa daerah studi dibangun di lahan bukan milik perorangan. Di antara lahan milik perorangan, hanya 36,5% yang bersertifikat. Kebanyakan lahan milik perorangan yang bersertifikat berada di daerah sekitar perkotaan, seperti Banda Aceh (Tibang dan Lambaro Skip, masing-masing 99,5% dan 44,5%), Pidie (Baroh Lancok, 43,9%). Di daerah pedesaan, kurang dari 10% lahan milik perorangan yang dilengkapi dengan sertifikat hak milik, kebanyakan tambak berada di daerah

pedesaan. Hal lain yang menarik adalah luas lahan tambak per keluarga bervariasi antara 0.5 ha dan 30 ha. Mereka yang memiliki lahan tambak cukup luas, kebanyakan tidak dikelola sendiri.

Kajian ini juga mencatat persoalan menyangkut status hukum dari lahan budi daya tambak yang secara fisik terletak di tepi pantai dan/atau bantaran sungai. Pengamatan di lapangan dan diskusi kelompok terarah mencatat bahwa ada sejumlah lahan tambak yang terletak atau berada dalam jarak 100-150 m dari tepi pantai. Dalam ketentuan hukum adat setempat, laut dan pantai (yang berpasir) tidak bisa dimiliki atau menjadi hak perorangan; dalam hal ini merupakan ruang publik. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai wilayah "*luen pukot*", yakni wilayah yang terletak seratus depa dari pasang tertinggi atau 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai (kira-kira 150 m dari tepi pantai). Dalam hukum positif yang termuat dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, wilayah yang berada di dalam jarak 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat, merupakan tanah publik yang dikuasai negara. Namun dalam kenyataannya, lahan atau tanah dalam batas-batas tersebut banyak yang telah dijadikan tambak oleh masyarakat. Keadaan seperti ini sudah berlangsung sejak lama bahkan tanah-tanah yang sebenarnya merupakan tanah negara tersebut sudah berkali-kali diwariskan. Dalam upaya perbaikan tambak pasca Tsunami di kawasan tersebut, issue tanah ini menjadi persoalan tersendiri.

Dengan memperhatikan modal yang digunakan, dan mengecualikan budi daya tambak yang dilakukan investor dalam skala besar dan padat modal, umumnya petani tambak di daerah studi (92%) membiayai kebutuhan modalnya dengan bantuan *tauke*. Sebagian kecil membiayainya dengan modal sendiri. **Petani tambak tidak pernah mengambil kredit dari bank ataupun mendapat fasilitas pinjaman kredit dari pemerintah.** Kuat dugaan hal ini berkaitan dengan pranata sosial yang berlaku di masyarakat Aceh. Fleksibilitas *tauke* dalam penyediaan dana bagi petani tambak merupakan keunggulan mereka. Modal sosial saling percaya antara petani tambak dan *tauke* merupakan jaminan hubungan kerja sama di antara mereka. *Tauke* menyediakan dana bagi petani tambak tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja petani tambak; bahkan sampai kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Bentuk pinjaman bisa dalam bentuk natura maupun tunai. Sebagai imbalannya petani harus 'menjual' produksinya kepada *tauke*. Jumlah pengembalian pinjaman tergantung nilai penjualan hasil panen. Apabila hasil panen kurang bagus, petani tambak boleh menunda pembayaran ataupun mencicilnya.

Menyangkut pemasaran produksi, terdapat tiga kemungkinan rantai pemasaran yang bisa dipilih petambak: (1) melalui pedagang desa, (2) langsung ke pedagang besar di kabupaten/Aceh pengecer, (3) langsung ke pedagang eceran. Kecuali mereka yang

ada di sekitar Banda Aceh, rantai pemasaran yang paling umum dipakai petani (dan juga *tauke*) adalah saluran pemasaran satu. Sedangkan mereka yang ada di Banda Aceh, lebih sering menggunakan saluran dua. Saluran pemasaran tiga hanya terjadi untuk komoditas udang yang kualitasnya rendah, seperti udang putih atau udang windu yang kecil. Ketiga pilihan di atas hanya bisa dilakukan oleh mereka yang membiayai modal kerja budi daya udang dengan modal sendiri. Bagi mereka yang menggunakan bantuan permodalan dari *tauke*, mata rantai terdepan adalah *tauke*. Untuk selanjutnya *tauke*, tergantung pada kedudukan usahanya, akan menentukan mata rantai yang mana yang akan mereka gunakan. Perlu dicatat di sini bahwa sebagian besar *tauke* adalah juga pedagang (bisa di tingkat desa maupun pedagang besar di Banda Aceh), sehingga kedudukan usaha *tauke* cukup menentukan mata rantai pemasarannya. Dalam hal ini *tauke* juga melayani pedagang pengecer. Khusus untuk udang windu, terlepas dari pilihan alur pemasaran yang dimanfaatkan petani tambak dalam menjual hasil panen udangnya, margin keuntungan terbesarnya tetap berada di tangan produsen, diikuti oleh pedagang besar/eksportir yang biasanya berkedudukan di Medan. Margin keuntungan petani tambak adalah sebesar 27,9% dari harga jual ke konsumen akhir dengan asumsi harga \$ 10 = Rp. 90.000,-/kg.

Daftar Pustaka

- Chambers R, Pacey A dan Thrupp LA (eds). 1989. *Farmer First: Farmer Innovation and Agricultural Research*. Longman, London
- Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). 2005. *Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prov. NAD dan Sumatera Utara Pasca Tsunami*, Sektor Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NAD. 2004. *Perikanan Dalam Angka Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003*, Banda Aceh.
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NAD. 2004. *Statistik Perikanan Budi daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003*, Banda Aceh.
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NAD. 2005. *Statistik Perikanan Budi daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004*, Banda Aceh.
- Djuhriansyah dan Abdusyahid. 1999. *Potensi Tambak-Tambak Primitif di Kabupaten Kutai*. FRONTIR Nomor 24, Pebruari 1999.
- Fakultas Pertanian Unsyiah. 2000. *Studi Potensi Pesisir Pantai Guna Pengembangan Tambak Udang di Kabupaten Aceh Timur*. Kerjasama dengan Kantor Wilayah

Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Aceh.
Banda Aceh.

Phillips M dan Budiman A. 2005 Assessment of the impacts of the 26th December 2004 earthquake and Tsunami on aquaculture in the Provinces of Aceh and North Sumatra, Indonesia. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Indonesia

Primavera JH. 1997. Socio-economic impacts of shrimp culture. *Aquaculture Research* 28 : 815-827

Zainun I, Budidarsono S, Rinaldi Y dan Adek MC. 2007. Socio-Economic Aspects of Brackish Water Aquaculture (Tambak) Production in Nanggroe Aceh Darussalam. . ICRAF Working Paper no 46:71 p.

Membangun Kembali Budi Daya Tambak di Aceh Pasca Tsunami 2004 – Kajian Sosial Ekonomi (Bagian Kedua)

*Suseno Budidarsono
World Agroforestry Centre (ICRAF)*

Pendahuluan

Upaya perbaikan tambak merupakan langkah strategis untuk pemulihan kehidupan masyarakat pesisir korban bencana Tsunami yang menghentak wilayah pantai Provinsi Aceh pada akhir tahun 2004. Rehabilitasi tambak secara swadaya, baik secara individu maupun kelompok, merupakan hal yang jauh dari kemampuan modal finansial yang tersedia di dalam masyarakat pasca bencana. Sementara itu upaya rehabilitasi oleh pihak luar di Provinsi Aceh terkendala oleh terbatasnya pengetahuan tentang aspek sosial-ekonomi dan lingkungan dari budi daya tambak. Terbatasnya informasi tentang pola penguasaan tambak dan praktik budi daya tambak di Provinsi Aceh menjelang bencana Tsunami, merupakan persoalan mendesak bagi lembaga donor dan penggerak pembangunan untuk menentukan prioritas rehabilitasi. Selain itu isu-isu lingkungan berkaitan dengan budi daya tambak, seperti dampak lingkungan dari budi daya tambak dan konversi hutan mangrove untuk lahan budi daya tambak, menjadi persoalan tersendiri dalam melakukan intervensi pengembangan tambak.

Tulisan ini, yang merupakan bagian kedua dari dua buah tulisan, menyajikan pemikiran tentang manfaat finansial budi daya tambak bagi petani tambak serta manfaat ekonomi bagi lingkungan di Aceh pasca Tsunami. Tulisan ini mengacu pada kajian budi daya tambak di Nanggroe Aceh Darussalam yang dilakukan oleh Indra Zainun dkk (2007) tepat satu tahun setelah Nanggroe Aceh Darussalam yang didera gelombang Tsunami pada akhir tahun 2004. Penelitian tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya pengkajian yang dilakukan ICRAF yang didanai oleh the Ford Foundation Indonesia dengan tajuk kegiatan *“Integrated Natural Resource Management & Livelihood Paradigms in Recovery from the Tsunami in Aceh”*. Tulisan berikut akan mengkaji beberapa aspek finansial berkaitan dengan rehabilitasi

Metoda, Pendekatan dan Daerah Studi

Kajian sosial-ekonomi budi daya ini dilakukan dengan menggunakan teknik kajian cepat perdesaan atau *Rapid Rural Appraisal* (Chambers dkk 1989). Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2005 melalui pencatatan data sekunder, pengamatan lapangan, wawancara kelompok, dan diskusi kelompok terarah dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur.

Pada aras provinsi pengumpulan data diarahkan untuk memperoleh informasi tentang keadaan umum budi daya tambak di Provinsi Aceh dan dampak dari gelombang Tsunami. Sedangkan pada aras kabupaten, kajian ini memilih enam kabupaten yang memiliki tambak cukup luas dan terkena dampak Tsunami paling luas. Dari enam kabupaten dipilih sepuluh kecamatan yang mengalami bencana Tsunami cukup serius. Selanjutnya pada tingkat desa dipilih 12 desa di 10 kecamatan tersebut yang mengalami bencana Tsunami cukup parah.

Tulisan berikut akan mengkaji beberapa aspek sosial – ekonomi yang dikaji berkaitan dengan rehabilitasi tambak mencakup: (1) pola penguasaan tambak di Provinsi Aceh sebelum bencana Tsunami; (2) kesempatan kerja yang tersedia dalam budi daya tambak; (3) Sistem produksi tambak; (4) Aspek legal dari kepemilikan tambak di Provinsi Aceh yang dalam hal ini kajian diarahkan untuk mengetahui budi daya tambak di lahan-lahan yang berada di bawah pengawasan negara; dan (5) Pola pengusahaan tambak yang mencakup pembelanjaan budi daya tambak, pemasaran hasil tambak, dan keterlibatan pengusaha swasta dalam upaya perbaikan tambak

Analisis Finansial Budi Daya Tambak

Kajian berikut dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum kemampuan budi daya tambak dalam memberikan manfaat finansial bagi petani tambak dan manfaat ekonomi bagi lingkungannya dengan menggunakan analisis sederhana neraca usaha tani (*farm budget analysis*). Secara khusus kajian ini diharapkan dapat mengetahui: (1) produktivitas lahan untuk budi daya tambak (dengan berbagai teknologi yang ada) yang diukur dari profitabilitas lahan dengan menghitung nilai penerimaan bersih sekarang (*Net Present Value*/NPV) dari budi daya tambak, (2) kemampuan tambak memberikan keuntungan untuk petani yang diukur dengan menghitung *return to labor* pada harga finansial, yaitu penerimaan bersih per hari orang kerja, (3) kemampuan lahan tambak dalam penyediaan lapangan perkerjaan di pedesaan dengan menghitung kebutuhan tenaga kerja per hektar per tahun, dan (4) besarnya investasi yang dibutuhkan.

Mengukur Profitabilitas budi daya tambak

Profitabilitas atau kemampuan memberikan keuntungan finansial maupun ekonomi dari satu kegiatan usaha tani (dalam hal ini budi daya tambak) dapat dilihat dua sisi. Pertama, profitabilitas lahan (dalam hal ini pengusahaan tambak), yaitu seberapa besar kegiatan penggunaan lahan memberikan keuntungan baik secara finansial maupun secara ekonomi. Dalam hal ini profitabilitas diukur dengan menggunakan menghitung nilai keuntungan bersih sekarang selama satu kurun waktu produksi tertentu atau lazim di sebut *Net Present Value* (NPV), yaitu selisih antara nilai sekarang dari manfaat/penerimaan dan nilai sekarang dari biaya yang dikeluarkan selama kurun waktu tertentu pada tingkat bunga yang ditentukan (Gittinger 1982). Secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$NPV = \sum_{t=0}^{t=n} \frac{B_t - C_t}{(1 + i)^t}$$

di mana B_t adalah nilai manfaat pada ke t dan C_t adalah biaya pada tahun ke t . Sementara itu i adalah nilai diskonto (*discount rate*) yang digunakan. Nilai positif NPV menunjukkan bahwa kegiatan investasi tersebut cukup menguntungkan. Sementara itu, NPV negatif tidak berarti bahwa kegiatan investasi usaha yang bersangkutan tidak menguntungkan, akan tetapi lebih memberikan indikasi bahwa sumber daya yang ada lebih baik dialokasikan untuk kegiatan investasi yang lain.

Hal kedua adalah profitabilitas bagi petani. Ini diukur dengan melihat besarnya *returns to labour* (penerimaan upah per hari-orang-kerja HOK/*person-day*) yang dihitung dengan cara mengubah 'surplus' yang ada menjadi upah perhari orang kerja (Vosti dkk 1998). Secara teknis perhitungan dilakukan dengan mengubah tingkat upah dalam neraca usaha tani sedemikian rupa sehingga $NPV = 0$. *Returns to labour* yang dihitung dengan harga finansial merupakan indikator insentif produksi bagi petani; mengukur seberapa besar insentif yang mampu diberikan oleh satu sistem usaha tani bagi petani dalam memproduksi. *Return to labor* yang lebih rendah dari upah rata-rata mengindikasikan bahwa kegiatan investasi yang bersangkutan memberikan daya tarik bagi petani untuk mengusahakannya.

Neraca usaha budi daya tambak

Analisis finansial budi daya tambak dilakukan dengan menggunakan analisis sederhana neraca usaha tani (*farm budget analisis*). Untuk itu terlebih dahulu disajikan hasil perhitungan neraca usaha budi daya tambak di daerah studi yang dikelompokkan ke dalam empat pola pengelolaan berdasarkan teknologinya: tradisional, tradisional plus, semi intensif dan intensif.

Penyusunan neraca usaha budi daya tambak ini dilakukan dengan menggunakan skenario produksi selama 10 tahun dengan asumsi-asumsi seperti tertulis dalam tiga tabel berikut ini. Tabel 1 yang merangkum komponen utama asupan eksternal dalam budi daya tambak. Tabel ini memberikan gambaran perbedaan tingkat asupan dari keempat teknologi yang ada. Tabel 2 merangkum asumsi produksi dalam budi daya tambak yang memberikan gambaran tentang hasil produksi pertahun dan waktu produksi efektif dari keempat pola pengusahaan tambak dalam kurun waktu skenario produksi (10 tahun) analisis ini. Yang terakhir adalah asumsi ekonomi makro dan harga produksi tambak yang digunakan dalam analisis ini, seperti disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 1. Komponen input budi daya tambak

Rincian	Satuan ukuran	Skala ekonomi dan tekhnologi			
		Intensif (2< ha)	Semi-Intensif (2-5 ha)	Tradisional Plus (1-2 ha)	Tradisional <2 ha
Generator listrik	Unit/farm	Harus ada dengan kapasitas 5.800 AC/W	Harus ada dengan kapasitas 2.900 AC/W	Harus ada dengan kapasitas 1.000 AC/W	tidak perlu
Pompa air		harus ada	harus ada	harus ada	tidak perlu
Aerator		harus ada	harus ada	ya dan tidak	tidak ada
Instalasi listrik		10	2	tidak ada	tidak ada
Sampan		2	1	tidak ada	tidak ada
Peralatan					
Salinometer		harus ada, satu unit			
pH meter		harus ada, satu unit	harus ada, satu unit	diperlukan	tidak ada
Jaring	Unit	20	4	2	2
Kontainer	Unit/ha	20	5	2	2
jerigen	Unit/ha	5	2	1	1
Petromax	Unit/ha			2	2
Benih					
benur	ekor/ha/ thn	280.000	120.000	50.000	s.d. 40.000
nener	ekor/ha/ thn			4.000	3.000
Bahan kimia					
Kapur pertanian	kg/ha/ thn	1.000	1.000	1.000	1.000
Insektisida					
Thiodan [®]	ltr/ha/ thn	4	4	3	2

Dursban ®	ltr/ha/ thn	6	6	4	3
Bristan	kg/ha/ thn	1	1	1	0
Pupuk					
Urea	kg/ha/ thn	700	600	400	400
TSP	kg/ha/ thn	500	400	200	200
Pakan ikan	kg/ha/ thn	8.400	3.600	1.000	600

Tenaga kerja

Tekhnisi	BOK/ha/ tahun	1			
Operator	BOK/ha/ tahun	5	1	2	2
Penjaga malam	BOK/ha/ tahun	3	2		

Tabel 2. Asumsi Produksi

Items	Satuan ukuran	Skala ekonomi dan teknologi			
		Intensif	Semi-Intensif	Tradisional Plus	Tradisional
		(2< ha)	(2-5 ha)	(1-2 ha)	<2 ha
Waktu operasi		10 tahun siklus produksi dengan jeda rotasi	10 tahun siklus produksi terus- menerus	10 tahun siklus produksi terus-menerus	10 tahun siklus produksi terus- menerus
Jumlah bibit					
Udang windu	ekor/ha/thn	280.000	120.000	50.000	40.000
Bandeng	ekor/ha/thn			4.000	3.000
Survival rate					
Udang windu	%	50,0%	50,0%	48,0%	48,0%
Bandeng	%			60,0%	60,0%
Produksi (kg/ha/year) (kg/ha)					
Tiger Shrimp					
grade C (40 ekor/kg)		1.120	720	360	336

grade B (30 ekor/kg)		2.333	800	256	160
grade A (20 ekor/kg)		1.260	360	96	48
		4.713	1.880	712	544
Bandeng	kg	0	0	800	600
Udang putih dan ikan lain	kg	80	80	80	80

Permodalan

Investasi pembangunan tambak dan infrastrukturnya	Rp 000/ha	47.613	44.183	18.905	17.915
Modal kerja	Rp 000/ha	65.392	37.895	16.172	11.289

Tabel 3. Asumsi makro-ekonomi dan harga output

Nilai tukar Desember 2005 (Rp / US \$)	9.100
Upah pertanian (Rp/HOK)*	35.000
Tingkat diskonto **	15%
Harga komoditas tambak	
1. Tiger shrimp	
Size A (Rp/kg)	75.000
Size B (Rp/kg)	60.000
Size C (Rp/kg)	50.000
2. Milk fish (Rp/kg)	12.000
3. White shrimp (Rp/kg)	20.00

Catatan :

*) Upah di pedesaan pada saat studi ini dilakukan mencerminkan keadaan tidak normal, di mana kegiatan pemulihan dan rekonstruksi pasca Tsunami yang masif sifatnya, mendorong tingkat upah tenaga kerja di pedesaan mencapai Rp. 50,000 per HOK. Studi ini menggunakan tingkat upah Rp. 35,000 per HOK dengan mempertimbangkan keadaan tersebut.

**) Tingkat diskonto mengacu pada tingkat bunga pinjaman nyata (*real interest rate – net of inflation*). Tingkat diskonto 15% merupakan perkiraan konservatif yang didasarkan pada kenyataan di lapangan bahwa tingkat suku bunga pinjaman bervariasi antara 20 – 35%. Dengan asumsi bahwa kemungkinan tingkat inflasi di Aceh bervariasi antara 5% dan 20%, tingkat diskonto 15% merupakan asumsi yang cukup hati-hati.

Dengan menggunakan asumsi-asumsi di atas (asupan, produksi dan parameter ekonomi makro), neraca usaha budi daya tambak di daerah studi disusun, dan dirangkum seperti disajikan dalam Tabel 4.

Dari Neraca usaha budi daya tambak tersebut, dapat terlihat bahwa semakin intensif teknologi yang diterapkan, budi daya tambak akan semakin padat modal, dan hasilnya pun secara finansial cenderung lebih besar. Dari sisi proporsi pengeluaran, *komponen external farm input* dan tenaga kerja merupakan komponen yang menonjol untuk semua pola.

Tabel 4. Neraca usaha budi daya tambak dengan skenario produksi 10 tahun (dengan tingkat diskonto 15%), dalam ribuan rupiah.

	Intensif	Semi-intensif	Tradisional Plus	Tradisional
Penerimaan	868.271	418.520	225.888	169.329
Penegeluaran				
1. Nilai investasi fisik	52.231	52.231	22.264	22.264
2. Nilai input				
Input usaha tambak	187.387	110.466	76.329	50.450
Peralatan	9.111	10.033	6.528	4.736
Mesin (biaya dalam penggunaan mesin)	84.828	72.370	13.410	0
3. Tenaga kerja				
Konstruksi tambak	21.902	5.723	7.401	6.997
Infrastruktur dan pemeliharaan	3.745	4.683	5.499	5.499
Penyiapan lahan	14.357	17.953	21.079	15.580
Budi daya udang dan bandeng	45.658	48.840	46.522	43.249
Tenaga kerja terampil	44.387	10.505	0	0
Total Pengeluaran	463.606	332.805	199.031	148.774
Margin keuntungan	404.665	85.715	26.857	20.555

Keuntungan Finansial budi daya Tambak dan Investasi

Tabel 5 menyajikan kebutuhan modal awal dan profitabilitas (kemampuan mendatangkan keuntungan) dari keempat jenis budi daya tambak di daerah studi. Kebutuhan modal awal per hektar untuk jenis tambak tradisional dan tradisional plus lebih kecil dibandingkan tambak dengan teknologi yang lebih intensif. Perbedaan yang menonjol terletak pada kebutuhan modal kerja; tambak dengan teknologi intensif membutuhkan modal kerja yang jauh lebih besar dibandingkan ketiga jenis

yang lain. Dari segi besarnya modal awal yang diperlukan, banyak orang menilai bahwa hanya investor besar dari luar Aceh yang mampu mengusahakan tambak udang secara intensif. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, karena kendala utama untuk dapat mengadopsi teknologi budi daya tambak secara intensif terletak pada *technical know-how* yang tidak dikuasai oleh petani tambak Aceh. Walaupun sudah sejak pertengahan tahun 1980-an budi daya tambak udang intensif diusahakan di provinsi ini, pengetahuan teknik budi daya tidak mudah menyebar ke masyarakat. Karena kebanyakan investor membawa tenaga kerja kunci dari daerah asalnya, yang sering menimbulkan persoalan sosial. Sehingga di samping keterbatasan permodalan untuk membudidayakan tambak intensif, penguasaan pengetahuan teknis juga merupakan kendala untuk mengadopsi sistem budi daya intensif.

Tabel 5. Permodalan dan Profitabilitas Budi Daya Tambak

	Satuan	Intensif	Semi-intensif	tradisional Plus	tradisional
Modal awal	Rp 000 /ha	47.613	44.183	18.905	17.915
Modal kerja	Rp 000 /ha	65.392	37.895	16.172	11.289
		113.005	82.079	35.076	29.203
<i>Returns to land</i>					
NPV (10 tahun budi daya tambak)	Rp 000 /ha	404.666	85.716	26.857	20.555
<i>Returns to labor</i>					
	Rp/HOK	244.649	74.529	46.332	44.802

Untuk budi daya tambak tradisional, dibutuhkan modal sebesar Rp. 30 jutaan. Dalam keadaan normal kebutuhan modal tersebut masih dapat dijangkau oleh kebanyakan petani tambak di Provinsi Aceh, baik melalui modal sendiri maupun bantuan *tauke*. Namun dalam kondisi pasca Tsunami, jumlah itu jauh dari kemampuan mereka, karena secara finansial seluruh masyarakat tambak tidak lagi memiliki kemampuan modal finansial.

Dari segi kemampuan memberikan keuntungan, budi daya tambak intensif memberikan keuntungan paling besar. Hasil perhitungan dengan menggunakan harga-harga Desember 2005, menunjukkan bahwa semakin intensif satu budi daya tambak maka semakin tinggi kemampuan memberikan keuntungan. Namun demikian perlu kehati-hatian dalam mencermati hasil perhitungan tersebut.

Perkiraan profitabilitas finansial tersebut, belum memasukkan biaya-biaya sosial karena hilangnya kawasan mangrove untuk budi daya tambak, kerusakan lingkungan dan sosial, seperti pencemaran air, kesehatan, dan salinitas sebagai akibat dari budi daya tambak intensif serta berkurangnya populasi ikan karena hilangnya tempat pemijahan alami mereka. Banyak nilai-nilai sosial dalam kelembagaan lokal dan kepemilikan komunal berbenturan dengan hadirnya budi daya tambak intensif yang dikelola secara privat dengan nilai-nilai yang lebih individual dan cenderung eksklusif.

Tingginya keuntungan dari budi daya tambak intensif di Provinsi Aceh menarik banyak investor dari luar Aceh untuk masuk dalam usaha ini. Namun, perlu dicatat bahwa budi daya tambak secara intensif di Provinsi Aceh sangat dinamis baik dalam luasan maupun lokasi; sering terjadi pengusahaan budi daya tambak intensif menghentikan usahanya tiba-tiba setelah beroperasi dua sampai tiga tahun dan memindahkannya ke tempat lain, baik karena alasan keamanan (persoalan sosio-politik) maupun alasan menurunnya produktivitas tambak terkait dengan menurunnya kualitas air dan lahan yang sudah tercemari oleh bahan – bahan kimia yang dipakai dalam usaha tambak secara intensif.

Kesempatan kerja

Secara umum dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja adalah fungsi dari kebutuhan tenaga kerja dari satu sistem produksi. Kajian ini menemukan bahwa budi daya tambak relatif lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja pada kegiatan usaha tani lainnya. Kebutuhan tenaga kerja operasional budi daya tambak bervariasi antara 392 – 739 HOK/ha/tahun, bergantung pada jenis teknologinya (Tabel 6). Untuk budi daya tambak intensif biasanya diperlukan tenaga profesional sebagai teknisi; diperkirakan kebutuhan untuk tenaga profesional ini dua BOK (bulan orang kerja)/hektar/tahun.

Pada tahap pembangunan tambak, kebutuhan tenaga kerja bervariasi antara 99, mencapai 196 HOK per hektar, dari tenaga kerja kasar sampai dengan teknisi. Biasanya, pembangunan tambak diusahakan secara intensif dan semi intensif -dilakukan dengan bantuan alat berat (*back-hoe*) dengan desain tata letak yang lebih baik. Sehingga untuk budi daya kedua jenis tambak ini membutuhkan tenaga profesional untuk mendesain tata letak tambak dan operator back hoe. Untuk ini diperkirakan dibutuhkan sembilan HOK per hektar tambak. Sementara itu, sebagai pembanding, kebutuhan tenaga kerja pada usaha tani padi sawah tadah hujan sekitar 179,4 HOK /ha/tahun dan sawah irigasi 238,3 HOK/ha/tahun.

Tabel 6. Kebutuhan tenaga kerja budi daya tambak

	Unit*)	Intensif	Semi-intensif	tradisional Plus	tradisional
Pembuatan tambak					
Pekerja profesional (back-hoe operator)	HOK/ha	9	9	0	0
Tenaga kerja teknis	HOK/ha	155	65	48	48
Tenaga kerja	HOK/ha	32	25	96	96
		196	99	144	144
Operasional					
Pekerja profesional (manajemen & teknis)	BOK/ha/year	2	0	0	0
Tenaga kerja teknis	HOK/ha/year	349	109	10	6
Tenaga kerja	HOK/ha/year	390	412	489	386
		739	521	499	392

*) HOK = hari orang kerja, BOK = bulan orang kerja

Melihat penerimaan per HOK, budi daya tambak mampu membayar tenaga kerja secara lebih baik. Dari perhitungan di atas (Tabel 5), budi daya tambak yang banyak diusahakan di daerah studi, yaitu tradisional dan tradisional plus, memiliki *returns to labor* mencapai Rp. 46.000.- per HOK; lebih besar dari upah pertanian rata-rata pada saat itu sebesar Rp. 35.000 per HOK. Dibandingkan dengan kegiatan nelayan (perikanan tangkap) penerimaan per HOK budi daya tambak masih lebih besar. Dalam keadaan normal, upah rata-rata anak buah kapal (ABK) yang biasanya dibayar berdasarkan hasil tangkapan ikan, bervariasi antara Rp. 29.500.- dan Rp. 39.500 per HOK, tergantung pada jenis usaha penangkapan ikannya.

Gambaran di atas menjelaskan bahwa budi daya tambak menyediakan kesempatan kerja di pedesaan sebesar 392 – 739 HOK /ha/tahun. Jika dalam satu desa terdapat 100 ha lahan tambak, maka jumlah tenaga kerja yang dapat diserap dari usaha tani tambak berkisar antara 39,200 HOK – 70,390 HOK /tahun. Dengan asumsi bahwa hari kerja efektif dalam setahun 259 hari, maka sektor tambak bisa menampung tenaga kerja atau memberikan pekerjaan untuk 153 – 272 orang petani (kepala keluarga) atau 15 – 27 tenaga kerja per 10 hektar.

Persoalan kemudian adalah bagaimana jika kebutuhan tenaga kerja tersebut tidak terpenuhi oleh angkatan kerja desa setempat. Keadaan ini lah yang sebenarnya

terjadi di daerah studi pasca Tsunami. Jika secara serentak seluruh usaha tambak direhabilitasi dan langsung beroperasi, maka akan terjadi lonjakan permintaan tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan upah tenaga kerja. Padahal di kebanyakan daerah yang terkena bencana Tsunami, pada saat studi ini dilakukan telah mengalami lonjakan upah tenaga kerja yang cukup nyata terkait dengan kegiatan adanya kegiatan rehabilitasi pasca bencana oleh sejumlah lembaga donor secara masif.

Penutup

Rehabilitasi Tambak – Satu Tahun Pasca Tsunami

Upaya pemulihan budi daya tambak pasca Tsunami bervariasi tergantung pada tingkat kerusakan tambak. Dalam waktu satu tahun sesudah Tsunami sudah dilakukan perbaikan beberapa tambak oleh organisasi internasional bekerja sama dengan mitra dalam negeri, walau masih sangat terbatas. Perbaikan tambak dimulai dari daerah yang mengalami kerusakan kecil, seperti di Kabupaten Bireun, Lhokseumawe. Sementara itu untuk wilayah yang mengalami kerusakan cukup serius baru dimulai bulan September 2005, dan dalam skala yang relatif kecil. Pada saat kajian ini dilakukan, tidak ada data yang cukup handal menyangkut seberapa besar rehabilitasi tambak sudah dilakukan. Melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Perikanan Provinsi Aceh dan organisasi yang bergiat dalam rehabilitasi tambak di Aceh, diperkirakan, sampai saat kajian ini dilakukan, kurang dari 15% tambak yang sudah direhabilitasi.

Pengamatan pada bulan Desember 2005 mencatat beberapa fenomena menarik dari upaya perbaikan tambak. Pertama, sangat sedikit tambak yang sudah diperbaiki dapat berfungsi atau digunakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya modal kerja yang tersedia. Beberapa tambak yang langsung difungsikan untuk budi daya udang, tidak berhasil, semata-mata karena kualitas air yang tidak memenuhi persyaratan. Beberapa kelompok pemuda di Kuala Meuraksa, Blang Mangat sudah melakukan pembesaran anakan ikan kerapu atas pesanan pengusaha dari Medan. Mereka membesarkan bibit ikan kerapu menjadi anakan (3 inchi) selama dua- tiga bulan. Satu kelompok pemuda beranggotakan tiga orang, dengan membesarkan 10.000 bibit kerapu selama dua-tiga bulan, dengan asumsi tingkat keberhasilan 70%, mampu menghasilkan keuntungan bersih Rp. 5 juta – Rp. 7,5 juta, dan *return to labor* sebesar Rp. 61.250 per HOK; relatif lebih besar dari upah rata-rata harian pada saat itu.

Kedua, perbaikan tambak dengan ketidakjelasan status pemilikan lahan. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi bencana Tsunami antara lain memutuskan untuk membangun kembali dan mengkonservasi kawasan yang sebelumnya merupakan kawasan mangrove. Banyak di antara kawasan tersebut yang sebelum terjadi bencana Tsunami sudah berubah fungsi sebagai tambak, walaupun status lahan masih merupakan lahan Negara. Kebanyakan organisasi internasional tidak melakukan kegiatan apapun di kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara lembaga tersebut dengan masyarakat yang menuntut perbaikan tambak dilakukan segera. Demikian juga halnya dengan tambak-tambak yang tidak memiliki kejelasan status atas lahan.

Ketiga, rehabilitasi tambak di daerah berpasir di pinggir pantai. Upaya perbaikan tambak di kawasan berpasir pinggir pantai merupakan persoalan tersendiri. Dalam ketentuan adat, 200 meter atau 150 *depa* dari garis pantai harus bebas dari kegiatan budi daya pertanian (termasuk tambak), karena dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan nelayan. Namun ketentuan ini sudah tidak lagi banyak dipraktekkan, karena budi daya tambak memberikan lebih banyak memberikan pendapatan masyarakat. Berkaitan dengan perbaikan tambak di daerah berpasir di Meunasah Lancok, Kecamatan Samalanga, ditemukan kasus bahwa beberapa minggu setelah upaya perbaikan tambak usai dilakukan, tanggul tambak kembali rata dengan tanah diterjang gelombang pasang yang relatif besar. Curahan waktu, tenaga dan dana untuk perbaikan tambak tersebut terasa sia-sia.

Keempat menyangkut persoalan gender dalam perbaikan tambak. Di dalam masyarakat Aceh terdapat persepsi bahwa tambak adalah merupakan pekerjaan laki-laki. Oleh karena itu, upaya untuk melibatkan perempuan dalam rehabilitasi tambak di daerah Pidie oleh satu NGO yang dimaksudkan juga untuk membantu ekonomi rumah tangga, diprotes oleh masyarakat. Sebagai akibatnya, upaya perbaikan tambak oleh NGO tersebut mengalami penundaan beberapa saat, dan ada di antaranya gagal dilakukan.

Dengan memperhatikan catatan tersebut, kajian ini menilai bahwa upaya perbaikan tambak setahun pasca Tsunami relatif lambat dibandingkan dengan perbaikan di sektor lain. Pemulihan budi daya tambak perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pengembangan potensi ekonomi sumber daya kawasan pantai dan keselamatan lingkungan atau masalah lingkungan yang ditimbulkannya. Benturan antara kepentingan privat dan kepentingan publik perlu menjadi perhatian seksama dalam pemulihan budi daya tambak yang kental dengan pranata sosial. Pemahaman atas jejaring sosial multi aras merupakan landasan yang penting dalam rehabilitasi tambak di Provinsi Aceh.

Kajian Finansial Upaya Perbaikan Tambak

Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kajian ini, biaya perbaikan per hektar tambak bervariasi antara Rp. 5,6 juta dan Rp. 32,41 juta, tergantung pada tingkat kerusakan dan model rehabilitasi yang digunakan; model padat modal yang dengan menggunakan alat-alat berat atau model padat karya. Model padat karya tidak dapat diterapkan untuk rehabilitasi tambak mengalami kerusakan berat yang terdapat reruntuhan bangunan di dalamnya. Sementara itu untuk tambak yang mengalami kerusakan ringan bisa menggunakan kedua model.

Kajian finansial *ex ante* atas budi daya tambak di Aceh berdasarkan harga berlaku pada bulan Desember 2005 memberikan gambaran yang menjanjikan. Budi daya tambak sistem tradisional yang banyak dipraktikkan masyarakat cukup menguntungkan pada tingkat bunga 15% pertahun. Perhitungan ini mengasumsikan tingkat kematian benur dan nener masing-masing 52% dan 40%. Modal awal (biaya pembangunan tambak dan modal kerja, di luar harga lahan) bervariasi di antara Rp. 18,5 juta dan Rp. 45 juta. Pada kondisi normal, modal awal cukup dapat terjangkau oleh kebanyakan pemilik tambak. Akan tetapi pasca Tsunami jumlah tersebut sulit terjangkau tanpa tersedianya bantuan kredit. Tingkat penerimaan per hari orang kerja (*return to labor*) yang merupakan nilai surplus per hari orang kerja setelah dikurangi semua biaya input pertanian yang digunakan dalam satu siklus produksi, adalah Rp. 45.000 / HOK; jumlah itu masih lebih tinggi dari upah rata-rata pertanian yang berlaku saat ini (Rp. 35.000 / HOK). Dengan kata lain, kegiatan budi daya tambak masih cukup menarik.

Sementara itu untuk budi daya tambak intensif, yang memerlukan modal awal antara Rp. 57,9 juta dan Rp. 84,1 juta per hektar, memberikan keuntungan tertinggi di antara sistem budi daya tambak yang lain. Dalam 11 tahun skenario siklus produksi sistem budi daya tambak intensif dengan hanya tujuh tahun masa efektif, nilai NPV mencapai Rp. 404,6 juta dengan tingkat penerimaan tenaga kerja sebesar Rp. 225.000 per HOK. Perlu dicatat bahwa perhitungan analisis finansial tersebut belum memasukkan biaya sosial yang ditimbulkannya, seperti hilangnya kawasan mangrove karena dikonversi untuk budi daya tambak, risiko kesehatan masyarakat karena menurunnya kualitas air berkaitan dengan pola budi daya tambak intensif yang pada umumnya berdampak pada meningkatnya tingkat keasaman air (Primavera 1993). Kerugian sosial sebagai akibat praktik budi daya tambak intensif perlu dimasukkan dalam perhitungan untung rugi sebagai masukan bagi para pengambil keputusan. Untuk ini, lembaga atau institusi yang berwenang untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal dari praktek kepentingan bisnis jangka pendek perlu dikembangkan dan diperkuat (Primavera 1999).

Dari sisi penciptaan lapangan kerja, budi daya tambak merupakan opsi yang baik, khususnya sistem budi daya tambak non-padat modal. Dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 395 – 813 HOK per hektar per tahun dan tingkat penerimaan per HOK lebih tinggi dari upah rata-rata pertanian, budi daya tambak bisa menjadi tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian perlu dicatat, khususnya budi daya tambak intensif yang pada umumnya dikembangkan oleh investor dari luar daerah, tidak selalu melibatkan atau memperkerjakan masyarakat lokal. Mereka membawa tenaga kerja sendiri dan hal ini sering menimbulkan ketegangan sosial dengan masyarakat lokal.

Kesimpulan

Upaya perbaikan ekosistem pantai pasca Tsunami dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat diperlukan pemahaman yang seksama tentang keterkaitan antara ketahanan sosial dan ketahanan ekologisnya serta dilakukan dengan perencanaan pengelolaan lingkungan secara cermat. Pengembangan pengetahuan tentang keseimbangan lingkungan pada tingkat lokal perlu diterjemahkan dalam sistem informasi akan dapat membantu pemegang otoritas pengelolaan sumber daya di kawasan tersebut.

Walaupun masih dapat diperdebatkan, korban bencana Tsunami yang menjadi perhatian banyak pihak di Banda Aceh sebenarnya juga disebabkan hilangnya fungsi lindung dari kawasan mangrove yang sudah dikonversi menjadi tambak. Dari perspektif ini nilai sosial dari kawasan mangrove menjadi sangat berarti, dan jauh lebih tinggi dari nilai privatnya. Namun demikian, belum ada mekanisme tentang bagaimana transfer manfaat kawasan mangrove kepada mereka yang memiliki kewenangan untuk mengkonversinya menjadi penggunaan lahan yang lebih produktif.

Daftar Pustaka

- Adger WN, Hughes TP, Folke C, Carpenter SR, dan Rockstrom J. 2005. *Social-Ecological Resilience to Coastal Disasters*. SCIENCE 309 :1036-1039
- Brown TC, Peterson GL, Brodersen RM, Ford V, dan Bell PA. 2005. *The judged seriousness of an environmental loss is a matter of what caused it*. Journal of Environmental Psychology 25 : 13-21
- Bengen DG. 2003. *Bahan Kuliah Analisis Ekosistem Pesisir dan Laut*, Program Studi SPL, Institut Pertanian Bogor.

- Buwono ID. 1993. *Tambak Udang Windu Sistem Pengelolaan Berpola Intensif*. PT. Kanisius. Yogyakarta.
- Chambers R, Pacey A dan Thrupp LA (eds). 1989. *Farmer First: Farmer Innovation and Agricultural Research*. Longman, London
- Dahuri R. 2002. *Bahan Kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu*. Program Studi SPL, Institut Pertanian Bogor.
- De Graaf GJ dan Xuan TT. 1998. *Extensive shrimp farming, mangrove clearance and marine fisheries in the southern provinces of Vietnam*. *Mangroves and Salt Marshes* 2(3) : 159-166
- Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Jakarta, 2005. *Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prov. NAD dan Sumatera Utara Pasca Tsunami*, Sektor Kelautan dan Perikanan.
- Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Jakarta. <http://www.dkp.go.id>
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003. *Statistik Perikanan*. <http://www.dkp.go.id>
- Dietz T, Ostrom E, dan Stern PC. 2003. *The Struggle to Govern the Commons*. *Science* 302 : 1907-1912
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NAD. 2004. *Perikanan Dalam Angka Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003*, Banda Aceh.
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NAD. 2004. *Statistik Perikanan budi daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003*, Banda Aceh.
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NAD. 2005. *Statistik Perikanan budi daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004*, Banda Aceh.
- Ditjen Perikanan budi daya. 2002. *Teknis budi daya Air Payau*. Jakarta
- Djuhriansyah dan Abdusyahid. 1999. *Potensi Tambak-Tambak Primitif di Kabupaten Kutai*. *FRONTIR* Nomor 24, Pebruari 1999.
- Efrizal T. 2005. *Analisis Pengelolaan sumber daya Ikan Demersal Di Pulau-Pulau Kecil : Suatu Pendekatan "Converging Dual Track Model (Cd Tram)*. Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Fakultas Pertanian Unsyiah. 2000. *Studi Potensi Pesisir Pantai Guna Pengembangan Tambak Udang di Kabupaten Aceh Timur*. Kerjasama dengan Kantor Wilayah

Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Aceh.
Banda Aceh.

Gittinger JP. 1982. *Economic Analysis of Agricultural Projects*. John Hopkins University Press

Gomez KA. 1977. *On Farm Assessment for Yield Constraints Methodological Problems*, in IRRI, Constraint to High Yields on Asian Rice Farms : An Interims Report, International Rice Research Institute, Los Banos.

Gunawardana M dan Rowan JS. 2005. *Economic Valuation of a Mangrove Ecosystem Threatened by Shrimp Aquaculture in Sri Lanka*. Environmental Management 36 :535-550

Kadariah. 2001. *Evaluasi Proyek, Analisis Ekonomis*. FE-UI, Jakarta

Kantor Camat Blang Mangat Alam. 2003. *Kecamatan Blang Mangat Dalam Angka 2002*.

Kantor Camat Kembang Tanjung. 2002. *Kecamatan Kuta Alam Dalam Angka 2001*.

Kantor Camat Kuta Alam. 2003. *Kecamatan Kuta Alam Dalam Angka 2002*.

Kantor Camat Peukan Bada. 2002. *Kecamatan Peukan Bada Dalam Angka 2001*.

Kantor Camat Seuneudon. 2002. *Kecamatan Seuneudon Dalam Angka 2001*.

Kantor Camat Syiah Kuala. 2003. *Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka 2002*.

Kusumastanto T. 2003. *Bahan Kuliah Analisis Manfaat-Biaya Proyek-proyek Pesisir dan Lautan*. Program Studi SPL, Institut Pertanian Bogor.

Martosubroto P dan Naamin N. 1997. *Relationships between tidal forest (mangroves) and commercial shrimp production in Indonesia*. Marine Research in Indonesia (18):81-86.

Phillips M dan Budiman A. 2005 *Assessment of the impacts of the 26th December 2004 earthquake and tsunami on aquaculture in the Provinces of Aceh and North Sumatra, Indonesia*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).Indonesia

Paw JN, Chua TE. 1989. *An assessment of the ecological and economic impact of mangrove conversion in Southeast Asia*. Marine Pollution Bull. 20(7): 335-343.

- Primavera JH. 2000. *Development and conservation of Philippine mangroves: institutional issues*. *Ecological Economics* 35 : 91-106
- Primavera JH. 1997. *Socio-economic impacts of shrimp culture*. *Aquaculture Research* 28 : 815-827
- Primavera JH. 1993. *A critical review of shrimp pond culture in the Philippines*. *Rev. Fish Sci.* 1 : 151-201
- Quarto A. 1998. *The Rise and Fall of the Blue Revolution*. *Swara* October-December 1998 : 16-21
- Ruitebeek HJ. 2004. *Modelling economy-ecology linkages in mangroves: economic evidence for promoting conservation in Bintuni Bay, Indonesia*. *Ecological economics* 10:233-247
- Sutoyo S. 2000. *Studi Kelayakan Proyek, Konsep, Teknik, dan Kasus*. PT. Damai Mulia Pustaka. Jakarta.
- Turner RE. 1977. *Intertidal vegetation and commercial yields of penaeid shrimp*. *Transaction of the American Fisheries Society* 106: 411-416
- Vosti SA, Witcover J, Gockowski J, Tomich TP, Carpentier CL, Faminow M, Oliviera S, dan Diaw C. 1998. *Socioeconomic Issues Linked to Best Bet Land Use Systems*. Forthcoming as an EMBRAPA, Technical Report.

Belajar dari Kawan: Cara Efektif untuk Menyebarluaskan Sistem Agroforestri Karet

Ratna Akiefnawati, Suyitno dan Janudianto

World Agroforestry Centre (ICRAF)

Pendahuluan

.....“ Jarak jauh yang harus kami tempuh tidak menyurutkan niat kami untuk belajar bertanam karet ke Muara Bungo, Jambi”, kata salah seorang peserta Training of Trainer (ToT) yang berasal dari Provinsi Aceh. “Kami tahu dari Pak Suyit, mayoritas petani Muara Bungo mendapatkan penghasilan dari memotong (= menyadap) karet. Kami ingin seperti mereka. Maka dari itu, kami akan belajar dengan mereka, lanjutnya”.

Indonesia adalah negara yang memiliki areal kebun karet terluas di dunia, tetapi produksinya lebih rendah dari Thailand yang merupakan negara produsen utama getah karet. Rendahnya produktivitas karet Indonesia terutama karena sebagian besar arealnya adalah karet rakyat yang dikelola secara tradisional yang belum mendukung produktivitas misalnya: kualitas sumber bahan tanaman yang rendah, karena bibit karet diambil dari biji atau cabutan, penanganan pasca panen yang tidak memperhatikan kualitas serta rendahnya pengetahuan petani mengenai cara bercocok tanam karet yang tepat. Sebagian besar petani karet masih menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun dari leluhurnya. Selain itu, faktor modal juga menjadi kendala dalam peremajaan kebun karet yang sudah berumur tua.

World Agroforestry Centre (ICRAF) sejak tahun 1995 telah mengembangkan berbagai aspek penelitian dalam sistem agroforestri karet bersama dengan masyarakat di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat; Sanggau, Kalimantan Barat; dan Kabupaten Bungo, Jambi melalui proyek *Smallholder Rubber Agroforestry System (SRAS Project)*. Beberapa kebun demo plot dibangun di ketiga kabupaten tersebut selama penelitian berlangsung dengan tujuan agar masyarakat ikut berperan, dan akan memiliki dasar teori yang kuat dalam bercocok tanam karet, meskipun sebelumnya mereka telah memiliki pengalaman praktek yang handal.

Pembuatan kebun demo plot dengan berbagai macam pendekatan seperti perbandingan pemupukan pada karet, penyiangan pada barisan karet, perbandingan produktivitas beberapa karet unggul dengan karet lokal, dan beberapa aspek terkait dengan budi daya lainnya yang dikemas dengan pola RAS 1, RAS 2 dan RAS 3, dengan tujuan meningkatkan produktivitas karet. Demo plot menjadi ruang belajar bersama bagi petani, penyuluh lapang, peneliti dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (Akiefnawati 2007).

Belajar Bersama dan Berbagi Pengalaman untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Bencana alam Tsunami pada akhir tahun 2004 mengakibatkan dampak besar bagi kehidupan masyarakat Aceh. Relokasi pembangunan untuk memulihkan perekonomian rakyat perlu segera dilakukan. Perkebunan karet rakyat yang porak poranda perlu dibenahi karena kebun karet merupakan tulang punggung pendapatan keluarga. ICRAF bersama masyarakat, beberapa lembaga pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui proyek *Rebuilding Green Infrastructure with Trees People Want (ReGrin Project)* melakukan pembangunan kebun karet dengan pola RAS atau wanatani karet (Janudianto 2010).

Dari hasil penelitian ICRAF terdahulu di Jambi dan Kalimantan Barat, terdapat tiga sistem utama agroforestri berbasis karet klonal (*Rubber Agroforestry System/RAS*) yang dapat diterapkan pada kondisi petani dan lahan yang berbeda (Budi dkk 2008), diantaranya :

RAS 1: Sistem Agroforestri Ekstensif. Merupakan sistem agroforestri yang pengelolaannya setara dengan karet rakyat, dimana bahan tanam karet asal biji atau cabutan diganti dengan karet klonal yang mampu tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang menyerupai hutan sekunder seperti sistem agroforestri. Produksi karet klonal tahun kedua penyadapan pada RAS 1 berkisar antara 1.200 – 1.700 kg/ha/tahun

RAS 2: Sistem Agroforestri Intensif. Merupakan sistem agroforestri kompleks dengan pengelolaan relatif intensif, dimana karet klonal ditanam secara tumpang sari dengan tanaman pangan, buah-buahan, dan tanaman penghasil kayu. Produksi karet klonal tahun kedua dan ketiga penyadapan pada RAS 2 berkisar antara 1.100 – 1.300 kg/ha/tahun

RAS 3: Reklamasi Lahan Alang-alang. Merupakan sistem agroforestri kompleks yang dibangun untuk merehabilitasi lahan alang-alang dengan mengintegrasikan

karet dengan jenis tanaman lain yang cepat tumbuh dan menutup permukaan tanah di antara barisan tanaman karet, sehingga pertumbuhan alang-alang terhambat. Tanaman pangan sebagai tumpang sari hanya dilakukan pada tahun pertama kemudian diikuti dengan kombinasi penanaman kacang-kacangan penutup tanah dan pohon cepat tumbuh penghasil *pulp*. Produksi karet klonal tahun ketiga penyesuaian pada RAS 3 berkisar antara 1.100 – 1.300 kg/ha/tahun.

Salah satu kegiatan dalam ReGrin Project untuk memperkenalkan RAS (*Rubber Agroforestry System*) kepada masyarakat dengan cepat, adalah Pelatihan bagi para Pelatih (*Training of Trainer/ToT*), untuk para penyuluh pertanian yang terdiri atas petani karet yang terlibat langsung dengan demo plot maupun kelompok tani; para fasilitator dari LSM yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan para staf pemerintah daerah kabupaten yang membawahi bidang perkebunan dan perdagangan karet serta perencanaan pembangunan kabupaten dan provinsi dalam rangka mempersiapkan perdagangan dan meningkatkan mutu karet.

ToT dilakukan dalam dua tahap, dimana para peserta mengikuti pelatihan di dua tempat yang berbeda. Tahap pertama dilaksanakan di Kabupaten Meulaboh selama empat hari dengan topik: budi daya karet dan penguatan kelompok tani. Peserta berjumlah 31 orang berasal dari kalangan petani karet, petani penangkar bibit, petugas penyuluh, staf dinas maupun utusan dari LSM. Tahap kedua dilaksanakan di Kabupaten Bungo selama empat hari dengan topik: teknik pengendalian penyakit, teknik penyesuaian dan cara memproduksi getah karet bersih serta pemahaman mengenai jalur perdagangan karet melalui penjualan di pasar lelang dan pabrik. Tahap kedua ini diikuti 34 orang peserta, dan mereka sangat antusias karena terlihat aktif berdiskusi baik disaat pemaparan materi maupun praktek di lapangan. Penyaji materi di tahap kedua ini adalah petani, staf pemerintah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bungo dan Dinas Perdagangan Bungo, pengurus KUD dan pengelola pasar lelang, juga Pimpinan pabrik PT. Djambi Waras di Bungo serta staf ICRAF.

Adapun tujuan dari pembelajaran dalam ToT (Akiefnawati 2007) adalah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan ilmu pengetahuan teknik budi daya karet dengan sistem karet agroforestri.
2. Meningkatkan pengetahuan petani karet, staf LSM, staf pemerintahan daerah Aceh dalam hal budi daya karet, penyesuaian karet unggul, pengendalian hama dan penyakit pada karet, penanganan pasca panen dan tata-niaga.
3. Transfer teknologi perkaretan secara cepat melalui media pertemuan langsung sesama petani karet dan penggerak tata-niaga karet dari Kabupaten Bungo dengan peserta dari Aceh.

Pengalaman dari Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi yang telah diperoleh ICRAF dari sekitar 60 plot percobaan (*demoplot*) menunjukkan bahwa demo plot sangat bermanfaat bagi petani karet karena bisa menjadi media belajar yang efektif. Mereka belajar bersama dan bertukar pengalaman, melihat kegagalan dan keberhasilan para petani karet yang kebunnya dijadikan lokasi penelitian. Berdasarkan pengalaman ini, ICRAF mencoba menerapkan program Sekolah Lapang (*Farmer Field School/FFS*) dan hasilnya ternyata sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan para petani.

Sejak 1999, petani karet dari kabupaten lain di Provinsi Jambi, Sumatera Barat dan Aceh berkunjung ke lokasi demo plot untuk belajar budi daya karet dari petani karet yang telah melaksanakan percobaan bersama ICRAF, dalam hal penanaman, pemeliharaan, penyadapan dan pembuatan getah karet bersih. Pada tahun 2007, 2008, dan 2009, beberapa petani, staf pemerintah, dan lembaga-lembaga lokal maupun internasional yang bekerja untuk proyek pengembangan masyarakat (*International Rescue Committee/IRC*, *NOEL Project* dan *ReGrin Project*) dari Provinsi Aceh berkunjung ke Muara Bungo sebagai peserta ToT dalam program Sekolah Lapang

Tahap Pembelajaran Sekolah Lapang

Pelatihan di Muara Bungo dilaksanakan selama empat hari efektif. Hari pertama, peserta mendengar pemaparan materi (teknik *grafting*, budi daya karet, pengenalan dan pengendalian penyakit, teknik penyadapan yang benar, pengelolaan bahan olah karet (bokar) hingga seluk beluk perdagangan karet di tingkat lokal, nasional dan internasional. Hari kedua dan ketiga, praktek lapangan ke lokasi demo plot karet agroforestri yang sudah dibangun oleh ICRAF sejak 1996. Peserta langsung melakukan praktek persiapan bibit karet, pengenalan dan pengendalian penyakit pada karet, pemupukan dan caranya, penyadapan yang benar dan proses pengolahan bokar. Hari keempat, kunjungan ke pabrik pengolahan bokar PT. Djambi Waras Jujuhan Kabupaten Bungo dan penjualan karet di tingkat pasar lelang di Desa Alai Ilir, Kabupaten Tebo.

Faktor Penentu Keberhasilan Pelatihan Sekolah Lapang

Peserta yang mengikuti Sekolah Lapang terdiri atas petani karet, pedagang, staf lapangan dan pimpinan salah satu LSM, serta staf pemerintah daerah. Semua peserta ingin mendapatkan informasi tentang budi daya karet dan tata-niaga karet, agar pembangunan kebun karet mereka pasca Tsunami di Provinsi Aceh dapat berhasil.

Pemilihan peserta Sekolah Lapang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan transfer ilmu pengetahuan budi daya karet dengan sistem agroforestri. Sebagai contoh, angkatan pertama tahun 2007 dianggap kurang berhasil karena peserta yang dipilih oleh IRC (*International Rescue Committee*) adalah anak-anak muda, berumur antara 16 - 25 tahun yang belum tertarik pada bidang pertanian terutama bercocok tanam karet sehingga terlihat kurang berminat dalam belajar. Petani muda yang mewakili orang tuanya ini lebih tertarik pada kegiatan kunjungan lapang dan bertemu kelompok tani daripada belajar teori teknik-teknik budi dayanya. Mereka adalah para petani yang baru akan menanam karet dengan bantuan bibit dari IRC.

Pelatihan angkatan kedua tahun 2008 yang diorganisir oleh ICRAF melalui proyek *Nurseries of Excellence for Aceh (NoEL Project)* dianggap berhasil karena melihat tingginya minat belajar para peserta pelatihan. Peserta adalah perwakilan kelompok tani yang mendapatkan bantuan bibit perkebunan, dan petani karet yang kebunnya dijadikan lokasi pembangunan demo plot. Para peserta berminat untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan petani karet di Bungo, dengan harapan akan membuat mereka berhasil sebagai petani karet. Untuk itu mereka juga sangat berharap akan dibangun pasar lelang dan pabrik karet di Aceh agar pendapatan mereka meningkat.



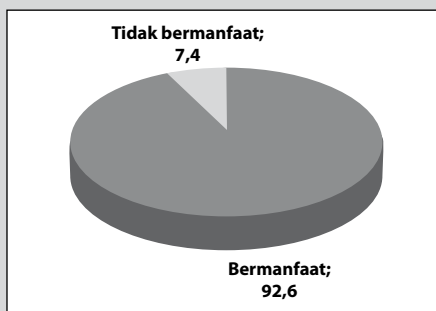
Gambar 1. Peserta pelatihan serius mendengarkan presentasi tata-niaga karet di PT. Djambi Waras, Jambi

Kotak 1. Respon ketertarikan peserta terhadap materi pelatihan

Untuk melihat respon ketertarikan peserta terhadap materi pelatihan, diajukan beberapa pertanyaan seperti:

1. Kepuasan peserta selama pelatihan
2. Materi yang disenangi dan dianggap bermanfaat oleh peserta
3. Harapan peserta setelah pelatihan
4. Saran peserta untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya

Hampir semua peserta (92,6%) menyatakan tertarik mengikuti pelatihan tersebut, karena mereka membutuhkan informasi tentang cara budi daya karet unggul dengan sistem agroforestri yang cocok dengan pola bercocok tanam karet masyarakat Aceh. Peserta lainnya (7,4%) menyatakan tidak tertarik karena mereka belum melaksanakan penanaman karet (Gambar 2).



Gambar 2. Presentase ketertarikan peserta terhadap pelatihan budi daya dan tata-niaga karet

Hampir 50% peserta menyatakan lebih senang praktek langsung di lapangan karena mereka terlibat langsung sehingga lebih mudah mengingat. Dan mereka kurang tertarik dengan materi perdagangan, karena masih pesimis dengan harga karet yang mereka produksi sebab Aceh belum memiliki pabrik dan pasar lelang. Mereka beranggapan harga karet di Aceh tidak akan semahal di Bungo. Dan para peserta yang berprofesi sebagai petani berharap besar kepada pemerintah di Aceh agar mengusahakan pembangunan pabrik dan pasar lelang karet agar dapat membantu petani karet. Kendala lain yang menyebabkan mereka kurang tertarik dengan materi yang disampaikan di ruangan adalah kesulitan dalam memahami bahasa Indonesia dan merasa bosan duduk dan mendengarkan saja. Walaupun teknik pelatihan sudah dikombinasikan antara pemaparan materi dan praktek, dimana setelah satu hari pemaparan materi, diikuti dengan dua hari latihan lapangan dan satu hari kunjungan ke pabrik dan pasar lelang, kendala masih tetap ada.

Angkatan ketiga tahun 2009 yang diorganisir oleh ICRAF juga memiliki hasrat yang besar untuk belajar seperti angkatan kedua karena pada pesertanya adalah petani yang sudah menanam karet unggul melalui *NoEL Project* dan *ReGrin Project*, mereka belajar serius untuk meraih keberhasilan.

Semua peserta pelatihan mempunyai cita-cita yang sama yaitu ingin mewujudkan impiannya setelah kembali ke desa masing-masing dan akan mengajak petani karet yang lain untuk serius membangun kebun karetnya. Berbekal pengetahuan karet agroforestri yang mereka dapatkan di Bungo, para petani ini akan menerapkan pengetahuannya di desa masing-masing.

Tindak Lanjut Peserta Setelah Pelatihan

Peserta Sekolah Lapang angkatan ketiga menyepakati bahwa pelatihan ini akan ditindaklanjuti, dengan atau tanpa fasilitasi dari Proyek ReGrin (Tabel 1).

Tabel 1. Rencana tindak lanjut di Aceh

No	Langkah yang akan dilakukan	Aksi yang diperlukan	Pelaksana
1	Mempraktekkan pengetahuan yang didapat, dimulai dari diri sendiri dan masyarakat terdekat untuk perubahan ke arah yang lebih baik.	Dimulai dari saat ini.	Semua pihak.
2	a. Sosialisasi kepada petani dan masyarakat luas tentang budi daya karet yang baik (pengendalian hama secara dini, teknik penyiadian yang baik, dan pengolahan bokar). b. Sosialisasi teknologi RAS (Agroforestri Karet) kepada masyarakat.	- Pertemuan/koordinasi di tingkat petani (desa), kecamatan, dan kabupaten yang diikuti petani, penyuluh, LSM dan dinas terkait. - Perlunya menggiatkan penggalian informasi dan pembelajaran dari kebun percontohan yang sudah dibangun.	Petani, kelompok tani, dinas terkait dan LSM.
3	a. Pemurnian 'entres', pengurusan ijin (TRUP) dan sertifikasi bibit bagi para petani penangkar bibit. b. Memberdayakan dan menumbuhkan-kembangkan kelompok penangkar bibit lainnya.	- Fasilitasi pembuatan TRUP bagi kelompok (petani) penangkar secara kolektif. - Mempercepat proses pemurnian 'entres'	Dinas Hutbun, kelompok tani/ penangkar

4	Inisiasi proses pembentukan cikal-bakal pasar lelang karet di wilayah Aceh Barat, Aceh Selatan, Nagan Raya. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait: pemerintah daerah, pedagang pengumpul, pabrikan, dan petani karet.	- Sosialisasi dan koordinasi tentang pembangunan pasar lelang karet - Mencoba membuat pasar lelang karet di tingkat kelompok kecil - Asosiasi Pengusaha Karet, Gapkindo, sudah ada? Lebih memberdayakan peran dan fungsinya.	Petani/kelompok tani, dinas terkait (Bappeda, Perindagkop, Hutbun), pedagang, LSM, pabrikan.
6	Kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan pedagang	- Komunikasi yang baik antara keduanya - Temu usaha	Petani dan pedagang
7	Hubungan strategis antara petani, penyuluh dan peneliti	- Komunikasi dan koordinasi yang baik antara tiga pihak dalam bentuk temu teknis	BKPP, Semua pihak

Perbaikan Sistem Pelatihan

Ketiga angkatan peserta pelatihan menyatakan bahwa penyelenggaraan pelatihan budi daya karet hingga tata-niaga karet ini sangat mengesankan dan bermanfaat. Mereka ingin segera kembali ke Aceh untuk menerapkan pola tanam karet sistem agroforestri.



Gambar 3. Presentasi dari masing-masing kelompok tentang rencana tindak lanjut kelompok

Belajar dari ketiga angkatan, terbukti bahwa teknik belajar dari kawan sangat efektif untuk menyebarkan pengetahuan dan pengalaman bercocok tanam karet unggul sistem agroforestri. Dan untuk perbaikan sistem pelatihan ke depan, beberapa opsi diperkenalkan. Pertama, mengkombinasikan pemaparan materi, dilanjutkan dengan praktek lapangan dan terakhir peninjauan tata-niaga karet. Kedua, pemaparan materi disampaikan di lapangan dengan memakai kertas peraga, kemudian langsung dilanjutkan dengan praktek. Sistem ini akan membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama, karena pelatih harus mempersiapkan gambar-gambar peraga. Semua peserta menginginkan bimbingan dan fasilitasi dari ICRAF untuk keberhasilan kebun karet yang sudah mereka bangun.

Daftar Pustaka

- Akiefnawati R, Suyitno, Joshi L. 2007. Belajar bersama: Media peningkatan pengetahuan petani yang efektif. *Warta Perkaretan* Vol. 26 No.2 Pusat Penelitian Karet Lembaga Riset Perkebunan Indonesia. P.54
- Janudianto. 2010. Technical Report CFC Aceh Project.
- Budi, Wibawa G, Ilahang, Akiefnawati R, Joshi L, Penot E, Janudianto. 2008. Panduan Pembangunan Kebun Wanatani Berbasis Karet Klonal (*A manual for Rubber Agroforestry System-RAS*). Bogor. World Agroforestry Centre (ICRAF) SEA Regional Office, Indonesia. 54 p.

